

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2025-2029



Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025–2029 dapat disusun sebagai pedoman strategis percepatan penurunan kemiskinan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

RPKD ini disusun untuk memperkuat konsistensi arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah agar selaras dengan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025–2029 dan RPJPD 2025–2045, sekaligus sinergi dengan kebijakan nasional dan provinsi, termasuk komitmen terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dengan pendekatan berbasis data, dokumen ini diharapkan meningkatkan ketepatan sasaran intervensi, memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, serta mendorong integrasi program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kontribusi pemikiran, data, dan masukan seluruh pihak dalam penyusunan dokumen ini. RPKD ini diharapkan menjadi acuan operasional dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan Tahun 2025–2029, guna memperkuat komitmen bersama mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang Religius, Sejahtera, dan Bermartabat.

Semoga dokumen ini bermanfaat dan menjadi landasan yang kokoh bagi upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah periode 2025–2029.

Barabai,

Bupati Hulu Sungai Tengah

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

Samsul Rizal

Daftar Isi

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Gambar iv
Daftar Tabel viii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum 4
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Peran TKPKD dalam Penyusunan RPKD 4
1.5 Sistematika Penulisan 5
BAB II KONDISI UMUM DAERAH 7
2.1 Aspek Geografi 7
2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah 7
2.2 Aspek Demografis 9
2.2.1 Penduduk 9
2.2.2 Pendidikan 14
2.2.3 Kesehatan 20
2.2.4 Ketenagakerjaan 23
2.3 Aspek Ekonomi 24
2.3.1 Kesejahteraan Ekonomi 24
BAB III PROFIL KEMISKINAN 63
3.1 Konsep Kemiskinan 63
3.2 Profil Makro Kemiskinan Daerah 63
3.2.1 Posisi Relatif Kemiskinan Daerah 63
3.2.2 Perkembangan Antar Waktu Kemiskinan dan Analisis Relevansi Kemiskinan 70
3.2.3 Analisis Efektivitas Perkembangan Kemiskinan 76
3.3 Determinan Kemiskinan Daerah 82
3.3.1 Pendidikan 82
3.3.2 Kesehatan 115
3.3.3 Infrastruktur 125
3.3.4 Ketenagakerjaan 133
3.3.5 Perekonomian 141
3.3.6 Pertanian 152

BAB IV PROGRAM PRIORITAS 158
4.1 Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah 158
4.2 Tujuan dan Sasaran Penanggulangan Kemiskinan Daerah 167
4.3 Strategi dan Arah Kebijakan Penggulangan Kemiskinan 169
4.3.1 Strategi dan Kebijakan Nasional 169
4.3.2 Strategi dan Kebijakan Prov. Kalimantan Selatan 175
4.3.3 Strategi dan Kebijakan Kab. Hulu Sungai Tengah 177
4.4 Program Penggulangan Kemiskinan Daerah 178
4.5 Target Penurunan Angka Kemiskinan 188
4.6 Analisis Kondisi Fiskal Untuk Penanggulangan Kemiskinan 188
4.6.1 Kondisi Umum Fiskal 188
4.6.2 Analisis Kemandirian Fiskal 190
4.7 Analisis Faktor Pendorong Dan Penghambat Intervensi 195
BAB V LOKASI PRIORITAS 198
5.1 Prioritas Wilayah Bedasarkan Jumlah Penduduk 198
5.2 Prioritas Wilayah Bedasarkan Kondisi Penduduk 199
5.2.1 Rumah Tidak Layak Huni 199
5.2.2 Tidak Bekerja 200
5.2.3 Tidak Bersekolah 201
5.2.4 Tidak Memiliki Lahan 203
5.2.5 Tidak Memiliki Usaha 205
5.2.6 Belum Menerima Bantuan 206
5.2.7 Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan 208
BAB VI PENUTUP 211

Daftar Gambar

Gambar 2. 1 Peta Administratif Kabupaten Hulu Sungai Tengah 7
Gambar 2. 2 Peta Administratif Kabupaten Hulu Sungai Tengah 7
Gambar 2. 3 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024 14
Gambar 2. 4 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024 16
Gambar 2. 5 Pertumbuhan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2024 17
Gambar 2. 6 Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan bantuan sosial 17
Gambar 2. 7 Jumlah Penduduk yang masuk Kelompok Rentang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah 18
Gambar 2. 8 Angka Harapan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024 20
Gambar 2. 9 Prevalensi Stunting Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022-2024 22
Gambar 2. 10 Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK (Miliar Rupiah) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024 34
Gambar 2. 11 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan 34
Gambar 2. 12 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2024 43
Gambar 2. 13 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Daerah Sekitarnya Tahun 2023-2024 44
Gambar 2. 14 PDRB per Kapita Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2024 (Juta Rupiah) 47
Gambar 2. 15 Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024 50
Gambar 2. 16 Perbandingan Gini Ratio Tahun 2024 Kabupaten & Kota di Provinsi Kalimantan Selatan 51
Gambar 2. 17 Perbandingan Persentase Kemiskinan Kabupaten & Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2024 54
Gambar 2. 18 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024 56
Gambar 2. 19 Pengeluaran per Kapita Kabupaten Hulu Sungai Tengah Disesuaikan Tahun 2020-2024 60
Gambar 2. 20 Tingkat Inflasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024 61
Gambar 3. 1 Grafik Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 64
Gambar 3. 2 Grafik Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kabupaten /Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 67

Gambar 3. 3 Grafik Posisi Relatif Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten /Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 68
Gambar 3. 4 Grafik Posisi Relatif Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten /Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 69
Gambar 3. 5 Grafik Perkembangan Antar Waktu Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015 - 2024 71
Gambar 3. 6 Grafik Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2015 – 2024 73
Gambar 3. 7 Grafik Perkembangan Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2015 – 2024 74
Gambar 3. 8 Grafik Perkembangan Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2015 - 2024 76
Gambar 3. 9 Grafik Perkembangan Penduduk Miskin Antar Periode Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah 77
Gambar 3. 10 Grafik Perkembangan Kedalaman Kemiskinan Antar Periode Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah 79
Gambar 3. 11 Grafik Perkembangan Keparahan Kemiskinan Antar Periode Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah 80
Gambar 3. 12 Grafik Perkembangan Parameter Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015 – 2024 81
Gambar 3. 13 Tren Capaian Indikator APK, APM, dan APS Jenjang SD/MI Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2015-2024 84
Gambar 3. 14 Perkembangan Capaian Angka Putus Sekolah SD/MI Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 – 2024 92
Gambar 3. 15 Perkembangan Capaian Angka Putus Sekolah SMP/MTs Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 – 2024 102
Gambar 3. 16 Tren Capaian Indikator APK, APM, dan APS Jenjang SMA/SLTA Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2015-2024 104
Gambar 3. 17 Tren Angka Kematian Ibu Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024 117
Gambar 3. 18 Tren Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024 118
Gambar 3. 19 Tren Perkembangan Angka Kematian Balita (AKABA) di Kab. Hulu Sungai Tengah 120
Gambar 3. 20 Tren Capaian Persalinan di fasilitas Kesehatan di Kab. Hulu Sungai Tengah 121
Gambar 3. 21 Tren Perkembangan Prevalensi Stunting Pada Balita Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 - 2024 122
Gambar 3. 22 Tren Perbandingan Perbandingan Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (Persen) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 126
Gambar 3. 23 Perkembangan Capaian Persentase Rumah Layak Huni di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 – 2024 127

Gambar 3. 24 Perkembangan Capaian Persentase rumah tangga bersanitasi di Kab Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024 127
Gambar 3. 25 Perkembangan Capaian Daya Listrik Terpasang (MW) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014 - 2024 128
Gambar 3. 26 Panjang Jalan Menurut Jalan (km) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023 sd 2024 129
Gambar 3. 27 Grafik Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015 – 2024 134
Gambar 3. 28 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 135
Gambar 3. 29 Perbandingan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2015-2024 136
Gambar 3. 30 Perkembangan Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2015 – 2024 137
Gambar 3. 31 Perbandingan Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 138
Gambar 3. 32 Perbandingan Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2020 – 2024 139
Gambar 3. 33 Perkembangan Perkembangan Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2015-2024 142
Gambar 3. 34 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2024 143
Gambar 3. 35 Perbandingan Tren Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Hulu Sungai Tengah dan Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2015-2024 144
Gambar 3. 36 Perbandingan Laju Pertumbuhan berdasarkan Sektor PDRB di Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 146
Gambar 3. 37 Pergeseran Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkanSektor PDRB di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023-2024 148
Gambar 3. 38 Kontribusi Sektor PDRB Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 .. 149
Gambar 3. 39 Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Rasio Produksi Padi di Kab Hulu Sungai Tengah Tahun 2018 sd 2024 153
Gambar 3. 40 Perbandingan Selisih Luas Panen dan Produksi Padi Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 154
Gambar 4. 4 Kerangka Pikir Penurunan Kemiskinan RPJPN Periode RPJMN 2025-2029 170
Gambar 4. 5 Strategi Empat Pilar Utama Penurunan Kemiskinan Nasional 172
Gambar 4. 6 Prasyarat Penurunan Kemiskinan Nasional 173
Gambar 5. 1 Pengelompokan Wilayah berdasarkan Kepala Keluarga Desil 1 - 5 dengan kondisi Rumah Tidak Layak Huni / RTLH 200
Gambar 5. 2 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Individu Desil 1 - 5 dengan Status Tidak Bekerja 201

Gambar 5. 3 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Individu Desil 1 - 5 dengan Status Tidak Bersekolah 203
Gambar 5. 4 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Kepala keluarga Desil 1 – 5 dengan Status Tidak Memiliki Lahan (selain yang ditempati) 204
Gambar 5. 5 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Kepala keluarga Desil 1 – 5 dengan Status Tidak Memiliki Usaha Sendiri/ Bersama 206
Gambar 5. 6 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Kepala keluarga Desil 1 – 5 dengan Status Belum Menerima Bantuan 207
Gambar 5. 7 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Individu Desil 1 – 5 dengan Status Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan 209

Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Angka Kematian Ibu dan Kematian Bayi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2024 21
Tabel 2. 2 PDRB ADHB Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah) 25
Tabel 2. 3 PDRB ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024(Milyar Rupiah) 30
Tabel 2. 4 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 s.d 2024 36
Tabel 2. 5 Pergeseran Persentase Kontribusi Sektor PDRB ADHB antara Tahun 2020 dan 2024 39
Tabel 2. 6 Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024 (%) 41
Tabel 2. 7 Perkembangan PDRB ADHB Per Kapita Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 – 2024 45
Tabel 2. 8 Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan Per Kapita di Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 sd 2024 49
Tabel 2. 9 Kondisi Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024 53
Tabel 2. 10 Perkembangan IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024 58
Tabel 2. 11 Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2024 .. 59
Tabel 2. 12 Laju pertumbuhan Sektoral Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kab. Hulu Sungai Tengah 2023-2024 145
Tabel 3. 1 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin (%) 64
Tabel 3. 2 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Tahun 2024 dengan RPJMD Tahun 2025 – 2029 65
Tabel 3. 3 Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 66
Tabel 3. 4 Posisi Relatif Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Selatan 67
Tabel 3. 5 Posisi Relatif Tingkat Kedalaman Keparahan (P2) Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 69
Tabel 3. 6 Perkembangan Antar Waktu Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten, Provinsi, Nasional Tahun 2015 - 2024 70
Tabel 3. 7 Perbandingan Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2015 - 2024 72
Tabel 3. 8 Perbandingan Perkembangan Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2015 - 2024 73
Tabel 3. 9 Perbandingan Perkembangan Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2015 - 2024 75

Tabel 3. 10 Perbandingan Jumlah dan Persentase Kemiskinan Antar Periode Pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah 77
Tabel 3. 11 Perbandingan Kedalaman Kemiskinan Antar Periode Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah 78
Tabel 3. 12 Perbandingan Keparahan Kemiskinan Antar Periode Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah 79
Tabel 3. 13 Keterkaitan Parameter Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah . 80
Tabel 3. 14 Capaian Jenjang SD/MI Kab. Hulu Sungai Tengah berdasarkan Indikator APK, APM dan APS Tahun 2015-2024 83
Tabel 3. 15 Capaian Jenjang SMP/MTs Kab. Hulu Sungai Tengah berdasarkan Indikator APK, APM dan APS Tahun 2015-2024 92
Tabel 3. 16 Capaian Jenjang SMA/SLTA Kab. Hulu Sungai Tengah berdasarkan Indikator APK, APM dan APS Tahun 2015-2024 102
Tabel 3. 17 Analisis Aspek Kemiskinan Berdasarkan Bidang Pendidikan di Kab. Hulu Sungai Tengah 112
Tabel 3. 18 Analisis Aspek Kemiskinan Berdasarkan Bidang Kesehatan di Kab. Hulu Sungai Tengah 123
Tabel 3. 19 Analisis Aspek Kemiskinan Berdasarkan Bidang Infrastruktur di Kab. Hulu Sungai Tengah 131
Tabel 3. 20 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2015-2024 133
Tabel 3. 21 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015 – 2024 136
Tabel 3. 22 Analisis Aspek Kemiskinan Berdasarkan Bidang Ketenagakerjaan di Kab. Hulu Sungai Tengah 140
Tabel 3. 23 Perkembangan Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2015-2024 141
Tabel 3. 24 Analisis Aspek Kemiskinan Berdasarkan Bidang Perekonomian di Kab. Hulu Sungai Tengah 151
Tabel 3. 25 Analisis Aspek Kemiskinan Berdasarkan Bidang Pertanian di Kab. Hulu Sungai Tengah 156

Tabel 4. 1 Sinkronisasi Kata Kunci Visi dan Penjabaran Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029 163
Tabel 4. 2 Persandingan Misi RPJMD Prov Kalimantan Selatan dan RPJMD Kab Hulu Sungai Tengah 168
Tabel 4. 3 Target Tujuan dan Sasaran Rencana Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 - 2029 169
Tabel 4. 4 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 - 2029 178
Tabel 4. 5 Strategi dan Kelompok Program Rencana Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 - 2029 179

Tabel 4. 6 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim 182
Tabel 4. 7 Target Penurunan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029 188
Tabel 4. 8 Realisasi Pendapatan dan Belanja Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 sd 2024 189
Tabel 4. 9 Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Nilai Rupiah dan Persentase Pertumbuhan tahunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024 ... 192
Tabel 4. 10 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah 195

Tabel 5. 1 Jumlah Kepala Keluarga Desil 1- 5 menurut Kecamatan 198
Tabel 5. 2 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni menurut Kepala Keluarga Desil 1 s/d Desil 5 199
Tabel 5. 3 Jumlah Individu Tidak Bekerja Desil 1 s/d Desil 5 200
Tabel 5. 4 Jumlah Individu Tidak Bersekolah Desil 1 s/d Desil 5 202
Tabel 5. 5 Jumlah Keluarga yang tidak memiliki lahan selain yang ditempati Desil 1 s/d Desil 5 203
Tabel 5. 6 Jumlah Keluarga Desil 1 – 5 yang Tidak Memiliki Usaha Sendiri/Bersama 205
Tabel 5. 7 Jumlah Keluarga Desil 1 - 5 yang Belum Menerima Bantuan 206
Tabel 5. 8 Jumlah Individu Desil 1 – 5 yang Tidak Menerima Jaminan Kesehatan 208

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusi dan bagian dari upaya mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat tersebut dijabarkan dalam Pasal 27, 28, 33, dan 34 UUD 1945 yang menegaskan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak dasar setiap warga negara, termasuk kelompok masyarakat miskin.

Dalam kerangka pembangunan jangka panjang, penanggulangan kemiskinan menjadi bagian strategis dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, yang menempatkan peningkatan kesejahteraan rakyat dan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai fondasi menuju *Indonesia Emas 2045*. Pada tingkat menengah, RPJMN 2025–2029 menegaskan pentingnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, dengan fokus pada pengurangan kemiskinan, penurunan ketimpangan antarwilayah, serta peningkatan produktivitas masyarakat berpenghasilan rendah. Komitmen nasional tersebut sejalan dengan agenda global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya tujuan pertama yaitu *mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dan di manapun*.

Dalam konteks otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan strategis untuk merancang dan melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama pembangunan

daerah yang dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah diarahkan untuk:

1) Meningkatkan efektivitas program pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif;
2) Memperkuat koordinasi lintas sektor dan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah;
3) Memperluas akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, dan peluang ekonomi produktif;
4) Mengintegrasikan kebijakan pengentasan kemiskinan dengan strategi pembangunan manusia, pengurangan ketimpangan, dan peningkatan daya saing daerah.

Secara empiris, kondisi kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan tantangan yang cukup signifikan dibandingkan daerah lain di Kalimantan Selatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, persentase penduduk miskin Kabupaten Hulu Sungai Tengah mencapai 5,81 persen atau sekitar 16.027 jiwa. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4,11 persen, dan menempatkan HST di antara kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di provinsi ini.

Selain itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Tahun 2024 Kabupaten Hulu Sungai Tengah tercatat sebesar 0,75, yang menunjukkan tingkat rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan masih cukup besar. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2024 sebesar 0,14 juga mencerminkan adanya ketimpangan di antara kelompok penduduk miskin itu sendiri. Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Selatan.

Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersifat multidimensi tidak hanya terkait dengan keterbatasan pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan infrastruktur dasar. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, melibatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, serta

optimalisasi perlindungan sosial. Dengan latar belakang tersebut, penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman strategis dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah. Dokumen ini diharapkan mampu menjadi acuan koordinasi antar perangkat daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menurunkan tingkat kemiskinan, sekaligus menjamin keterpaduan antara kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Selain itu, RPKD juga berperan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian target penurunan kemiskinan yang selaras dengan arah RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025–2029, serta menjadi dasar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata, inklusif, dan berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan RPKD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025–2029 berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta kebijakan penanggulangan kemiskinan. Landasan hukum tersebut sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6) Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
7) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;

8) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
9) Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);
11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1277);
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1475);
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1041);
14) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 546);
15) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan

Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403);

16) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025–2045;
17) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025–2029;
18) Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 37 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;dan
19) Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 050.13/157/050.13/Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan teknokratis yang menjadi pedoman dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan strategis bagi perangkat daerah, instansi vertikal, dan seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah berlangsung secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Adapun tujuan penyusunan RPKD adalah untuk:

1) Menyediakan arah kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025–2029;

2) Menjamin sinergi antara kebijakan daerah dengan kebijakan provinsi, nasional, dan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*;
3) Mendorong efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan lintas sektor dan lintas pelaku;
4) Menjadi instrumen pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah; dan
5) Menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran daerah yang berpihak pada masyarakat miskin dan rentan.

1.4 Peran TKPKD dalam Penyusunan RPKD

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam melaksanakan tugasnya merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, serta Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 050.13/157/050.13/2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Berdasarkan Pasal 5, TKPKD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), memiliki tugas untuk melaksanakan koordinasi dalam perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan pelaksanaan program kemiskinan kabupaten/kota masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, TKPKD Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyelenggarakan fungsi:penulisan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1) penyusunan RPKD dan Rencana Aksi Kabupaten;
2) koordinasi penyusunan rancangan RKPD kabupaten di bidang Penanggulangan Kemiskinan;

3) koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
4) fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
5) penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
6) pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugasnya, TKPKD dibantu oleh Sekretariat TKPKD yang berkedudukan di Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan tugas:

1) memberikan dukungan administrasi teknis;
2) menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
3) menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
4) memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPKD.

Selain Sekretariat, TKPKD juga dibantu oleh Kelompok Pengelola Program yang terdiri atas kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu; dan kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang masing-masing melaksanakan sebagian tugas TKPKD dalam koordinasi penanggulangan kemiskinan sesuai bidangnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Uraian singkat tentang mengapa RPKD penting bagi daerah, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum penyusunan, serta sistematika penulisan.

BAB II KONDISI UMUM DAERAH

Uraian yang menjelaskan data-data terkait dengan kondisi secara umum daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah baik dari aspek topografi, demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum terkait kemiskinan, dan aspek daya saing daerah.

BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH

Uraian yang menjelaskan data-data terkait dengan kondisi kemiskinan di daerah dan hasil analisis kondisi kemiskinan yang bertujuan untuk merumuskan prioritas bidang dan prioritas wilayah. Perumusan prioritas dilakukan dengan analisis tren, analisis relevansi dan efektivitas, serta analisis keterkaitan data makro kemiskinan. Profil kemiskinan juga secara umum dilihat dari aspek bidang yang memiliki keterkaitan dengan tidak meratanya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Selain itu, determinan kemiskinan juga terkait dengan tidak terpenuhinya akses terhadap infrastruktur dasar dan ketahanan pangan. Profil kemiskinan juga dilihat secara mikro sebagai basis data dalam rangka operasional penanggulangan kemiskinan berdasarkan determinan wilayah, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketenagakerjaan, ekonomi, dan lain-lain.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM

Uraian tentang isu strategis, strategi dan kebijakan yang akan digunakan dalam menanggulangi kemiskinan, identifikasi program prioritas penanggulangan kemiskinan, rencana aksi tahunan, kelembagaan, pemantauan, dan evaluasi.

BAB V LOKASI PRIORITAS

Berisi penentuan lokasi prioritas program penanggulangan kemiskinan berdasarkan hasil analisis spasial dan kondisi sosial ekonomi daerah.

BAB VI PENUTUP

Berisi kesimpulan umum dan arahan pelaksanaan RPKD, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

BAB II
KONDISI UMUM DAERAH

2.1 Aspek Geografi

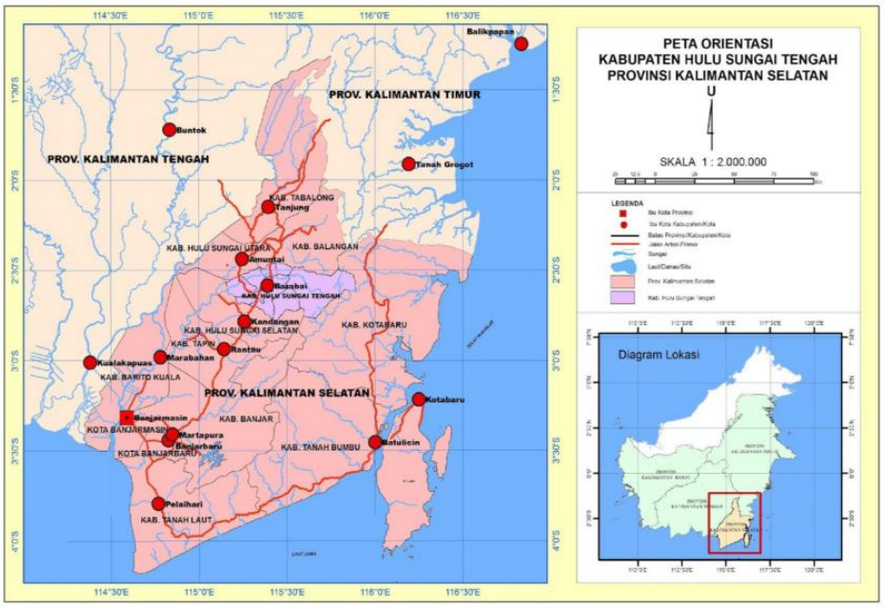
2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Posisi Kabupaten Hulu Sungai Tengah terletak di antara 2°27'0.9"-2°46'55" lintang selatan dan 115°9'17"-115°53'33" bujur timur. Luas wilayahnya kurang lebih seluas 1.770,77 km^2. Batas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah sebagai berikut:

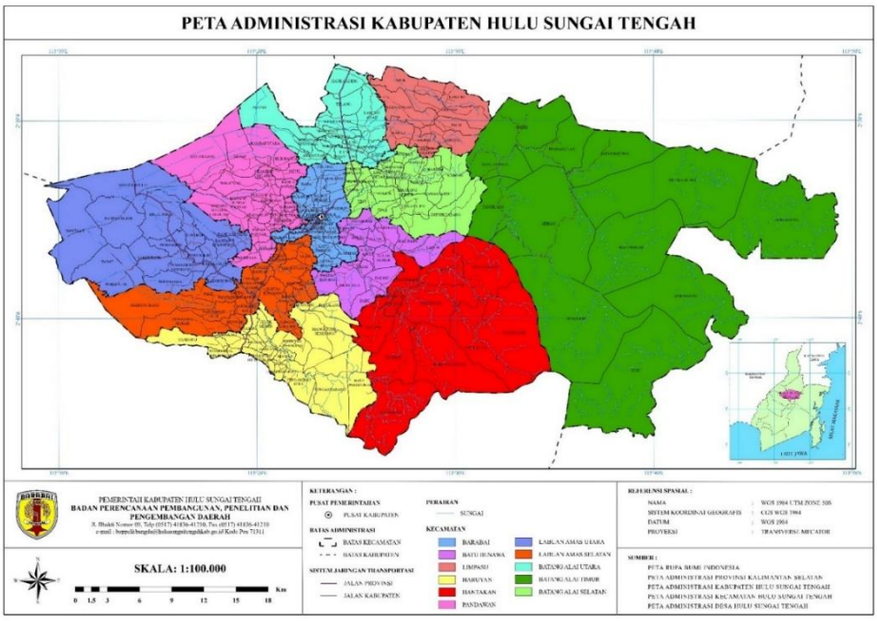
Sebelah Utara	:	Kab. Balangan
Sebelah Timur	:	Kab. Kotabaru
Sebelah Selatan	:	Kab. Hulu Sungai Selatan
Sebelah Barat	:	Kab. Hulu Sungai Utara

Posisi Kabupaten Hulu Sungai Tengah persis berada diperlintasan Provinsi Kalimantan Selatan menuju ke Provinsi Kalimantan Tengah maupun ke Provinsi Kalimantan Timur, serta perlintasan antar kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan seperti dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 1 Peta Administratif Kabupaten Hulu Sungai Tengah



Gambar 2. 2 Peta Administratif Kabupaten Hulu Sungai Tengah



Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Tengah, 2025

Dengan posisi geografis kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan maka posisi ini sangat strategis menjadi penghubung utama antar wilayah dan menjadi jalur distribusi barang dan jasa yang penting. Sebagai daerah pertanian, maka posisi geografis dan berada diperlintasan jalur distribusi tersebut juga mempunyai peran strategis sebagai daerah produksi yang berperan menjadi pemasok kebutuhan daerah sekitarnya baik pada kabupaten tetangga baik dalam provinsi Kalimantan Selatan maupun Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Posisi ini juga punya peran strategis menjadi jalur perdagangan dan pergerakan jasa. Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah menjadi pusat distribusi dengan tumbuhnya kawasan pergudangan sebagai sub distribusi perdagangan yang melayani kabupaten sekitar. Posisi ini juga berperan dalam mendukung logistik maupun pertahanan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Secara ekonomi, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan luas 1.770,77 km2 berkontribusi menyumbang PDRB sebesar 3,29% dari Rp. 286.818,87 milyar nilai PDRB provinsi Kalimantan Selatan Sebagai daerah pertanian, maka peran dalam ketahanan pangan adalah sebagai salah satu lumbung pangan di provinsi Kalimantan Selatan dengan kontribusi 11,41 % dari

produksi padi provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 1.029.567,93 ton pada tahun 2024, nomor 3 penyumbang terbesar setelah Kabupaten Barito Kuala dan Banjar. Begitu pula disektor peternakan khususnya ternak unggas, maka populasi unggas di kabupaten Hulu Sungai Tengah menyumbang 15,42% dari populasi se provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 yaitu 2.531.462 ekor, tertinggi kontribusinya. Produksi telur khususnya ternak itik mencapai 1.975.108 butir, tertinggi nomor 2 setelah kabupaten Hulu Sungai Utara di provinsi Kalimantan Selatan.

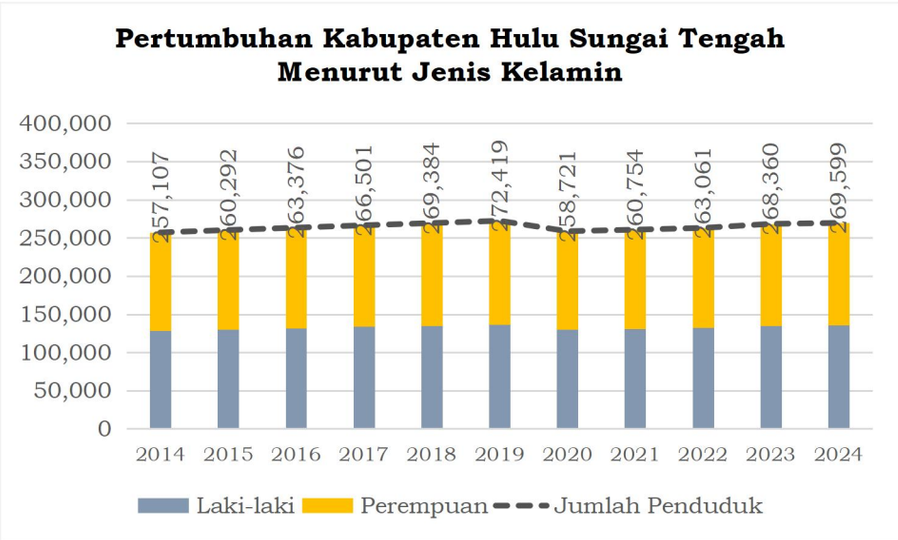
2.2 Aspek Demografis

2.2.1 Penduduk

Jumlah penduduk merupakan salah satu indikator dasar yang penting dalam perencanaan pembangunan daerah, karena berpengaruh terhadap kebutuhan pelayanan dasar, infrastruktur, dan alokasi sumber daya. Gambar berikut menyajikan perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah menurut jenis kelamin selama periode tahun 2014 hingga 2024.

Gambar 2. 3 di bawah memperlihatkan tren pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Gambar 2. 3 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014 – 2024



Sumber: kompilasi data Hulu Sungai Tengah Dalam Angka s.d 2025, Hasil Olahan 2025.

Jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama satu dekade terakhir menunjukkan tren pertumbuhan yang cenderung positif, meskipun tidak sepenuhnya linier dan mengalami dinamika tertentu, khususnya pada tahun 2020. Tren ini mencerminkan perkembangan sosial-ekonomi dan arah pembangunan wilayah yang berlangsung secara berkelanjutan. Pada tahun 2014, jumlah penduduk tercatat sebanyak 257.107 jiwa, terdiri dari 128.464 jiwa laki-laki dan 128.643 jiwa perempuan. Jumlah ini mengalami peningkatan konsisten hingga mencapai 272.419 jiwa pada tahun 2019, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 3.062 jiwa per tahun atau sekitar 1,2 persen per tahun.

Namun demikian, pada tahun 2020 terjadi penyesuaian jumlah penduduk sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil sensus mencatat jumlah penduduk sebesar 258.721 jiwa, lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya. Penurunan ini bukan disebabkan oleh faktor alami seperti migrasi atau penurunan angka kelahiran, melainkan akibat dari peningkatan akurasi metodologi pencacahan dan pembaruan basis data kependudukan nasional. Oleh karena itu, SP2020 ditetapkan sebagai baseline baru dalam penghitungan dan proyeksi penduduk di tahun-tahun berikutnya.

Setelah tahun 2020, jumlah penduduk kembali menunjukkan tren pertumbuhan yang moderat. Pada tahun 2021 jumlah penduduk meningkat menjadi 260.754 jiwa, bertambah menjadi 263.061 jiwa pada tahun 2022, 268.360 jiwa pada tahun 2023, dan mencapai 269.599 jiwa pada tahun 2024. Jika dibandingkan antara tahun 2014 dan 2024, maka terdapat penambahan penduduk sebanyak 12.492 jiwa, atau meningkat sebesar 4,9 persen dalam kurun waktu sepuluh tahun. Namun demikian, laju pertumbuhan penduduk setelah tahun 2020 tercatat relatif melambat dibandingkan dengan periode sebelumnya, mencerminkan adanya transisi demografi

yang perlu diantisipasi secara tepat dalam kebijakan pembangunan kependudukan daerah.

Tabel berikut menyajikan jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah menurut jenis kelamin tahun 2024:

Tabel 2. 1 Jumlah penduduk dan *Sex Ratio* menurut kecamatan

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Sex Ratio
1	Haruyan	11.370	11.114	22.484	102,3
2	Batu Benawa	10.401	10.306	20.707	100,92
3	Hantakan	6.762	6.336	13.098	106,72
4	Batang Alai Selatan	12.278	12.280	24.558	99,98
5	Batang Alai Timur	3.797	3.595	7.392	105,62
6	Barabai	27.880	28.076	55.956	99,3
7	Labuan Amas Selatan	15.186	15.084	30.270	100,68
8	Labuan Amas Utara	14.417	14.317	28.734	100,7
9	Pandawan	18.207	17.714	35.921	102,78
10	Batang Alai Utara	9.655	9.453	19.108	102,14
11	Limpasu	5.814	5.557	11.371	104,62
Jumlah		**135.767**	**133.832**	**269.599**	**101,45**

Sumber: kompilasi data Hulu Sungai Tengah Dalam Angka s.d 2025

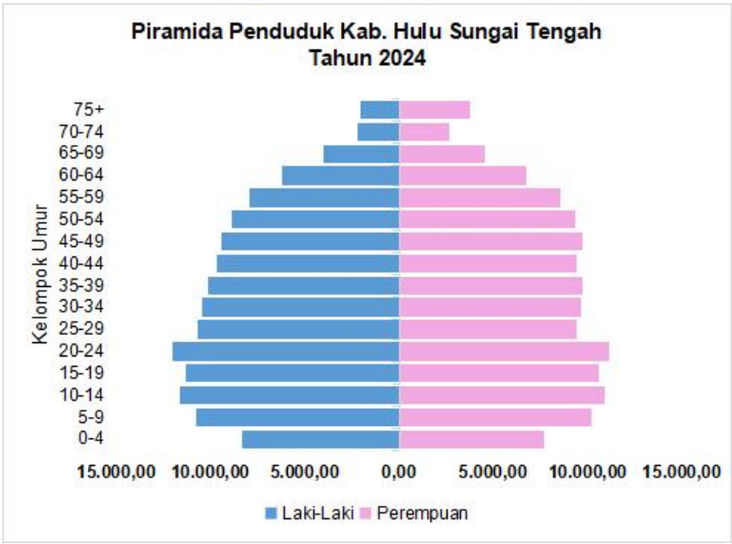
Distribusi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2024 menunjukkan pola persebaran yang bervariasi di antara sebelas kecamatan yang ada. Total jumlah penduduk tercatat sebesar 269.599 jiwa, terdiri dari 135.767 jiwa laki-laki dan 133.832 jiwa perempuan, dengan *sex ratio* sebesar 101,45, yang mengindikasikan bahwa secara umum jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan.

Kecamatan Barabai menjadi wilayah dengan konsentrasi penduduk tertinggi, yaitu sebanyak 55.956 jiwa atau sekitar 20,8 persen dari total penduduk kabupaten. Tingginya angka ini mencerminkan posisi Barabai sebagai pusat administrasi dan perekonomian daerah, yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah dan simpul pelayanan publik utama di tingkat kabupaten. Selanjutnya, Kecamatan Pandawan dan Labuan Amas Selatan menempati urutan berikutnya dengan jumlah penduduk masing-masing sebesar 35.921 jiwa dan 30.270 jiwa, yang menunjukkan peran kedua kecamatan tersebut sebagai kawasan penyangga perkotaan serta lokasi permukiman yang tumbuh pesat.

Di sisi lain, Kecamatan Batang Alai Timur merupakan wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit, yakni 7.392 jiwa, diikuti oleh Kecamatan Limpasu dengan 11.371 jiwa. Kondisi ini dapat diasosiasikan dengan keterbatasan aksesibilitas, kondisi geografis yang relatif terpencil, serta tingkat pelayanan infrastruktur dasar yang masih perlu ditingkatkan. Meski demikian, wilayah-wilayah ini tetap memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekologi dan potensi sumber daya alam yang dapat dioptimalkan secara berkelanjutan.

Dari sisi komposisi gender, Kecamatan Hantakan menunjukkan *sex ratio* tertinggi, yaitu sebesar 106,72, mengindikasikan dominasi penduduk laki-laki yang cukup signifikan. Hal ini dapat dikaitkan dengan struktur pekerjaan atau sektor ekonomi lokal yang lebih banyak melibatkan tenaga kerja laki-laki, seperti sektor kehutanan, pertambangan rakyat, atau pertanian lahan kering. Sebaliknya, Kecamatan Barabai memiliki *sex ratio* terendah yaitu 99,3, yang berarti jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki. Hal ini cukup lazim di kawasan perkotaan, di mana peran sosial perempuan dalam sektor jasa, pendidikan, dan pelayanan cenderung lebih besar.

Gambar 2. 4 Piramida Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024



Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Angka 2025, Publikasi BPS 2025, Hasil Olahan 2025

Distribusi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2024 berdasarkan kelompok umur menunjukkan bahwa struktur penduduk didominasi oleh kelompok usia muda dan usia produktif. Kelompok umur dengan jumlah penduduk terbanyak berada pada rentang usia 20–24 tahun, yaitu sebanyak 23.120 jiwa, terdiri dari 12.030 laki-laki dan 11.090 perempuan. Kelompok usia lainnya yang juga memiliki jumlah cukup besar adalah usia 10–14 tahun (22.495 jiwa), 15–19 tahun (21.955 jiwa), dan 5–9 tahun (20.967 jiwa).

Jumlah penduduk secara umum cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Hal ini terlihat pada kelompok umur lanjut usia (65 tahun ke atas), yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Misalnya, kelompok umur 70–74 tahun berjumlah 4.893 jiwa, dan kelompok 75 tahun ke atas berjumlah 5.786 jiwa.

Dari segi jenis kelamin, penduduk laki-laki mendominasi pada sebagian besar kelompok umur, terutama pada usia produktif dan anak-anak. Ketimpangan jumlah antara laki-laki dan perempuan paling mencolok terlihat pada kelompok umur 20–24 tahun, dengan selisih 940 jiwa lebih banyak laki-laki.

Sejalan dengan dinamika kependudukan yang telah dijelaskan sebelumnya, proyeksi penduduk menjadi instrumen penting untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah. Proyeksi ini membantu pemerintah daerah dalam

memperkirakan kebutuhan pelayanan dasar, alokasi sumber daya, serta pengendalian pertumbuhan penduduk di masa mendatang.

Tabel 2. 2 Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun 2025-2030 di Kalimantan Selatan dan Hulu Sungai Tengah (Ribu Jiwa)

KABUPATEN/KOTA DAN PROVINSI	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kalimantan Selatan	4.323.33	4.372.11	4.419.74	4.466.21	4.511.56	4.555,83
Hulu Sungai Tengah	271.23	273.67	276.03	278.31	280.53	282.67

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan

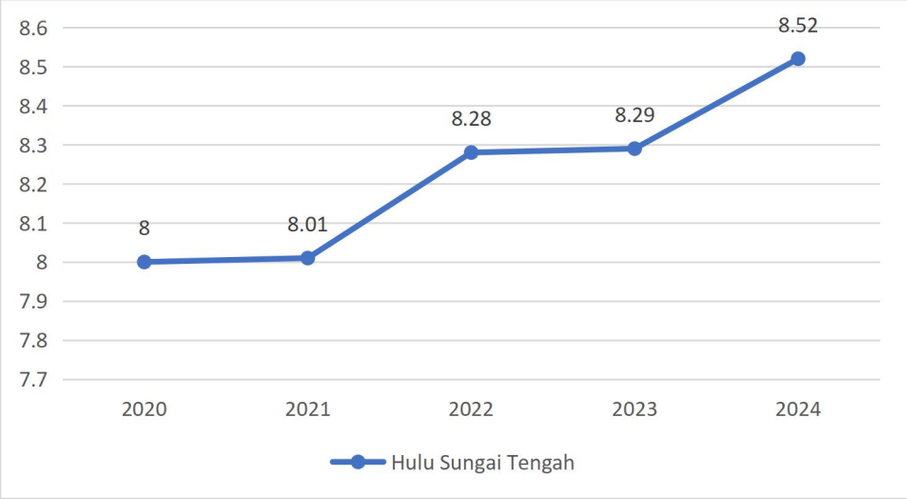
Tabel proyeksi penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah diperkirakan terus meningkat dari 271,23 ribu jiwa pada 2025 menjadi 282,67 ribu jiwa pada 2030. Kenaikan rata-rata sekitar 2.200 jiwa per tahun ini mencerminkan laju pertumbuhan yang relatif moderat. Pola ini konsisten dengan tren transisi demografi yang ditandai oleh melambatnya pertumbuhan penduduk, meskipun secara absolut jumlah penduduk tetap bertambah. Jika dibandingkan dengan tingkat provinsi Kalimantan Selatan, proyeksi penduduk Hulu Sungai Tengah hanya menyumbang sekitar 6,3 persen dari total penduduk provinsi, menegaskan peran Hulu Sungai Tengah sebagai daerah dengan populasi menengah.

2.2.2 Pendidikan

2.2.2.1 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada periode 2020–2024 menunjukkan peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, RLS tercatat sebesar 8,00 tahun, kemudian naik tipis menjadi 8,01 tahun pada 2021, meningkat lagi menjadi 8,28 tahun pada 2022, 8,29 tahun pada 2023, dan mencapai 8,52 tahun pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan akses dan partisipasi pendidikan, di mana penduduk usia 15 tahun ke atas semakin lama menempuh pendidikan formal.

Gambar 2. 5 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024



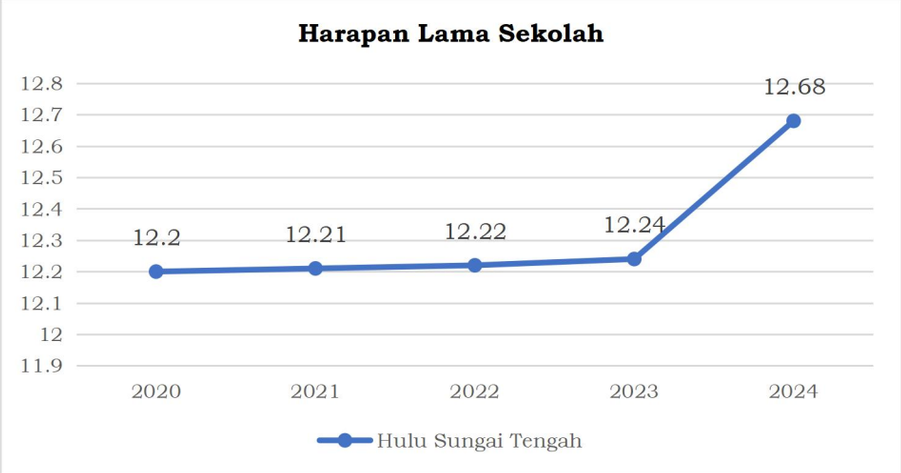
Sumber : Diolah dari Publikasi Badan Pusat Statistik, 2025

Meskipun ada peningkatan, capaian ini menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat masih berada pada level pendidikan setara kelas VIII SMP. Artinya, sebagian penduduk belum menamatkan pendidikan menengah atas. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mendorong keberlanjutan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi melalui kebijakan seperti beasiswa, penyediaan sarana prasarana pendidikan yang merata, serta program pengentasan putus sekolah. Jika tren positif ini dapat dipertahankan dan dipercepat, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berpeluang meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih kompetitif di masa depan.

2.2.2.2 Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang stabil. Pada tahun 2020, HLS berada di angka 12,20 tahun, kemudian naik tipis menjadi 12,21 tahun pada 2021, 12,22 tahun pada 2022, dan 12,24 tahun pada 2023. Kenaikan lebih signifikan terjadi pada 2024, yakni mencapai 12,68 tahun. HLS menggambarkan lamanya pendidikan formal yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak-anak yang memasuki usia sekolah pada tahun tertentu, dengan asumsi pola partisipasi pendidikan saat ini terus berlangsung sepanjang hidup mereka.

Gambar 2. 6 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024



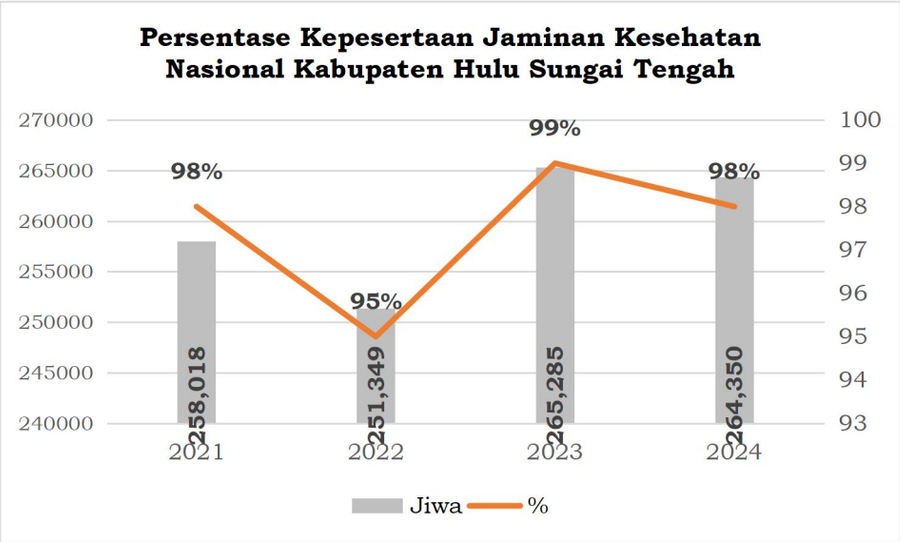
Sumber : Diolah dari Publikasi Badan Pusat Statistik, 2025

Peningkatan capaian ini menunjukkan adanya kemajuan dalam akses dan kesempatan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Nilai yang mendekati 13 tahun ini mengindikasikan bahwa secara rata-rata, anak-anak berpotensi menempuh pendidikan hingga tingkat sekolah menengah atas bahkan sebagian dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Meskipun demikian, peningkatan yang relatif lambat pada awal periode 2020–2023 menunjukkan perlunya intervensi yang lebih kuat untuk memperluas pemerataan pendidikan, mengurangi angka putus sekolah, dan meningkatkan kualitas pendidikan.Perlindungan Sosial yang Adaptif

2.2.2.3 Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan Nasional merupakan instrumen utama dalam sistem jaminan sosial nasional yang menjamin perlindungan kesehatan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Analisis pada bagian ini menggambarkan kecenderungan capaian kepesertaan selama periode 2021–2024, yang menjadi salah satu indikator penting dalam menilai sejauh mana penduduk telah terlindungi dalam sistem jaminan kesehatan daerah. Narasi berikut menyajikan perkembangan tren kepesertaan dan proporsinya terhadap total penduduk, yang mencerminkan tingkat keterjangkauan dan kesinambungan layanan kesehatan di wilayah ini.

Gambar 2. 7 Pertumbuhan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2024



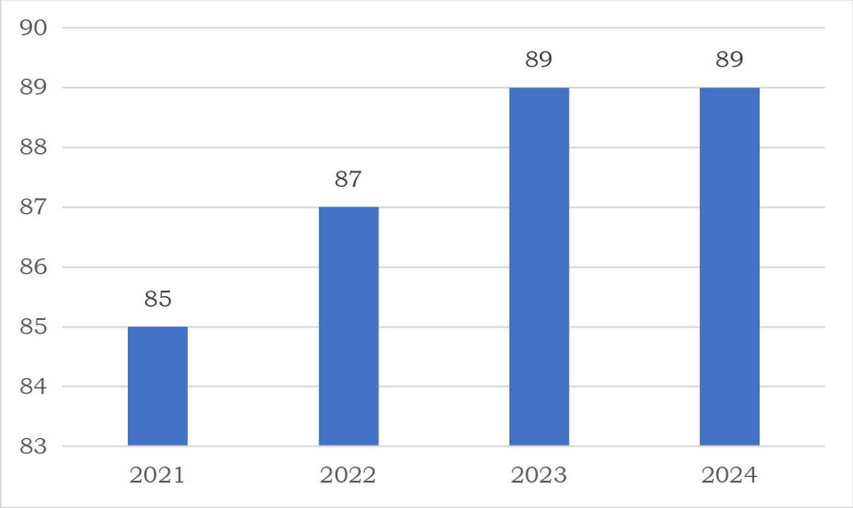
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Tengah, 2025

Pada tahun 2021, jumlah peserta tercatat 258.018 jiwa (98%), kemudian menurun pada 2022 menjadi 251.349 jiwa (95%). Setelah itu, capaian meningkat tajam di tahun 2023 hingga 265.285 jiwa (99%), sebelum sedikit turun kembali di tahun 2024 menjadi 264.350 jiwa (98%).

2.2.2.4 Bantuan Sosial

Bantuan Sosial sebagai intervensi pemerintah dalam memberikan perlindungan dan jaminan bagi masyarakat rentan yang masuk kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Bantuan sosial berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk mengurangi kerentanan sosial, menekan angka kemiskinan, serta meningkatkan taraf hidup kelompok masyarakat yang membutuhkan, baik karena faktor ekonomi, disabilitas, usia lanjut, maupun kondisi kedaruratan sosial lainnya. Melalui bantuan sosial, diharapkan tercipta jaring pengaman sosial yang mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendorong tercapainya keadilan sosial.

Gambar 2. 8 Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan bantuan sosial



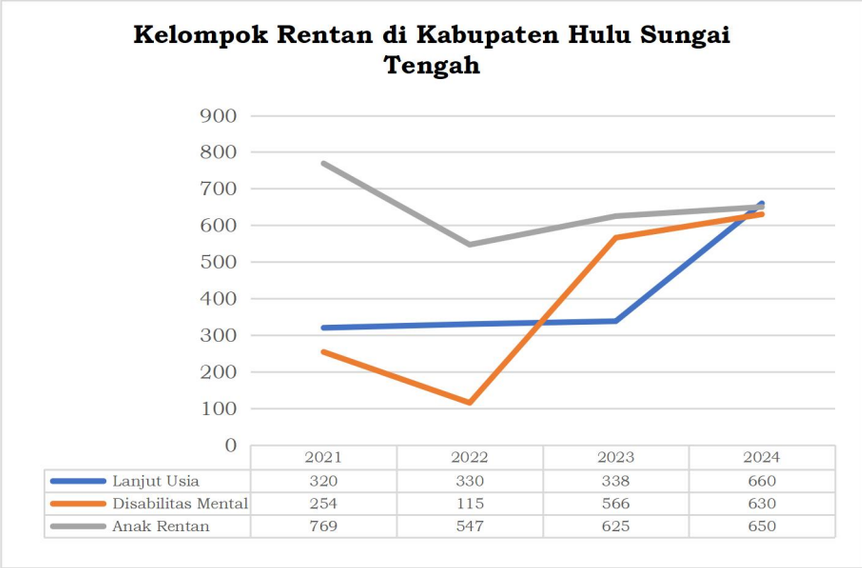
Sumber : Dinas Sosial, 2025

Capaian persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan tren yang cukup positif. Pada tahun 2021 persentase penerima berada di angka 85 persen, kemudian meningkat menjadi 87 persen pada tahun 2022. Tren kenaikan ini berlanjut hingga tahun 2023, di mana capaian mencapai 89 persen dan stabil pada tingkat yang sama di tahun 2024.

2.2.2.5 Perlindungan Sosial

Perlindungan Sosial menjadi perhatian pemerintah terhadap kelompok masyarakat rentan, yang meliputi penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak-anak rentan. Perlindungan sosial ini merupakan upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar sekaligus melindungi mereka dari risiko sosial, ekonomi, maupun kesehatan.

Gambar 2. 9 Jumlah Penduduk yang masuk Kelompok Rentang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah



Sumber : Dinas Sosial, 2025

Berdasarkan data, jumlah penyandang disabilitas mental menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2021 jumlahnya tercatat 254 jiwa, kemudian menurun tajam menjadi 115 jiwa pada 2022. Namun, pada 2023 terjadi lonjakan cukup tinggi hingga 566 jiwa dan meningkat lagi pada 2024 mencapai 630 jiwa. Lonjakan ini dapat diartikan sebagai hasil dari semakin baiknya pendataan serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kondisi disabilitas.

kelompok lanjut usia (lansia) jumlahnya cenderung stabil pada awal periode, yaitu 320 jiwa pada 2021, meningkat sedikit menjadi 330 jiwa di 2022, dan 338 jiwa di 2023. Namun pada 2024, angka ini melonjak drastis hingga 660 jiwa. Peningkatan signifikan tersebut dapat menggambarkan adanya perbaikan dalam pencatatan data lansia serta kemungkinan bertambahnya angka harapan hidup masyarakat.

Jumlah anak rentan mengalami fluktuasi dengan tren yang relatif stabil. Pada 2021 tercatat sebanyak 769 jiwa, menurun cukup tajam menjadi 547 jiwa di tahun 2022, lalu kembali meningkat menjadi 625 jiwa pada 2023, dan sedikit bertambah menjadi 650 jiwa di tahun 2024.

2.2.3 Kesehatan

2.2.3.1 Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan konsistensi peningkatan selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, AHH tercatat sebesar 71,46 tahun, kemudian naik menjadi 71,66 tahun pada 2021, 72,00 tahun pada 2022, 72,33 tahun pada 2023, dan mencapai 72,60 tahun pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kualitas kesehatan masyarakat, akses terhadap layanan kesehatan, gizi, sanitasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat.

Gambar 2. 10 Angka Harapan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024



Sumber : Diolah dari Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, 2025

Peningkatan yang relatif stabil dari tahun ke tahun menunjukkan keberhasilan berbagai program pembangunan kesehatan, baik melalui penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, pemerataan tenaga kesehatan, maupun program preventif seperti imunisasi, posyandu, dan pemeriksaan kesehatan rutin. Meskipun capaian ini positif, tantangan tetap ada, seperti menjaga kualitas lingkungan, mengatasi penyakit tidak menular, serta memastikan layanan kesehatan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah terpencil. Dengan mempertahankan peningkatan ini, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berpeluang mencapai angka

harapan hidup yang lebih tinggi di masa depan, mendekati target nasional.

2.2.3.2 Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi

Indikator angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) merupakan ukuran penting dalam menilai derajat kesehatan masyarakat, kualitas pelayanan kesehatan, serta efektivitas intervensi pemerintah di bidang kesehatan ibu dan anak. AKI menggambarkan jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan, hingga 42 hari setelah berakhirnya kehamilan per 100.000 kelahiran hidup, sementara AKB menunjukkan jumlah kematian bayi usia 0–11 bulan per 1.000 kelahiran hidup. Kedua indikator ini secara langsung berkaitan dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya target menurunkan angka kematian ibu dan bayi, sehingga menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 2. 3 Angka Kematian Ibu dan Kematian Bayi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2024

Indikator	2021	2022	2023	2024
Angka kematian ibu	N/A	79,1	171.2	126.3
Angka kematian bayi	N/A	17.1	17.7	10.4

Sumber : Dinas Kesehatan, 2025

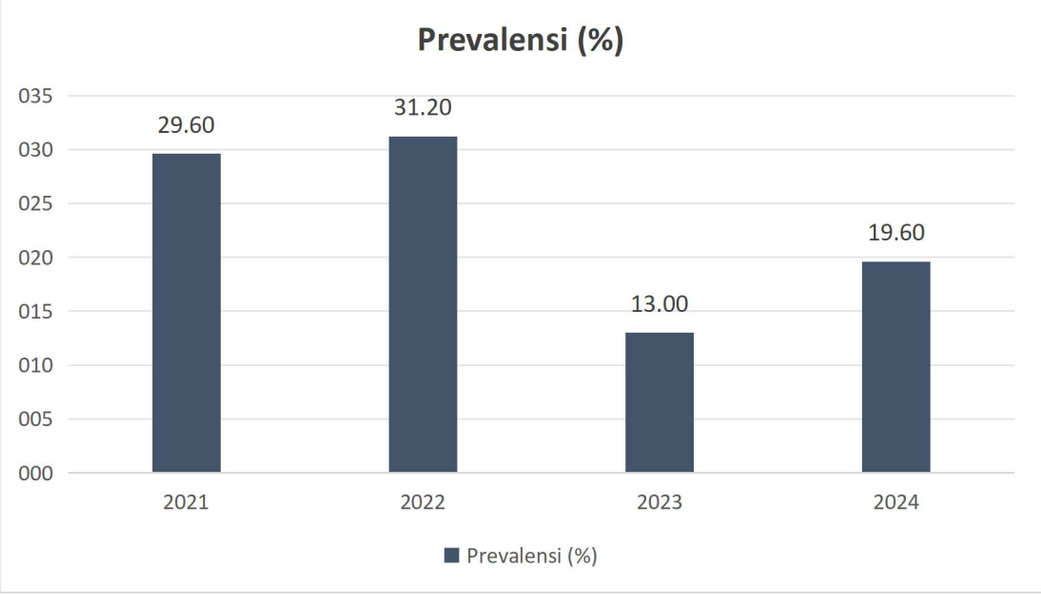
Berdasarkan data Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2021–2024, terlihat dinamika yang cukup signifikan. Pada tahun 2021 data tidak tersedia. Memasuki tahun 2022, angka kematian ibu tercatat sebesar 79,1 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini relatif masih tinggi, namun pada tahun berikutnya justru melonjak tajam hingga mencapai 171,2. Lonjakan tersebut dapat mengindikasikan adanya permasalahan serius dalam pelayanan kesehatan maternal, seperti keterlambatan rujukan, keterbatasan tenaga medis, atau meningkatnya kasus komplikasi kehamilan. Meski demikian, pada tahun 2024 terjadi perbaikan yang cukup berarti dengan penurunan menjadi 126,3 per 100.000 kelahiran hidup. Sementara itu, angka kematian bayi

menunjukkan pola yang berbeda. Pada tahun 2022, AKB berada pada posisi 17,1 per 1.000 kelahiran hidup dan sedikit meningkat pada tahun 2023 menjadi 17,7. Angka ini masih berada di atas target nasional yang ingin menurunkan AKB di bawah 12 per 1.000 kelahiran hidup. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan drastis hingga mencapai 10,4 per 1.000 kelahiran hidup.

2.2.3.3 Prevalensi Stunting

Indikator prevalensi stunting merupakan ukuran persentase balita yang mengalami kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, serta stimulasi yang tidak memadai, sehingga tinggi badan anak lebih rendah dibanding standar usianya. Indikator ini penting untuk memantau kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, karena stunting berdampak jangka panjang terhadap perkembangan kognitif, produktivitas, hingga kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Gambar 2. 11 Prevalensi Stunting Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2024



Sumber : Dinas Kesehatan, 2025

Prevalensi stunting di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam periode 2022–2024 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2022, prevalensi stunting tercatat sebesar 9,9 persen. Angka ini kemudian meningkat menjadi 10,2 persen pada

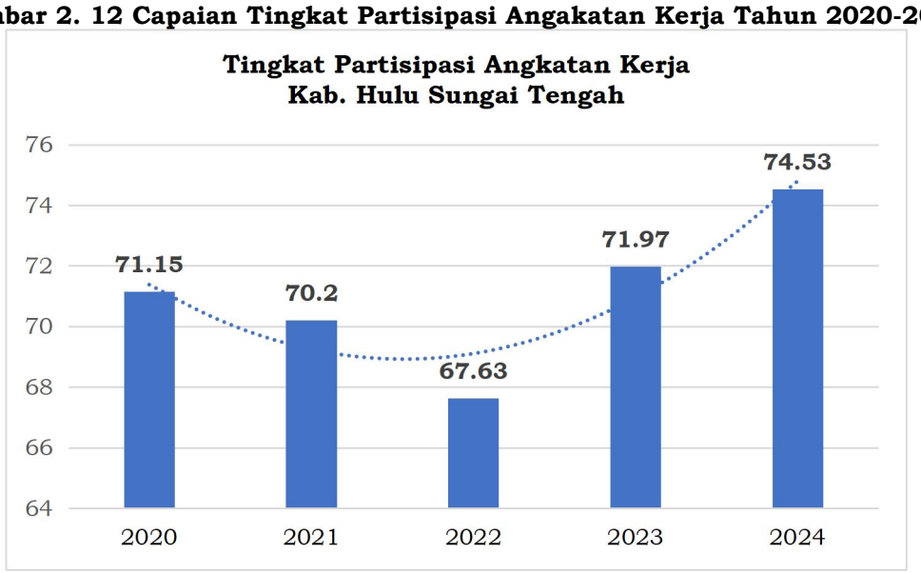
tahun 2023, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam menekan kasus stunting, baik karena faktor gizi, kesehatan lingkungan, maupun pola asuh. Namun, pada tahun 2024 prevalensi stunting menurun kembali menjadi 9,6 persen.

2.2.4 Ketenagakerjaan

2.2.4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang menunjukkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaan. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat keterlibatan penduduk dalam pasar tenaga kerja di suatu daerah.

Gambar 2. 12 Capaian Tingkat Partisipasi Angakatan Kerja Tahun 2020-2024



Sumber : Diolah dari Publikasi BPS, 2025

Berdasarkan data Kabupaten Hulu Sungai Tengah, TPAK selama periode 2020–2023 menunjukkan pola fluktuatif. Pada tahun 2020, TPAK tercatat sebesar 71,15 persen, kemudian menurun menjadi 70,20 persen pada tahun 2021, dan kembali turun pada tahun 2022 hingga mencapai 67,63 persen. Pada tahun 2023, nilai TPAK meningkat menjadi 71,97 persen, melampaui capaian awal tahun 2020. Secara keseluruhan, tren TPAK Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama empat tahun terakhir menunjukkan pergerakan yang berfluktuasi dengan arah peningkatan pada tahun terakhir periode pengamatan.

2.3 Aspek Ekonomi

2.3.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu indikator kinerja pembangunan perekonomian daerah yang menunjukkan suatu besaran atau nilai tambah bruto (kotor) dari keseluruhan barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di suatu regional yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi. Pada penghitungan periode ini, metode penghitungan PDRB mengalami perubahan terkait tahun dasar dan metodologi penghitungannya. Rincian sektor lapangan usaha pada PDRB meningkat menjadi 17 kategori dimana sebelumnya hanya 9 sektor lapangan usaha. Peningkatan cakupan kategori ini juga menimbulkan efek berupa revisi dan penyempurnaan nilai PDRB pada lima tahun terakhir sehingga analisis periodik juga terbatas pada penghitungan dengan metode yang baru.

Berdasarkan lapangan usaha, analisis PDRB terbagi atas Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). Analisis PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) bertujuan untuk menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah pada tahun yang bersangkutan dan untuk menunjukkan pendapatan yang dihasilkan oleh penduduk yang bekerja pada lapangan usaha-lapangan usaha di suatu wilayah tertentu pada tahun yang bersangkutan. PDRD ADHB Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 4 PDRB ADHB Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah)

No	LAPANGAN USAHA	2020		2021		2022		2023		2024	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.704,46	24,17	1.744,45	23,59	1.840,25	23,15	1.983,04	23,07	2.170,81	23,18
B	Pertambangan dan Penggalian	52,39	0,74	53,50	0,72	58,25	0,73	63,12	0,73	67,19	0,72
C	Industri Pengolahan	990,17	14,04	1.040,97	14,08	1.112,74	14,00	1.104,78	12,86	1.183,21	12,63
D	Pengadaan Listrik Dan Gas	12,72	0,18	13,61	0,18	14,77	0,19	15,95	0,19	17,11	0,18
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	35,20	0,50	36,48	0,49	38,91	0,49	42,76	0,50	45,31	0,48

	Daur Ulang										
F	Konstruksi	594,12	8,42	618,75	8,37	668,87	8,42	745,75	8,68	813,01	8,68
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	819,73	11,62	869,66	11,76	979,03	12,32	1.103,54	12,84	1.187,86	12,68
H	Transportasi dan Pergudangan	333,67	4,73	342,69	4,63	384,70	4,84	458,58	5,34	509,85	5,44
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	263,00	3,73	278,85	3,77	309,58	3,90	344,17	4,00	376,08	4,02
J	Informasi dan Komunikasi	329,81	4,68	359,14	4,86	391,31	4,92	430,28	5,01	467,97	5,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	156,20	2,21	165,59	2,24	177,05	2,23	197,32	2,30	211,79	2,26

L	Real Estate	238,54	3,38	256,15	3,46	277,38	3,49	299,27	3,48	323,00	3,45
M,N	Jasa Perusahaan	14,53	0,21	15,21	0,21	16,53	0,21	18,72	0,22	20,68	0,22
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	724,16	10,27	764,78	10,34	778,81	9,80	827,77	9,63	930,45	9,93
P	Jasa Pendidikan	528,22	7,49	557,40	7,54	598,09	7,53	631,34	7,35	681,63	7,28
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	151,79	2,15	171,50	2,32	184,43	2,32	198,32	2,31	217,09	2,32
R,S,T,U	Jasa lainnya	103,65	1,47	105,14	1,42	116,88	1,47	129,33	1,50	142,98	1,53
Total	PDRB ADHB	7.052,36	100,00	7.393,87	100,00	7.947,58	100,00	8.594,04	100,00	9.366,02	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan. Nilai PDRB meningkat dari Rp 7.052,35 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 9.366,01 miliar pada tahun 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi lintas sektor di wilayah tersebut.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi kontributor utama terhadap PDRB, meskipun proporsi kontribusinya sedikit menurun dari 24,17% pada 2020 menjadi 23,18% pada 2024. Namun demikian, secara nominal sektor ini tumbuh signifikan dari Rp 1.704,46 miliar menjadi Rp 2.170,81 miliar.

Sektor industri pengolahan menunjukkan peningkatan nilai dari Rp 990,17 miliar (14,04%) pada 2020 menjadi Rp 1.183,21 miliar (12,63%) pada 2024. Meskipun terjadi penurunan persentase kontribusi, nilai absolut sektor ini tetap tumbuh.

Sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor juga mencatat pertumbuhan positif, dengan peningkatan nilai dari Rp 819,73 miliar (11,62%) pada 2020 menjadi Rp 1.187,86 miliar (12,68%) pada 2024. Pertumbuhan ini mengindikasikan peningkatan aktivitas konsumsi dan distribusi barang di masyarakat.

Sektor transportasi dan pergudangan mengalami peningkatan dari Rp 333,67 miliar (4,73%) pada tahun 2020 menjadi Rp 509,85 miliar (5,44%) pada tahun 2024, mencerminkan meningkatnya konektivitas dan pergerakan logistik dalam wilayah.

Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib turut mengalami pertumbuhan nilai dari Rp 724,16 miliar (10,27%) menjadi Rp 930,45 miliar (9,93%) pada periode yang sama, meskipun proporsi kontribusinya terhadap total PDRB sedikit menurun.

Sektor pendidikan, kesehatan dan kegiatan sosial, serta informasi dan komunikasi juga menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, memperkuat peran sektor jasa dalam struktur perekonomian daerah.

Tabel 2. 5 PDRB ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024(Milyar Rupiah)

No	LAPANGAN USAHA	2020		2021		2022		2023		2024	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.225,92	25,37	1.231,47	24,74	1.246,69	24,10	1.273,42	23,64	1.320,52	23,36
B	Pertambangan dan Penggalian	36,15	0,75	36,63	0,74	38,32	0,74	39,86	0,74	41,16	0,73
C	Industri Pengolahan	681,74	14,11	696,94	14,00	728,00	14,07	732,18	13,59	757,38	13,40
D	Pengadaan Listrik Dan Gas	7,58	0,16	7,90	0,16	8,50	0,16	9,10	0,17	9,68	0,17
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	25,03	0,52	25,67	0,52	26,99	0,52	29,10	0,54	30,32	0,54
F	Konstruksi	415,56	8,60	427,33	8,58	445,68	8,61	474,78	8,82	503,41	8,91
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan	514,79	10,65	537,21	10,79	574,50	11,10	601,50	11,17	626,00	11,07

No	LAPANGAN USAHA	2020		2021		2022		2023		2024	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
	Reparasi Mobil dan Sepeda Motor										
H	Transportasi dan Pergudangan	228,18	4,72	233,86	4,70	249,02	4,81	266,53	4,95	281,78	4,98
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	180,85	3,74	185,45	3,73	198,58	3,84	217,30	4,03	232,06	4,11
J	Informasi dan Komunikasi	257,67	5,33	279,73	5,62	298,36	5,77	321,09	5,96	342,30	6,06
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	102,11	2,11	103,92	2,09	102,95	1,99	112,87	2,10	119,63	2,12
L	Real Estate	174,35	3,61	181,35	3,64	192,49	3,72	204,45	3,80	214,93	3,80
M,N	Jasa Perusahaan	9,10	0,19	9,36	0,19	9,87	0,19	10,52	0,20	11,19	0,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	446,89	9,25	465,73	9,36	465,18	8,99	475,64	8,83	514,78	9,11

No	LAPANGAN USAHA	2020		2021		2022		2023		2024	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
	Wajib										
P	Jasa Pendidikan	362,64	7,50	380,86	7,65	403,76	7,80	420,98	7,82	438,89	7,76
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	99,96	2,07	109,72	2,20	115,36	2,23	123,12	2,29	129,85	2,30
R,S,T,U	Jasa lainnya	64,22	1,33	65,10	1,31	69,31	1,34	73,57	1,37	78,99	1,40
Total	PDRB ADHB	4.832,74	100,00	4.978,23	100,00	5.173,56	100,00	5.386,01	100,00	5.652,87	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2025

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan tren peningkatan selama lima tahun terakhir. Nilai total PDRB ADHK naik dari Rp 4.832,75 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 5.652,88 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil yang positif dan berkelanjutan di berbagai lapangan usaha.

Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap menjadi kontributor terbesar dengan nilai mencapai Rp 1.320,52 miliar (23,36%) pada tahun 2024, meningkat dari Rp 1.225,92 miliar (25,37%) pada tahun 2020. Meskipun persentase kontribusinya mengalami sedikit penurunan, nilai riil sektor ini tetap menunjukkan pertumbuhan.

Sektor Industri Pengolahan juga mengalami pertumbuhan dari Rp 681,74 miliar (14,11%) pada tahun 2020 menjadi Rp 757,38 miliar (13,40%) pada tahun 2024. Sektor ini tetap menjadi salah satu penopang penting perekonomian daerah.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mencatat pertumbuhan stabil, dari Rp 514,79 miliar (10,65%) pada tahun 2020 menjadi Rp 626,00 miliar (11,07%) pada tahun 2024.

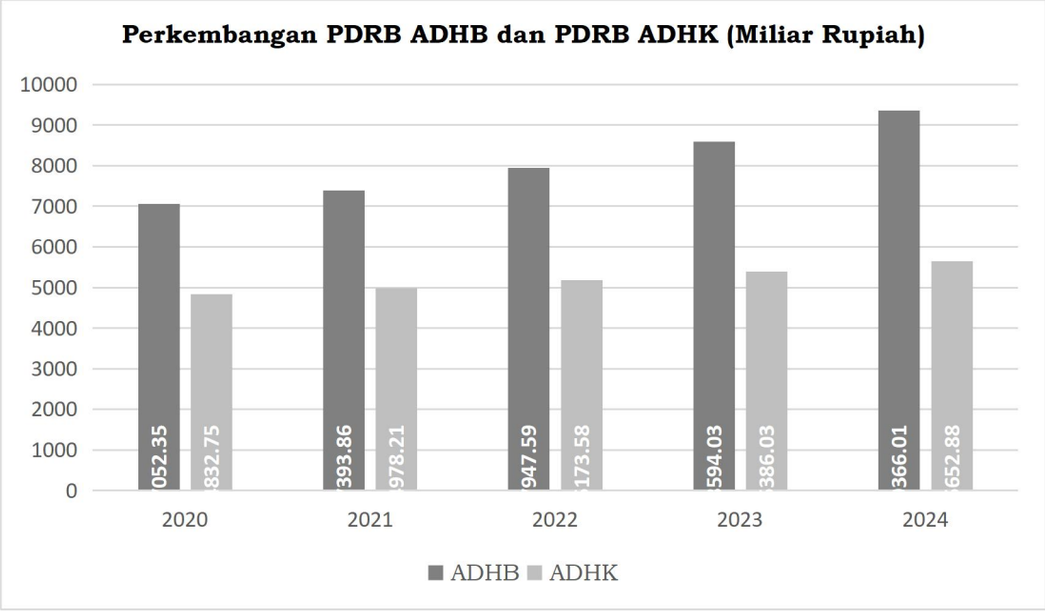
Sektor Transportasi dan Pergudangan menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dari Rp 228,18 miliar (4,72%) pada tahun 2020 menjadi Rp 281,78 miliar (4,98%) pada tahun 2024. Begitu pula dengan sektor Informasi dan Komunikasi, yang mengalami peningkatan dari Rp 257,67 miliar (5,33%) menjadi Rp 342,30 miliar (6,06%) selama periode yang sama.

Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mencatat kenaikan dari Rp 446,89 miliar (9,25%) pada tahun 2020 menjadi Rp 514,78 miliar (9,11%) pada tahun 2024, menunjukkan peran yang tetap signifikan dalam struktur ekonomi daerah.

Secara grafik Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK, serta Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai

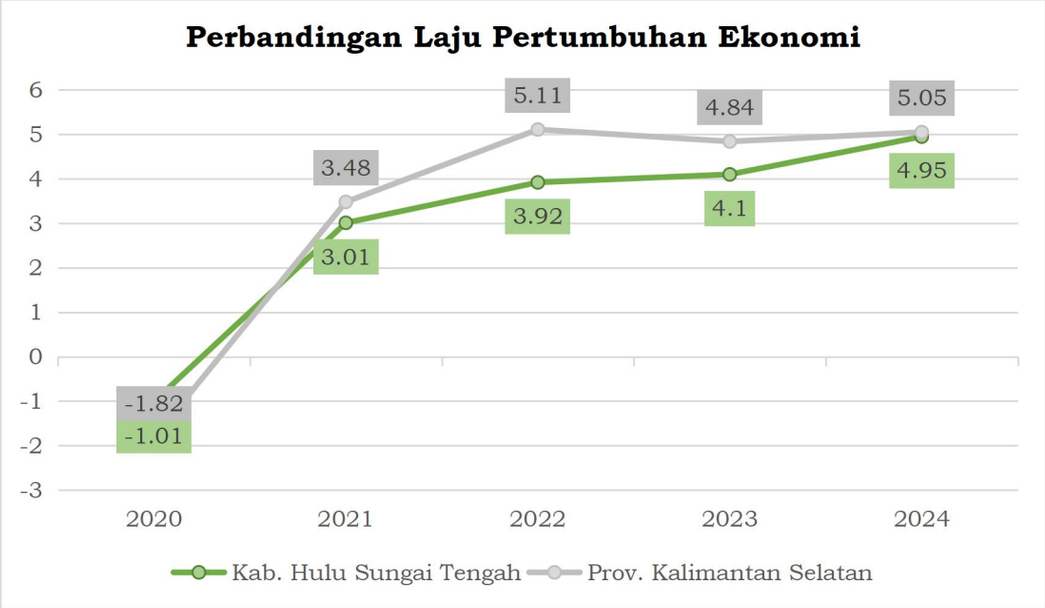
Tengah antara Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 13 Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK (Miliar Rupiah) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2025

Gambar 2. 14 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan



Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2025

Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2019 yang mencapai 4,76% lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan yang sebesar 4,09%. Namun, pandemi COVID-19 pada tahun 2020

menyebabkan kontraksi ekonomi yang berdampak signifikan bagi keduanya, di mana Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami penurunan sebesar -1,01% dan Provinsi Kalimantan Selatan mengalami penurunan yang lebih dalam yaitu sebesar -1,82%.

Memasuki tahun 2021, ekonomi mulai menunjukkan pemulihan. Kabupaten Hulu Sungai Tengah mencatat pertumbuhan sebesar 3,01%, sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan tumbuh sebesar 3,48%. Tren pemulihan ini terus berlanjut pada tahun 2022, dengan pertumbuhan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 3,92%, meskipun masih lebih rendah dari Provinsi Kalimantan Selatan yang tumbuh sebesar 5,11%.

Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah meningkat menjadi 4,10%, sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,84%. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah terus menunjukkan perbaikan dan meningkat menjadi 4,95%. Sementara itu, Provinsi Kalimantan Selatan mencatat pertumbuhan sebesar 5,05%.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama periode 2019–2024 mencapai 3,46%, sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai 3,79%. Meskipun demikian, tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan bahwa perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah terus menunjukkan pemulihan dan penguatan.

Tabel 2. 6 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 s.d 2024

KATEGORI	URAIAN	2020		2021		2022		2023		2024	
		HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,17	25,37	23,59	24,74	23,15	24,1	23,07	23,64	23,18	23,36
B	Pertambangan dan Penggalian	0,74	0,75	0,72	0,74	0,73	0,74	0,73	0,74	0,72	0,73
C	Industri Pengolahan	14,04	14,11	14,08	14	14	14,07	12,86	13,59	12,63	13,4
D	Pengadaan Listrik, Gas	0,18	0,16	0,18	0,16	0,19	0,16	0,19	0,17	0,18	0,17
E	Pengadaan Air	0,5	0,52	0,49	0,52	0,49	0,52	0,5	0,54	0,48	0,54
F	Konstruksi	8,42	8,6	8,37	8,58	8,42	8,61	8,68	8,82	8,68	8,91
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,62	10,65	11,76	10,79	12,32	11,1	12,84	11,17	12,68	11,07
H	Transportasi dan Pergudangan	4,73	4,72	4,63	4,7	4,84	4,81	5,34	4,95	5,44	4,98
I	Penyediaan Akomodasi	3,73	3,74	3,77	3,73	3,9	3,84	4	4,03	4,02	4,11

	dan Makan Minum										
J	Informasi dan Komunikasi	4,68	5,33	4,86	5,62	4,92	5,77	5,01	5,96	5	6,06
K	Jasa Keuangan	2,21	2,11	2,24	2,09	2,23	1,99	2,3	2,1	2,26	2,12
L	Real Estate	3,38	3,61	3,46	3,64	3,49	3,72	3,48	3,8	3,45	3,8
M,N	Jasa Perusahaan	0,21	0,19	0,21	0,19	0,21	0,19	0,22	0,2	0,22	0,2
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,27	9,25	10,34	9,36	9,8	8,99	9,63	8,83	9,93	9,11
P	Jasa Pendidikan	7,49	7,5	7,54	7,65	7,53	7,8	7,35	7,82	7,28	7,76
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,15	2,07	2,32	2,2	2,32	2,23	2,31	2,29	2,32	2,3
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,47	1,33	1,42	1,31	1,47	1,34	1,5	1,37	1,53	1,4
Total	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2025

Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi sektor andalan dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada tahun 2023, sektor ini menyumbang sebesar 23,07% terhadap PDRB ADHB dan 23,64% terhadap PDRB ADHK. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 2022, kontribusi sektor ini mengalami sedikit penurunan dari 23,15% (ADHB) dan 24,10% (ADHK). Penurunan tersebut masing-masing sebesar 0,08% (ADHB) dan 0,46% (ADHK).

Sebelumnya, pada tahun 2021, kontribusi sektor ini tercatat sebesar 23,59% (ADHB) dan 24,74% (ADHK), yang berarti terjadi penurunan berturut-turut pada tahun 2022 sebesar 0,44% (ADHB) dan 0,64% (ADHK). Jika dilihat secara tren, sejak tahun 2020 kontribusi sektor ini terus mengalami koreksi dan fluktuasi.

Penurunan ini tidak hanya disebabkan oleh dampak berkepanjangan dari pandemi COVID-19 pada tahun 2020, tetapi juga diperburuk oleh faktor-faktor lain seperti bencana banjir, fenomena cuaca ekstrem *La Niña Triple Dip*, serta alih fungsi lahan pertanian yang menyebabkan perlambatan dalam pemulihan sektor ini.

Pada tahun 2024, meskipun belum sepenuhnya pulih, kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu menjadi 23,18% (ADHB) dan 23,36% (ADHK). Namun, capaian ini masih berada di bawah posisi sebelum pandemi, yakni lebih dari 24%, yang menunjukkan bahwa sektor ini masih dalam tahap pemulihan menuju kondisi normal.

Tabel 2. 7 Pergeseran Persentase Kontribusi Sektor PDRB ADHB antara Tahun 2023 dan 2024

KATEGORI	URAIAN	2023	2024	Pergeseran
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,07	23,18	0,48
B	Pertambangan dan Penggalian	0,73	0,72	-1,37
C	Industri Pengolahan	12,86	12,63	-1,79
D	Pengadaan Listrik, Gas	0,19	0,18	-5,26
E	Pengadaan Air	0,5	0,48	-4
F	Konstruksi	8,68	8,68	0
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,84	12,68	-1,25
H	Transportasi dan Pergudangan	5,34	5,44	1,87
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4	4,02	0,5
J	Informasi dan Komunikasi	5,01	5	-0,2
K	Jasa Keuangan	2,3	2,26	-1,74
L	Real Estate	3,48	3,45	-0,86
M,N	Jasa Perusahaan	0,22	0,22	0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,63	9,93	3,12
P	Jasa Pendidikan	7,35	7,28	-0,95
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,31	2,32	0,43
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,5	1,53	2
Total	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2025

Meskipun nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami peningkatan kontribusi dari 23,07%

pada tahun 2023 menjadi 23,18% pada tahun 2024 (naik 0,48%), namun peningkatan ini masih relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sektor ini tetap menjadi penyumbang terbesar PDRB, pertumbuhannya tidak jauh melampaui sektor-sektor lain yang berkembang lebih cepat.

Sektor industri pengolahan mengalami penurunan kontribusi sebesar 1,79%, dari 12,86% menjadi 12,63%. Penurunan ini cukup signifikan dan mencerminkan adanya tantangan dalam menjaga efisiensi dan daya saing industri pengolahan, yang merupakan salah satu sektor kunci dalam struktur ekonomi daerah.

Sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor juga mengalami penurunan kontribusi sebesar 1,25%. Meskipun secara nominal sektor ini mungkin tumbuh, namun laju pertumbuhannya kalah dibandingkan dengan sektor lain.

Sebaliknya, sektor transportasi dan pergudangan mencatat peningkatan kontribusi sebesar 1,87%, dari 5,34% menjadi 5,44%. Peningkatan ini menandakan semakin pentingnya sektor ini dalam mendukung distribusi dan logistik daerah.

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum juga tumbuh positif dengan peningkatan kontribusi sebesar 0,5%. Ini menunjukkan adanya geliat pada sektor pariwisata dan layanan pendukungnya.

Sementara itu, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib menunjukkan lonjakan kontribusi yang paling tinggi, yakni sebesar 3,12%. Kenaikan ini menunjukkan peran signifikan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, namun tetap perlu diimbangi dengan peningkatan efektivitas dan efisiensi birokrasi.

Sebaliknya, beberapa sektor lainnya seperti jasa keuangan (-1,74%), informasi dan komunikasi (-0,2%), serta jasa pendidikan (-0,95%) mengalami penurunan kontribusi yang perlu mendapat perhatian.

Tabel 2. 8 Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024 (%)

NO	LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,26	0,45	1,24	2,14	3,7
B	Pertambangan dan Penggalian	-2,17	1,34	4,62	4,01	3,25
C	Industri Pengolahan	-3,46	2,23	4,46	0,57	3,44
D	Pengadaan Listrik Dan Gas	4,22	4,27	7,61	7,05	6,32
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,37	2,53	5,14	7,83	4,2
F	Konstruksi	-2,91	2,83	4,29	6,53	6,03
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,37	4,36	6,94	4,70	4,07
H	Transportasi dan Pergudangan	-3,88	2,49	6,48	7,03	5,72
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-2,65	2,54	7,08	9,43	6,79
J	Informasi dan Komunikasi	8,12	8,56	6,66	7,62	6,6
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,09	1,77	-0,93	9,63	5,99
L	Real Estate	2,02	4,01	6,15	6,21	5,12
M,N	Jasa Perusahaan	-3,07	2,76	5,49	6,56	6,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-2,04	4,22	-0,12	2,25	8,23
P	Jasa Pendidikan	1,08	5,02	6,01	4,26	4,26
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,61	9,76	5,14	6,73	5,46
R,S,T,U	Jasa lainnya	-1,67	1,37	6,47	6,14	7,37
Total	PDRB	-1,01	3,01	3,92	4,11	4,95

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2025

Selain struktur perekonomian, laju pertumbuhan PDRB pada masing-masing sektor juga dapat diketahui dengan melihat PDRB atas dasar harga konstan. Tabel berikut menyajikan laju pertumbuhan (%) Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 (PDRB ADHK) Kabupaten Hulu Sungai Tengah menurut lapangan usaha, dari tahun 2020 sampai dengan 2024.

Pada tahun 2023, nilai PDRB ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah mencapai 5,386 triliun rupiah, meningkat dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 5,174 triliun rupiah. Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,11 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2022 yang sebesar 3,92 persen, atau naik 0,19 persen.

Namun demikian, peningkatan ini relatif lebih lambat jika dibandingkan dengan lonjakan pertumbuhan dari tahun 2021 ke 2022 yang mencapai 0,91 persen (dari 3,01% menjadi 3,92%). Salah satu faktor yang mungkin mempengaruhi perlambatan ini adalah belum optimalnya kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan—sektor utama penopang perekonomian daerah—yang hanya tumbuh 2,14 persen pada 2023, meskipun terus meningkat dari tahun sebelumnya.

Di sisi lain, sektor-sektor lain menunjukkan kinerja yang cukup baik:

Penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh paling tinggi dengan 9,43 persen, menunjukkan pemulihan yang kuat di sektor pariwisata dan perhotelan.

Jasa keuangan dan asuransi mengalami lonjakan pertumbuhan sebesar 9,63 persen, menandakan adanya geliat pada aktivitas perbankan dan keuangan.

Sektor pengadaan air, limbah, dan daur ulang serta pengadaan listrik dan gas juga tumbuh stabil tinggi masing-masing sebesar 7,83% dan 7,05%.

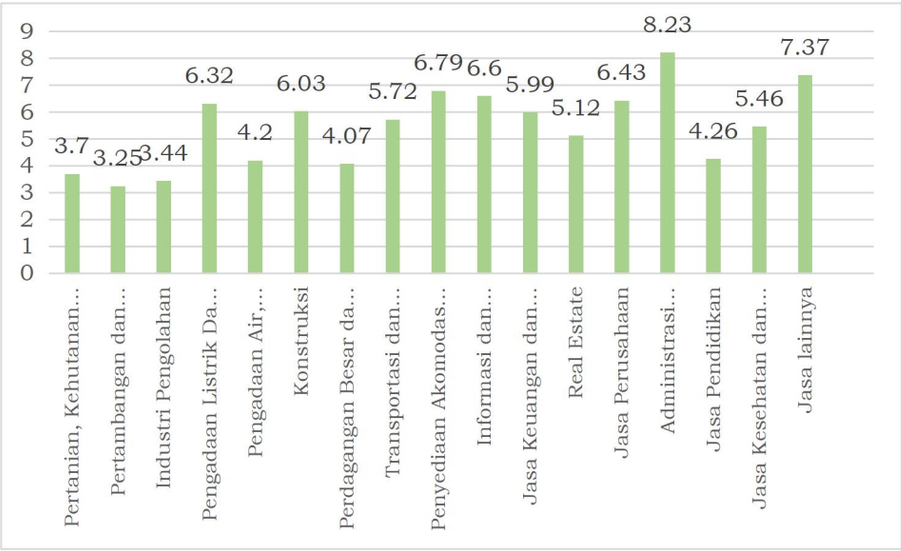
Sektor transportasi dan pergudangan menunjukkan pertumbuhan solid sebesar 7,03 persen, mencerminkan pentingnya sektor logistik dan distribusi dalam perputaran ekonomi daerah.

Sebaliknya, sektor industri pengolahan yang merupakan salah satu sektor strategis, justru menunjukkan perlambatan pertumbuhan hanya 0,57 persen, jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,46 persen.

Ini menunjukkan adanya hambatan dalam peningkatan produksi atau daya saing industri lokal.

Sektor administrasi pemerintahan juga tumbuh lamban dengan hanya 2,25 persen, yang menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja serta program-program publik untuk mendorong kontribusi yang lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Gambar 2. 15 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2024



Sumber : Diolah dari data BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2025

Jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel di atas, sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan pertumbuhan yang cukup merata dan relatif positif di hampir seluruh lapangan usaha.

Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 8,23 persen, menunjukkan peningkatan belanja pemerintah atau efektivitas program-program publik. Diikuti oleh Jasa Lainnya yang juga tumbuh signifikan sebesar 7,37 persen, serta sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan pertumbuhan sebesar 6,79 persen, mengindikasikan terus meningkatnya mobilitas dan kegiatan pariwisata.

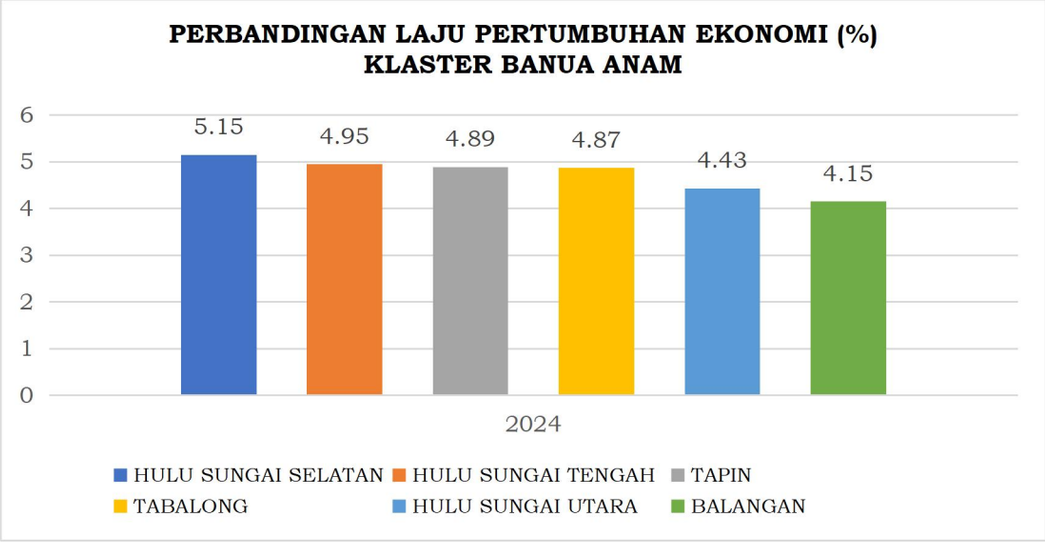
Sektor-sektor jasa lainnya yang mencatat pertumbuhan tinggi adalah:

- Jasa Perusahaan: 6,43 persen
- Informasi dan Komunikasi: 6,6 persen
- Pengadaan Listrik dan Gas: 6,32 persen
- Konstruksi: 6,03 persen
- Jasa Keuangan dan Asuransi: 5,99 persen
- Transportasi dan Pergudangan: 5,72 persen
- Pertumbuhan yang cukup baik juga tercatat di sektor:
- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial: 5,46 persen
- Real Estate: 5,12 persen
- Jasa Pendidikan: 4,26 persen
- Pengadaan Air dan Limbah: 4,2 persen
- Perdagangan dan Reparasi Kendaraan: 4,07 persen
- Sementara itu, beberapa sektor mengalami pertumbuhan yang lebih moderat, seperti:
- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan: 3,7 persen
- Industri Pengolahan: 3,44 persen
- Pertambangan dan Penggalian: 3,25 persen

Kinerja sektor-sektor ini menunjukkan bahwa ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2024 berada dalam tren pemulihan dan pertumbuhan yang cukup solid, dengan dorongan utama berasal dari sektor jasa, administrasi publik, dan pariwisata.

Adapun perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan beberapa kabupaten sekitarnya tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 2. 16 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Daerah Sekitarnya Tahun 2023-2024



Sumber : Diolah dari data BPS Kalimantan Selatan, 2025

2.3.1.2 PDRB per Kapita

PDRB perkapita bertujuan untuk menunjukkan nilai PDRB perorang yakni gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk secara makro. Menurut klasifikasi Bank Dunia, pendapatan perkapita kurang dari $1.045 dikategorikan sebagai pendapatan perkapita rendah, sementara pendapatan perkapita antara $1.045 - $4.125 termasuk pendapatan perkapita menengah kebawah, dan pendapatan perkapita lebih tinggi dari $12.746 temasuk pendapatan perkapita tinggi.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Berikut disajikan PDRB ADHB Per Kapita Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 :

Tabel 2. 9 Perkembangan PDRB ADHB Per Kapita Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 – 2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHB Perkapita	27,26	28,34	30,15	32,28	34,85

(Juta Rupiah)					
Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB ADHB (%)	0,18	4,84	7,49	8,13	8,98

Sumber : Diolah dari data BPS Hulu Sungai Tengah, 2025

Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama kurun tahun 2020-2024 semakin meningkat setiap tahunnya. Apabila diukur dalam USD menurut klasifikasi bank dunia, PDRB Per Kapita Kabupaten Hulu Sungai Tengah termasuk dalam kategori wilayah berpendapatan menengah kebawah.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan tren yang konsisten meningkat dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2020 hingga 2024, PDRB per kapita terus mengalami kenaikan, mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat secara nominal.

Pada tahun 2020, PDRB per kapita tercatat sebesar Rp27,26 juta, kemudian naik menjadi Rp28,34 juta pada tahun 2021, Rp30,15 juta pada tahun 2022, Rp32,28 juta pada tahun 2023, dan mencapai Rp34,85 juta pada tahun 2024. Kenaikan nilai nominal ini sebagian besar dipengaruhi oleh faktor inflasi, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan daya beli masyarakat.

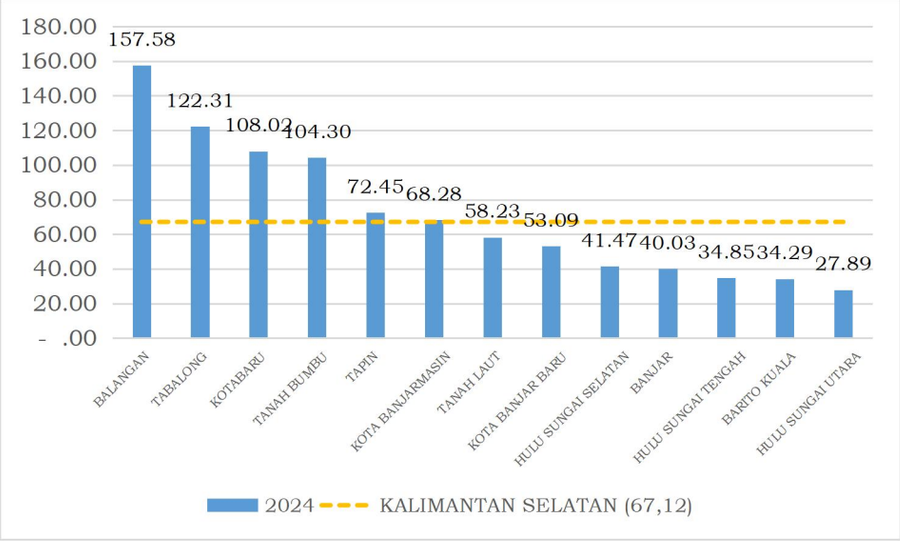
Namun, untuk memahami dinamika ekonomi secara lebih mendalam, perlu dilihat juga laju pertumbuhan ekonomi riil yang menggambarkan pertumbuhan volume produksi barang dan jasa. Dalam periode yang sama, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Setelah hanya tumbuh 0,18% pada tahun 2020—yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19—pertumbuhan ekonomi melonjak menjadi 4,84% pada tahun 2021, 7,49% pada tahun 2022, 8,13% pada tahun 2023, dan mencapai 8,98% pada tahun 2024. Tren

positif ini mencerminkan pemulihan dan penguatan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Perkembangan nilai PDRB per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dirangkum sebagai berikut:

Gambar 2. 17 PDRB per Kapita Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2024 (Juta Rupiah)



Sumber : Diolah dari Publikasi BPS Kalimantan Selatan, 2025

Pada tahun 2024, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan variasi yang cukup signifikan, mencerminkan perbedaan struktur dan potensi ekonomi masing-masing wilayah. Data terbaru menunjukkan bahwa Kabupaten Balangan mencatatkan nilai PDRB per kapita tertinggi, yakni sebesar Rp157,58 juta. Disusul oleh Kabupaten Tabalong dengan nilai sebesar Rp122,31 juta, serta Kabupaten Kotabaru yang mencapai Rp108,02 juta. Ketiga kabupaten ini dikenal sebagai daerah dengan dominasi sektor pertambangan, khususnya batubara, yang memberikan kontribusi besar terhadap output ekonomi daerah.

Tingginya nilai PDRB per kapita di wilayah-wilayah tersebut mencerminkan kekuatan ekonomi berbasis sumber daya alam, terutama hasil tambang. Aktivitas pertambangan yang padat modal dan bernilai tinggi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan, meskipun belum

tentu secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata jika tidak disertai dengan pemerataan pendapatan.

Sebaliknya, beberapa kabupaten lainnya mencatatkan nilai PDRB per kapita yang relatif rendah. Kabupaten Hulu Sungai Utara berada pada posisi terendah dengan nilai Rp27,89 juta, diikuti oleh Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp34,29 juta, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar Rp34,85 juta. Wilayah-wilayah ini umumnya memiliki struktur ekonomi yang lebih bertumpu pada sektor pertanian, perdagangan, dan jasa, yang nilai tambahnya relatif lebih kecil dibandingkan sektor pertambangan.

Perbedaan nilai PDRB per kapita ini menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi antarwilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Daerah yang melakukan eksplorasi sumber daya alam yang besar mampu menghasilkan output ekonomi yang tinggi, sementara daerah lainnya yang tidak melakukan eksplorasi kekayaan alam serupa cenderung memiliki tingkat produktivitas ekonomi yang lebih rendah.

2.3.1.3 Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan Per Kapita

Rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri atas dua komponen utama, yaitu pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran untuk non makanan. Pola konsumsi ini mencerminkan prioritas kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kesejahteraan dan perubahan pola hidup. Dalam lima tahun terakhir (2020–2024), proporsi pengeluaran untuk kedua komponen tersebut mengalami variasi, namun secara umum pengeluaran untuk makanan tetap menempati porsi yang lebih besar dibandingkan non makanan. Adapun data terkait pengeluaran konsumsi makanan per kapita dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 10 Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan Per Kapita di Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 sd 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai :					
Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Makanan Perkapita Sebulan (Rp)	565.671	605.674	558.296	734.127	769.588
Rata-rata Pengeluaran Konsumsi non Makanan Perkapita Sebulan (Rp)	443.854	560.367	363.293	495.517	539.359
Persentase :					
Persentase pengeluaran konsumsi makanan perkapita (%)	56,03	51,94	60,58	59,70	58,79
Persentase pengeluaran konsumsi non makanan perkapita (%)	43,97	48,06	39,42	40,30	41,21

Sumber : Diolah dari Dokumen Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Angka Tahun 2021 sd 2025

Berdasarkan data periode 2020–2024, terlihat bahwa persentase pengeluaran konsumsi makanan per kapita mengalami fluktuasi, dimulai dari 56,03 persen pada tahun 2020, turun menjadi 51,94 persen pada 2021, lalu meningkat signifikan menjadi 60,58 persen pada 2022. Pada 2023, persentase ini sedikit menurun menjadi 59,70 persen, dan kembali turun tipis ke 58,79 persen di tahun 2024. Sementara itu, persentase pengeluaran untuk non makanan bergerak berlawanan arah, dengan puncak tertinggi pada 2021 sebesar 48,06 persen, dan titik terendah pada 2022 sebesar 39,42 persen. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun

terjadi perubahan proporsi dari tahun ke tahun, kebutuhan pangan tetap menjadi komponen pengeluaran utama masyarakat HST, yang dapat dipengaruhi oleh faktor harga bahan pokok, daya beli, dan kondisi ekonomi daerah.

2.3.1.4 Indeks Gini

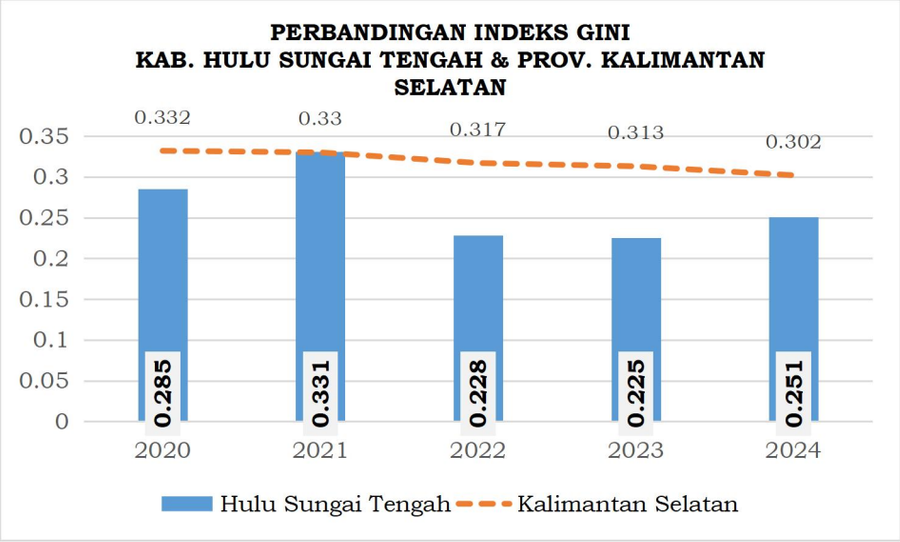
Pada tahun 2020, Gini Ratio di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tercatat sebesar 0,285. Angka ini meningkat cukup tajam pada tahun 2021 menjadi 0,331, kemudian menurun signifikan pada tahun 2022 menjadi 0,228. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2023 dengan nilai 0,225. Untuk tahun 2024, data Gini Ratio di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami sedikir kenaikan dengan nilai 0,251.

Sementara itu, Gini Ratio di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 adalah 0,332, dan mengalami sedikit penurunan menjadi 0,330 di tahun 2021. Tren penurunan terus berlanjut pada tahun 2022 menjadi 0,317, kemudian 0,313 pada 2023, dan akhirnya mencapai 0,302 pada tahun 2024.

Jika dibandingkan, Gini Ratio Kabupaten Hulu Sungai Tengah cenderung lebih rendah daripada rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan selama periode 2020 hingga 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah relatif lebih terkendali dibandingkan dengan kondisi di tingkat provinsi.

Grafik di bawah ini menggambarkan perbandingan Gini Ratio Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2020 hingga 2024.

Gambar 2. 18 Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024



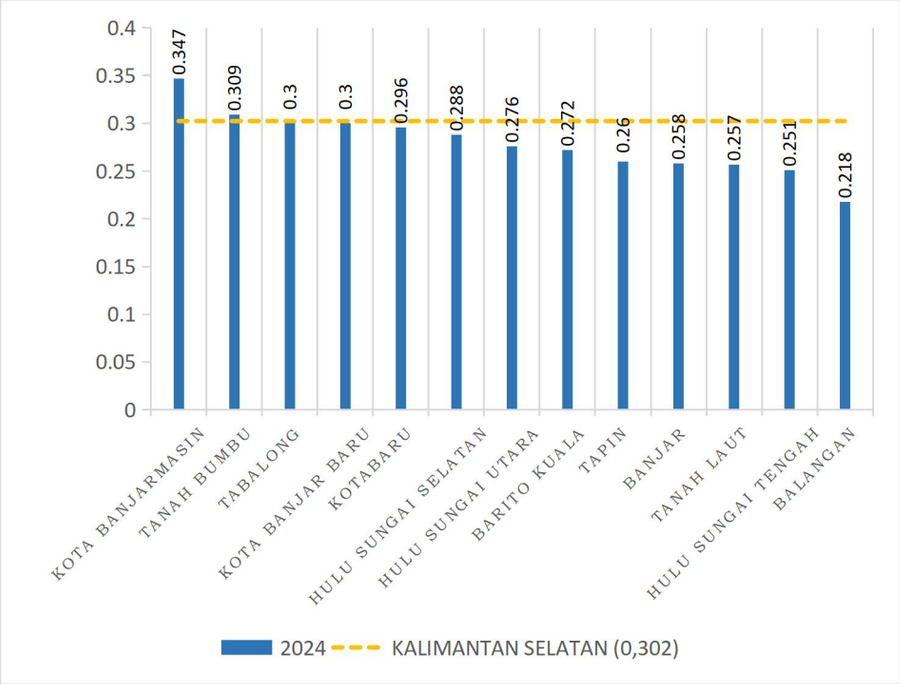
Sumber : diolah dari publikasi BPS Kalimantan Selatan, 2025

Grafik berikut menyajikan perbandingan Indeks Gini di wilayah klaster Banua Anam selama periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, sebagian besar kabupaten mencatatkan nilai Indeks Gini di atas 0,28. Kabupaten Tabalong mencatat nilai tertinggi sebesar 0,346, diikuti oleh HSU (0,319), sementara Tapin dan HSS memiliki nilai yang lebih rendah yaitu 0,274 dan 0,300. Hulu Sungai Tengah (HST) berada di tengah-tengah dengan nilai 0,285.

Pada tahun 2021, HST mengalami lonjakan ketimpangan dengan Gini Ratio tertinggi di klaster sebesar 0,331, disusul oleh HSU (0,378) yang menjadi yang tertinggi di antara semua kabupaten. Namun, mulai tahun 2022 hingga 2023, tren penurunan ketimpangan terjadi secara menyeluruh di seluruh wilayah Banua Anam.

Tahun 2024 menunjukkan hasil yang baik, kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan nilai 0,225 menjadi kabupaten dengan tingkat ketimpangan terendah nomor 2 setelah Kabupaten Balangan.

Gambar 2. 19 Perbandingan Gini Ratio Tahun 2024 Kabupaten & Kota di Provinsi Kalimantan Selatan



Sumber : Diolah dari Publikasi BPS Kalimantan Selatan, 2025

2.3.1.5 Indeks Williamson

Indeks Williamson digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan antarwilayah berdasarkan distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Semakin rendah nilai indeks ini, semakin merata distribusi kegiatan ekonomi antarwilayah. Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan data nilai Indeks Williamson provinsi kalimantan selatan dalam lima tahun terakhir sebagai gambaran perkembangan pemerataan wilayah.

Dalam periode 2020–2024, nilai Indeks Williamson HST berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada awal periode dan menurun di tahun terakhir. Nilai pada tahun 2020 tercatat sebesar 0,395, naik menjadi 0,429 di tahun 2021, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing menjadi 0,502 dan 0,503. Penurunan terjadi pada tahun 2024 dengan nilai 0,433. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan pemerataan pembangunan antarwilayah dalam kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun sempat terjadi peningkatan kesenjangan pada pertengahan periode,

kebijakan pemerataan pembangunan yang dijalankan mulai memberikan dampak positif. Arah penurunan nilai Indeks Williamson diharapkan terus berlanjut pada periode RPJMD 2025–2029 sehingga mendukung terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan inklusif di wilayah yang juga mencakup Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2.3.1.6 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar, baik makanan maupun non-makanan. Fenomena ini merupakan persoalan yang terus berlangsung dan berkembang di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam mengukur kemiskinan adalah pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), yaitu dengan menghitung jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Tabel berikut menyajikan data lengkap perkembangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama periode 2020 hingga 2024.

Tabel 2. 11 Kondisi Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024

Tahun	Persentase Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
2020	5.64	15.470	0.430	0,060
2021	6.18	16.770	0.533	0,086
2022	5.92	16.144	0.749	0,147
2023	5.84	16.008	0.630	0,144
2024	5.81	16.027	0.745	0,141

Sumber : Diolah dari publikasi BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2025

Selama periode 2020–2024, kondisi kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan penurunan yang relatif lambat.

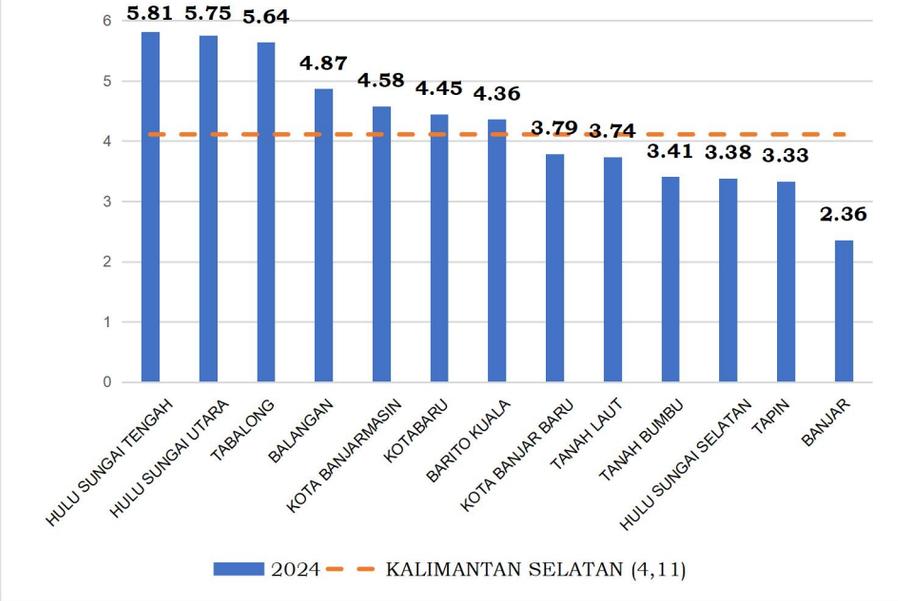
Persentase penduduk miskin pada tahun 2020 tercatat sebesar 5,64 persen, kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 6,18 persen. Setelah itu, angka kemiskinan mengalami penurunan bertahap masing-masing menjadi 5,92 persen pada 2022, 5,84 persen pada 2023, dan 5,81 persen pada 2024.

Dalam hal jumlah, penduduk miskin juga menunjukkan tren yang hampir serupa. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 15.470 jiwa, naik menjadi 16.770 jiwa pada 2021, lalu menurun secara bertahap menjadi 16.144 jiwa pada 2022, 16.008 jiwa pada 2023, dan 16.027 jiwa pada 2024. Data ini menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan dalam empat tahun terakhir berlangsung sangat lambat, dengan selisih hanya sekitar 1,6 persen antara 2021 dan 2024.

Indikator tingkat kedalaman kemiskinan (P1) yang menggambarkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam. Nilai P1 meningkat dari 0,430 pada tahun 2020 menjadi 0,533 pada 2021, kemudian naik signifikan menjadi 0,749 pada 2022, turun menjadi 0,630 pada 2023, dan kembali naik ke 0,745 pada 2024. Pergerakan ini menunjukkan perubahan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan yang tidak stabil selama periode tersebut.

Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan (P2) yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran antarpenduduk miskin juga mengalami variasi. Nilai P2 meningkat dari 0,060 pada tahun 2020 menjadi 0,086 pada 2021, kemudian naik tajam ke 0,147 pada 2022, dan meskipun menurun sedikit menjadi 0,144 pada 2023 serta 0,141 pada 2024, nilainya masih lebih tinggi dibandingkan awal periode.

Gambar 2. 20 Perbandingan Persentase Kemiskinan Kabupaten & Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2024



Sumber : Diolah dari publikasi BPS Kalimantan Selatan, 2025

Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tercatat sebesar 5,81 persen, menempatkannya sebagai daerah dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Kalimantan Selatan. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Hulu Sungai Utara (5,75 persen) dan Kabupaten Tabalong (5,64 persen) yang berada di posisi kedua dan ketiga tertinggi.

Jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai 4,11 persen, tingkat kemiskinan Hulu Sungai Tengah lebih tinggi sekitar 1,7 poin persen, yang menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat di daerah ini masih tertinggal dibandingkan rata-rata provinsi.

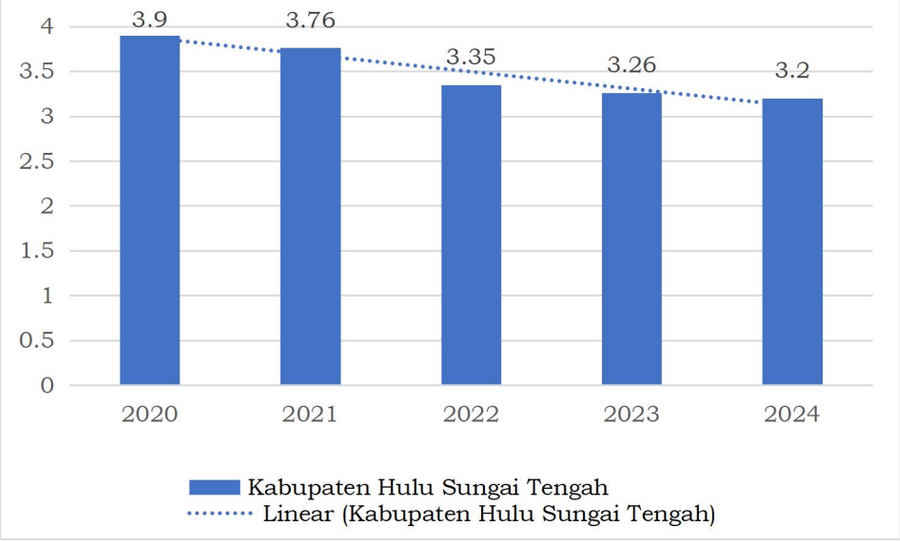
Sementara itu, beberapa daerah menunjukkan tingkat kemiskinan yang jauh lebih rendah. Kabupaten Banjar mencatat persentase kemiskinan terendah sebesar 2,36 persen, diikuti Kabupaten Tapin (3,33 persen), Hulu Sungai Selatan (3,38 persen), dan Tanah Bumbu (3,41 persen).

2.3.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Pada tahun 2020, TPT tercatat sebesar 3,96% dan berhasil turun menjadi 3,76% pada tahun 2021. Perbaikan semakin terlihat pada tahun

2022 dengan capaian 3,35%, kemudian menurun lagi menjadi 3,26% pada tahun 2023. Hingga tahun 2024, TPT berhasil ditekan hingga 3,20%, menunjukkan adanya upaya nyata pemerintah daerah dalam memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Penurunan ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah, seperti pemberdayaan UMKM, optimalisasi sektor pertanian, perdagangan, serta upaya pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19. Secara keseluruhan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, TPT berhasil diturunkan sebesar 0,76 poin persentase atau sekitar 19,2% dari kondisi awal, yang berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Capaian ini menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah serta landasan penting dalam penyusunan target dan strategi pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025–2029.

Gambar 2. 21 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024



Sumber : Kompilasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Angka Tahun 2024

2.3.1.8 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah. IPM disusun berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur melalui Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH), yang menunjukkan rata-rata usia hidup yang diharapkan dapat dicapai oleh seseorang sejak lahir. Indikator ini mencerminkan kondisi kesehatan masyarakat secara umum dan diperoleh dari data hasil sensus serta survei kependudukan.

Dimensi pengetahuan dilihat dari dua indikator utama. Pertama, Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yaitu jumlah rata-rata tahun yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam mengikuti pendidikan formal. Kedua, Harapan Lama Sekolah (HLS), yaitu estimasi lama waktu (dalam tahun) yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak usia sekolah di masa mendatang.

Sementara itu, dimensi standar hidup layak diukur berdasarkan pengeluaran per kapita yang disesuaikan, yaitu rata-rata pengeluaran penduduk per tahun yang telah disesuaikan dengan daya beli (purchasing power parity/PPP), mencerminkan kemampuan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Ketiga dimensi tersebut digabungkan untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai kualitas hidup masyarakat suatu wilayah.

Selama periode lima tahun terakhir, yakni dari tahun 2020 hingga 2024, IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan tren yang terus meningkat. Pada tahun 2020, IPM tercatat sebesar 71,45 dan secara konsisten mengalami peningkatan hingga mencapai 73,33 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.

Perkembangan lebih rinci mengenai komponen penyusun IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama periode tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 12 Perkembangan IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024

Tahun	Angka Umur Harapan Hidup (Th)	Angka Harapan Sekolah (Th)	Rata-rata Lama Sekolah (Th)	Pengeluaran Riil Per Kapita (Rp.000,-)	IPM
2020	71,46	12,2	8	12.153	71,45
2021	71,66	12,21	8,01	12.280	71,67
2022	72	12,22	8,28	12.448	72,32
2023	72,33	12,24	8,29	12.782	72,76
2024	72,60	12,68	8,52	13.176,	73,33

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dalam Angka Tahun 2024

Pada tahun 2020, Angka Umur Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tercatat sebesar 71,46 tahun. Angka ini menunjukkan peningkatan secara konsisten selama lima tahun terakhir, hingga mencapai 72,60 tahun pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pelayanan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.

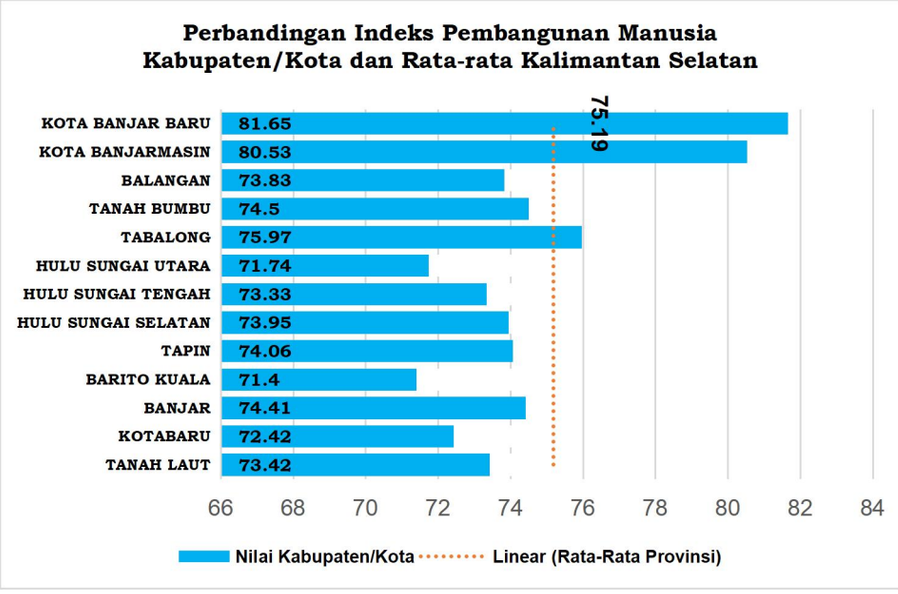
Angka Harapan Sekolah (HLS), yang mencerminkan estimasi lama pendidikan yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak-anak usia sekolah, juga mengalami peningkatan. Dari 12,20 tahun pada 2020, angka ini naik secara bertahap menjadi 12,68 tahun pada 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan akses dan kualitas pendidikan dasar dan menengah di daerah tersebut.

Selanjutnya, Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yaitu jumlah tahun rata-rata pendidikan yang telah diselesaikan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas, meningkat dari 8,00 tahun pada tahun 2020 menjadi 8,52 tahun pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang mengenyam pendidikan lebih lama.

Dari sisi ekonomi, Pengeluaran Riil Per Kapita yang Disesuaikan mengalami kenaikan dari Rp12.153.000 pada tahun 2020 menjadi Rp13.176.000 pada tahun 2024. Angka ini mencerminkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, peningkatan yang terjadi pada masing-masing komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengindikasikan perkembangan positif kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. IPM daerah ini meningkat secara stabil dari 71,45 pada tahun 2020 menjadi 73,33 pada tahun 2024.

Tabel 2. 13 Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2024



Sumber : Diolah dari publikasi BPS Kalimantan Selatan,2025

Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Hulu Sungai Tengah tercatat sebesar 73,33, yang menempatkannya pada peringkat ke-10 dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Posisi ini menunjukkan bahwa meskipun IPM Hulu Sungai Tengah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, secara relatif masih berada di posisi menengah ke bawah dibandingkan daerah lain di provinsi ini.

Kota Banjarbaru menempati posisi tertinggi dengan IPM mencapai 81,65, disusul oleh Kota Banjarmasin (80,53), yang mencerminkan kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan kabupaten di daerah. Sementara itu, Kabupaten Barito Kuala mencatatkan IPM terendah di Kalimantan Selatan, yaitu sebesar 71,40.

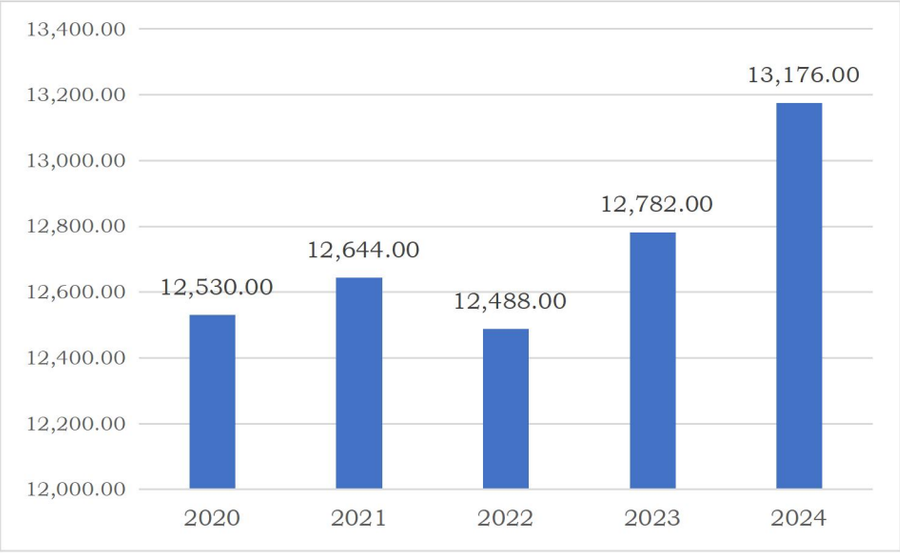
Jika dilihat dari klaster Banua Anam yang terdiri dari enam kabupaten, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada di

peringkat ke-5. Peringkat ini berada di atas Kabupaten Hulu Sungai Utara (71,74), namun masih tertinggal dari kabupaten-kabupaten lain di klaster tersebut. Kabupaten Tabalong menempati posisi tertinggi dengan IPM sebesar 75,97, menunjukkan capaian pembangunan manusia yang relatif lebih baik di wilayah tersebut.

2.3.1.9 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Indikator Pengeluaran per Kapita Disesuaikan memberikan gambaran kondisi hidup layak masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada tahun 2024, pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Hulu Sungai Tengah mencapai Rp13,016 juta per tahun naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,83 persen. Peningkatan pengeluaran per kapita yang disesuaikan ini sejalan dengan semakin terkendalinya pandemi COVID-19 sehingga roda perekonomian kembali berjalan.

Gambar 2. 22 Pengeluaran per Kapita Kabupaten Hulu Sungai Tengah Disesuaikan Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kab. Hulu Sungai Tengah, 2025

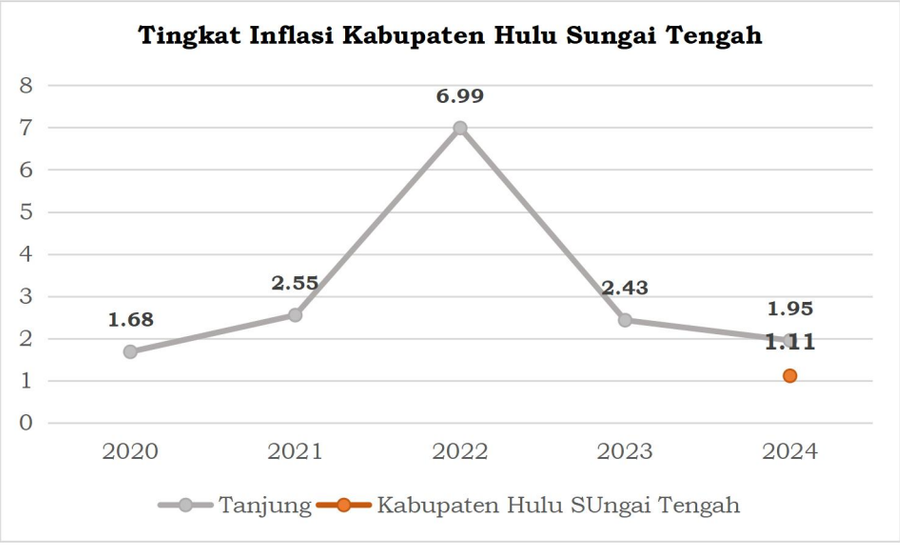
2.3.1.10 Inflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Terjadinya inflasi dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (administered price), terjadinya *negative supply shocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi,

tingginya permintaan barang dan jasa, dan perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Inflasi menggambarkan perubahan harga komoditi yang dihitung berdasarkan perubahan IHK (Indeks Harga Konsumen). IHK adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (defiasi) dari barang dan jasa.

Gambar 2. 23 Tingkat Inflasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024



Sumber : Diolah dari data BPS Kalimantan Selatan, 2025

Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan tingkat inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:

Tingkat inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada periode sebelum tahun 2024 masih merujuk pada ukuran inflasi di Kota Tanjung. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya pengukuran inflasi secara mandiri di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Namun, mulai tahun 2024, pengukuran inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah dilakukan secara tersendiri. Dengan demikian, data inflasi yang diperoleh menjadi lebih akurat dan mencerminkan kondisi riil perekonomian di wilayah tersebut.

BAB III
PROFIL KEMISKINAN

3.1 Konsep Kemiskinan

Secara umum kemiskinan dipandang sebagai kondisi dimana seseorang atau suatu keluarga berada dalam keadaan kekurangan dan atau ketidaklayakan hidup menurut standar-standar tertentu, ketidak atau kekurangmampuan fisik manusia, ketiadaan atau kekurangan akses dalam memperoleh pelayanan minimal dalam berbagai bidang kehidupan, serta sulit atau kurang memperoleh akses dalam proses-proses pengambilan kebijakan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), yaitu kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan (GK). Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis kemiskinan yang digunakan oleh BPS terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yang terdiri atas 52 jenis komoditi dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) yang terdiri dari 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan, di mana GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

3.2 Profil Makro Kemiskinan Daerah

3.2.1 Posisi Relatif Kemiskinan Daerah

Dilihat dari posisi relatif, Kabupaten Hulu Sungai Tengah termasuk daerah yang memiliki tingkat persentase kemiskinan yang relatif tinggi di Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2024 tingkat kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mencapai 5,81 % atau menempati urutan yang ke dua tertinggi di Kalimantan Selatan. Posisi relatif terhadap capaian kinerja

Kabupaten/Kota Lain di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

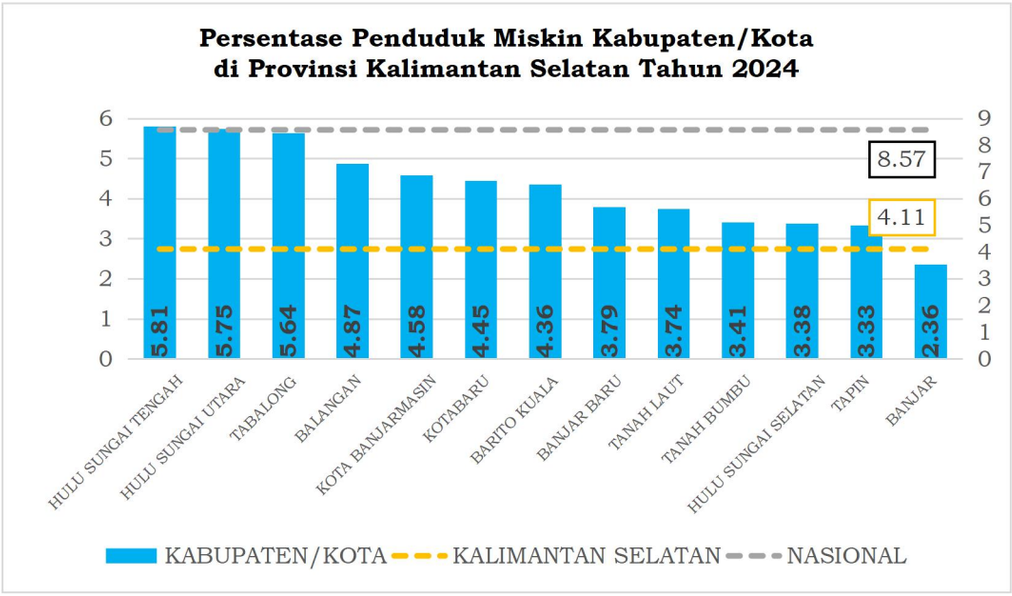
Tabel 3. 1 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin (%)

KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN TAHUN 2024
NASIONAL	8.57
HULU SUNGAI TENGAH	5,81
HULU SUNGAI UTARA	5,75
TABALONG	5,64
BALANGAN	4,87
KOTA BANJARMASIN	4,58
KOTABARU	4,45
BARITO KUALA	4,36
KALIMANTAN SELATAN	4,11
BANJAR BARU	3,79
TANAH LAUT	3,74
TANAH BUMBU	3,41
HULU SUNGAI SELATAN	3,38
TAPIN	3,33
BANJAR	2,36

Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, 2025

Kabupaten tertinggi persentase kemiskinan adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (5,81 %) dan yang terendah adalah Kabupaten Banjar (2,36 %). Posisi relatif persentase kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah lebih tinggi dari persentase kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan (4,11 %) dan berada di bawah persentase kemiskinan nasional (8,57 %). Secara grafik hal ini dapat dilihat pada Gambar 3. 1 di bawah ini:

Gambar 3. 1 Grafik Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024



Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, 2025

Posisi relatif capaian target penduduk miskin tahun 2024 terhadap target penduduk miskin pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 2 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Tahun 2024 dengan RPJMD Tahun 2025 – 2029

KABUPATEN/KOTA	TARGET AKHIR RPJMD TAHUN 2021 - 2026 (%)	CAPAIAN TAHUN 2024 (%)	DEVIASI (%)
HULU SUNGAI TENGAH	4,5	5,81	-1,31

Sumber : Dokumen RPJMD Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2025

Dari target akhir RPJMD periode tahun 2021 - 2026 sebesar 4,5 %, maka terjadi deviasi capaian sebesar -1,31 %. Deviasi ini menjadi signifikan karena alih-alih terjadi pengurangan, tingkat kemiskinan justru menunjukkan tren kenaikan jika dihitung dari kondisi awal perencanaan tahun 2020 yang sebesar 5,64%. Kegagalan mencapai target bahkan sudah terjadi sejak tahun pertama, di mana target tahun 2021 sebesar 5,5% tidak tercapai karena realisasinya adalah 6,24%.

Pada tahun 2024, ditinjau dari garis kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) tercatat sebesar Rp513.950,00 per kapita per bulan, menempatkannya sebagai kabupaten dengan garis kemiskinan terendah kedua di Provinsi Kalimantan Selatan, sedikit di atas Kabupaten Barito Kuala yang berada pada Rp437.579,00. Nilai ini berada di bawah rata-rata provinsi sebesar Rp632.739,00 dan juga lebih rendah dari garis kemiskinan nasional yang mencapai Rp595.242,00. Posisi tersebut menunjukkan bahwa ambang batas minimum pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin di HST relatif lebih rendah dibandingkan sebagian besar kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan, seperti Kota Banjarbaru (Rp781.405,00) dan Kota Banjarmasin (Rp743.872,00). Masing-masing besaran garis kemiskinan kabupaten/kota seperti terlihat pada tabel berikut.

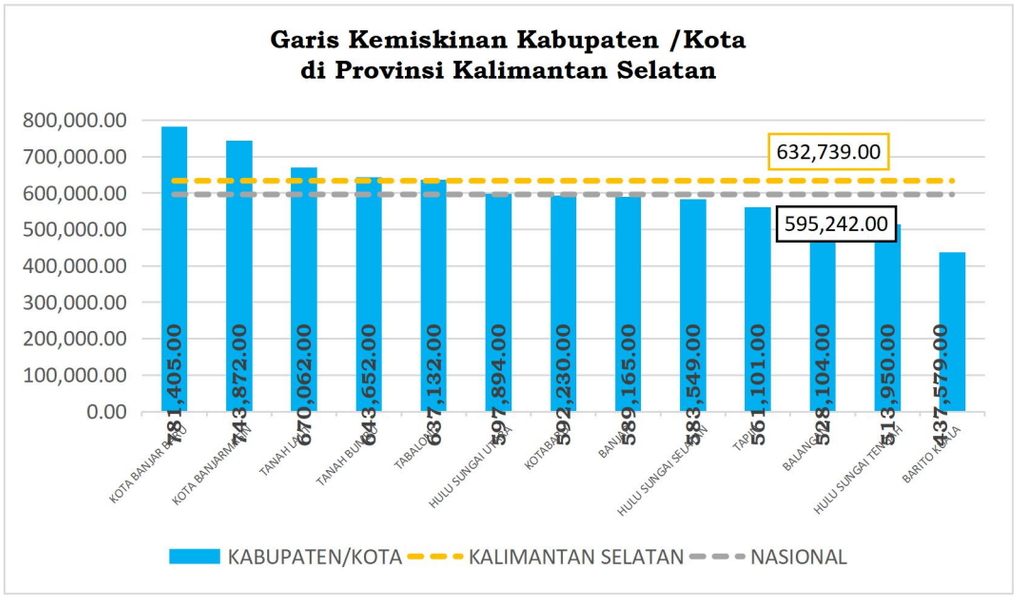
Tabel 3. 3 Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

KABUPATEN/KOTA	GARIS KEMISKINAN (Rp)
NASIONAL	595,242.00
KOTA BANJAR BARU	781.405,00
KOTA BANJARMASIN	743.872,00
TANAH LAUT	670.062,00
TANAH BUMBU	643.652,00
TABALONG	637.132,00
KALIMANTAN SELATAN	**632.739,00**
HULU SUNGAI UTARA	597.894,00
KOTABARU	592.230,00
BANJAR	589.165,00
HULU SUNGAI SELATAN	583.549,00
TAPIN	561.101,00
BALANGAN	528.104,00
HULU SUNGAI TENGAH	**513.950,00**
BARITO KUALA	437.579,00

Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, 2025

Persentase kemiskinan di Hulu Sungai Tengah berada pada posisi pertama tertinggi tetapi garis kemiskinannya berada pada posisi ke-12 terendah, dilihat dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Dibandingkan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara, persentase kemiskinannya berada pada posisi ke-2 tertinggi dengan garis kemiskinan berada pada posisi ke-6. atau posisi Kabupaten Tabalong dengan persentase kemiskinan di peringkat ke-3 tertinggi dengan garis kemiskinan berada di posisi ke-5. Dengan demikian apabila diukur dengan garis kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan, bahwa persentase kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah lebih besar dari Kabupaten Tabalong dan Hulu Sungai Utara. Secara grafik untuk masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan dapat terlihat pada gambar berikut.

Gambar 3. 2 Grafik Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kabupaten /Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024



Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, hasil olahan 2025

Tingkat kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2024 adalah sebesar 0,745. Dari tingkat kedalaman kemiskinan ini maka posisi relatif Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah berada pada peringkat ke-4 dibandingkan dengan tingkat kedalaman kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Tingkat kedalaman kemiskinan tertinggi adalah di Kota Balangan (0,849) dan yang terendah adalah Kabupaten Banjar (0,326). Tingkat kedalaman kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih lebih rendah dari tingkat kedalaman kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan (0,571). Masing-masing besaran tingkat kedalaman kemiskinan kabupaten/kota seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 4 Posisi Relatif Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Selatan

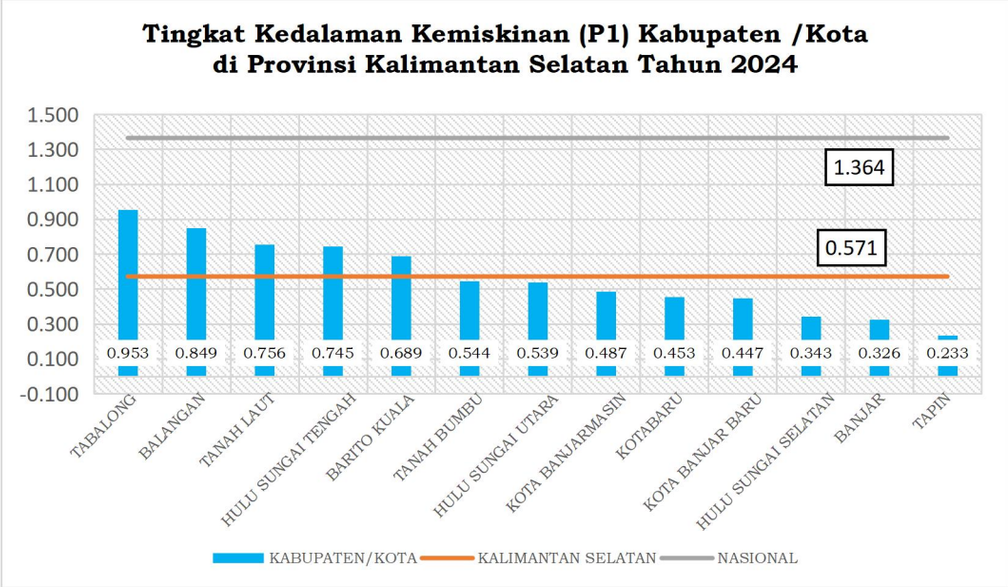
KABUPATEN/KOTA	TINGKAT KEDALAMAN KEMISKINAN (P1)
NASIONAL	1,364
TABALONG	0,953
BALANGAN	0,849
TANAH LAUT	0,756
HULU SUNGAI TENGAH	0,745
BARITO KUALA	0,689
KALIMANTAN SELATAN	0,571
TANAH BUMBU	0,544
HULU SUNGAI UTARA	0,539
KOTA BANJARMASIN	0,487
KOTABARU	0,453

KABUPATEN/KOTA	TINGKAT KEDALAMAN KEMISKINAN (P1)
KOTA BANJAR BARU	0,447
HULU SUNGAI SELATAN	0,343
BANJAR	0,326
TAPIN	0,233

Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, hasil olahan 2025

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih cukup tinggi kedalamannya dibandingkan dengan kondisi kemiskinan di kabupaten/kota lainnya. Dari grafik dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3. 3 Grafik Posisi Relatif Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten /Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024



Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, hasil olahan 2025

Tingkat keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2024 adalah sebesar 0,141. Dari tingkat keparahan kemiskinan ini maka posisi relatif Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah berada pada peringkat ke-9 terendah atau peringkat ke 6 tertinggi dibandingkan dengan tingkat keparahan kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Tingkat keparahan kemiskinan tertinggi adalah di Kota Tanah Laut (0,205) dan yang terendah adalah Kabupaten Tapin (0,031). Tingkat keparahan kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah lebih tinggi dari tingkat kedalaman kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan (0,116). Masing-masing besaran tingkat kedalaman kemiskinan kabupaten/kota seperti terlihat pada tabel berikut.

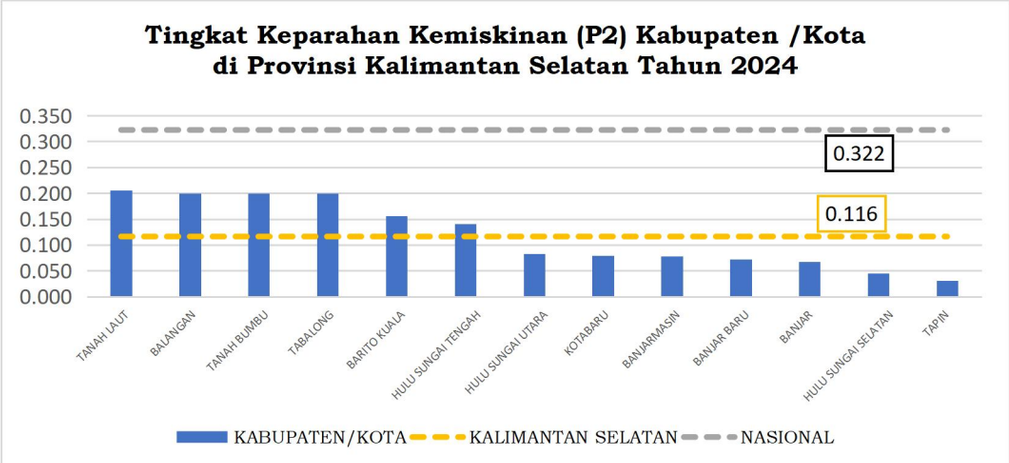
Tabel 3. 5 Posisi Relatif Tingkat Kedalaman Keparahan (P2) Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

KABUPATEN/KOTA	TINGKAT KEPARAHAN KEMISKINAN (P2)
NASIONAL	0,322
TANAH LAUT	0,205
BALANGAN	0,200
TANAH BUMBU	0,199
TABALONG	0,199
BARITO KUALA	0,156
HULU SUNGAI TENGAH	0,141
KALIMANTAN SELATAN	0,116
HULU SUNGAI UTARA	0,083
KOTABARU	0,079
BANJARMASIN	0,078
BANJAR BARU	0,072
BANJAR	0,067
HULU SUNGAI SELATAN	0,045
TAPIN	0,031

Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, hasil olahan 2025

Dengan besaran tingkat keparahan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah 0,141 maka kondisi kemiskinan cukup tinggi dibandingkan dengan kondisi rata-rata kemiskinan di Kalimantan Selatan, tetapi relatif sedang apabila dibandingakan dengan kondisi nacional. Seperti tingkat kedalaman kemiskinan, maka kondisi antar penduduk miskin tidak berbeda jauh atau relatif sama kondisi kemiskinannya. Secara relatif penduduk yang sangat miskin sangat sedikit dan gap antar penduduk miskin tidak terlalu jauh. Secara grafik kondisi keparahan kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3. 4 Grafik Posisi Relatif Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten /Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024



Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, hasil olahan 2025

3.2.2 Perkembangan Antar Waktu Kemiskinan dan Analisis Relevansi Kemiskinan

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) selama periode 2015–2024 menunjukkan pola yang relatif stabil di kisaran 15–16 ribu jiwa. Nilai tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 16.770 jiwa, sementara nilai terendah muncul pada 2020 sebesar 15.470 jiwa. Fluktuasi ini tidak membentuk tren kenaikan atau penurunan yang konsisten, tetapi memperlihatkan dinamika tahunan yang cenderung berada pada rentang sempit. Stabilitas jumlah secara absolut ini menjadi ciri utama kondisi kemiskinan di HST dalam sepuluh tahun terakhir.

Masing-masing besaran perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan persentase kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 6 Perkembangan Antar Waktu Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten, Provinsi, Nasional Tahun 2015 - 2024

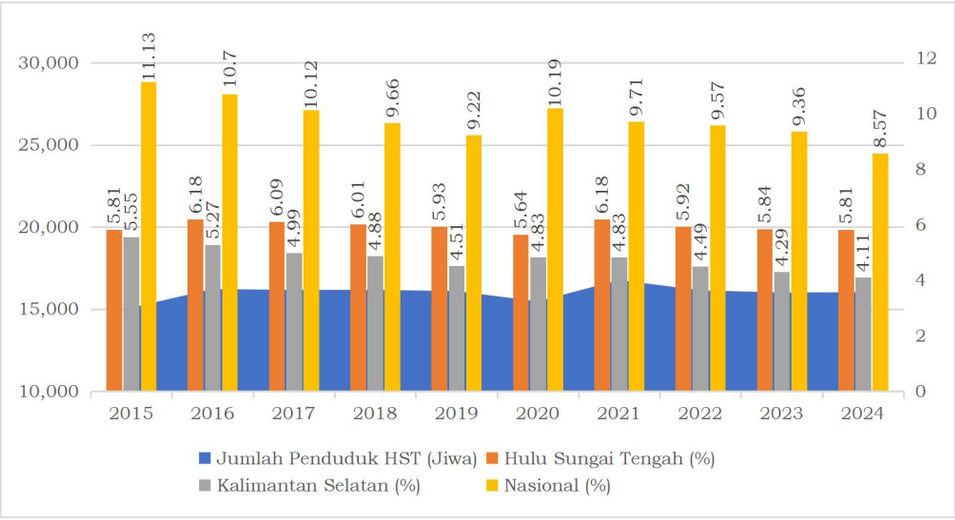
Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Tingkat Kemiskinan (%)		
		HST	Provinsi	Nasional
2015	15.080	5,81	5.55	11.13
2016	16.220	6,18	5.27	10.7
2017	16.169	6,09	4.99	10.12
2018	16.170	6,01	4.88	9.66
2019	16.096	5,93	4.51	9.22
2020	15.470	5,64	4.83	10.19
2021	16.770	6,18	4.83	9.71
2022	16 144	5,92	4.49	9.57
2023	16.008	5,84	4.29	9.36
2024	16.027	5,81	4.11	8.57

Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, Olahan Data 2025

Relevansi perkembangan antar level menunjukkan bahwa HST bergerak dengan pola yang berbeda dibandingkan provinsi maupun nasional. Provinsi menunjukkan penurunan yang lebih konsisten terutama sejak 2017, sedangkan nasional menunjukkan tren menurun jangka panjang yang cukup jelas. Sebaliknya, HST lebih menggambarkan stabilitas dengan fluktuasi kecil tanpa tren menurun yang kuat. Dengan demikian, dibandingkan provinsi dan nasional, dinamika HST lebih bersifat datar dan tidak mengikuti arah penurunan signifikan yang terjadi pada tingkat provinsi maupun nasional.

Pada periode 2015–2024, perkembangan tingkat kemiskinan menunjukkan pola yang berbeda antar level HST, provinsi, dan nasional. Di HST, persentase kemiskinan bergerak dalam rentang yang relatif sempit, dari 5,81 persen pada 2015 naik ke 6,18 persen pada 2016, lalu menurun bertahap menjadi 5,64 persen pada 2020, meningkat kembali ke 6,18 persen pada 2021, dan kemudian turun lagi hingga kembali berada pada angka 5,81 persen pada 2024. Di tingkat provinsi, garis tren terlihat cenderung menurun: dari 5,55 persen pada 2015 menurun hampir setiap tahun menjadi 4,51 persen pada 2019, sedikit naik ke 4,83 persen pada 2020–2021, kemudian kembali turun hingga mencapai 4,11 persen pada 2024. Pada level nasional, persentase kemiskinan turun dari 11,13 persen pada 2015 menjadi 9,22 persen pada 2019, sempat naik menjadi 10,19 persen pada 2020 dan 9,71 persen pada 2021, lalu kembali turun secara bertahap hingga 8,57 persen pada 2024.

Gambar 3. 5 Grafik Perkembangan Antar Waktu Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015 - 2024



Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, hasil olahan 2025

Garis kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan kecenderungan meningkat secara konsisten sepanjang periode 2015–2024. Pada tahun 2015 garis kemiskinan tercatat sebesar Rp279.530,00 dan naik menjadi Rp322.392,00 (2016), Rp341.024,00 (2017), serta Rp354.214,00 (2018). Kenaikan berlanjut pada 2019 sebesar Rp365.008,00, kemudian meningkat cukup tajam menjadi Rp417.778,00 pada

2020 dan Rp425.438,00 pada 2021. Pada tahun-tahun berikutnya, nilai garis kemiskinan terus bertambah menjadi Rp444.331,00 (2022), Rp475.655,00 (2023), dan mencapai Rp513.950,00 pada 2024. Secara kumulatif, garis kemiskinan HST meningkat Rp234.420,00 dalam sepuluh tahun, atau rata-rata sekitar Rp26.000,00 per tahun, sehingga memberikan gambaran kuantitatif yang jelas mengenai dinamika kebutuhan pengeluaran minimum penduduk di wilayah ini.

Tabel 3. 7 Perbandingan Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2015 - 2024

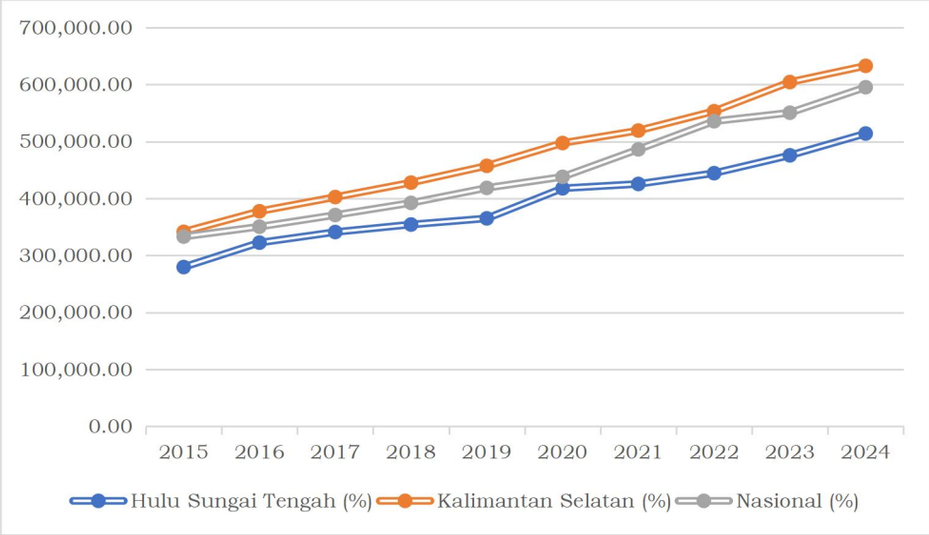
TAHUN	HST	KALSEL	NASIONAL
2015	279,530.00	341,350.00	333,034.00
2016	322,392.00	377,480.00	350,420.00
2017	341,024.00	402,424.00	370,910.00
2018	354,214.00	427,774.00	392,154.00
2019	365,008.00	457,222.00	418,515.00
2020	417,778.00	497,262.00	437,902.00
2021	425,438.00	519,150.00	486,168.00
2022	444,331.00	553,073.00	535,547.00
2023	475,655.00	604,266.00	550,458.00
2024	513,950.00	632,739.00	595,242.00

Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, Olahan Data 2025

Dari sisi perbandingan antarlevel, nilai garis kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah secara konsisten berada di bawah nilai provinsi dan nasional pada seluruh tahun pengamatan. Pada 2015, garis kemiskinan HST sebesar Rp279.530,00, sedangkan Kalimantan Selatan dan nasional masing-masing sebesar Rp341.350,00 dan Rp333.034,00. Pada 2024, urutan tersebut tetap sama dengan nilai Rp513.950,00 untuk HST, Rp632.739,00 untuk Kalimantan Selatan, dan Rp595.242,00 untuk nasional. Selisih antara HST dan Kalimantan Selatan meningkat dari Rp61.820,00 (2015) menjadi Rp118.789,00 (2024), sementara selisih antara HST dan nasional bertambah dari Rp53.504,00 menjadi Rp81.292,00 pada periode yang sama. Perbedaan numerik ini tercermin jelas pada Gambar 3.6, di mana kurva HST berada di posisi terbawah, kurva nasional di tengah, dan kurva Kalimantan Selatan di bagian atas, sehingga memberikan konteks komparatif yang penting bagi

analisis kebijakan penanggulangan kemiskinan lintas level wilayah. Secara grafik dapat di lihat sebagai berikut.

Gambar 3. 6 Grafik Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2015 – 2024



Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, hasil olahan 2025

Tingkat kedalaman kemiskinan menggambarkan rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sehingga menjadi indikator penting untuk menilai seberapa jauh kondisi penduduk miskin dari batas pengeluaran minimum yang dibutuhkan Tabel 3.8 menyajikan perkembangan tingkat kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan nasional selama periode 2015–2024.

Tabel 3. 8 Perbandingan Perkembangan Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2015 - 2024

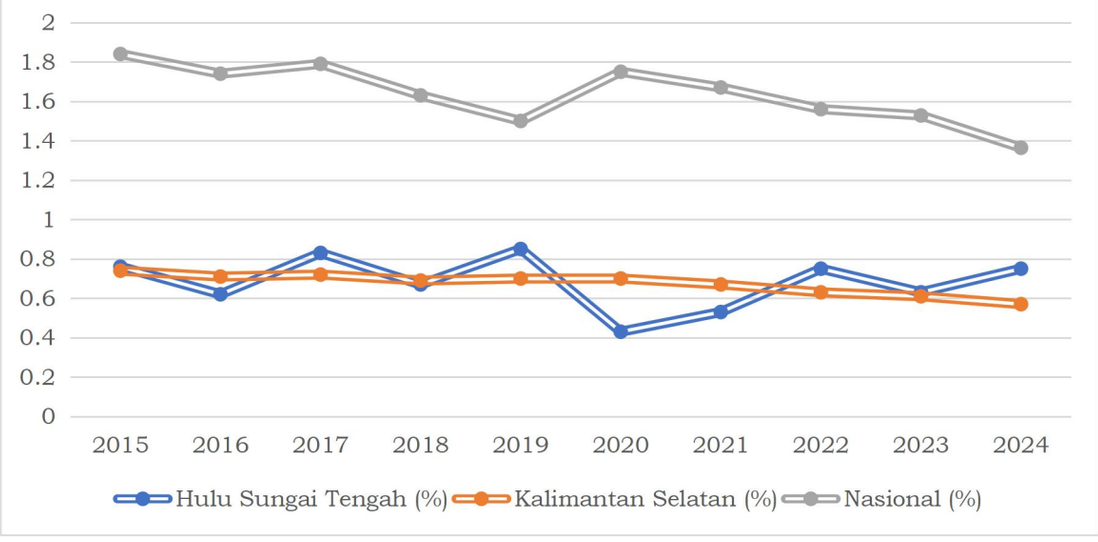
Tahun	HST	KALSEL	NASIONAL
2015	0.76	0.74	1.84
2016	0.62	0.71	1.74
2017	0.83	0.72	1.79
2018	0.67	0.69	1.63
2019	0.85	0.7	1.5
2020	0.43	0.7	1.75
2021	0.53	0.67	1.67
2022	0.75	0.63	1.56
2023	0.63	0.61	1.528
2024	0.75	0.57	1.364

Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, Olahan Data 2025

Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tingkat kedalaman kemiskinan menunjukkan pola yang berfluktuasi sepanjang periode pengamatan. Pada 2015, nilainya tercatat 0,76 lalu menurun menjadi 0,62 pada 2016. Pada 2017 terjadi kenaikan menjadi 0,83 dan kembali turun ke 0,67 pada 2018. Tahun 2019 mencatat nilai tertinggi sepanjang periode yaitu 0,85, kemudian turun tajam menjadi 0,43 pada 2020 yang merupakan nilai terendah. Setelah itu, indikator ini naik ke 0,53 pada 2021, meningkat lagi ke 0,75 pada 2022, turun ke 0,63 pada 2023, dan kembali berada pada angka 0,75 pada 2024. Dibandingkan awal periode (0,76 pada 2015), nilai pada 2024 relatif berada pada tingkat yang hampir sama, yaitu 0,75.

Dari sisi relevansi antarlevel, nilai tingkat kedalaman kemiskinan nasional berada pada posisi tertinggi sepanjang periode pengamatan, yakni dalam rentang 1,364–1,84, lebih besar daripada HST maupun Kalimantan Selatan pada setiap tahun. Dibandingkan dengan provinsi, nilai HST pada 2015, 2017, 2019, 2022, 2023, dan 2024 masing-masing lebih tinggi daripada Kalimantan Selatan, sedangkan pada 2016, 2018, 2020, dan 2021 lebih rendah. Pada 2015 misalnya, HST sebesar 0,76 dan Kalimantan Selatan 0,74, sementara nasional 1,84; pada 2024 HST berada di angka 0,75, Kalimantan Selatan 0,57, dan nasional 1,364.

Gambar 3. 7 Grafik Perkembangan Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2015 – 2024



Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, hasil olahan 2025

Tingkat keparahan kemiskinan (P2) mengukur penyebaran jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan memperhitungkan ketimpangan di antara rumah tangga miskin, sehingga menjadi indikator penting untuk menilai konsentrasi dan kerentanan kemiskinan. Tabel 3.9 menyajikan perkembangan tingkat keparahan kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan nasional selama periode 2015–2024.

Tabel 3. 9 Perbandingan Perkembangan Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2015 - 2024

Tahun	HST	KALSEL	NASIONAL
2015	0.15	0.18	0.51
2016	0.1	0.16	0.44
2017	0.15	0.16	0.46
2018	0.12	0.16	0.41
2019	0.19	0.15	0.36
2020	0.06	0.16	0.47
2021	0.09	0.13	0.42
2022	0.15	0.133	0.379
2023	0.14	0.158	0.377
2024	0.14	0.116	0.322

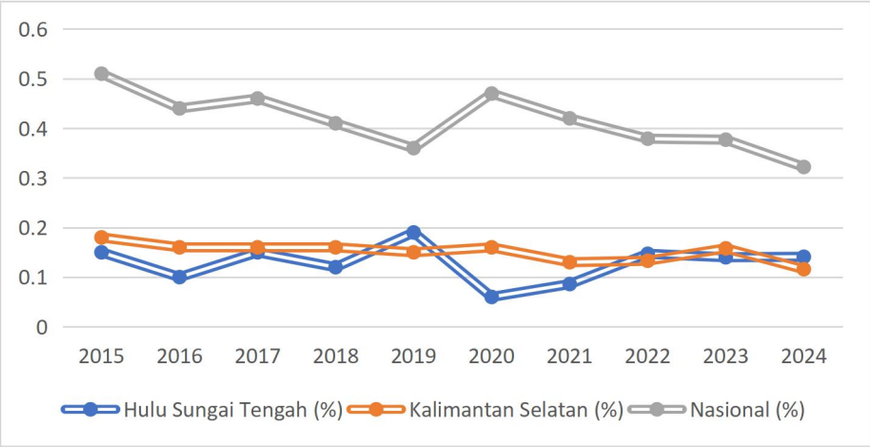
Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, Olahan Data 2025

Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tingkat keparahan kemiskinan menunjukkan pola yang berfluktuasi dalam rentang nilai yang relatif rendah. Pada 2015, nilai P2 tercatat sebesar 0,15 dan menurun menjadi 0,10 pada 2016. Tahun 2017 terjadi kenaikan kembali ke 0,15, kemudian sedikit turun menjadi 0,12 pada 2018. Pada 2019 nilai P2 mencapai 0,19 yang merupakan nilai tertinggi sepanjang periode, lalu turun tajam menjadi 0,06 pada 2020 yang menjadi nilai terendah. Setelah itu, angka keparahan kemiskinan meningkat menjadi 0,09 pada 2021, naik lagi ke 0,15 pada 2022, dan sedikit menurun menjadi 0,14 pada 2023 serta bertahan di 0,14 pada 2024. Dibandingkan tahun awal, nilai P2 pada 2024 sama dengan kisaran tahun awal periode (0,14–0,15).

Dari sisi perbandingan antarlevel, nilai tingkat keparahan kemiskinan nasional secara konsisten berada pada posisi tertinggi sepanjang periode, dengan rentang 0,322–0,51, lebih besar daripada nilai Kabupaten Hulu Sungai Tengah maupun

Kalimantan Selatan pada setiap tahun. Dibandingkan dengan provinsi, nilai P2 HST pada 2015–2018, 2020, 2021, dan 2023 lebih rendah daripada Kalimantan Selatan, sedangkan pada 2019, 2022, dan 2024 lebih tinggi. Sebagai ilustrasi, pada 2015 HST mencatat nilai 0,15, Kalimantan Selatan 0,18, dan nasional 0,51; pada 2024 HST berada pada angka 0,14, Kalimantan Selatan 0,116, dan nasional 0,322. Perbedaan numerik ini tergambar jelas pada Gambar 3.8, di mana kurva nasional berada di bagian atas, sementara kurva HST dan Kalimantan Selatan saling berpotongan mengikuti variasi nilai P2 yang tercantum pada Tabel 3.9, sehingga memberikan konteks komparatif yang berguna bagi analisis kebijakan pengurangan keparahan kemiskinan lintas level wilayah.

Gambar 3. 8 Grafik Perkembangan Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2015 - 2024



Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, hasil olahan 2025

3.2.3 Analisis Efektivitas Perkembangan Kemiskinan

Perkembangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada dua periode RPJMD terakhir menunjukkan kecenderungan penurunan, meskipun dengan besaran yang berbeda. Pada periode 2016–2020, jumlah penduduk miskin menurun dari 16.220 jiwa pada tahun ke-1 menjadi 15.470 jiwa pada tahun ke-5, atau berkurang 750 jiwa. Pada periode 2021–2026 (data 2021–2024), jumlah penduduk miskin turun dari 16.770 jiwa pada tahun ke-1 menjadi 16.027 jiwa pada tahun ke-4, atau berkurang 743 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang berjumlah 15.080 jiwa, jumlah penduduk miskin pada

tahun 2020 (15.470 jiwa) dan 2024 (16.027 jiwa) masih sedikit lebih besar, namun kedua periode RPJMD menunjukkan arah penurunan di dalam masing-masing periode.

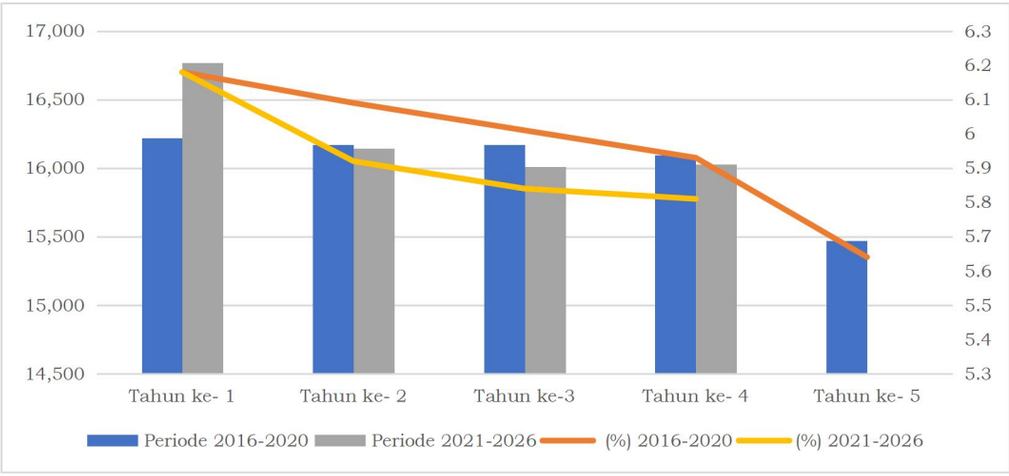
Tabel 3. 10 Perbandingan Jumlah dan Persentase Kemiskinan Antar Periode Pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Tahun	Periode 2016-2020	%	Periode 2021-2026	%
Tahun ke- 1	16,220	6.18	16,770	6.18
Tahun ke- 2	16,169	6.09	16,144	5.92
Tahun ke-3	16,170	6.01	16,008	5.84
Tahun ke- 4	16,096	5.93	16,027	5.81
Tahun ke- 5	15,470	5.64	N/A	N/A

Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, Olahan Data 2025

Secara persentase, periode 2016–2020 mencatat penurunan dari 6,18 persen pada tahun ke-1 menjadi 5,64 persen pada tahun ke-5. Periode 2021–2026 menunjukkan penurunan dari 6,18 persen (tahun ke-1) menjadi 5,81 persen (tahun ke-4). Rata-rata persentase kemiskinan periode 2016–2020 sekitar 5,97 persen, sedangkan periode 2021–2026 sekitar 5,94 persen. Pada tahun 2020, dengan jumlah penduduk miskin lebih besar daripada 2015, persentase kemiskinan justru lebih rendah (5,64 persen dibanding 5,81 persen). Berdasarkan angka-angka ini, penurunan persentase kemiskinan selama 2016–2020 lebih besar dibanding penurunan selama 2021–2024, meskipun kedua periode sama-sama bergerak ke arah yang menurun. Perbandingan perkembangan penduduk miskin antar periode dapat di lihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 3. 9 Grafik Perkembangan Penduduk Miskin Antar Periode Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah



Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, hasil olahan 2025

Secara grafik, perkembangan kedalaman kemiskinan antarperiode dapat dilihat pada Gambar di atas. P1 periode 2016–2020 menunjukkan fluktuasi, tetapi berakhir pada titik yang lebih rendah pada tahun ke-5. Periode 2021–2024 juga terjadi fluktuasi dengan kisaran nilai sedikit di atas 0,6 dan belum menunjukkan penurunan serendah 0,43 sebagaimana tahun 2020. Pola ini sejalan dengan data, yaitu bahwa perbaikan kedalaman kemiskinan yang paling besar dari awal ke akhir periode terjadi pada RPJMD 2016–2020, sementara RPJMD 2021–2026 hingga tahun 2024 masih berada pada tingkat kedalaman yang relatif serupa dengan nilai rata-ratanya.

Arah perubahan capaian pengentasan penduduk miskin periode 2021 - 2026 semakin membaik, terjadi penurunan jumlah penduduk dan persentase tingkat kemiskinan. Dengan demikian kebijakan pengentasan kemiskinan pada periode tahun 2021 - 2026 perlu dioptimalkan agar bisa kembali menyentuh nilai atau penguarangannya melebihi dengan tahun ke-5 periode 2016-2020. Perbandingan kedalaman kemiskinan antar periode pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 11 Perbandingan Kedalaman Kemiskinan Antar Periode Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

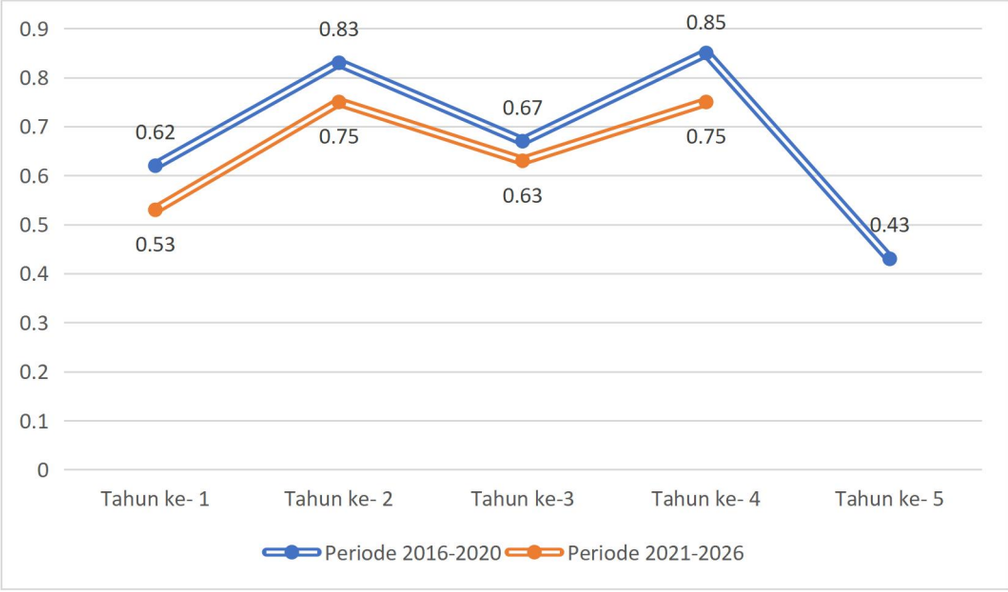
Tahun	Periode 2016-2020	Periode 2021-2026
Tahun ke- 1	0.62	0.53
Tahun ke- 2	0.83	0.75
Tahun ke-3	0.67	0.63
Tahun ke- 4	0.85	0.75
Tahun ke- 5	0.43	N/A

Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, Olahan Data 2025

Pada periode pembangunan 2016–2020, tingkat kedalaman kemiskinan (P1) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah bergerak dari 0,62 pada awal periode (tahun 2016) menjadi 0,43 pada akhir periode (tahun 2020), dengan pola fluktuatif tiap tahun. Rata-rata kedalaman kemiskinan pada periode ini adalah 0,68. Pada periode pembangunan 2021–2026, kedalaman kemiskinan tercatat sebesar 0,53 pada tahun ke-1, meningkat menjadi 0,75 pada tahun ke-2, turun ke 0,63 pada tahun ke-3, dan kembali berada di angka 0,75 pada tahun ke-4, dengan rata-rata sekitar

0,67. Dengan demikian, secara rata-rata tingkat kedalaman kemiskinan pada periode 2021–2026 sedikit lebih rendah dibanding periode 2016–2020, meskipun nilai P1 pada akhir periode 2016–2020 (0,43 pada tahun 2020) masih lebih rendah dibanding nilai terakhir yang tersedia pada periode 2021–2026 (0,75 pada tahun 2024). Secara grafik perkembangan kedalaman kemiskinan antar periode pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3. 10 Grafik Perkembangan Kedalaman Kemiskinan Antar Periode Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah



Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, hasil olahan 2025

Tingkat keparahan kemiskinan antar periode pembangunan perkembangannya juga masih berfluktuasi seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 12 Perbandingan Keparahan Kemiskinan Antar Periode Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

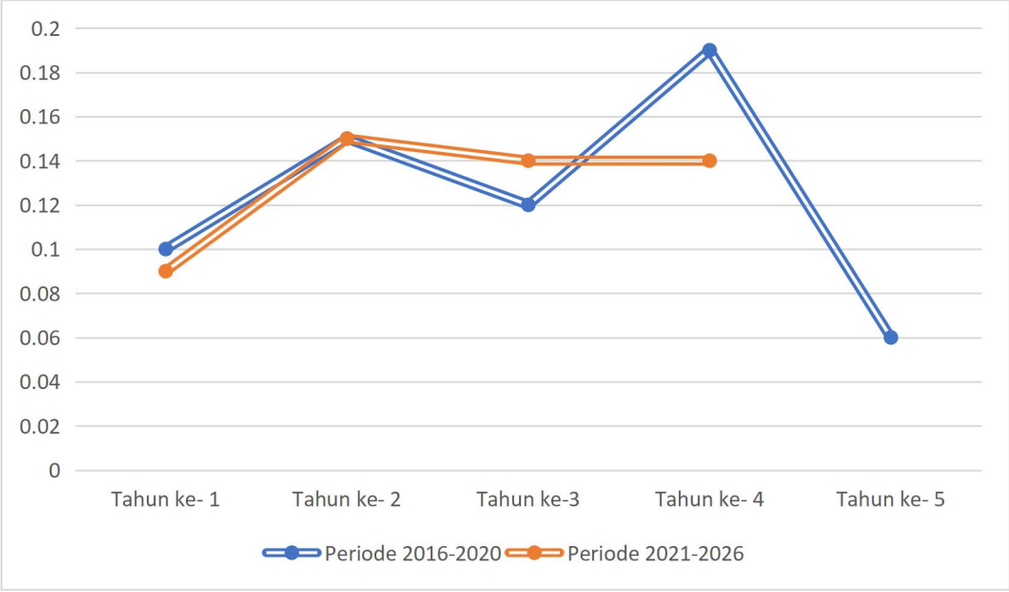
Tahun	Periode 2016-2020	Periode 2021-2026
Tahun ke- 1	0.1	0.09
Tahun ke- 2	0.15	0.15
Tahun ke-3	0.12	0.14
Tahun ke- 4	0.19	0.14
Tahun ke- 5	0.06	N/A

Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, Olahan Data 2025

Perbandingan keparahan kemiskinan antarperiode pembangunan disajikan dalam Tabel 3.10. Pada periode 2016–2020, tingkat keparahan kemiskinan (P2) tercatat 0,10; 0,15;

0,12; 0,19; dan 0,06 dari tahun ke-1 hingga tahun ke-5, dengan rata-rata sekitar 0,12. Pada periode 2021–2026 (data 2021–2024), nilai P2 adalah 0,09; 0,15; 0,14; dan 0,14, dengan rata-rata sekitar 0,13. Kedua periode sama-sama berada pada tingkat keparahan kemiskinan yang rendah, namun nilai akhir 2020 (0,06) merupakan titik terendah dalam dua periode tersebut, sedangkan nilai terakhir yang tersedia pada 2024 masih berada di angka 0,14. Secara grafik perkembangan keparahan kemiskinan antar periode pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3. 11 Grafik Perkembangan Keparahan Kemiskinan Antar Periode Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah



Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, hasil olahan 2025

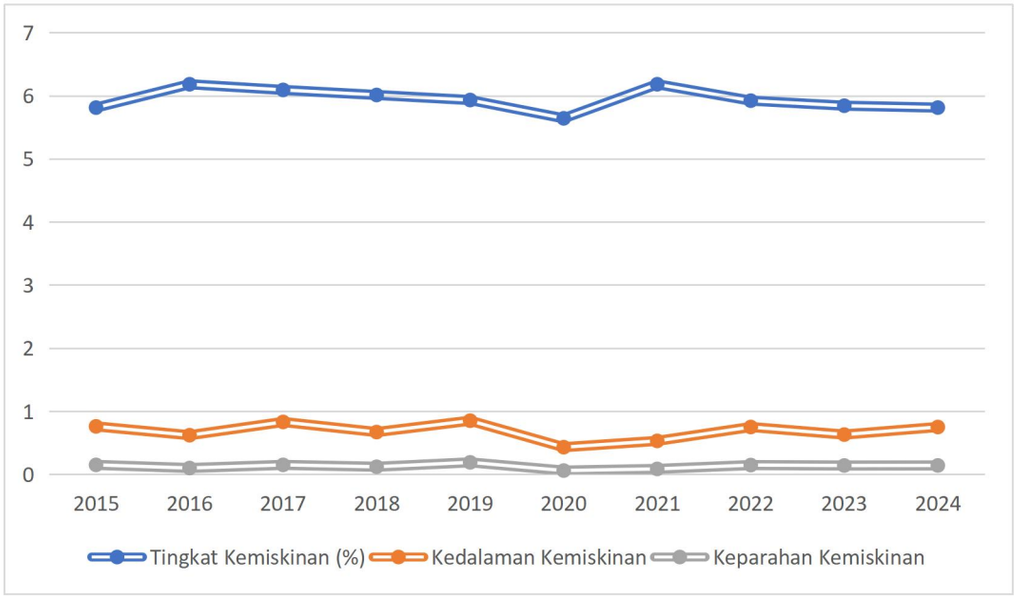
Analisis keterkaitan indikator kemiskinan terhadap 4 (empat) perspektif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2015-2024 dan Grafik antar parameter kemiskinan dapat dilihat pada **Tabel 3. 13** dan **Gambar 3. 12** berikut:

Tabel 3. 13 Keterkaitan Parameter Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Parameter	Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi	Keterkaitan
Jumlah Penduduk Miskin	Tertinggi Kedua di Kalsel (±16.027 jiwa pada 2024), mencerminkan beban absolut kemiskinan masih cukup besar di provinsi.	Fluktuatif 2015–2024 dalam kisaran 15–116 ribu jiwa. Dalam RPJMD 2016–2020 dan 2021–2026 sama-sama terjadi penurunan dari awal ke akhir periode, tetapi	Cukup efektif	Cukup relevan	Naik turun mengikuti kombinasi perubahan P1, P2, dan garis kemiskinan. Penurunan P1 dan P2 (seperti 2020) berkorelasi dengan jumlah miskin terendah; ketika

Parameter	Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi	Keterkaitan
		level akhir masih sedikit di atas 2015.			P1/P2 naik, penurunan jumlah miskin melemah.
Persentase Penduduk Miskin	Tertinggi di kalsel dengan 5,81; di atas rata-rata provinsi, di bawah nasional. Menunjukkan tingkat kemiskinan relatif paling berat di Kalsel.	Pola fluktuatif tanpa tren penurunan kuat: naik di awal periode, turun bertahap 2016–2020, naik kembali 2021, dan turun lagi hingga 5,81% pada 2024. Rata-rata dua periode RPJMD hampir sama.	Cukup efektif	Cukup relevan terhadap provinsi dan nasional	Ditentukan oleh jumlah miskin dan total penduduk. Dapat menurun walaupun jumlah miskin naik jika pertumbuhan penduduk lebih cepat. Perubahan P1 dan P2 memengaruhi persentase melalui masuk-keluar garis kemiskinan.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Peringkat tinggi di Kalsel dan sering di atas rata-rata provinsi; di bawah nilai nasional. Menunjukkan jarak pengeluaran rumah tangga miskin HST terhadap garis kemiskinan relatif besar.	Berfluktuasi kuat, dengan titik terendah 0,43 (2020) dan tertinggi 0,85 (2019). Nilai awal (0,76 pada 2015) dan akhir (0,75 pada 2024) hampir sama; rata-rata dua periode RPJMD hanya membaik sedikit.	Cukup Efektif	Cukup relevan terhadap provinsi dan nasional	Penurunan P1 yang berkelanjutan berpotensi paling kuat menurunkan jumlah dan persentase miskin. Kenaikan P1 biasanya berkaitan dengan meningkatnya jumlah miskin atau tertahannya penurunan kemiskinan.
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Peringkat menengah-atas di Kalsel, lebih tinggi dari provinsi namun jauh di bawah nasional.	Fluktuatif dengan rentang relatif rendah (0,06–0,19). Setelah penurunan tajam 2020, P2 kembali stabil di sekitar 0,14–0,15 pada 2021–2024, menunjukkan tidak ada perbaikan struktural yang kuat.	Cukup Efektif	Cukup relevan terhadap provinsi dan nasional	P2 yang rendah menunjukkan gap antar penduduk miskin tidak terlalu lebar, namun peningkatan P2 mengindikasikan adanya kelompok sangat miskin yang tertinggal. Kombinasi P1 tinggi dan P2 tinggi akan memperberat upaya pengurangan jumlah miskin.

Gambar 3. 12 Grafik Perkembangan Parameter Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015 – 2024



Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, hasil olahan 2025

Kenaikan atau penurunan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan tidak selalu berpengaruh terhadap kenaikan dan penurunan persentase kemiskinan, tetapi dapat menggambarkan kondisi kemiskinan daerah.

3.3 Determinan Kemiskinan Daerah

Determinanan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan gambaran mengenai faktor-faktor struktural, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkaitan dengan kondisi kesejahteraan rumah tangga. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik yang menunjukkan keterbatasan akses penduduk terhadap layanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan sumber pendapatan. Selain itu, kajian determinan mencakup kondisi infrastruktur dasar, kualitas permukiman, serta aspek ketahanan pangan yang menjadi bagian penting dalam memahami profil kemiskinan daerah. Pemahaman terhadap berbagai determinan tersebut memberikan landasan bagi perumusan strategi penanggulangan kemiskinan yang konsisten dengan karakteristik kewilayahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada periode perencanaan 2025–2029.

3.3.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu determinan penting yang digunakan untuk memahami karakteristik kemiskinan di Kabupaten

Hulu Sungai Tengah. Kondisi pendidikan penduduk mencerminkan tingkat akses, keterjangkauan, serta partisipasi masyarakat terhadap layanan pendidikan formal, sehingga menjadi bagian dari gambaran struktural yang berkaitan dengan kondisi kesejahteraan rumah tangga. Melalui analisis pendidikan, dapat dilihat bagaimana distribusi capaian pendidikan pada setiap jenjang berhubungan dengan kemampuan penduduk dalam mengakses layanan publik dan peluang ekonomi yang tersedia di daerah.

Kajian determinan pendidikan dalam konteks kemiskinan dilakukan dengan menggunakan sejumlah indikator yang menggambarkan tingkat partisipasi dan keberlanjutan pendidikan. pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA menggunakan Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Putus Sekolah. Pengamatan terhadap indikator-indikator tersebut memberikan gambaran struktural tentang kondisi pendidikan yang relevan dalam memahami determinan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

3.3.1.1 SD/MI

Kajian pada jenjang SD/MI difokuskan untuk melihat kondisi dasar partisipasi pendidikan anak usia 7–12 tahun di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Indikator-indikator pada jenjang ini menggambarkan keterjangkauan dan kelangsungan pendidikan dasar sebagai fondasi awal peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengamatan terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), serta angka putus sekolah memberikan gambaran mengenai karakteristik pendidikan dasar yang berhubungan dengan determinan kemiskinan daerah. Data rinci mengenai indikator-indikator tersebut disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 14 Capaian Jenjang SD/MI Kab. Hulu Sungai Tengah berdasarkan Indikator APK, APM dan APS Tahun 2015-2024

TAHUN	APK	APM	APS
2015	113,66	99,32	99,32
2016	106,68	96,49	99,98
2017	109,32	99,12	100
2018	111,68	99,54	99,54

2019	109,92	99,27	99,27
2020	108,09	99,01	99,97
2021	106,39	99,42	99,57
2022	108,4	99,75	99,75
2023	106,64	99,53	99,53
2024	104,44	98,37	99,19

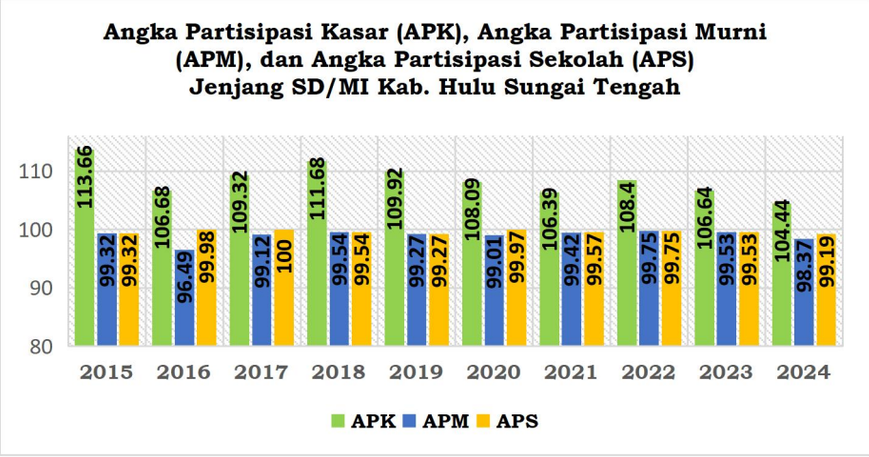
Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, Olahan Data 2025

Selama periode 2015–2024, capaian indikator pendidikan dasar di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan menurun pada beberapa tahun terakhir. Angka Partisipasi Kasar (APK) berada pada kisaran 113,66 persen pada tahun 2015 dan berfluktuasi hingga 104,44 persen pada tahun 2024, mencerminkan penurunan partisipasi secara umum pada jenjang pendidikan dasar.

Angka Partisipasi Murni (APM) relatif stabil pada tingkat tinggi, yaitu 99,32 persen pada tahun 2015 dan sedikit menurun menjadi 98,37 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak usia sekolah dasar masih bersekolah sesuai dengan kelompok umurnya.

Sementara itu, Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan capaian yang cenderung konstan dengan nilai berkisar antara 99,19 hingga 100 persen, mencerminkan tingkat partisipasi penduduk usia sekolah yang tetap tinggi. Secara visual perkembangan APK, APM, dan APS dapat dilihat pada gambar berikutnya.

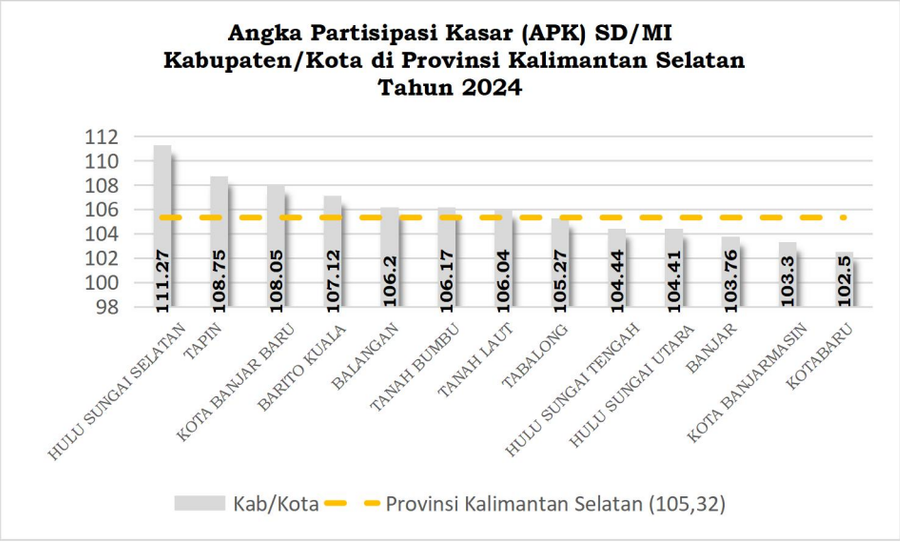
Gambar 3. 13 Tren Capaian Indikator APK, APM, dan APS Jenjang SD/MI Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2015-2024



Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, Olahan Data 2025

Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SD/MI Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencatat nilai tertinggi, yaitu 111,27 persen, diikuti Tapin (108,75 persen) dan Kota Banjarbaru (108,05 persen). Beberapa daerah lain seperti Barito Kuala (107,12 persen), Balangan (106,20 persen), Tanah Bumbu (106,17 persen), dan Tanah Laut (106,04 persen) juga berada di atas rerata provinsi yang sebesar 105,32 persen. Kabupaten Tabalong memiliki capaian mendekati rerata provinsi dengan nilai 105,27 persen. Sementara itu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada sedikit di bawah rerata provinsi dengan capaian 104,44 persen, bersama Hulu Sungai Utara (104,41 persen) dan Banjar (103,76 persen). Nilai terendah dicapai oleh Kota Banjarmasin (103,30 persen) dan Kabupaten Kotabaru (102,50 persen). Gambaran perbandingan capaian antar kabupaten/kota dan Kalimantan Selatan dapat dilihat pada gambar berikutnya.

Gambar 3. 2 Posisi Relatif Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024



Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, Olahan Data 2025

Perkembangan APK SD/MI Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama periode 2015–2024 menunjukkan dinamika yang bergerak menurun secara bertahap. Pada tahun 2015, Kabupaten Hulu Sungai Tengah mencatat capaian 113,66 persen, berada di atas Provinsi Kalimantan Selatan (111,14 persen) dan nasional (110,50 persen). Posisi ini menempatkan

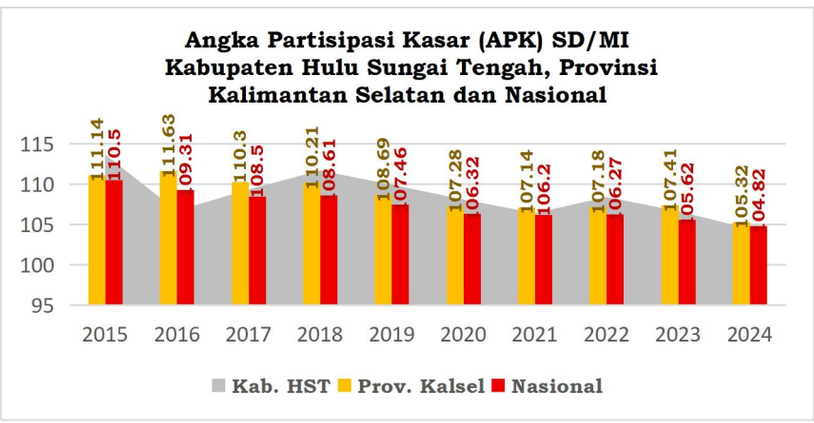
kabupaten sebagai salah satu daerah dengan partisipasi sekolah dasar yang relatif tinggi pada awal periode.

Mulai tahun 2016, capaian Kabupaten Hulu Sungai Tengah bergerak fluktuatif namun menunjukkan kecenderungan menurun. Nilai APK kabupaten berada pada rentang 106,68–111,68 persen selama 2016–2018. Pada periode ini capaian Kabupaten Hulu Sungai Tengah umumnya berada di bawah Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi tetap berada di atas capaian nasional.

Memasuki tahun 2019 hingga 2024, tren penurunan menjadi lebih jelas. Capaian turun dari 109,92 persen pada 2019 menjadi 104,44 persen pada 2024. Selama periode tersebut, Kabupaten Hulu Sungai Tengah konsisten berada di bawah capaian provinsi, sementara posisinya terhadap nasional cenderung menurun dan semakin mendekati nilai nasional dari tahun ke tahun.

Pada tahun terakhir, 2024, APK Kabupaten Hulu Sungai Tengah (104,44 persen) berada sedikit di atas nasional (104,82 persen) namun masih di bawah Provinsi Kalimantan Selatan (105,32 persen). Hal ini menunjukkan bahwa pergerakan APK kabupaten semakin dekat dengan pola nasional, sementara jarak dengan capaian provinsi semakin melebar dibanding awal periode. Gambaran perbandingan posisi relatif Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam konteks provinsi dan nasional dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3. 3 Perbandingan Perkembangan APK SD/MI Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2015 – 2024



Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, Olahan Data 2025

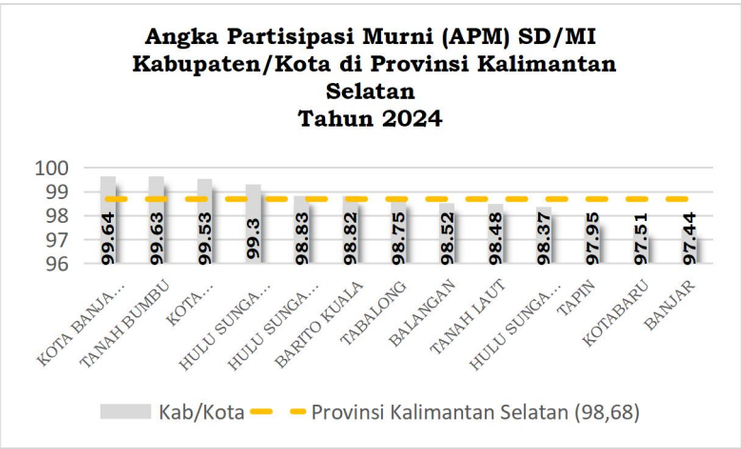
Capaian APM SD/MI Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada pada 98,37 persen, sedikit di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan yang sebesar 98,68 persen. Posisi ini menempatkan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada kelompok tengah-bawah dibandingkan kabupaten/kota lain di provinsi.

Sejumlah daerah memiliki capaian APM lebih tinggi, termasuk Kota Banjarbaru (99,64 persen), Tanah Bumbu (99,63 persen), serta Kota Banjarmasin (99,53 persen). Kabupaten Hulu Sungai Utara (99,30 persen) dan Hulu Sungai Selatan (98,83 persen) juga berada di atas rerata provinsi dan mencatat nilai lebih tinggi daripada Hulu Sungai Tengah.

Beberapa daerah yang memiliki capaian mendekati nilai provinsi adalah Barito Kuala (98,82 persen), Tabalong (98,75 persen), dan Balangan (98,52 persen). Sebaliknya, daerah yang berada di bawah Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah Tapin (97,95 persen), Kotabaru (97,51 persen), dan Banjar (97,44 persen).

Secara keseluruhan, capaian APM Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada sedikit di bawah rata-rata provinsi dan berada di posisi menengah jika dibandingkan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Perbandingan antar daerah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3. 4 Posisi Relatif Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024



Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, Olahan Data 2025

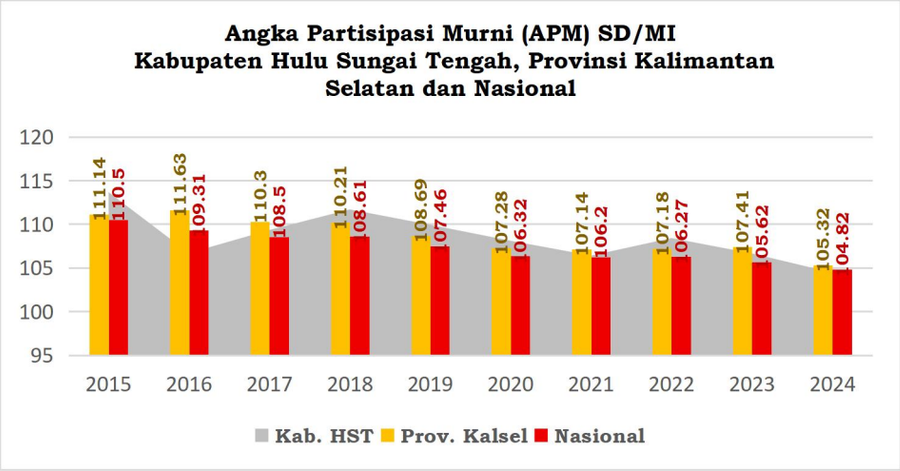
Perkembangan APM SD/MI Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama periode 2015–2024 menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan menurun pada akhir periode. Pada tahun 2015, Kabupaten Hulu Sungai Tengah mencatat capaian 113,66 persen, berada sedikit di atas Provinsi Kalimantan Selatan (111,14 persen) dan capaian nasional (110,50 persen). Tahun ini menjadi titik awal ketika posisi kabupaten relatif lebih tinggi dibandingkan dua level pembanding.

Memasuki tahun 2016 hingga 2018, capaian Kabupaten Hulu Sungai Tengah berfluktuasi pada kisaran 106,68–111,68 persen. Selama tiga tahun ini, kabupaten cenderung berada di bawah Provinsi Kalimantan Selatan, namun tetap lebih tinggi dibandingkan capaian nasional. Pergerakan kabupaten menunjukkan dinamika yang lebih tajam dibandingkan tren provinsi dan nasional yang lebih stabil menurun.

Sejak 2019 hingga 2024, tren Kabupaten Hulu Sungai Tengah terus bergerak turun dari 109,92 persen pada 2019 menjadi 104,44 persen pada 2024. Pada seluruh periode setelah 2019, capaian kabupaten konsisten berada di bawah Provinsi Kalimantan Selatan dan berangsur mendekati nilai nasional. Pada tahun 2024, selisih Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan nasional menjadi sangat tipis, yaitu 104,44 persen dibandingkan 104,82 persen, sedangkan jaraknya dengan provinsi tetap relatif lebih besar.

Dengan demikian, posisi Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang pada awal periode berada di atas provinsi dan nasional, secara bertahap bergerak turun sehingga pada akhir periode mendekati capaian nasional dan tetap berada di bawah capaian provinsi. Pergeseran ini memperlihatkan perubahan posisi relatif kabupaten dalam konteks regional dan nasional selama satu dekade terakhir sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3. 5 Perbandingan Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2015 – 2024



Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, Olahan Data 2025

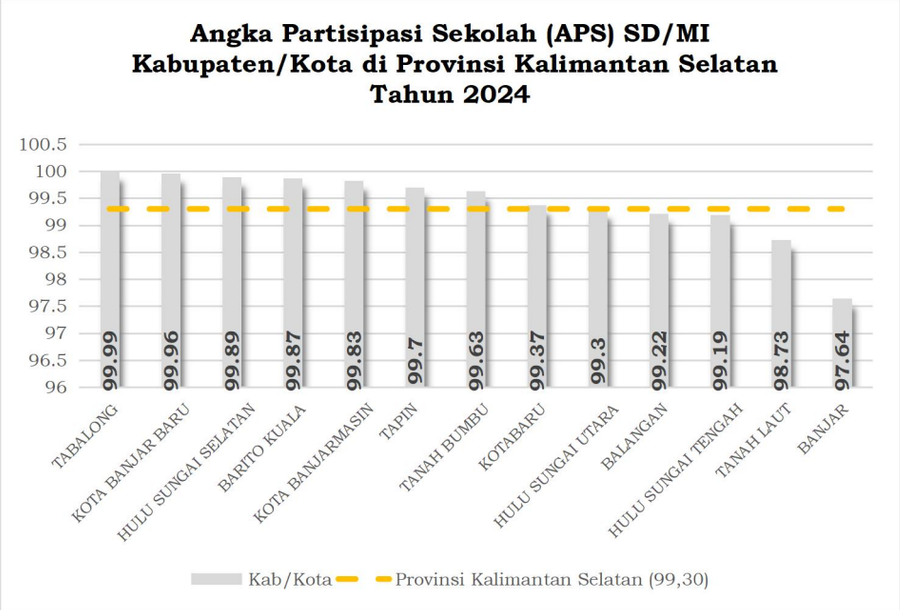
Capaian APS SD/MI Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada pada 99,19 persen, sedikit di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan yang sebesar 99,30 persen. Dengan nilai tersebut, Kabupaten Hulu Sungai Tengah menempati posisi menengah-bawah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di provinsi.

Sejumlah daerah menunjukkan capaian yang lebih tinggi, terutama Tabalong (99,99 persen), Kota Banjarbaru (99,96 persen), serta Hulu Sungai Selatan (99,89 persen). Daerah-daerah lain seperti Barito Kuala (99,87 persen), Kota Banjarmasin (99,83 persen), Tapin (99,70 persen), dan Tanah Bumbu (99,63 persen) juga berada di atas capaian Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Beberapa daerah berada dekat dengan nilai provinsi, seperti Kotabaru (99,37 persen) dan Hulu Sungai Utara (99,30 persen). Di bawah Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdapat Balangan (99,22 persen, sangat berdekatan dengan HST), Tanah Laut (98,73 persen), serta Banjar (97,64 persen).

Secara keseluruhan, capaian APS Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih berada dalam kategori tinggi, namun posisinya relatif lebih rendah dibandingkan sebagian besar kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dan sedikit di bawah nilai rata-rata provinsi. Perbandingan antar daerah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3. 6 Posisi Relatif Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024



Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, Olahan Data 2025

Perkembangan APS SD/MI Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama periode 2015–2024 menunjukkan pola yang relatif stabil dengan nilai yang bergerak pada kisaran 99,19–100 persen. Pada tahun 2015, capaian Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada pada 99,32 persen, sedikit di bawah Provinsi Kalimantan Selatan (99,43 persen). Posisi ini berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, di mana capaian kabupaten cenderung mendekati namun tetap berada di bawah nilai provinsi.

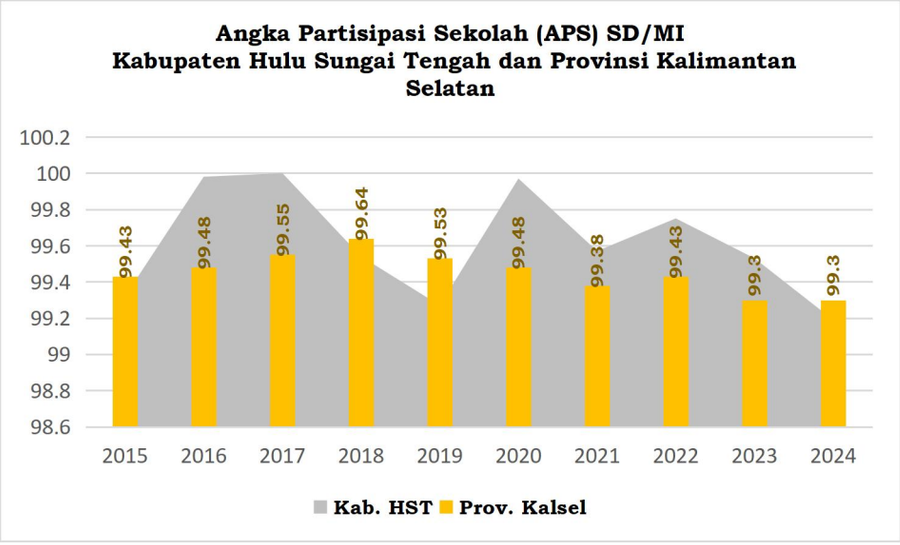
Selama 2016–2018, Kabupaten Hulu Sungai Tengah mencatat nilai APS antara 99,54–100 persen, sementara Provinsi Kalimantan Selatan berada pada rentang 99,48–99,64 persen. Meskipun terdapat beberapa tahun ketika capaian kabupaten berada sangat dekat dengan nilai provinsi, selisih keduanya tetap kecil dan konsisten.

Memasuki periode 2019–2024, capaian Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan fluktuasi ringan dari 99,27 persen pada 2019 menjadi 99,19 persen pada 2024. Pada periode yang sama, capaian Provinsi Kalimantan Selatan bergerak dari 99,53 persen menjadi 99,30 persen. Jarak capaian kabupaten terhadap provinsi tetap berada dalam kisaran sangat tipis, meskipun Kabupaten Hulu Sungai

Tengah terus berada sedikit di bawah nilai provinsi hampir di seluruh tahun pengamatan.

Secara keseluruhan, tren APS Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan konsistensi yang tinggi dengan pergerakan yang hampir sejajar dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Perbedaan antarwilayah bersifat sangat kecil, mencerminkan tingkat partisipasi sekolah dasar yang relatif merata pada tingkat provinsi. Perbandingan tren tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3. 7 Perbandingan Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 – 2024

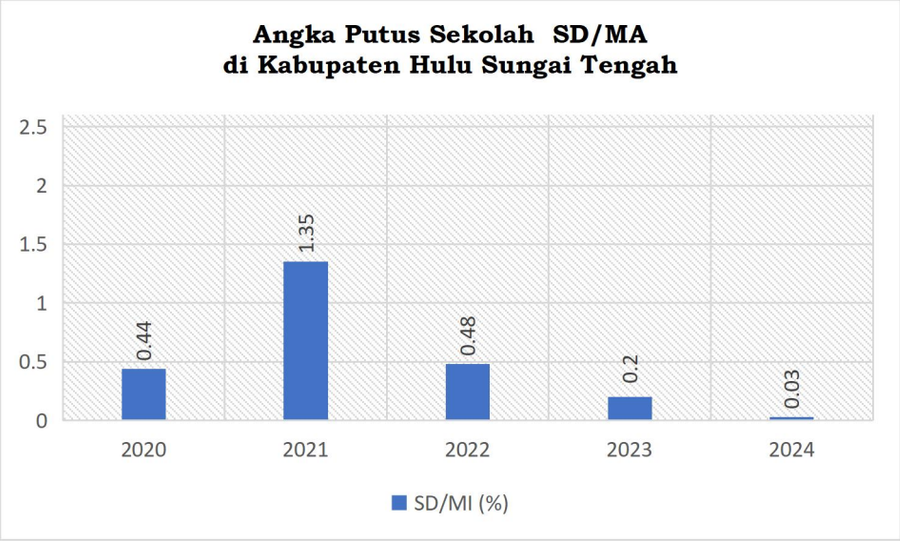


Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, Olahan Data 2025

Perkembangan Angka Putus Sekolah (APTS) jenjang SD/MI di Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama periode 2020–2024 menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Pada 2020, angka putus sekolah berada pada 0,44 persen, kemudian meningkat menjadi 1,35 persen pada 2021. Setelah itu, nilai APTS kembali menurun signifikan menjadi 0,48 persen pada 2022 dan terus turun menjadi 0,20 persen pada 2023. Pada 2024, capaian APTS mencapai titik terendah dalam lima tahun terakhir, yaitu 0,03 persen. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa Angka Putus Sekolah SD/MI di Kabupaten Hulu Sungai Tengah bergerak menuju tingkat yang semakin rendah dari tahun ke tahun,

dengan penurunan paling tajam terjadi setelah 2021. Perkembangan tersebut terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3. 14 Perkembangan Capaian Angka Putus Sekolah SD/MI Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 – 2024



Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, Olahan Data 2025

3.3.1.2 SMP / MTs

Analisis pada jenjang SMP/MTs bertujuan untuk menilai tingkat partisipasi penduduk usia 13–15 tahun dalam pendidikan menengah pertama. Indikator APK, APM, dan angka putus sekolah pada jenjang ini menunjukkan kelangsungan pendidikan setelah tingkat dasar dan memberikan gambaran struktural mengenai kondisi pendidikan kelompok usia wajib belajar. Informasi ini menjadi bagian dari pemahaman determinan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Data lengkap terkait capaian indikator dapat dilihat pada tabel setelah narasi ini.

Tabel 3. 15 Capaian Jenjang SMP/MTs Kab. Hulu Sungai Tengah berdasarkan Indikator APK, APM dan APS Tahun 2015-2024

TAHUN	APK	APM	APS
2015	81,24	74,5	85,11
2016	89,91	74,85	92,2
2017	81,27	72,66	91,93
2018	71,96	71,13	91,09
2019	73,63	72,56	90,75
2020	74,71	72,44	91,2
2021	76,6	72,53	91,12
2022	77,01	72,52	90,59
2023	81,7	72,28	95,03
2024	85,09	74,95	93,48

Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, Olahan Data 2025

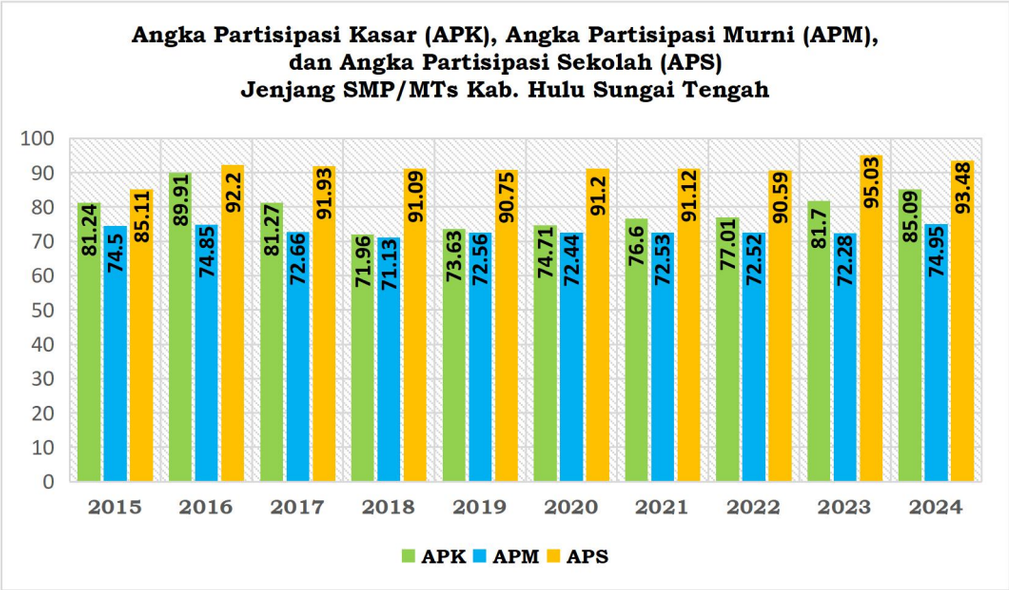
Perkembangan indikator pendidikan jenjang SMP/MTs di Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama periode 2015–2024 menunjukkan pola fluktuatif dengan pergerakan yang berbeda pada setiap indikator. Angka Partisipasi Kasar (APK) bergerak dari 81,24 persen pada 2015 dan meningkat tajam pada 2016 menjadi 89,91 persen, sebelum menurun pada 2018 hingga 71,96 persen. Setelah periode tersebut, APK kembali menunjukkan perbaikan bertahap dan mencapai 85,09 persen pada 2024.

Angka Partisipasi Murni (APM) berada pada kisaran yang relatif stabil, antara 71,13–74,95 persen sepanjang satu dekade. APM sempat menurun pada 2017–2018, kemudian bergerak mendatar dengan variasi kecil hingga mencapai nilai tertinggi 74,95 persen pada 2024.

Sementara itu, Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan tren yang cenderung tinggi dan stabil. Nilai APS berada pada rentang 85,11–95,03 persen, dengan peningkatan paling signifikan terjadi pada 2023 ketika APS mencapai 95,03 persen, sebelum berada pada 93,48 persen pada 2024.

Secara keseluruhan, ketiga indikator menunjukkan dinamika yang konsisten dari tahun ke tahun, dengan APK mengalami fluktuasi yang lebih tajam, APM bergerak stabil dalam rentang sempit, dan APS mempertahankan capaian tinggi selama periode pengamatan. Secara visual gambara perkembangan dapat dilihat di bawah ini.

Gambar 3. 8 Tren Capaian Indikator APK, APM, dan APS Jenjang SMP/MTs Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2015-2024



Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, Olahan Data 2025

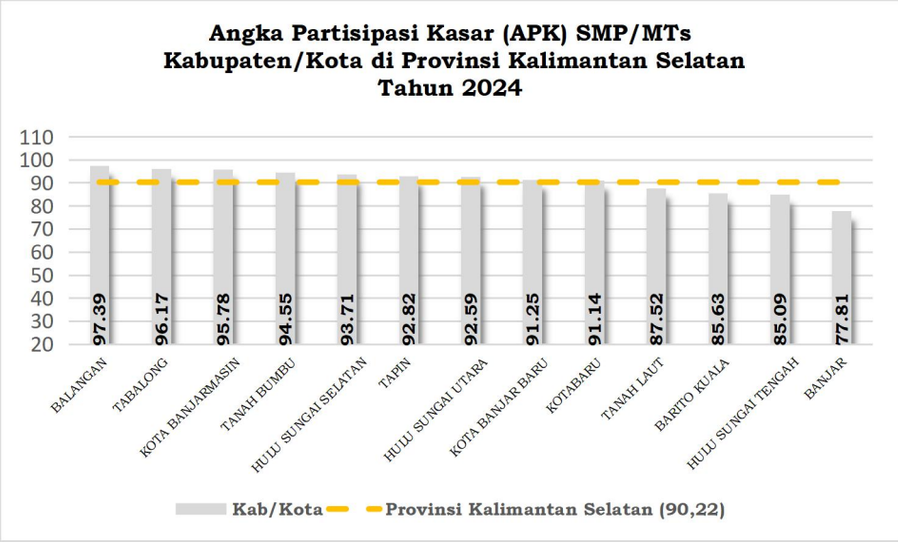
Capaian APK SMP/MTs Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada pada 85,09 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan yang sebesar 90,22 persen. Posisi ini menempatkan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada kelompok menengah-bawah dalam persebaran capaian pendidikan jenjang SMP/MTs di tingkat provinsi.

Beberapa daerah berada jauh lebih tinggi, terutama Balangan (97,39 persen) dan Tabalong (96,17 persen) yang menempati posisi teratas. Kota Banjarmasin (95,78 persen) dan Tanah Bumbu (94,55 persen) juga mencatat nilai yang jauh di atas rata-rata provinsi. Daerah sekitar Hulu Sungai Tengah seperti Hulu Sungai Selatan (93,71 persen) dan Hulu Sungai Utara (92,59 persen) menunjukkan capaian yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Sementara itu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada sedikit di atas Kabupaten Banjar (77,81 persen), namun masih berada di bawah Barito Kuala (85,63 persen) dan Tanah Laut (87,52 persen). Posisi ini memperlihatkan bahwa capaian kabupaten berjarak cukup besar dari sebagian besar daerah dengan kinerja tinggi di tingkat provinsi.

Gambaran posisi relatif Kabupaten Hulu Sungai Tengah terhadap daerah lain di Provinsi Kalimantan Selatan ditampilkan di bawah ini.

Gambar 3. 9 Posisi Relatif Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP / MTs Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024



Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, Olahan Data 2025

Tren APK SMP/MTs Kabupaten Hulu Sungai Tengah sepanjang 2015–2024 menunjukkan pola yang berfluktuasi dengan capaian yang secara konsisten berada di bawah Provinsi Kalimantan Selatan dan nasional. Pada tahun 2015, nilai Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada pada 81,24 persen, sedikit di bawah Provinsi Kalimantan Selatan (82,81 persen) dan jauh di bawah capaian nasional (91,17 persen).

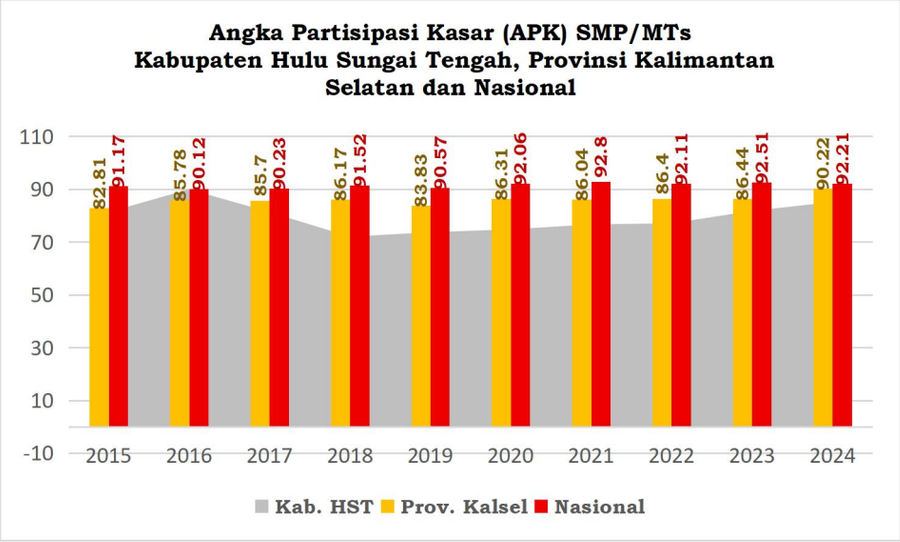
Pada tahun 2016, Kabupaten Hulu Sungai Tengah mencatat peningkatan signifikan hingga 89,91 persen, mendekati provinsi yang berada pada 85,78 persen, namun tetap jauh di bawah capaian nasional yang sebesar 90,12 persen. Setelah itu, capaian kabupaten kembali bergerak turun dan mencapai titik terendah pada 2018, yaitu 71,96 persen, sementara Provinsi Kalimantan Selatan tetap berada pada kisaran 86,17 persen dan nasional pada 91,52 persen.

Mulai 2019 hingga 2022, APK Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami peningkatan bertahap, bergerak dari 73,63 persen menjadi 77,01 persen, namun tetap terpaut cukup jauh dari provinsi dan nasional. Pada 2023 dan 2024, capaian kabupaten kembali menguat masing-masing menjadi

81,70 persen dan 85,09 persen. Meskipun mengalami perbaikan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tetap berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan (90,22 persen) dan nasional (92,21 persen) pada akhir periode.

Secara keseluruhan, posisi Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan pola yang sejajar tetapi berada pada tingkat capaian lebih rendah dibandingkan provinsi dan nasional, dengan jarak yang paling kecil terjadi pada tahun 2016 dan jarak terlebar pada tahun 2018. Gambaran perbandingan lengkapnya dapat dilihat di bawah ini.

Gambar 3. 10 Perbandingan Perkembangan APK SMP / MTs Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2015 – 2024



Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, Olahan Data 2025

Capaian APM SMP/MTs Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada pada 74,95 persen, lebih rendah daripada rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai 78,14 persen. Dengan nilai tersebut, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada pada kelompok bawah dalam distribusi capaian APM tingkat provinsi.

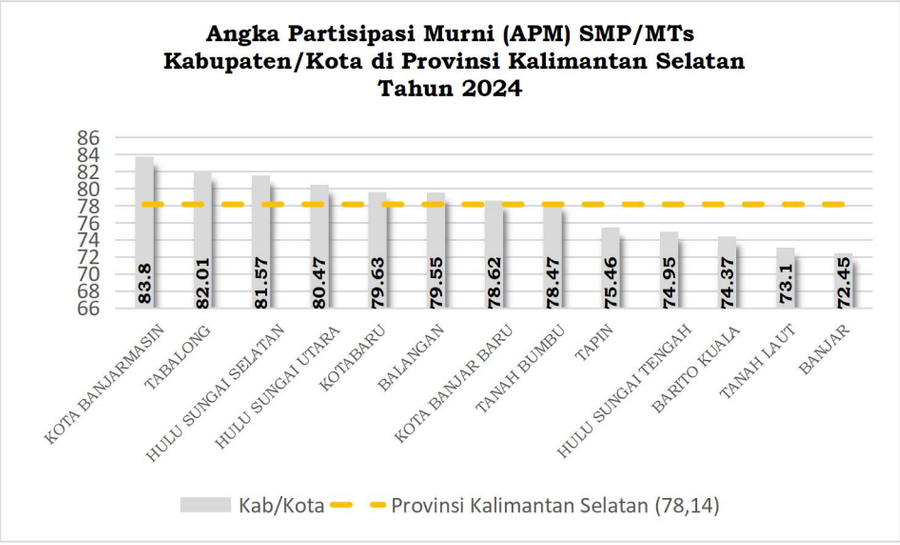
Beberapa daerah menunjukkan capaian yang jauh lebih tinggi, seperti Kota Banjarmasin (83,80 persen) yang mencatat nilai tertinggi di provinsi, diikuti Tabalong (82,01 persen) serta Hulu Sungai Selatan (81,57 persen). Kabupaten Hulu Sungai Utara (80,47 persen) dan Kotabaru (79,63 persen) juga berada

di atas rata-rata provinsi dan menjadi bagian dari kelompok daerah dengan capaian tinggi.

Daerah yang memiliki capaian mendekati nilai provinsi antara lain Kota Banjarbaru (78,62 persen) dan Tanah Bumbu (78,47 persen), sedangkan daerah yang berada sedikit di bawah nilai provinsi meliputi Balangan (79,55 persen) dan Tapin (75,46 persen). Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada di bawah kelompok ini, bersama Barito Kuala (74,37 persen), Tanah Laut (73,10 persen), dan Banjar (72,45 persen).

Secara keseluruhan, capaian APM Kabupaten Hulu Sungai Tengah menempatkan kabupaten ini pada posisi yang lebih rendah dibanding sebagian besar kabupaten/kota lain, serta berada di bawah nilai rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan. Gambaran perbandingan terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3. 11 Posisi Relatif Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP / MTs Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024



Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, Olahan Data 2025

Perkembangan APM SMP/MTs Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama periode 2015–2024 menunjukkan pola yang relatif stabil dengan fluktuasi ringan. Pada tahun 2015, capaian Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada pada 74,50 persen, sedikit di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan (72,51 persen) namun masih di bawah capaian nasional (77,82 persen).

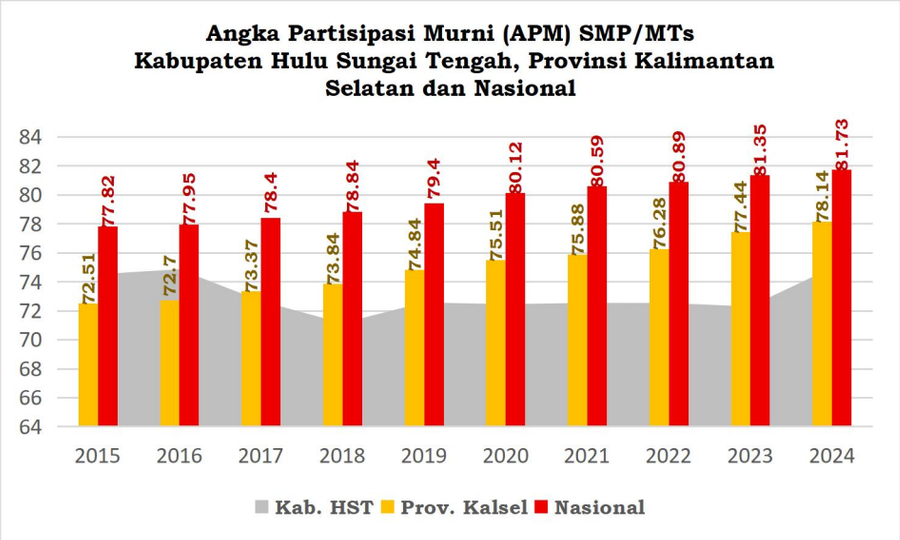
Pada 2016–2017, capaian kabupaten bergerak pada rentang 72,66–74,85 persen, sementara provinsi menunjukkan tren kenaikan bertahap dari 72,70 persen menjadi 73,37 persen. Selama periode ini, posisi Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada sedikit di atas provinsi tetapi tetap berada di bawah capaian nasional yang mencapai 78,40 persen pada 2017.

Mulai 2018 hingga 2022, capaian APM Kabupaten Hulu Sungai Tengah bergerak dalam rentang sempit 71,13–72,56 persen, menunjukkan stabilitas yang kuat namun tanpa peningkatan signifikan. Pada periode yang sama, Provinsi Kalimantan Selatan mengalami peningkatan bertahap dari 73,84 persen menjadi 76,28 persen, sementara capaian nasional meningkat konsisten hingga mencapai 80,89 persen pada 2022. Selama lima tahun tersebut, posisi Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada di bawah provinsi dan nasional.

Pada dua tahun terakhir, 2023 dan 2024, Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan perbaikan yang lebih jelas, masing-masing mencapai 72,28 persen dan 74,95 persen. Meskipun demikian, capaian tersebut masih berada di bawah Provinsi Kalimantan Selatan (78,14 persen) dan nasional (81,73 persen) pada 2024.

Secara keseluruhan, tren APM Kabupaten Hulu Sungai Tengah bergerak stabil sepanjang satu dekade dengan kecenderungan stagnan pada sebagian besar periode, sementara provinsi dan nasional memperlihatkan pola peningkatan yang lebih konsisten. Posisi Kabupaten Hulu Sungai Tengah terhadap Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional dapat dilihat di bawah ini.

Gambar 3. 12 Perbandingan Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMP / MTs Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2015 – 2024



Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, Olahan Data 2025

Capaian APS SMP/MTs Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada pada 93,48 persen, sedikit di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan yang sebesar 93,70 persen. Dengan capaian ini, Kabupaten Hulu Sungai Tengah menempati posisi menengah dalam distribusi capaian APS tingkat provinsi.

Beberapa daerah menunjukkan capaian jauh lebih tinggi, terutama Balangan (99,75 persen) dan Kota Banjarbaru (99,34 persen), yang menempati urutan teratas. Tabalong (98,15 persen) dan Kota Banjarmasin (97,78 persen) juga memiliki capaian yang jauh melampaui rata-rata provinsi dan berada pada kelompok daerah dengan partisipasi sekolah yang sangat tinggi.

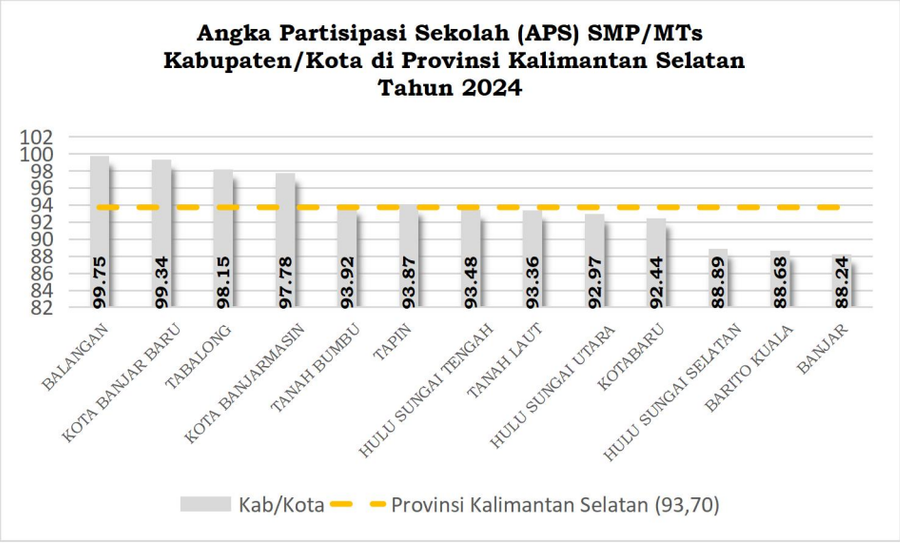
Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada mendekati beberapa daerah lain yang berada sedikit di atas atau sedikit di bawah nilai provinsi, seperti Tanah Bumbu (93,92 persen) dan Tapin (93,87 persen). Wilayah yang berada sedikit di bawah Hulu Sungai Tengah antara lain Tanah Laut (93,36 persen) dan Hulu Sungai Utara (92,97 persen).

Sementara itu, kelompok daerah dengan capaian lebih rendah mencakup Kotabaru (92,44 persen), Hulu Sungai Selatan (88,89 persen), Barito Kuala (88,68 persen), dan Banjar (88,24 persen). Perbandingan ini menempatkan

Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada posisi yang kompetitif, meskipun masih berada sedikit di bawah capaian rata-rata provinsi.

Gambaran posisi relatif Kabupaten Hulu Sungai Tengah terhadap kabupaten/kota lain dalam provinsi ditampilkan pada gambar di bawah ini.

Gambar 3. 13 Posisi Relatif Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP / MTs Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024



Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, Olahan Data 2025

Perkembangan APS SMP/MTs Kabupaten Hulu Sungai Tengah sepanjang 2015–2024 menunjukkan pola yang relatif stabil dengan variasi ringan dari tahun ke tahun. Pada 2015, capaian Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada pada 85,11 persen, lebih rendah dibandingkan Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai 91,91 persen. Selisih capaian antara kabupaten dan provinsi yang cukup lebar ini tetap terlihat konsisten pada tahun-tahun berikutnya.

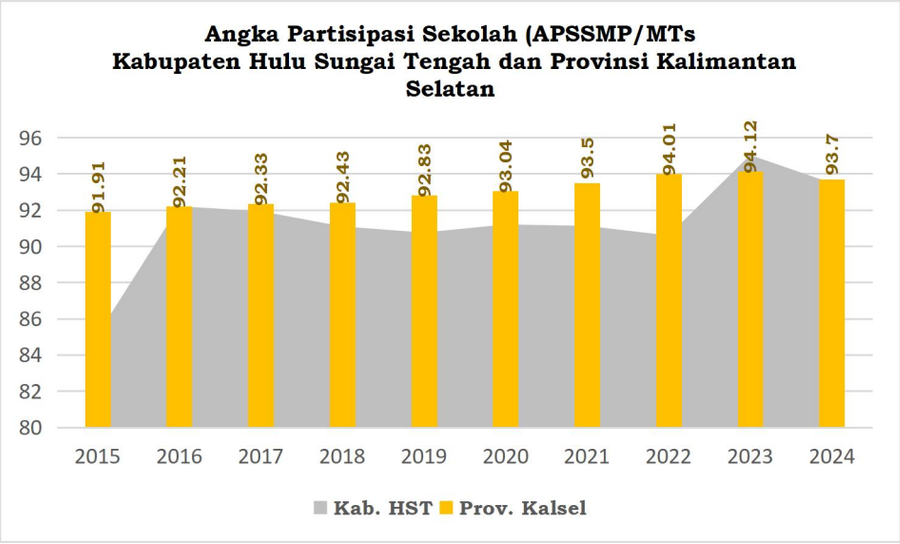
Selama periode 2016–2021, capaian APS Kabupaten Hulu Sungai Tengah bergerak pada kisaran 90,75–92,20 persen, sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan berada pada rentang 92,21–93,50 persen. Pola tersebut menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki capaian yang relatif stabil, posisinya tetap berada di bawah capaian provinsi pada seluruh tahun pengamatan.

Pada 2022–2024, capaian Kabupaten Hulu Sungai Tengah tetap stabil dengan nilai antara 90,59–95,03 persen.

Tahun 2023 mencatat peningkatan tertinggi, yaitu 95,03 persen, meskipun capaian Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun yang sama masih sedikit lebih tinggi, yakni 94,12 persen. Pada tahun 2024, nilai Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada pada 93,48 persen, mendekati capaian provinsi sebesar 93,70 persen.

Secara keseluruhan, tren APS Kabupaten Hulu Sungai Tengah bergerak hampir sejajar dengan Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi secara konsisten berada sedikit di bawah capaian provinsi pada sebagian besar periode. Perbandingan lengkap tren ini ditampilkan pada gambar di bawah ini.

Gambar 3. 14 Perbandingan Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP / MTs Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 – 2024

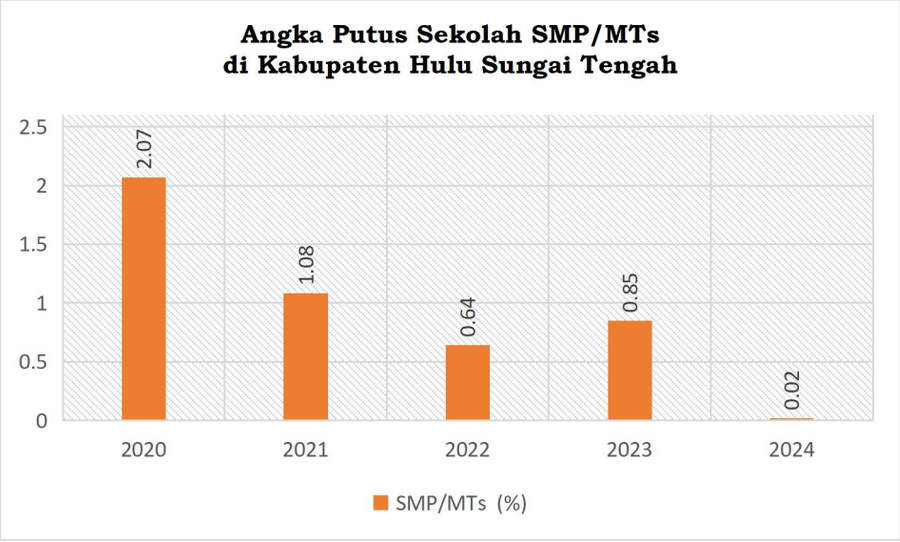


Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, Olahan Data 2025

Perkembangan Angka Putus Sekolah (APTS) jenjang SMP/MTs di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam periode 2020–2024 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dengan pola fluktuasi kecil pada pertengahan periode. Pada 2020, APTS tercatat sebesar 2,07 persen, kemudian menurun menjadi 1,08 persen pada 2021. Tren penurunan berlanjut hingga 2022 dengan capaian 0,64 persen. Pada 2023, angka putus sekolah sedikit meningkat menjadi 0,85 persen, sebelum kembali mengalami penurunan yang sangat tajam pada 2024 hingga mencapai 0,02 persen, menjadi capaian

terendah dalam lima tahun terakhir. Secara keseluruhan, dinamika APTS tergambar pada visual di bagian berikutnya.

Gambar 3. 15 Perkembangan Capaian Angka Putus Sekolah SMP/MTs Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 – 2024



Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, Olahan Data 2025

3.3.1.3 SMA / SLTA

Kajian jenjang SMA/SMK/MA menelaah kondisi partisipasi pendidikan penduduk usia 16–18 tahun yang berada pada tahap pendidikan menengah atas. Indikator APK dan APM digunakan untuk melihat sejauh mana penduduk dapat mengakses dan melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi sesuai usia sekolahnya. Analisis indikator tersebut memberikan konteks struktural yang berkaitan dengan determinan kemiskinan, khususnya dalam memahami kondisi pendidikan kelompok usia produktif awal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Data rinci setiap indikator disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 16 Capaian Jenjang SMA/SLTA Kab. Hulu Sungai Tengah berdasarkan Indikator APK, APM dan APS Tahun 2015-2024

TAHUN	APK	APM	APS
2015	69,49	59,21	70,82
2016	83,71	64,97	72,16
2017	84,9	66,63	72,93
2018	81,72	66,06	66,06
2019	89,81	66,8	66,8
2020	90,78	66,61	66,61
2021	88,25	66,19	66,19
2022	89	66,19	66,19
2023	86,72	56,5	66,74

TAHUN	APK	APM	APS
2024	86,36	58,99	72,23

Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, Olahan Data 2025

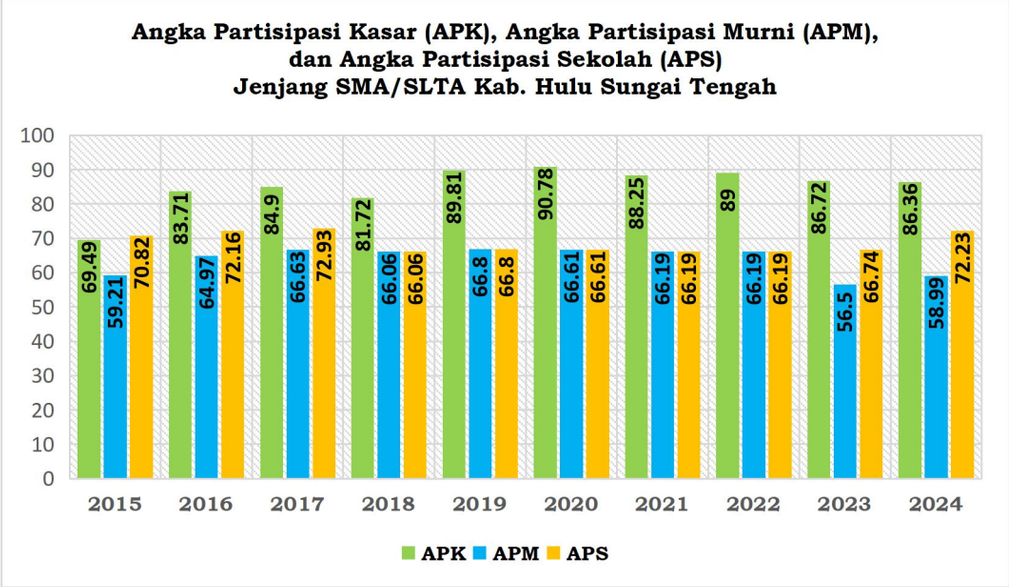
Perkembangan indikator pendidikan jenjang SMA/SLTA di Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama periode 2015–2024 menunjukkan dinamika yang bervariasi pada ketiga indikator. Angka Partisipasi Kasar (APK) mengalami peningkatan signifikan pada awal periode, dari 69,49 persen pada 2015 menjadi 83,71 persen pada 2016 dan mencapai 84,90 persen pada 2017. Setelah itu, nilai APK bergerak fluktuatif, sempat menurun pada 2018 menjadi 81,72 persen, lalu meningkat hingga mencapai titik tertinggi 90,78 persen pada 2020. Pada tiga tahun terakhir, capaian APK cenderung stabil dalam kisaran 86,36–89,00 persen.

Angka Partisipasi Murni (APM) bergerak dalam rentang yang relatif sempit, yaitu 56,50–66,80 persen. Setelah peningkatan pada 2016–2019 yang membawa nilai APM mencapai 66,80 persen, tren menunjukkan stabilitas pada kisaran 66 persen hingga 2022. Penurunan cukup terlihat pada 2023 ketika nilai mencapai 56,50 persen, sebelum kembali meningkat menjadi 58,99 persen pada 2024.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) memperlihatkan pola stabil pada kisaran 66,06–72,93 persen. Setelah mencapai 72,93 persen pada 2017, nilai APS berada pada rentang sekitar 66 persen selama 2018–2022. Pada 2023 dan 2024, APS kembali menunjukkan peningkatan, dengan capaian 66,74 persen dan kemudian 72,23 persen pada 2024.

Secara keseluruhan, ketiga indikator jenjang SMA/SLTA menunjukkan fluktuasi yang lebih besar dibandingkan jenjang pendidikan sebelumnya. APK memperlihatkan kenaikan signifikan pada awal dan pertengahan periode, APM bergerak stabil dalam rentang sempit, sedangkan APS mempertahankan pola yang konsisten dengan peningkatan pada tahun terakhir. Gambaran perkembangan per tahun ditampilkan di bawah ini.

Gambar 3. 16 Tren Capaian Indikator APK, APM, dan APS Jenjang SMA/SLTA Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2015-2024



Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, Olahan Data 2025

Capaian APK SMA/SLTA Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada pada 86,36 persen, lebih tinggi daripada rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan yang sebesar 82,17 persen. Dengan capaian ini, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada pada kelompok atas dalam persebaran capaian pendidikan jenjang SMA/SLTA di provinsi.

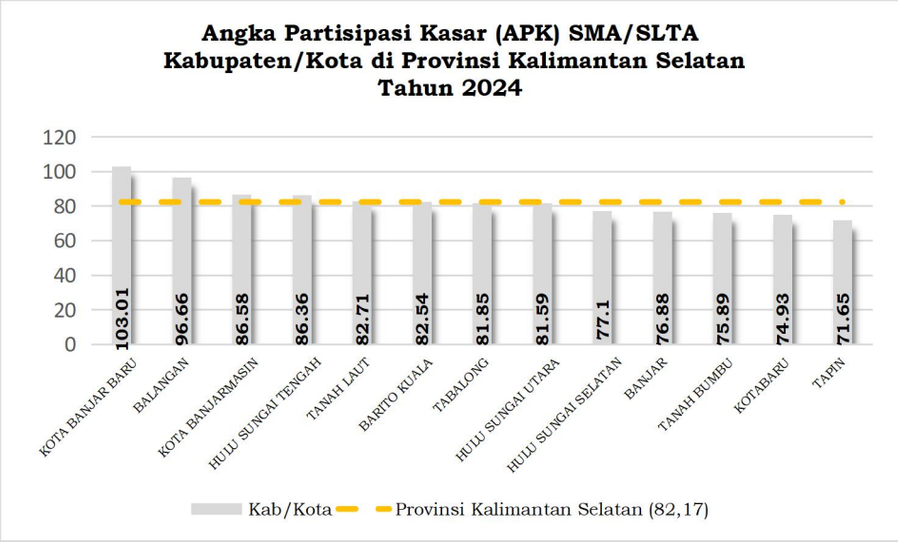
Beberapa daerah mencatat capaian yang jauh lebih tinggi, terutama Kota Banjarbaru (103,01 persen) dan Balangan (96,66 persen) yang menempati posisi teratas di provinsi. Di bawah kelompok tersebut, Kota Banjarmasin (86,58 persen) berada sedikit lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan selisih capaian yang sangat tipis.

Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada di atas sejumlah daerah dengan capaian mendekati rata-rata provinsi, antara lain Tanah Laut (82,71 persen), Barito Kuala (82,54 persen), Tabalong (81,85 persen), dan Hulu Sungai Utara (81,59 persen). Sementara itu, kelompok daerah dengan capaian lebih rendah mencakup Hulu Sungai Selatan (77,10 persen), Banjar (76,88 persen), Tanah Bumbu (75,89 persen), Kotabaru (74,93 persen), dan Tapin (71,65 persen).

Secara keseluruhan, capaian Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan posisi yang kompetitif dan berada pada

kelompok atas dibandingkan sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Gambaran perbandingan dapat dilihat di bawah ini.

Gambar 3. 9 Posisi Relatif Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SLTA Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024



Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, Olahan Data 2025

Perkembangan APK SMA/SLTA Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama periode 2015–2024 menunjukkan tren yang meningkat pada awal hingga pertengahan periode, kemudian bergerak stabil hingga 2024. Pada tahun 2015, capaian Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada pada 69,49 persen, lebih rendah dibandingkan capaian Provinsi Kalimantan Selatan (73,88 persen) dan nasional (78,02 persen).

Pada 2016–2017, Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan peningkatan signifikan, masing-masing mencapai 83,71 persen dan 84,90 persen, sehingga posisinya mendekati capaian provinsi dan memperkecil selisih dengan capaian nasional. Meskipun demikian, capaian kabupaten tetap berada di bawah provinsi dan nasional pada periode tersebut.

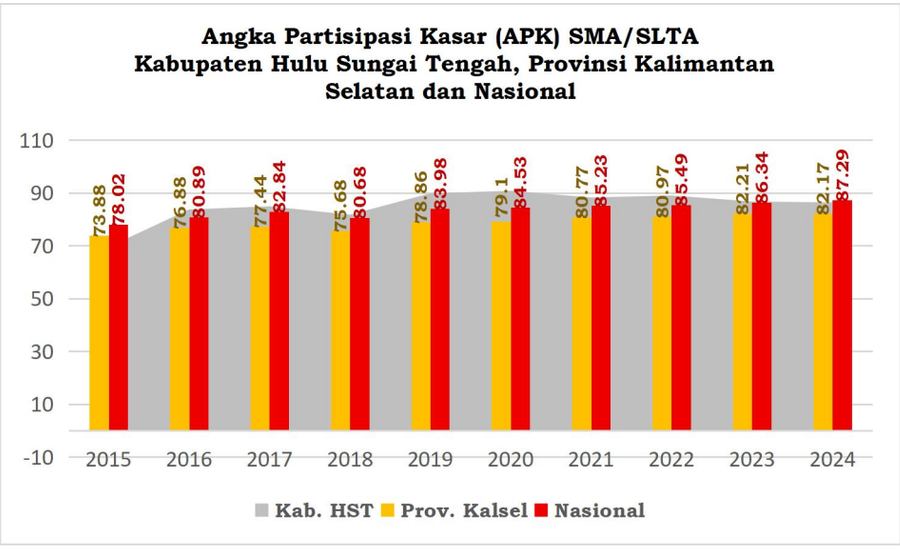
Pada 2018, capaian Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami penurunan menjadi 81,72 persen, sebelum kembali meningkat tajam pada 2019 dan 2020 hingga mencapai 89,81 persen dan 90,78 persen, yang menjadi capaian tertinggi selama satu dekade. Selama dua tahun ini, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada lebih tinggi daripada

Provinsi Kalimantan Selatan, meskipun tetap berada di bawah capaian nasional.

Sejak 2021 hingga 2024, capaian Kabupaten Hulu Sungai Tengah bergerak stabil pada kisaran 86–89 persen, sementara capaian provinsi memperlihatkan peningkatan bertahap dan nasional menunjukkan pola yang konsisten lebih tinggi. Pada tahun terakhir, 2024, Kabupaten Hulu Sungai Tengah mencatat 86,36 persen, berada sedikit di atas Provinsi Kalimantan Selatan (82,17 persen) namun tetap lebih rendah dibandingkan capaian nasional (87,29 persen).

Secara keseluruhan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan perkembangan APK SMA/SLTA yang meningkat dan relatif stabil, dengan posisi yang pada sebagian besar tahun berada di antara capaian provinsi dan nasional. Perbandingan ini ditampilkan pada gambar di bawah.

Gambar 3. 10 Perbandingan Perkembangan APK SMA/SLTA Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2015 – 2024



Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, Olahan Data 2025

Capaian APM SMA/SLTA Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada pada 58,99 persen, sedikit di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan yang sebesar 60,26 persen. Dengan nilai ini, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada pada kelompok menengah-bawah dalam distribusi capaian APM tingkat provinsi.

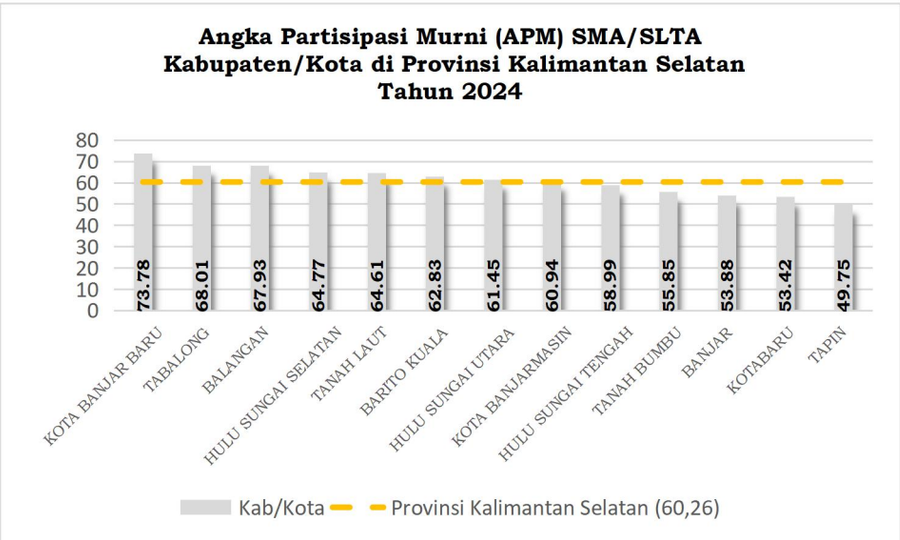
Beberapa daerah menunjukkan capaian yang jauh lebih tinggi, terutama Kota Banjarbaru (73,78 persen), Tabalong (68,01 persen), dan Balangan (67,93 persen), yang menempati posisi tertinggi di provinsi. Daerah lain seperti Hulu Sungai Selatan (64,77 persen) dan Tanah Laut (64,61 persen) juga mencatat nilai yang berada cukup jauh di atas rata-rata provinsi.

Kelompok daerah dengan capaian mendekati nilai provinsi meliputi Barito Kuala (62,83 persen), Hulu Sungai Utara (61,45 persen), dan Kota Banjarmasin (60,94 persen). Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada tepat di bawah kelompok ini, menjadi daerah pertama yang nilainya lebih rendah dari rerata provinsi.

Sementara itu, beberapa daerah memiliki capaian di bawah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, antara lain Tanah Bumbu (55,85 persen), Banjar (53,88 persen), Kotabaru (53,42 persen), dan Tapin (49,75 persen), yang berada pada kelompok capaian rendah.

Secara keseluruhan, posisi Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada pada tingkat menengah-bawah dalam capaian APM SMA/SLTA di Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana ditampilkan pada gambar di bawah ini.

Gambar 3. 11 Posisi Relatif Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SLTA Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024



Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, Olahan Data 2025

Perkembangan APM SMA/SLTA Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama 2015–2024 menunjukkan pola yang cenderung stabil pada kisaran pertengahan, dengan beberapa fluktuasi pada akhir periode. Pada tahun 2015, capaian Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada pada 59,21 persen, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Selatan (55,58 persen) namun sedikit di bawah capaian nasional (59,71 persen).

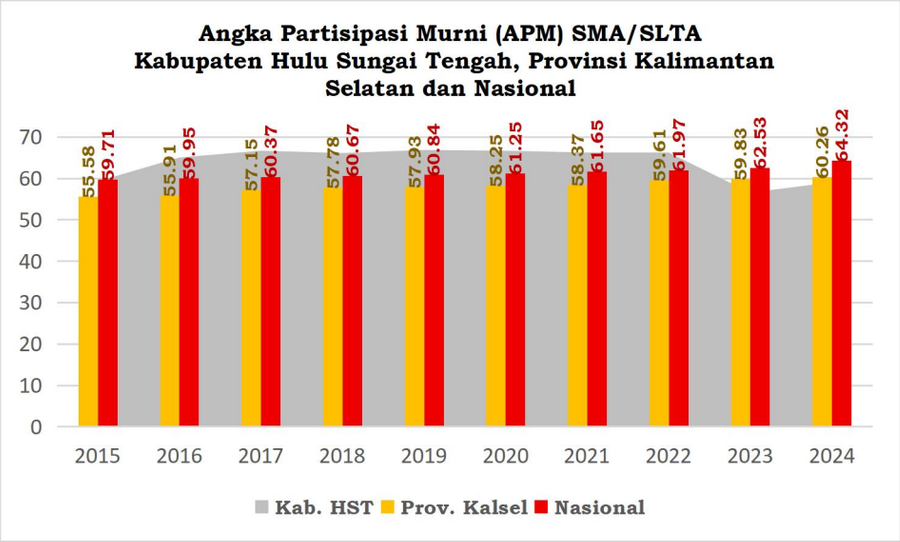
Pada tahun 2016–2020, capaian kabupaten meningkat dan kemudian bergerak stabil dalam rentang 64,97–66,80 persen. Selama periode ini, Kabupaten Hulu Sungai Tengah secara konsisten berada di atas capaian Provinsi Kalimantan Selatan, sementara posisinya terhadap capaian nasional cenderung lebih rendah namun relatif dekat.

Mulai 2021 hingga 2022, capaian Kabupaten Hulu Sungai Tengah bergerak stabil pada 66,19 persen, sementara Provinsi Kalimantan Selatan terus menunjukkan peningkatan bertahap dan nasional tetap menjadi yang tertinggi dalam deret data tersebut. Pada dua tahun ini, Kabupaten Hulu Sungai Tengah mempertahankan posisinya di atas capaian provinsi, meskipun jaraknya semakin menyempit.

Perubahan yang lebih signifikan terlihat pada tahun 2023 ketika capaian kabupaten turun menjadi 56,50 persen, berada di bawah Provinsi Kalimantan Selatan (59,83 persen) dan cukup jauh dari capaian nasional (62,53 persen). Pada 2024, nilai Kabupaten Hulu Sungai Tengah kembali meningkat menjadi 58,99 persen, namun masih berada di bawah provinsi (60,26 persen) dan nasional (64,32 persen).

Secara keseluruhan, capaian APM Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan pola stabil pada sebagian besar periode, dengan posisi umumnya berada di atas capaian provinsi dan hanya kemudian bergeser ke bawah dalam dua tahun terakhir. Tren kabupaten juga secara konsisten berada di bawah capaian nasional sepanjang satu dekade. Perbedaan dan perubahan posisi ini tergambar jelas pada gambar yang ditampilkan di bawah ini.

Gambar 3. 12 Perbandingan Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SLTA Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2015 – 2024



Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, Olahan Data 2025

Capaian APS SMA/SLTA Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada pada 72,23 persen, sedikit di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan yang sebesar 72,31 persen. Dengan nilai tersebut, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada pada posisi menengah dalam persebaran capaian APS tingkat provinsi.

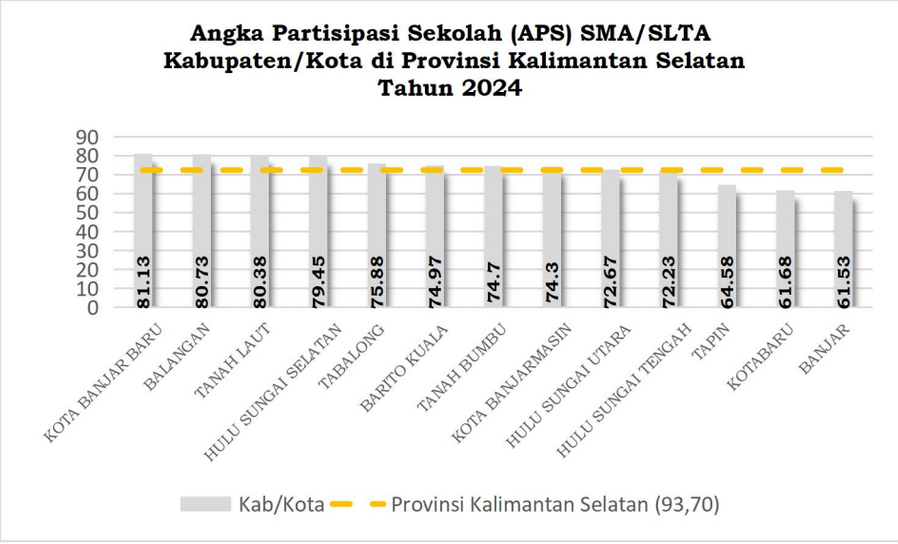
Sejumlah daerah menunjukkan capaian yang jauh lebih tinggi, terutama Kota Banjarbaru (81,13 persen), Balangan (80,73 persen), dan Tanah Laut (80,38 persen), yang menjadi daerah dengan partisipasi sekolah tertinggi pada jenjang SMA/SLTA di provinsi. Hulu Sungai Selatan (79,45 persen) dan Tabalong (75,88 persen) juga mencatat capaian yang melampaui rata-rata provinsi.

Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada sangat dekat dengan Hulu Sungai Utara (72,67 persen) dan Kota Banjarmasin (74,30 persen), sehingga membentuk kelompok tengah dengan jarak capaian yang relatif kecil. Sementara itu, beberapa daerah memiliki capaian yang berada di bawah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, antara lain Tapin (64,58 persen), Kotabaru (61,68 persen), dan Banjar (61,53 persen).

Secara keseluruhan, posisi Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada pada kategori menengah dalam konteks capaian APS SMA/SLTA di Provinsi Kalimantan Selatan.

Capaian kabupaten berada sangat dekat dengan nilai provinsi dan lebih tinggi dibandingkan beberapa kabupaten/kota lain, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3. 13 Posisi Relatif Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SLTA Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024



Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, Olahan Data 2025

Perkembangan APS SMA/SLTA Kabupaten Hulu Sungai Tengah sepanjang 2015–2024 menunjukkan pola fluktuatif dengan pergerakan yang berada dekat dengan capaian Provinsi Kalimantan Selatan. Pada 2015, APS Kabupaten Hulu Sungai Tengah mencapai 70,82 persen, lebih tinggi dari capaian Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 67,49 persen. Tren ini berlanjut pada 2016 dan 2017 ketika capaian kabupaten berada pada 72,16 persen dan 72,93 persen, tetap berada di atas capaian provinsi.

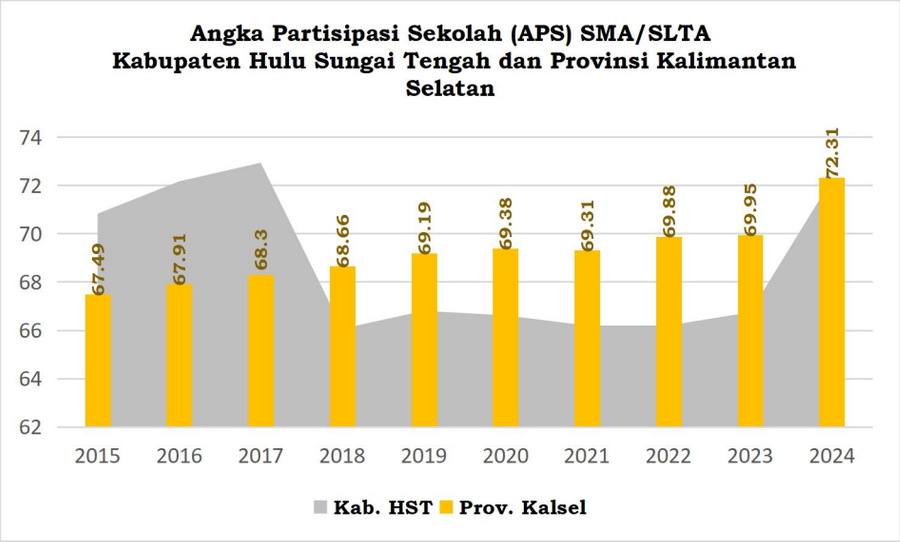
Pada periode 2018–2023, capaian Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami penurunan dan bergerak dalam rentang 66,06–66,80 persen, sementara Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan tren peningkatan bertahap dari 68,66 persen pada 2018 menjadi 69,95 persen pada 2023. Selama enam tahun tersebut, capaian Kabupaten Hulu Sungai Tengah konsisten berada di bawah capaian provinsi.

Pada tahun terakhir, 2024, capaian Kabupaten Hulu Sungai Tengah meningkat menjadi 72,23 persen, mendekati nilai Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 72,31 persen, dengan perbedaan yang sangat kecil. Posisi ini menunjukkan

bahwa selisih capaian antara kabupaten dan provinsi menyempit kembali setelah periode perbedaan yang lebih besar pada tahun-tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, tren APS Kabupaten Hulu Sungai Tengah memperlihatkan dinamika yang bergerak mendekati capaian Provinsi Kalimantan Selatan pada awal dan akhir periode, dengan perbedaan yang melebar pada pertengahan periode. Gambaran perbandingan kedua wilayah ini tergambar jelas pada visual di bawah ini.

Gambar 3. 14 Perbandingan Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SLTA Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 – 2024



Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, Olahan Data 2025

Tabel 3. 17 Analisis Aspek Kemiskinan Berdasarkan Bidang Pendidikan di Kab. Hulu Sungai Tengah

Indikator	Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi
APK SD/MI	Capaian Kab. HST (104.44) masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan capaian provinsi (105.32) dengan gap -0.88	Cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan 1.1 dari tahun 2020 s.d 2024	Tren ini menunjukan masih kurang efektifnya capaian pembangunan dibadingkan dinamika yang berkembang	Meskipun tren provinsi menunjukan fluktuasi, tetapi secara konsisten antara tahun 2020 (107.28) sampai dengan tahun 2024 (105.32) dapat dikatakan Kab HST dan Provinsi sama-sama menunjukan tren penurunan dengan Kab HST 2020 (108.09) sampai dengan Tahun 2024 (104.44)
APK SMP/MTS	Capaian Kab. HST (85,09) masih lebih rendah dibandingkan capaian Prov. Kalsel (90,22) dengan gap -5,13.	Cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan 2,60 dari tahun 2020 s.d 2024 (74,71 menjadi 85,09).	Tren ini menunjukkan capaian pembangunan pada indikator APK SMP/MTs cenderung membaik dibandingkan dinamika sebelumnya.	Meskipun tren provinsi berfluktuasi, tetapi secara konsisten antara tahun 2020 (86,31) sampai dengan tahun 2024 (90,22) Prov. Kalsel menunjukkan tren peningkatan; hal yang sama juga terjadi pada Kab. HST tahun 2020 (74,71) sampai dengan tahun 2024 (85,09).
APK SMA/MA	Capaian Kab. HST (86,36) lebih tinggi dibandingkan capaian provinsi (82,17) dengan gap 4,19; namun masih sedikit lebih rendah dari nasional (87,29) dengan gap -0,93.	Cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan 1,11 dari tahun 2020 s.d 2024 (90,78 menjadi 86,36).	Tren ini menunjukkan masih kurang efektifnya capaian pembangunan dibandingkan dinamika yang berkembang pada periode terakhir.	Meskipun tren provinsi menunjukkan peningkatan pada periode 2020 (79,10) sampai dengan 2024 (82,17), namun Kab. HST pada periode yang sama justru menurun dari 90,78 menjadi 86,36, sehingga arah perkembangan Kab. HST belum sejalan dengan provinsi.
APM SD/MI	Capaian Kab. HST (98,37) masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan capaian provinsi (98,68) dengan gap -0,31	Cenderung fluktuatif namun menurun pada periode 2020–2024; dari 2020 (99,01) menjadi 2024 (98,37) dengan rata-rata penurunan 0,16.	Dinamika capaian relatif stabil pada sebagian besar tahun, namun penurunan pada 2024 menunjukkan capaian belum konsisten meningkat	Meskipun capaian provinsi berada pada kisaran yang relatif stabil, tetapi secara konsisten pada tahun 2024 provinsi (98,68) masih sedikit lebih tinggi dibandingkan Kab. HST (98,37), sehingga dapat dikatakan Kab. HST dan provinsi sama-sama berada pada level capaian tinggi namun Kab. HST masih di bawah rata-rata provinsi
APM SMP/MTS	Capaian Kab. HST (74,95)	Cenderung mengalami	Tren ini menunjukkan	Meskipun tren provinsi cenderung

Indikator	Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi
	masih lebih rendah dibandingkan capaian Prov. Kalsel (78,14) dengan gap -3,19.	peningkatan dengan rata-rata peningkatan 0,63 dari tahun 2020 s.d 2024 (72,44 menjadi 74,95).	capaian relatif meningkat, meskipun laju peningkatannya masih terbatas	meningkat bertahap, tetapi secara konsisten antara tahun 2020 (75,51) sampai dengan tahun 2024 (78,14) Prov. Kalsel menunjukkan tren peningkatan; hal yang sama juga terjadi pada Kab. HST tahun 2020 (72,44) sampai dengan tahun 2024 (74,95).
APM SMA/MA	Capaian Kab. HST (58,99) masih lebih rendah dibandingkan capaian provinsi (60,26) dengan gap -1,27; serta lebih rendah dari nasional (64,32) dengan gap -5,33.	Cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan 1,91 dari tahun 2020 s.d 2024 (66,61 menjadi 58,99).	Tren ini menunjukkan capaian APM SMA/SLTA mengalami pelemahan pada periode terakhir.	Meskipun provinsi dan nasional menunjukkan tren peningkatan pada periode 2020–2024 (Prov. 57,61→60,26; Nasional 61,25→64,32), namun Kab. HST menurun dari 66,61 menjadi 58,99, sehingga perkembangan Kab. HST belum mengikuti arah perbaikan provinsi dan nasional
APS SD/MI	Capaian Kab. HST (99,19) masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan capaian provinsi (99,30) dengan gap -0,11.	Cenderung menurun pada periode 2020–2024; dari 2020 (99,97) menjadi 2024 (99,19) dengan rata-rata penurunan 0,20.	Capaian masih tinggi dan relatif stabil, namun tren penurunan menunjukkan perlunya penguatan agar capaian tetap terjaga dan tidak terus menurun.	Meskipun capaian provinsi cenderung stabil, tetapi secara konsisten pada tahun 2024 provinsi (99,30) masih sedikit lebih tinggi dibandingkan Kab. HST (99,19), sehingga dapat dikatakan Kab. HST dan provinsi sama-sama berada pada capaian tinggi namun Kab. HST sedikit lebih rendah
APS SMP/MTS	Capaian Kab. HST (93,48) masih sedikit lebih rendah dibandingkan capaian Prov. Kalsel (93,70) dengan gap -0,22.	Cenderung meningkat dengan fluktuasi; dari tahun 2020 (91,20) menjadi 2024 (93,48) dengan rata-rata peningkatan 0,57.	Tren ini menunjukkan capaian cenderung terjaga dan meningkat, meskipun terjadi fluktuasi antar tahun pada periode pengamatan.	Meskipun tren provinsi berfluktuasi, tetapi secara konsisten antara tahun 2020 (93,04) sampai dengan tahun 2024 (93,70) Prov. Kalsel menunjukkan tren peningkatan; hal yang sama juga terjadi pada Kab. HST tahun 2020 (91,20) sampai dengan tahun 2024 (93,48).
APS SMA/MA	Capaian Kab. HST (72,23) masih sedikit lebih	Cenderung mengalami peningkatan dengan rata-	Tren ini menunjukkan capaian APS SMA/SLTA	Meskipun tren provinsi berfluktuasi, tetapi secara konsisten antara tahun 2020 (69,38)

Indikator	Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi
	rendah dibandingkan capaian provinsi (72,31) dengan gap -0,08.	rata peningkatan 1,41 dari tahun 2020 s.d 2024 (66,61 menjadi 72,23).	cenderung membaik pada periode terakhir.	sampai dengan tahun 2024 (72,31) provinsi menunjukkan tren peningkatan; hal yang sama juga terjadi pada Kab. HST tahun 2020 (66,61) sampai dengan tahun 2024 (72,23).
Rata-rata lama sekolah	Capaian Kab. HST (8,35) masih sedikit lebih rendah dibandingkan capaian provinsi (8,62) dengan gap -0,27.	Cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan 0,09 dari tahun 2020 s.d 2024 (8 menjadi 8,35).	Tren ini menunjukkan capaian konsisten terjaga dan meningkat. Pada tahun capaian terakhir mengalami akselerasi yg cukup signifikan dibanding capaian tahun sebelumnya	Meskipun tren provinsi menunjukkan peningkatan pada periode 2020 (8,29) sampai dengan 2024 (8.62), namun Kab. HST pada periode yang sama juga mengalami peningkatan dari 8 menjadi 8,38, sehingga arah perkembangan Kab. HST sejalan dengan provinsi.
Harapan Lama Sekolah	Capaian Kab. HST (12.31) masih sedikit lebih rendah dibandingkan capaian provinsi (12,87) dengan gap -0,56.	Cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan 0.03 dari tahun 2020 s.d 2024 (12,2 menjadi 12,31).	Tren ini menunjukkan capaian mengalami peningkatan tiap tahunnya secara konsisten.	Meskipun tren provinsi menunjukkan peningkatan pada periode 2020 (12.68) sampai dengan 2024 (12,87), namun Kab. HST pada periode yang sama juga mengalami peningkatan dari 12,2 menjadi 12,31, sehingga arah perkembangan Kab. HST sejalan dengan provinsi.

3.3.2 Kesehatan

Kesehatan masyarakat merupakan salah satu modal dasar dalam upaya pengentasan kemiskinan, karena derajat kesehatan yang baik berpengaruh langsung terhadap produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Program pengentasan kemiskinan dan pembangunan kesehatan harus berjalan secara seimbang dan saling mendukung, sebab peningkatan kesejahteraan tidak dapat dicapai tanpa kondisi kesehatan masyarakat yang memadai. Pembangunan kesehatan pada dasarnya merupakan investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas fisik, intelektual, dan sosial masyarakat dalam keluar dari jerat kemiskinan.

Rendahnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat sering kali menjadi penyebab kemiskinan struktural, karena kondisi kesehatan yang buruk menurunkan daya tahan fisik, kemampuan berpikir, serta produktivitas kerja. Sebaliknya, masyarakat dengan kondisi kesehatan yang baik memiliki kemampuan lebih tinggi untuk bekerja secara optimal, memperoleh pendapatan yang layak, dan meningkatkan taraf hidupnya. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan memiliki fungsi strategis sebagai instrumen kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan, melalui peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dasar, gizi masyarakat, serta perlindungan kesehatan bagi kelompok rentan.

Pemerintah daerah berperan penting dalam memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui kebijakan intervensi kesehatan, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah. Perbaikan derajat kesehatan akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mengurangi hari tidak bekerja, dan memperbesar peluang ekonomi rumah tangga miskin untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

Tingkat keberhasilan pembangunan kesehatan dapat dilihat dari berbagai indikator utama, antara lain Angka Kematian Ibu

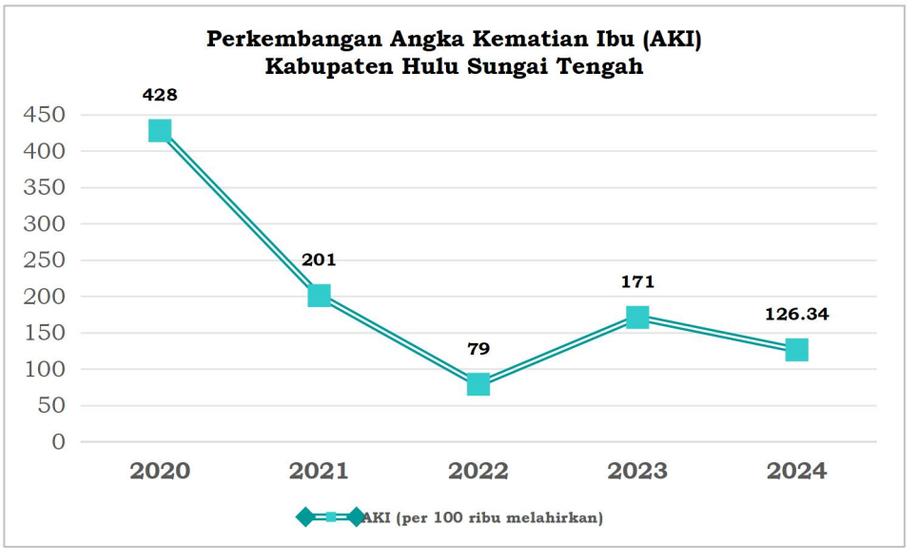
(AKI), Angka Kematian Bayi (AKB dan AKABA), cakupan persalinan di fasilitas kesehatan, serta prevalensi stunting yang mencerminkan kondisi gizi anak. Indikator-indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai sejauh mana pembangunan kesehatan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup dan pengurangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab Alain, per 100.000 kelahiran hidup. Yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll.

Sebagaimana gambar di bawah terlihat bahwa pada tahun 2020, AKI tercatat sebesar 428 per 100.000 kelahiran hidup dan menurun menjadi 201 pada tahun 2021. Penurunan berlanjut pada 2022 dengan capaian 79 per 100.000 kelahiran hidup, yang merupakan nilai terendah dalam periode pengamatan. Pada tahun 2023, AKI kembali meningkat menjadi 171, kemudian menurun kembali pada 2024 menjadi 126,34 per 100.000 kelahiran hidup. Secara keseluruhan meski terjadi dinamika sampai dengan tahun 2024 terjadi penutunan AKI meskipun bukan merupakan nilai terendah dalam 5 tahun terakhir

Gambar 3. 17 Tren Angka Kematian Ibu Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Tengah, 2025

Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator utama yang menggambarkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya pada kelompok usia paling rentan. AKB menunjukkan jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam periode tertentu. Secara normatif, nilai AKB dikategorikan sebagai berikut: <20 rendah, 20–39 sedang, 40–70 tinggi, dan >70 sangat tinggi.

AKB berfungsi sebagai indikator yang sensitif terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi, kesehatan lingkungan, serta mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak. Bayi yang baru lahir sangat rentan terhadap kondisi gizi, lingkungan, dan tingkat pendidikan maupun ekonomi keluarga. Oleh karena itu, nilai AKB sering digunakan sebagai tolok ukur efektivitas intervensi kesehatan dasar, seperti pelayanan antenatal, persalinan aman, imunisasi, serta perawatan bayi baru lahir.

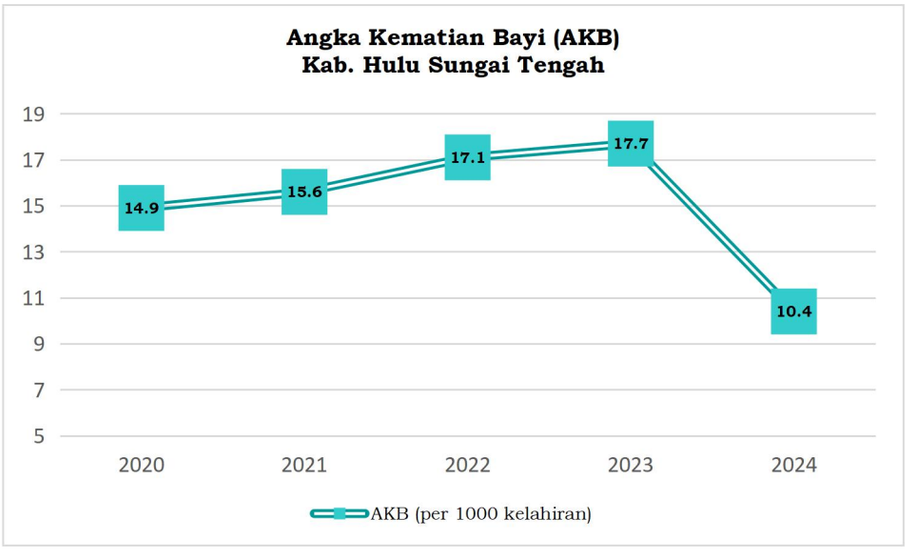
Selain itu, AKB juga mencerminkan tingkat kesehatan reproduksi, karena sebagian besar kematian bayi terjadi pada usia 0–28 hari (periode neonatal) yang berkaitan dengan kondisi ibu selama kehamilan, proses persalinan, dan perawatan pasca lahir.

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah periode 2020–2024 menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan menurun pada akhir periode.

Pada tahun 2020, AKB tercatat sebesar 14,9 per 1.000 kelahiran hidup, kemudian meningkat secara bertahap menjadi 15,6 pada tahun 2021, 17,1 pada 2022, dan mencapai nilai tertinggi sebesar 17,7 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2023. Setelah itu, pada tahun 2024, AKB menurun cukup signifikan menjadi 10,4 per 1.000 kelahiran hidup, yang merupakan capaian terendah selama lima tahun terakhir.

Secara umum, data tersebut menunjukkan bahwa Angka Kematian Bayi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada pada kategori rendah (di bawah 20 per 1.000 kelahiran hidup) dengan variasi antar tahun. Perubahan nilai ini menggambarkan dinamika pencapaian derajat kesehatan anak, khususnya dalam upaya penurunan kematian bayi di daerah selama periode 2020–2024. Nilai AKB di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3. 18 Tren Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Tengah, 2025

Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita (AKABA) menggambarkan jumlah kematian anak usia 0–4 tahun (0–59 bulan) per 1.000 anak pada kelompok usia yang sama dalam periode tertentu. AKABA digunakan untuk menilai kelangsungan hidup anak serta

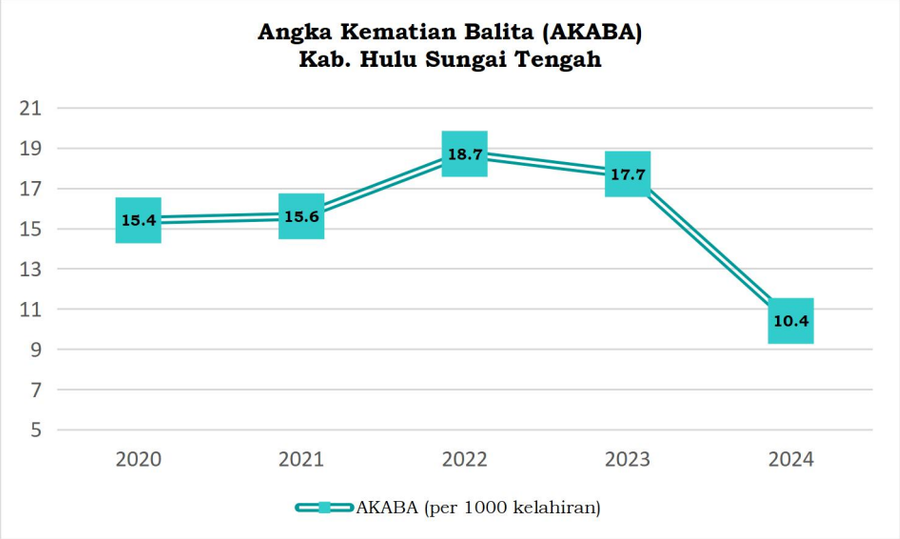
mencerminkan kondisi sosial, ekonomi, gizi, dan lingkungan tempat tinggal masyarakat.

Indikator ini sering digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kesejahteraan dan kesulitan ekonomi penduduk, karena anak-anak dari keluarga miskin umumnya lebih rentan terhadap penyakit, kekurangan gizi, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan sanitasi. Dengan demikian, AKABA menjadi salah satu indikator penting dalam analisis kemiskinan nonmoneter, yang menggambarkan kualitas hidup rumah tangga dari sisi kesehatan anak.

Angka Kematian Balita (AKABA) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah periode 2020–2024 menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan menurun pada akhir periode. Pada tahun 2020, AKABA tercatat sebesar 15,4 per 1.000 kelahiran hidup, kemudian relatif stabil pada tahun 2021 dengan nilai 15,6. Pada tahun 2022, angka kematian balita meningkat menjadi 18,7, yang merupakan nilai tertinggi selama lima tahun terakhir, dan sedikit menurun pada 2023 menjadi 17,7 per 1.000 kelahiran hidup. Selanjutnya, pada tahun 2024, AKABA menurun cukup tajam menjadi 10,4 per 1.000 kelahiran hidup.

Secara umum, nilai AKABA di Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama periode 2020–2024 berada pada kategori rendah (di bawah 20 per 1.000 kelahiran hidup), dengan variasi antar tahun yang menunjukkan adanya perubahan capaian dalam pembangunan kesehatan anak. Tren penurunan pada akhir periode menunjukkan perbaikan kondisi kelangsungan hidup balita di daerah tersebut. Nilai AKABA di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3. 19 Tren Perkembangan Angka Kematian Balita (AKABA) di Kab. Hulu Sungai Tengah



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Tengah, 2025

Persalinan di fasilitas kesehatan

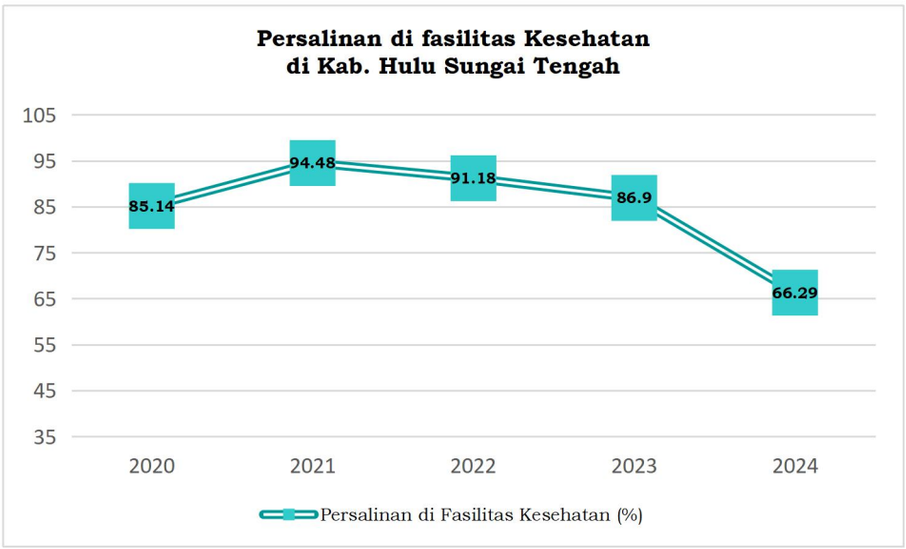
Persalinan di fasilitas kesehatan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai derajat kesehatan ibu dan kualitas pelayanan kesehatan dasar di suatu daerah. Indikator ini menggambarkan sejauh mana masyarakat, khususnya ibu hamil, memperoleh akses terhadap layanan persalinan yang aman dan ditangani oleh tenaga kesehatan profesional.

Kebijakan peningkatan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan menjadi strategi utama dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir, karena fasilitas kesehatan memiliki standar pelayanan medis, sarana, dan tenaga yang lebih memadai untuk menjamin keselamatan ibu dan bayi selama proses persalinan.

Capaian persalinan di fasilitas kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah periode 2020–2024 menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan menurun pada akhir periode. Pada tahun 2020, persalinan di fasilitas kesehatan tercatat sebesar 85,14 persen, kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 94,48 persen, yang merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Setelah itu, capaian tersebut menurun menjadi 91,18 persen pada tahun 2022, dan kembali turun menjadi 86,9 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2024, persentase persalinan di fasilitas kesehatan menurun lebih jauh menjadi 66,29 persen.

Secara umum, data tersebut menunjukkan bahwa cakupan persalinan di fasilitas kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah relatif tinggi pada awal periode namun mengalami penurunan signifikan pada tahun 2024. Variasi capaian antar tahun ini mencerminkan dinamika akses dan pemanfaatan layanan kesehatan ibu di daerah selama periode pengamatan. Capaian persalinan di fasilitas kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3. 20 Tren Capaian Persalinan di fasilitas Kesehatan di Kab. Hulu Sungai Tengah



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Tengah, 2025

Prevalensi stunting pada balita

Stunting merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan kualitas gizi dan kesehatan anak usia dini, serta menjadi cerminan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang terjadi akibat ketidakcukupan asupan gizi dalam jangka waktu lama, terutama pada masa seribu hari pertama kehidupan (HPK). Kondisi ini ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih rendah dari standar usianya, yang menunjukkan adanya gangguan pertumbuhan fisik dan perkembangan.

Masalah stunting memiliki keterkaitan yang erat dengan kemiskinan, karena rumah tangga berpendapatan rendah cenderung memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan gizi, akses terhadap pelayanan kesehatan, air bersih, serta

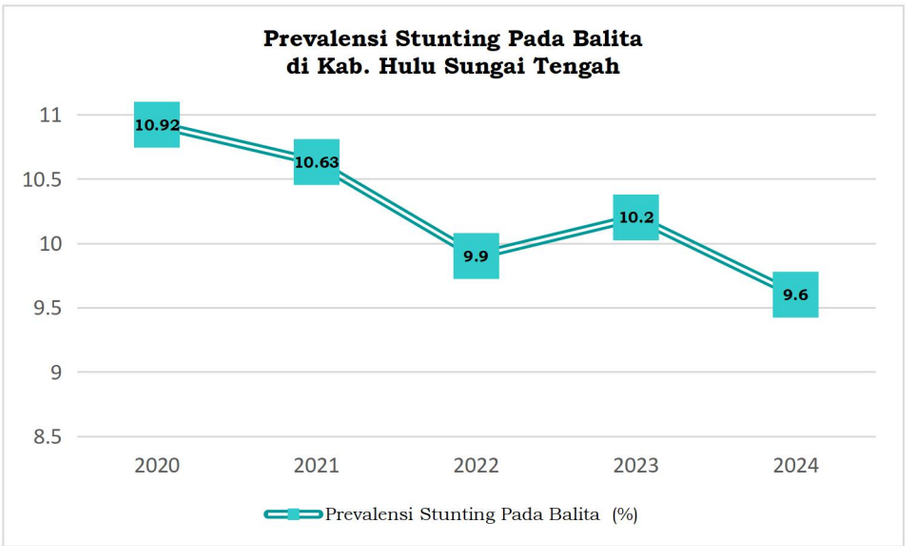
sanitasi yang layak. Akumulasi faktor-faktor tersebut berdampak pada kualitas tumbuh kembang anak.

Prevalensi stunting tidak hanya mencerminkan kondisi gizi, tetapi juga menjadi indikator penting kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Tingginya angka stunting berimplikasi terhadap rendahnya kapasitas belajar, produktivitas, dan daya saing tenaga kerja di masa dewasa. Oleh karena itu, penurunan stunting merupakan bagian strategis dari upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan manusia di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pada tahun 2020, prevalensi stunting tercatat sebesar 10,92 persen, kemudian menurun menjadi 10,63 persen pada tahun 2021 dan 9,90 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2023, prevalensi sedikit meningkat menjadi 10,20 persen, namun kembali menurun pada 2024 menjadi 9,60 persen, yang merupakan capaian terendah dalam lima tahun terakhir.

Secara umum, data tersebut menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Hulu Sungai Tengah cenderung menurun dari tahun ke tahun, mencerminkan perbaikan kondisi gizi dan kesehatan anak balita di daerah. Perkembangan prevalensi stunting pada balita di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2020–2024 dapat dilihat pada gambar di bawah.

Gambar 3. 21 Tren Perkembangan Prevalensi Stunting Pada Balita Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 - 2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Tengah, 2025

Tabel 3. 18 Analisis Aspek Kemiskinan Berdasarkan Bidang Kesehatan di Kab. Hulu Sungai Tengah

Indikator	Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi
Angka Kematian Ibu	Capaian AKI Kab. HST pada 2024 sebesar 126,34, lebih rendah dibanding Prov. Kalsel 146 dengan gap -19,66.	Kab. HST menurun dari 428 (2020) menjadi 126,34 (2024) (penurunan total -301,66; rata-rata penurunan -75,42 per tahun). Prov. Kalsel meningkat dari 135 (2020) menjadi 146 (2024) (meningkat total +11; rata-rata peningkatan +2,75 per tahun).	Tren ini menunjukkan capaian menurun, meskipun terjadi fluktuasi antar tahun pada periode pengamatan.	Meskipun tren provinsi menunjukan fluktuasi, dari tahun 2020 (135) sampai dengan tahun 2024 (146) dapat dikatakan Kab HST dan Provinsi sama-sama menunjukan tren fluktuatif dengan Kab HST 2020 (428) sampai dengan Tahun 2024 (126,34).
Angka Kematian Bayi	Capaian AKB Kab. HST pada 2024 sebesar 10,4, lebih rendah dibanding Prov. Kalsel 11,2 dengan gap -0,8.	Kab. HST menurun dari 14,9 (2020) menjadi 10,4 (2024) (perubahan total -4,5; rata-rata perubahan -1,125 per tahun), dengan pola sempat meningkat hingga 2023 (17,7) lalu turun tajam di 2024. Prov. Kalsel meningkat dari 8,7 (2020) menjadi 11,2 (2024) (perubahan total +2,5; rata-rata perubahan +0,625 per tahun).	Tren ini menunjukkan capaian menurun, meskipun terjadi fluktuasi antar tahun pada periode pengamatan.	Meskipun tren provinsi menunjukan fluktuasi, dari tahun 2020 (8,7) sampai dengan tahun 2024 (11,2) dapat dikatakan Kab HST dan Provinsi sama-sama menunjukan tren fluktuatif dengan Kab HST 2020 (14,9) sampai dengan Tahun 2024 (10,4).
Angka Kematian Balita	Capaian AKABA Kab. HST pada 2024 sebesar 10,4, lebih rendah dibanding 2023 (17,7) dengan gap -7,3, dan merupakan nilai terendah pada periode 2020–2024.	Meningkat dari 15,4 (2020) menjadi puncak 18,7 (2022), kemudian turun menjadi 17,7 (2023) dan turun tajam ke 10,4 (2024). Perubahan 2022–2024 turun 8,3 poin.	Penurunan dari 17,7 (2023) menjadi 10,4 (2024) menunjukkan perbaikan capaian hasil pada tahun terakhir, setelah sebelumnya sempat meningkat hingga 2022.	AKABA relevan sebagai indikator outcome kesehatan anak karena menggambarkan perubahan risiko kematian balita per 1.000 kelahiran hidup, yang mencerminkan kondisi layanan kesehatan anak dan faktor pendukung tumbuh kembang balita.

Indikator	Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi
Persalinan di fasilitas kesehatan	Capaian tertinggi terjadi pada 2021 sebesar 94,48%, sedangkan capaian terendah pada 2024 sebesar 66,29% dengan gap -28,19 poin. Dibanding 2023 (86,90%), capaian 2024 lebih rendah -20,61 poin.	Capaian meningkat dari 85,14% (2020) ke 94,48% (2021), kemudian menurun bertahap menjadi 91,18% (2022) dan 86,90% (2023), serta turun tajam menjadi 66,29% (2024). Secara total 2020–2024 turun -18,85 poin (rata-rata perubahan -4,71 poin per tahun).	Penurunan capaian yang berlanjut hingga 2024 menunjukkan hasil indikator belum terjaga konsistensinya, terutama karena penurunan terbesar terjadi pada 2023–2024 (-20,61 poin) yang mengubah posisi indikator dari level tinggi (di atas 85%) menjadi 66,29%.	Indikator ini relevan sebagai ukuran akses dan pemanfaatan layanan persalinan aman karena berhubungan langsung dengan kualitas layanan maternal–neonatal, serta berkaitan erat dengan dinamika indikator outcome seperti AKI dan AKB.
Prevalensi stunting pada balita	Capaian tertinggi terjadi pada 2020 sebesar 10,92%, sedangkan capaian terendah pada 2024 sebesar 9,60% dengan gap -1,32 poin. Dibanding 2023 (10,20%), capaian 2024 lebih rendah -0,60 poin.	Capaian menurun dari 10,92% (2020) ke 10,63% (2021) dan 9,90% (2022), sempat meningkat pada 2023 menjadi 10,20%, lalu kembali menurun pada 2024 menjadi 9,60%. Secara total 2020–2024 turun -1,32 poin (rata-rata perubahan -0,33 poin per tahun).	Secara hasil, stunting pada 2024 membaik dibanding 2023 (turun 0,60 poin) dan menjadi nilai terendah dalam periode 2020–2024. Namun adanya kenaikan pada 2023 (9,90% → 10,20%) menunjukkan capaian sempat berfluktuasi sebelum kembali menurun pada 2024.	Indikator stunting relevan sebagai ukuran outcome gizi balita dan kualitas tumbuh kembang, serta menjadi indikator strategis pembangunan SDM karena perubahannya mencerminkan kondisi gizi kronis yang berdampak jangka panjang pada kualitas kesehatan dan produktivitas.

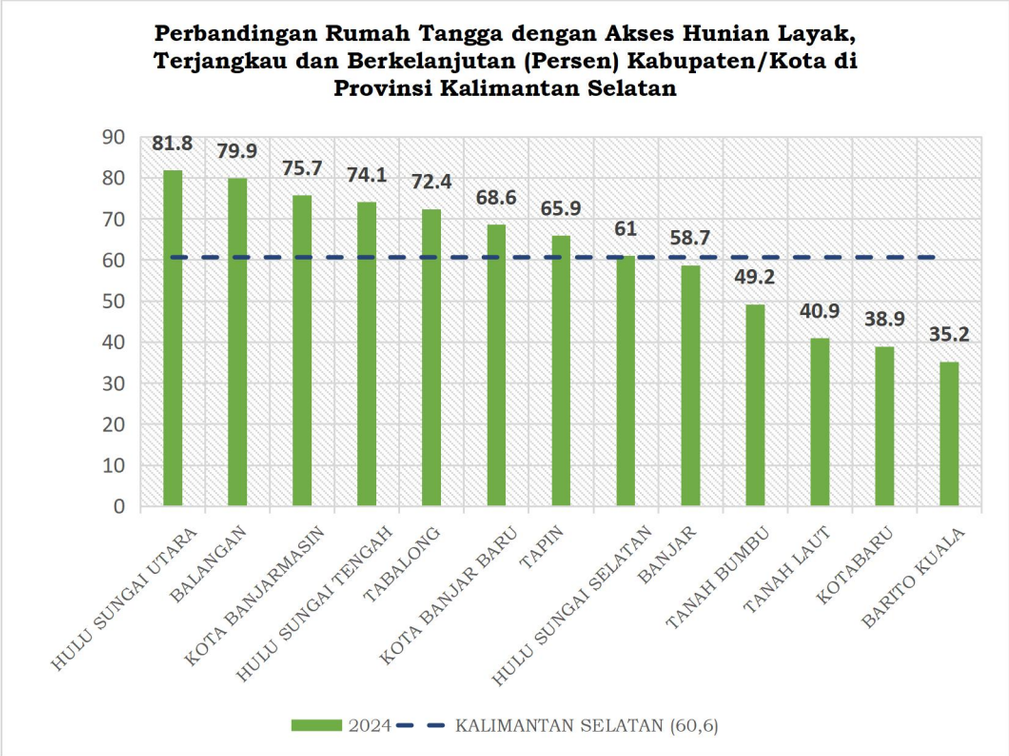
3.3.3 Infrastruktur

Infrastruktur dasar merupakan salah satu determinan penting dalam memahami kondisi kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ketersediaan, kualitas, dan keterjangkauan infrastruktur hunian, energi, sanitasi, dan jaringan jalan berhubungan dengan kemampuan rumah tangga dalam mengakses layanan dasar, kegiatan sosial-ekonomi, serta pelayanan publik di wilayahnya. Oleh karena itu, analisis infrastruktur dalam konteks penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk menggambarkan kondisi objektif sarana dan prasarana yang dinikmati rumah tangga di daerah.

Kajian infrastruktur pada sub-bab ini difokuskan pada beberapa kelompok indikator. Pertama, Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (persen) yang menggambarkan proporsi rumah tangga yang telah menempati hunian dengan standar kelayakan tertentu, sekaligus memungkinkan perbandingan posisi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan. Kedua, Persentase Rumah Layak Huni yang menunjukkan proporsi unit hunian yang memenuhi kriteria kelayakan fisik bangunan, kualitas bahan, dan kondisi lingkungan permukiman. Ketiga, Persentase Rumah Tangga Bersanitasi yang memberikan gambaran mengenai akses rumah tangga terhadap prasarana sanitasi dasar yang memadai. Keempat, Capaian Daya Listrik Terpasang (MW) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang memberikan gambaran perkembangan kapasitas penyediaan energi listrik di daerah dalam kurun waktu tertentu. Kelima, Panjang Jalan Menurut Jenis Jalan (km) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menunjukkan kondisi jaringan jalan sebagai salah satu prasarana utama mobilitas penduduk dan distribusi barang/jasa.

Seluruh indikator tersebut disajikan untuk memberikan gambaran infrastruktur dalam analisis determinan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Gambar 3. 22 Tren Perbandingan Perbandingan Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (Persen) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024



Sumber : BPS Kalimantan Selatan, hasil olahan 2025

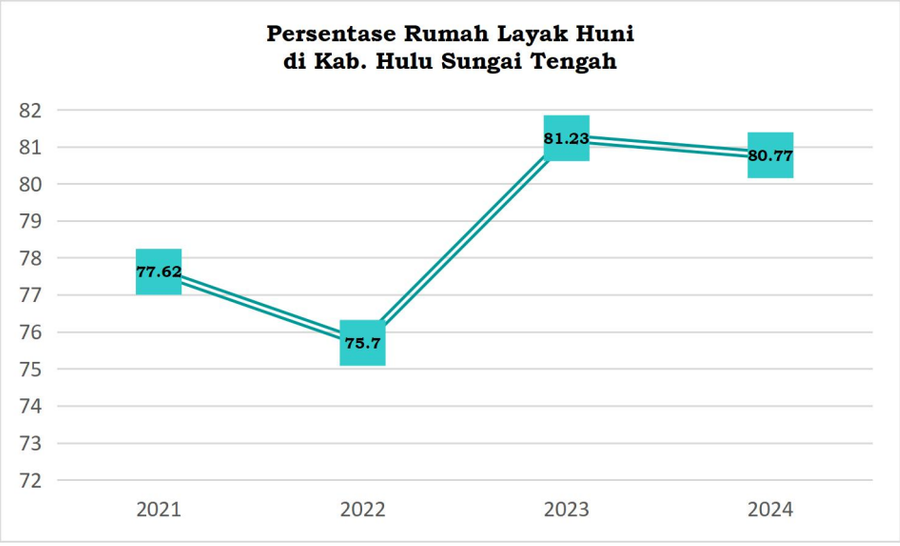
Berdasarkan gambar di atas data tahun 2024 menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Selatan berada pada angka 60,6 persen. Jika dibandingkan antar kabupaten/kota, terlihat variasi capaian yang cukup lebar di seluruh wilayah provinsi.

Kabupaten Hulu Sungai Tengah mencatat capaian sebesar 74,1 persen, berada di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan dan menempati posisi keempat tertinggi di antara kabupaten/kota. Tiga daerah dengan capaian lebih tinggi dibanding Hulu Sungai Tengah adalah Hulu Sungai Utara (81,8 persen), Balangan (79,9 persen), dan Kota Banjarmasin (75,7 persen). Setelah Hulu Sungai Tengah, capaian berikutnya adalah Tabalong (72,4 persen), Kota Banjarbaru (68,6 persen), Tapin (65,9 persen), serta Hulu Sungai Selatan (61,0 persen) yang berada sedikit di atas rata-rata provinsi.

Sebaliknya, beberapa kabupaten berada di bawah rata-rata provinsi, yaitu Banjar (58,7 persen), Tanah Bumbu (49,2 persen), Tanah Laut (40,9 persen), Kotabaru (38,9 persen), dan Barito

Kuala (35,2 persen). Posisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Tengah termasuk dalam kelompok daerah dengan capaian relatif tinggi untuk indikator hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan jika dibandingkan dengan sebagian besar kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan pada tahun 2024.

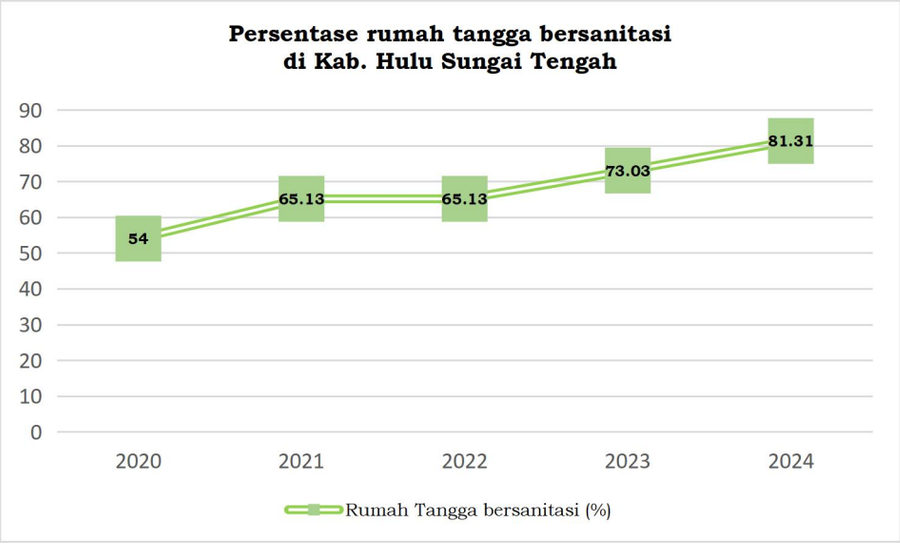
Gambar 3. 23 Perkembangan Capaian Persentase Rumah Layak Huni di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 – 2024



Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Hasil olahan 2025

Berdasarkan gambar capaian rasio rumah layak huni di atas pada tahun 2021 adalah sebesar 77,62 % dan pada tahun 2024 sudah mencapai 80,77 %. Berarti masih ada rumah yang tidak layak huni pada tahun 2024 sebesar 20,23 %.

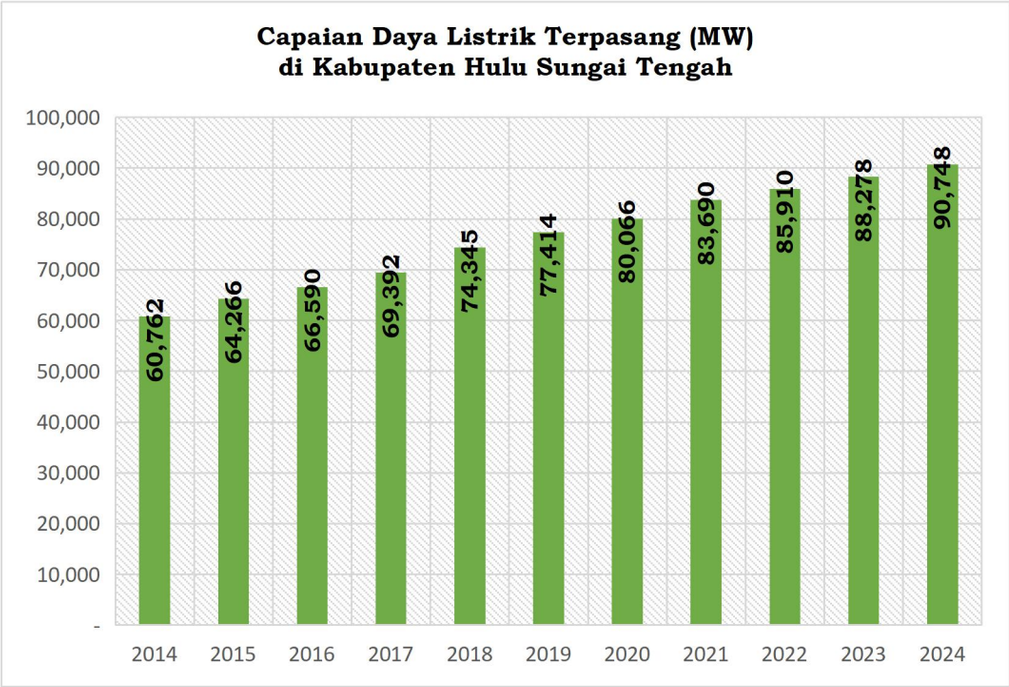
Gambar 3. 24 Perkembangan Capaian Persentase rumah tangga bersanitasi di Kab Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Hulu Sungai Tengah, Hasil olahan 2025

Cakupan rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, cakupan rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak baru mencapai 54,00%, kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai 81,31% pada tahun 2024. Meskipun terjadi kemajuan yang cukup pesat, kondisi pada awal periode menunjukkan bahwa hampir setengah rumah tangga di daerah ini belum memiliki akses sanitasi layak sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3. 25 Perkembangan Capaian Daya Listrik Terpasang (MW) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014 - 2024



Sumber : Tabel Dinamis BPS Kalimantan Selatan dari PT PLN (Persero), hasil olahan 2025

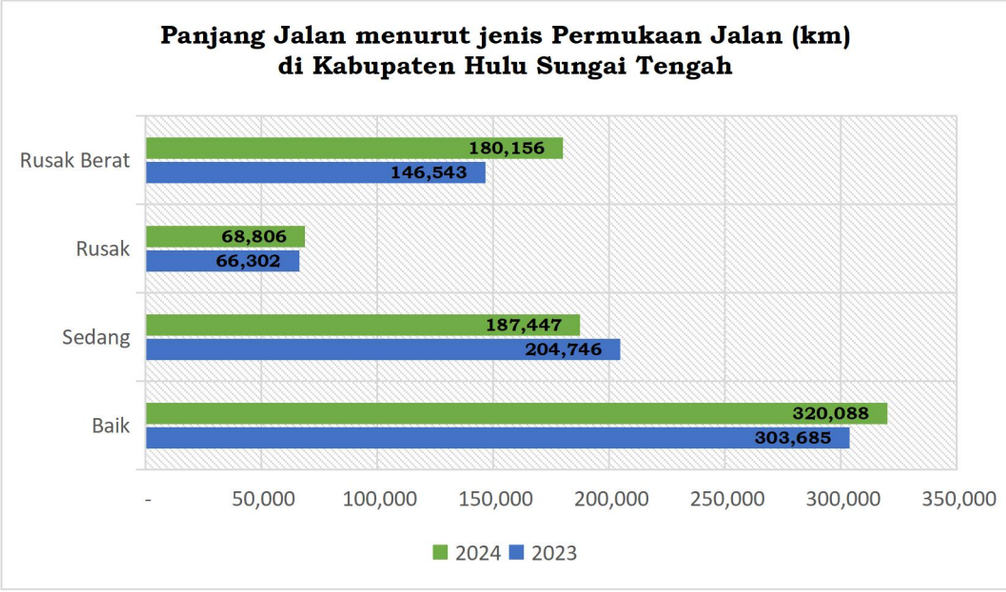
Berdasarkan gambar di atas perkembangan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan peningkatan kuantitatif yang konsisten selama periode 2014–2024. Data memperlihatkan bahwa jumlah rumah tangga yang memiliki akses hunian layak meningkat setiap tahun tanpa jeda penurunan.

Pada tahun 2014 jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak tercatat sebanyak 60.762 rumah tangga, dan meningkat menjadi 64.266 pada tahun 2015 serta 66.590 pada 2016. Peningkatan berlanjut pada 2017 mencapai 69.392 rumah

tangga, kemudian naik menjadi 74.345 pada 2018 dan 77.414 pada 2019.

Pada periode 2020–2024, pertumbuhan jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak menunjukkan pola peningkatan tahunan yang tetap. Tahun 2020 tercatat 80.066 rumah tangga, meningkat menjadi 83.690 pada 2021, 85.910 pada 2022, dan 88.278 pada 2023. Tahun 2024 mencatat jumlah tertinggi sepanjang periode dengan 90.748 rumah tangga.

Gambar 3. 26 Panjang Jalan Menurut Jalan (km) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023 sd 2024



Sumber : BPS Kalimantan Selatan dari Dinas PUPR Kab.HST, hasil olahan 2025

Data panjang jalan menurut kondisi permukaan jalan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan adanya perubahan dalam distribusi kondisi jalan kabupaten. Perubahan ini menggambarkan variasi kondisi infrastruktur transportasi yang menjadi bagian penting dalam analisis infrastruktur dasar daerah.

Pada tahun 2023, panjang jalan dengan kondisi baik tercatat sebesar 303,685 km, dan meningkat menjadi 320,088 km pada tahun 2024. Jalan dengan kondisi sedang pada 2023 mencapai 204,746 km, kemudian berkurang menjadi 187,447 km pada 2024. Untuk kategori rusak, panjang jalan tercatat 66,302 km pada 2023 dan meningkat menjadi 68,806 km pada tahun berikutnya. Sementara itu, jalan dengan kondisi rusak berat

sepanjang 146,543 km pada 2023 bertambah menjadi 180,156 km pada 2024.

Tabel 3. 19 Analisis Aspek Kemiskinan Berdasarkan Bidang Infrastruktur di Kab. Hulu Sungai Tengah

Indikator	Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Capaian Kab. HST tahun 2024 sebesar 74,1 persen, berada di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan (60,6 persen) dan termasuk kelompok capaian menengah–atas di tingkat provinsi.	Capaian meningkat dari 75,7 persen (2022) menjadi 81,23 persen (2023) dan relatif stabil pada 80,77 persen (2024).	Stabilnya capaian pada level tinggi menunjukkan upaya pemenuhan hunian layak berjalan relatif efektif meskipun terdapat koreksi kecil pada tahun terakhir.	Tren peningkatan akses hunian layak di Kab. HST sejalan dengan arah provinsi yang juga berada pada capaian di atas 60 persen. Capaian Kab. HST yang lebih tinggi dari rata-rata provinsi menunjukkan kontribusi positif daerah dalam mendukung pencapaian target pembangunan perumahan di tingkat regional.
Rumah Layak Huni	Persentase rumah layak huni Kab. HST tahun 2024 mencapai 80,77 persen, menunjukkan kondisi perumahan yang relatif baik.	Setelah menurun pada 2022 (75,7 persen), capaian meningkat signifikan pada 2023 (81,23 persen) dan relatif terjaga pada 2024.	Peningkatan pasca-2022 dan stabilisasi capaian menunjukkan efektivitas intervensi perbaikan kualitas rumah.	Perkembangan rumah layak huni di Kab. HST menunjukkan pola peningkatan yang konsisten dan selaras dengan arah kebijakan peningkatan kualitas permukiman. Stabilnya capaian pada level tinggi memperkuat dukungan daerah terhadap target peningkatan kesejahteraan hunian secara berkelanjutan.
Persentase rumah tangga bersanitasi	Capaian sanitasi rumah tangga tahun 2024 sebesar 81,31 persen, menunjukkan akses sanitasi yang relatif tinggi.	Meningkat konsisten dari 54 persen (2020) menjadi 81,31 persen (2024), dengan akselerasi pada dua tahun terakhir.	Tren peningkatan berkelanjutan menunjukkan efektivitas program sanitasi dalam memperluas akses rumah tangga.	Tren peningkatan sanitasi rumah tangga di Kab. HST sejalan dengan agenda provinsi dan nasional dalam perluasan akses sanitasi layak. Kenaikan signifikan sejak 2020 menunjukkan peran aktif daerah dalam mendukung target kesehatan lingkungan.
Daya Listrik Terpasang (MW)	Daya listrik terpasang Kab. HST tahun 2024 mencapai 90,748 MW, menunjukkan kapasitas pasokan energi yang meningkat.	Meningkat konsisten dari 60,762 MW (2014) tanpa penurunan hingga 2024.	Konsistensi peningkatan mencerminkan efektivitas pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan.	Peningkatan daya listrik terpasang di Kab. HST sejalan dengan tren penguatan infrastruktur energi di tingkat provinsi. Konsistensi kenaikan kapasitas mendukung kebutuhan pelayanan dasar dan aktivitas ekonomi

Indikator	Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi
				daerah.
Panjang Jalan Menurut Jalan (km)	Panjang jalan kondisi baik meningkat menjadi 320,088 km (2024) dibandingkan 2023 (303,685 km).	Terjadi peningkatan jalan kondisi baik dan penurunan kondisi sedang, namun jalan rusak berat meningkat dari 146,543 km menjadi 180,156 km.	Perbaikan jalan berjalan, namun peningkatan jalan rusak berat menunjukkan tantangan pemeliharaan jaringan jalan.	Perbaikan kondisi jalan di Kab. HST mendukung arah kebijakan peningkatan konektivitas wilayah. Namun, meningkatnya jalan rusak berat menunjukkan perlunya penguatan pemeliharaan agar sejalan dengan target peningkatan kualitas infrastruktur jalan secara menyeluruh.

3.3.4 Ketenagakerjaan

Permasalahan utama ketenagakerjaan adalah pengangguran, yang berdampak langsung terhadap kerawanan sosial dan tingkat kemiskinan. Fenomena ini mencerminkan adanya kelebihan penawaran tenaga kerja dibandingkan dengan kesempatan kerja yang tersedia, sehingga sebagian penduduk usia produktif tidak memperoleh pendapatan yang memadai.

Kesempatan kerja merupakan aspek mendasar dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Setiap penduduk yang mampu dan mau bekerja seharusnya memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak dan dilindungi secara hukum. Oleh karena itu, pengangguran perlu mendapat perhatian serius sebagai indikator ketidakmampuan sistem ekonomi daerah dalam menyerap tenaga kerja serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)

Indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran terbuka (TPT). TPT merupakan perbandingan antara penduduk yang termasuk dalam kategori pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT merupakan indikator yang sangat informatif yang dapat menggambarkan indikasi maupun kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan. Tingginya angka TPT mencerminkan tingkat kegagalan penyerapan tenaga kerja dalam pasar kerja. Manfaat analisis terhadap indikator ini adalah untuk melihat keterjangkauan pekerjaan.

Tabel 3. 20 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2015-2024

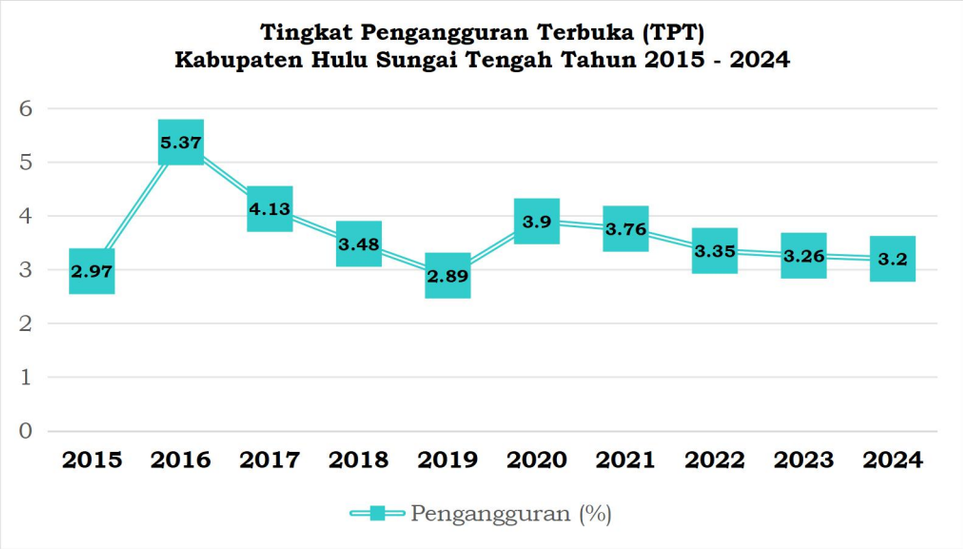
Tahun	Pengangguran (%)
2015	2,97
2016	5,37
2017	4,13
2018	3,48
2019	2,89
2020	3,9
2021	3,76
2022	3,35
2023	3,26
2024	3,2

Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, Olahan Data 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada periode 2015–2024 menunjukkan fluktuasi dalam kisaran 2,89–5,37 persen. Pada tahun 2015, TPT tercatat sebesar 2,97 persen, kemudian meningkat menjadi 5,37 persen pada tahun 2016, yang merupakan nilai tertinggi dalam periode tersebut. Setelah itu, TPT menurun hingga mencapai 2,89 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2020, TPT meningkat menjadi 3,90 persen, kemudian turun menjadi 3,76 persen pada tahun 2021, 3,26 persen pada tahun 2023, dan 3,20 persen pada tahun 2024.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa nilai TPT Kabupaten Hulu Sungai Tengah berfluktuasi dengan kecenderungan menurun dalam rentang sepuluh tahun terakhir, sebagaimana tergambar pada grafik berikut.

Gambar 3. 27 Grafik Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015 – 2024



Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, Olahan Data 2025

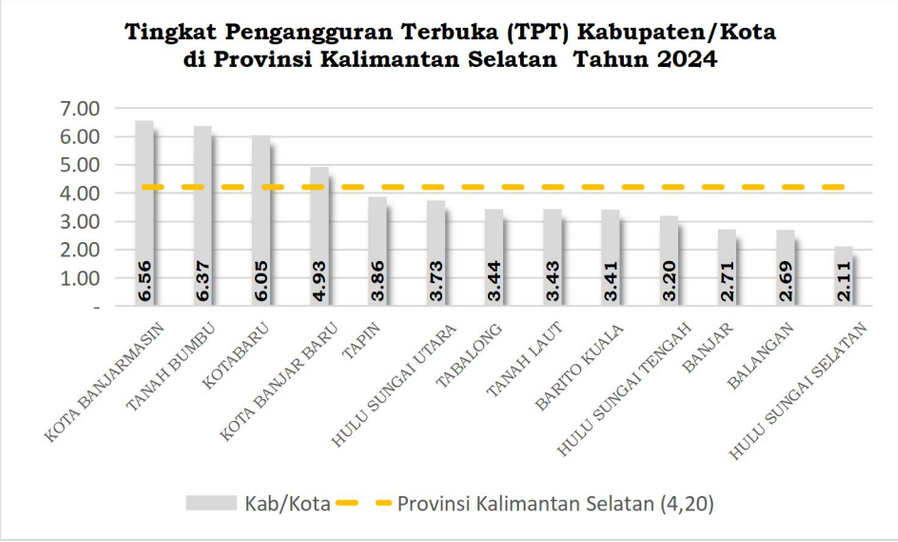
Berdasarkan data TPT Provinsi Kalimantan Selatan tahun terakhir, rata-rata provinsi tercatat sebesar 4,20 persen. Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki TPT sebesar 3,20 persen, berada di bawah rata-rata provinsi dan menempati posisi ke-10 dari 13 kabupaten/kota.

Nilai TPT Hulu Sungai Tengah lebih rendah dibandingkan daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi seperti Kota Banjarmasin (6,56%), Tanah Bumbu (6,37%), dan Kotabaru (6,05%). Sebaliknya, TPT HST masih lebih tinggi dibandingkan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan (2,11%), Balangan (2,69%), dan Banjar (2,71%).

Perbandingan ini menunjukkan variasi tingkat pengangguran antarwilayah di Kalimantan Selatan, dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada pada kelompok daerah dengan TPT menengah ke bawah dalam konteks provinsi. Perbandingan capaian kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

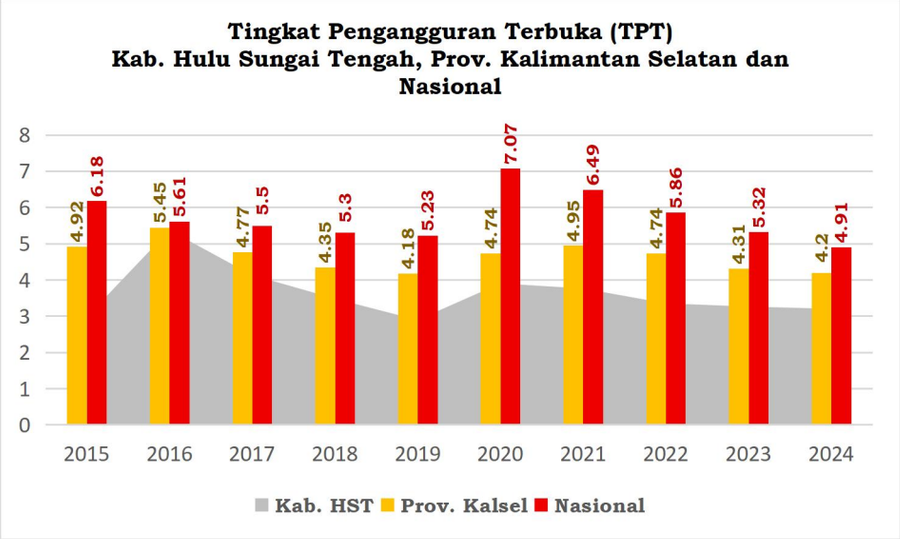
Gambar 3. 28 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024



Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, Olahan Data 2025

Pada tahun 2015, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 2,97 persen, lebih rendah dibandingkan Provinsi Kalimantan Selatan (4,92 persen) dan nasional (6,18 persen). Tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 5,37 persen, mendekati rata-rata provinsi (5,45 persen) dan nasional (5,61 persen). Sejak tahun 2017 hingga 2024, TPT Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Pada tahun 2024, TPT HST tercatat 3,20 persen, sedangkan Kalimantan Selatan 4,20 persen dan nasional 4,91 persen. Perbandingan capaian TPT Kab. Hulu Sungai Tengah dengan tingkat Prov. Kalimantan Selatan dan Nasional dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3. 29 Perbandingan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2015-2024



Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, Olahan Data 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja.TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Tabel 3. 21 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015 – 2024

Tahun	TPAK (%)
2015	74,16
2016	71,65
2017	74,58
2018	73,87
2019	70,03
2020	71,15
2021	70,20
2022	67,63
2023	71,97
2024	74,53

Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, Olahan Data 2025

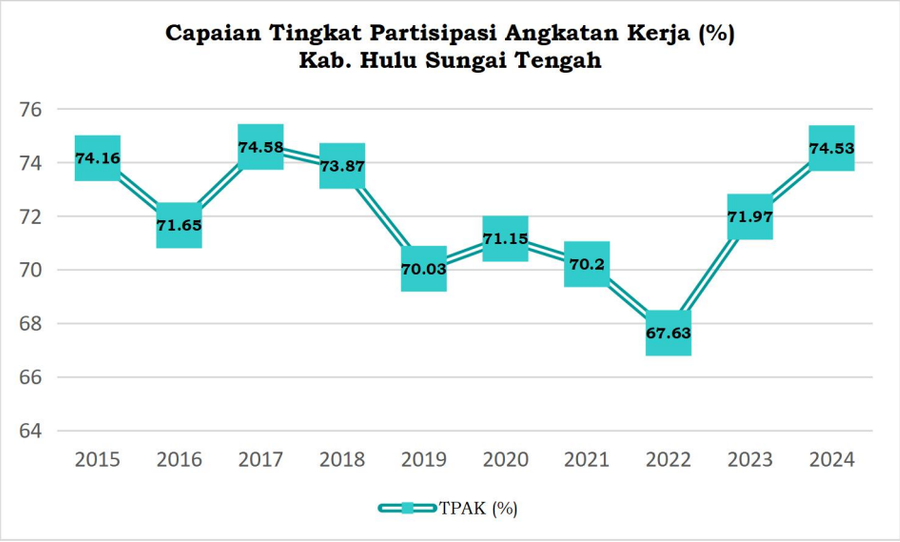
Berdasarkan data diatas, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada periode 2015–2024 menunjukkan pola yang berfluktuasi. Pada tahun 2015, TPAK

tercatat sebesar 74,16 persen, kemudian menurun menjadi 71,65 persen pada tahun 2016, dan kembali meningkat menjadi 74,58 persen pada tahun 2017.

Pada tahun 2018, TPAK sedikit menurun menjadi 73,87 persen, dan mencapai nilai terendah pada tahun 2022 sebesar 67,63 persen. Setelah itu, TPAK kembali meningkat menjadi 71,97 persen pada tahun 2023 dan 74,53 persen pada tahun 2024, yang merupakan nilai tertinggi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir.

Secara umum, data menunjukkan bahwa partisipasi penduduk usia kerja di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam kegiatan ekonomi mengalami perubahan dari tahun ke tahun, dengan nilai TPAK berada pada kisaran 67–75 persen selama periode 2015–2024. Secara visual perkembangan capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3. 30 Perkembangan Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2015 – 2024



Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, Olahan Data 2025

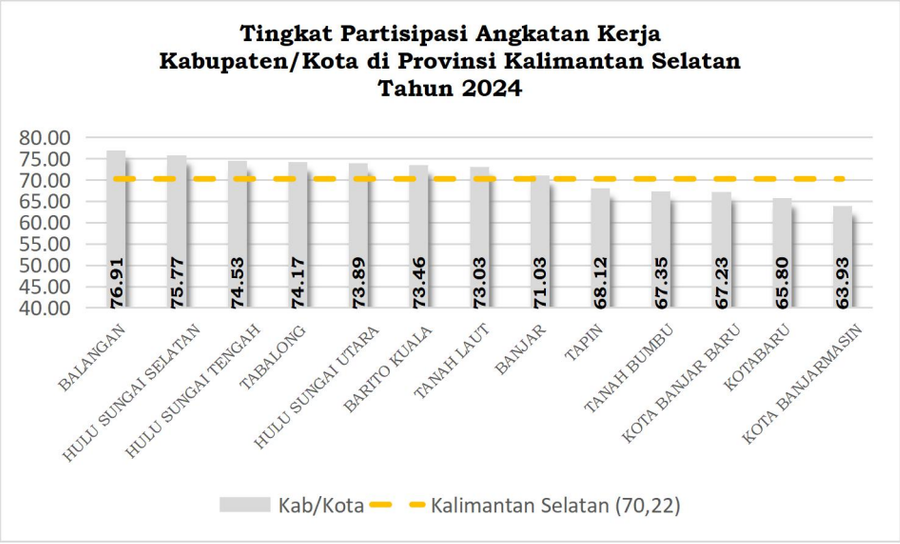
Berdasarkan data TPAK Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024, rata-rata provinsi tercatat sebesar 70,22 persen. Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki TPAK sebesar 74,53 persen, berada di atas rata-rata provinsi dan menempati peringkat ketiga tertinggi dari 13 kabupaten/kota.

Daerah dengan TPAK tertinggi adalah Kabupaten Balangan (76,91%), diikuti Hulu Sungai Selatan (75,77%), dan Hulu Sungai

Tengah (74,53%). Sementara itu, nilai TPAK terendah terdapat pada Kota Banjarmasin (63,93%), Kotabaru (65,80%), dan Kota Banjarbaru (67,23%).

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Tengah termasuk dalam kelompok daerah dengan tingkat partisipasi angkatan kerja tinggi di Kalimantan Selatan. Perbandingan capaian TPAK Kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3. 31 Perbandingan Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

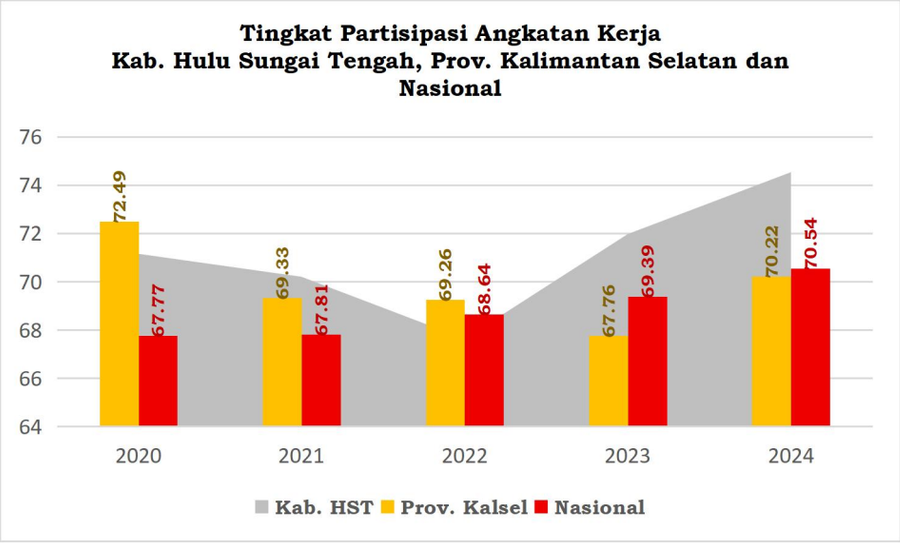


Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, Olahan Data 2025

Pada tahun 2020, TPAK Kabupaten Hulu Sungai Tengah tercatat sebesar 71,15 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan Provinsi Kalimantan Selatan (72,49 persen) namun lebih tinggi dari nasional (67,77 persen). Pada tahun 2021, nilai TPAK HST sebesar 70,20 persen, mendekati capaian provinsi (69,33 persen) dan nasional (67,81 persen). Pada tahun 2022, TPAK Kabupaten Hulu Sungai Tengah menurun menjadi 67,63 persen, lebih rendah dari provinsi (69,26 persen) dan nasional (68,64 persen). Pada tahun 2023, TPAK HST meningkat menjadi 71,97 persen, melampaui provinsi (67,76 persen) dan nasional (69,39 persen). Pada tahun 2024, TPAK Kabupaten Hulu Sungai Tengah tercatat sebesar 74,53 persen, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Selatan (70,22 persen) dan nasional (70,54 persen). Perbandingan capaian TPAK Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov.

Kalimantan Selatan, dan Nasional dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3. 32 Perbandingan Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2020 – 2024



Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik, Olahan Data 2025

Tabel 3. 22 Analisis Aspek Kemiskinan Berdasarkan Bidang Ketenagakerjaan di Kab. Hulu Sungai Tengah

Indikator	Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi
Tingkat Pengangguran Terbuka	Capaian Kab. HST (3,20) lebih rendah dibandingkan dengan capaian provinsi (4,20) dengan gap -1,00.	Cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan 0,175 dari tahun 2020 s.d 2024 (3,90 menjadi 3,20).	Tren ini menunjukkan penurunan pengangguran terbuka yang berlangsung relatif berkelanjutan, sehingga arah capaian mengindikasikan perbaikan kondisi ketenagakerjaan.	Trend yang sama dengan provinsi terjadi penurunan TPT. Sejak tahun 2020 s.d 2024 provinsi mengalami rata-rata penurunan 0,135 dan Kab HST 0,175.
TIngkat Partisipasi Angkatan Kerja	Capaian Kab. HST (74,53) lebih tinggi dibandingkan dengan capaian provinsi (70,22) dengan gap 4,31.	Cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan 0,845 dari tahun 2020 s.d 2024 (71,15 menjadi 74,53).	Tren ini menunjukkan partisipasi angkatan kerja sempat melemah, namun kemudian kembali menguat pada tahun-tahun terakhir, sehingga capaian akhir menunjukkan pemulihan dan penguatan partisipasi.	Meskipun tren provinsi menunjukkan penurunan pada periode 2020 (72,49) sampai dengan 2024 (70,22), namun Kab HST pada periode yang sama meningkat dari 71,15 menjadi 74,53, sehingga arah perkembangan Kab HST belum sejalan dengan provinsi.

3.3.5 Perekonomian

Perekonomian daerah merupakan salah satu pilar utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencerminkan peningkatan kapasitas produksi dan pendapatan masyarakat, serta diharapkan mampu menciptakan efek ganda (*multiplier effect*) terhadap kesempatan kerja dan kesejahteraan sosial. Namun demikian, laju pertumbuhan ekonomi tidak selalu sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan apabila tidak disertai dengan pemerataan manfaat hasil pembangunan.

Dalam konteks pembangunan daerah, kualitas pertumbuhan ekonomi menjadi faktor kunci. Pertumbuhan yang inklusif yakni pertumbuhan yang mampu melibatkan seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah akan berperan lebih besar dalam menurunkan tingkat kemiskinan dibandingkan pertumbuhan yang hanya terkonsentrasi pada sektor atau wilayah tertentu. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah perlu memastikan keterkaitan yang kuat antara peningkatan produktivitas sektor unggulan dengan perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan rumah tangga, dan penguatan ekonomi masyarakat miskin. Adapun data mengenai tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah menggambarkan dinamika kinerja ekonomi daerah selama periode 2015–2024 yang mencerminkan kemampuan sistem ekonomi daerah dalam menghasilkan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 23 Perkembangan Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2015-2024

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
2015	6,12
2016	6,21
2017	5,72
2018	5,16
2019	4,78
2020	-1,01
2021	3,01
2022	3,92

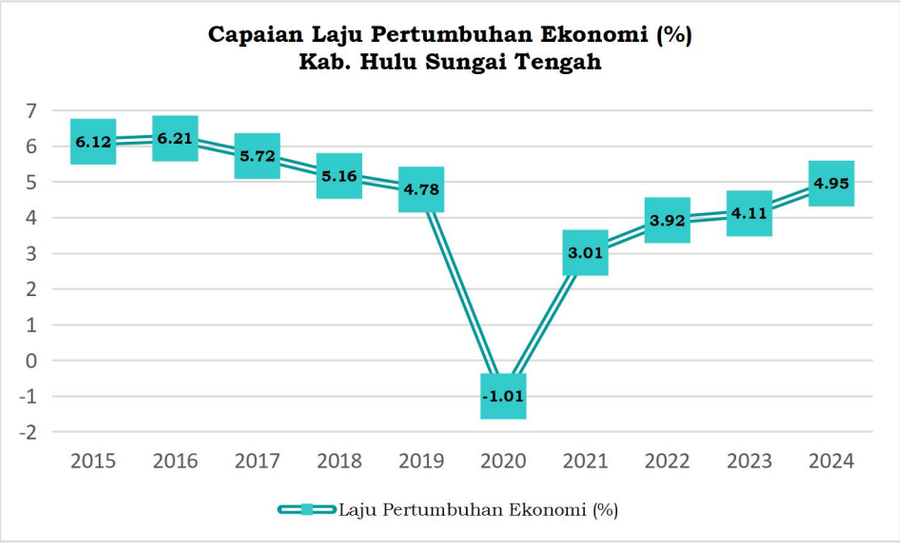
2023	4,11
2024	4,95

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan data diatas selama periode 2015–2024, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun pada awal periode dan kembali meningkat pada beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan tertinggi tercatat pada tahun 2016 sebesar 6,21 persen, kemudian melambat hingga 4,78 persen pada 2019. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menyebabkan kontraksi ekonomi sebesar –1,01 persen, namun sejak 2021 perekonomian berangsur pulih dengan pertumbuhan yang terus meningkat hingga mencapai 4,95 persen pada 2024.

Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah mulai kembali stabil dan menuju pemulihan pascapandemi. Gambaran perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2015–2024 dapat dilihat pada gambar di bawah.

Gambar 3. 33 Perkembangan Perkembangan Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2015-2024

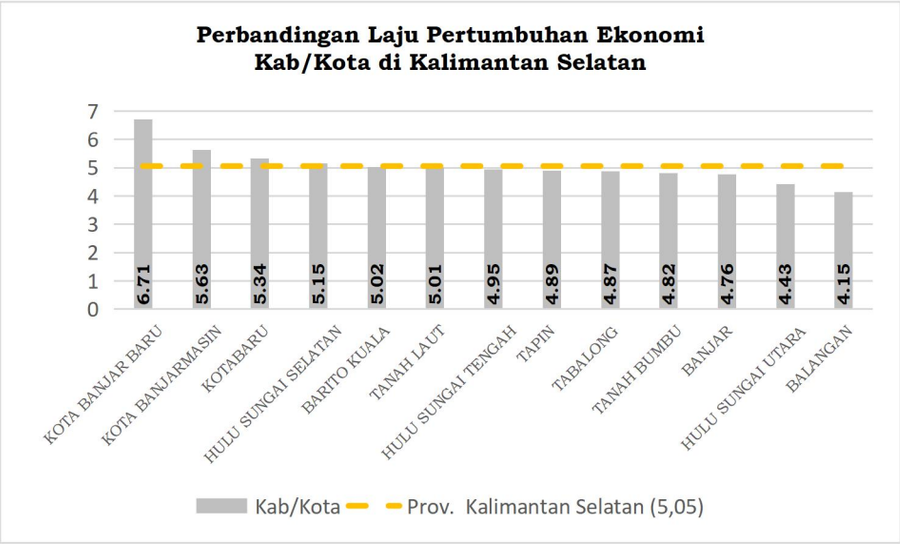


Sumber : Diolah dari publikasi Badan Pusat Statistik, 2025

Pada tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah (4,95%) berada sedikit di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan (5,05%). Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di provinsi ini, posisi Hulu Sungai Tengah termasuk dalam kelompok menengah bawah, di mana beberapa

daerah menunjukkan kinerja pertumbuhan yang lebih tinggi, terutama Kota Banjarbaru (6,71%) dan Kota Banjarmasin (5,63%) yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan. Beberapa daerah lain dengan pertumbuhan di atas rata-rata provinsi antara lain Kotabaru (5,34%) dan Hulu Sungai Selatan (5,15%), sedangkan daerah dengan pertumbuhan di bawah Hulu Sungai Tengah di antaranya Tabalong (4,87%), Tanah Bumbu (4,82%), Banjar (4,76%), dan Balangan (4,15%). Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3. 34 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2024



Sumber : Diolah dari publikasi Badan Pusat Statistik, 2025

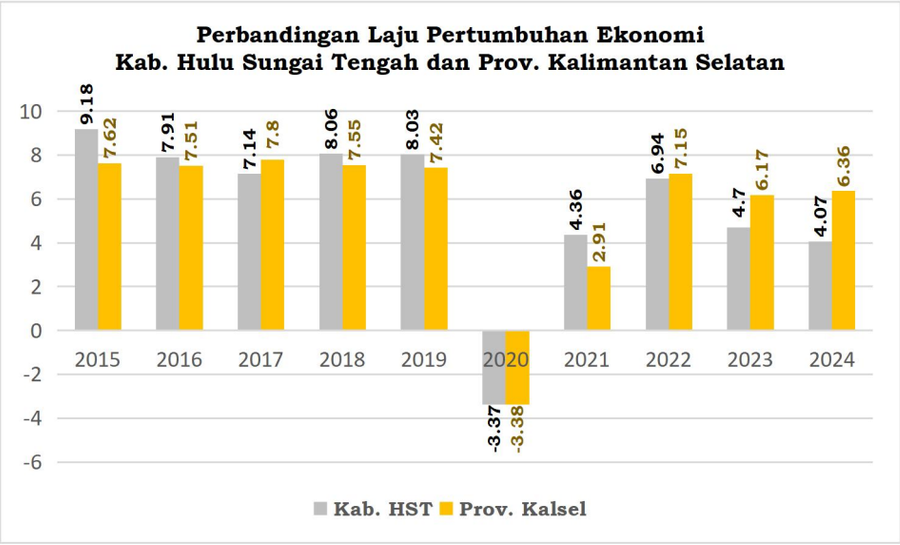
Pada periode 2015–2019, pertumbuhan ekonomi HST secara konsisten berada di atas rata-rata provinsi, dengan laju pertumbuhan yang cukup tinggi antara 7,14 hingga 9,18 persen, sementara Kalimantan Selatan tumbuh antara 7,42 hingga 7,80 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada masa tersebut, perekonomian HST masih memiliki daya dorong yang kuat terutama pada sektor pertanian, perdagangan, dan konstruksi.

Namun, pada tahun 2020, pandemi COVID-19 menyebabkan kontraksi tajam di kedua wilayah. HST mengalami penurunan hingga –3,37 persen, hampir sama dengan provinsi yang terkontraksi –3,38 persen, menunjukkan dampak pandemi yang merata di seluruh daerah.

Memasuki masa pemulihan, pada tahun 2021 pertumbuhan HST meningkat signifikan menjadi 4,36 persen, lebih tinggi

dibandingkan provinsi (2,91 persen). Namun pada periode selanjutnya, pertumbuhan ekonomi HST cenderung melambat, di bawah capaian Kalimantan Selatan. Pada tahun 2022–2024, laju pertumbuhan HST masing-masing sebesar 6,94 persen, 4,70 persen, dan 4,07 persen, sedangkan provinsi mencatat 7,15 persen, 6,17 persen, dan 6,36 persen. Gambaran tren laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015–2024 dapat dilihat pada gambar di bawah.

Gambar 3. 35 Perbandingan Tren Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Hulu Sungai Tengah dan Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2015-2024



Sumber : Diolah dari publikasi Badan Pusat Statistik, 2025

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika ekonomi daerah, analisis tidak hanya dilakukan berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi agregat, tetapi juga melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha. Pendekatan sektoral ini penting untuk mengidentifikasi struktur perekonomian daerah, sektor-sektor yang menjadi penggerak utama pertumbuhan (leading sector), serta sektor yang pertumbuhannya masih relatif lambat dan memerlukan intervensi kebijakan.

Melalui analisis pertumbuhan sektoral, dapat diketahui sejauh mana kontribusi masing-masing sektor—seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan jasa—dalam menopang perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selain itu, analisis ini membantu memahami arah transformasi ekonomi

daerah, apakah masih didominasi oleh sektor primer atau mulai bergeser ke sektor sekunder dan tersier.

Dengan demikian, analisis pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha memberikan dasar yang lebih kuat dalam merumuskan strategi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan produktivitas dan pemerataan kesejahteraan. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah menurut sektor PDRB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 14 Laju pertumbuhan Sektoral Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kab. Hulu Sungai Tengah 2023-2024

Kategori	Lapangan Usaha	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,14	3,7
B	Pertambangan dan Penggalian	4,01	3,25
C	Industri Pengolahan	0,57	3,44
D	Pengadaan Listrik Dan Gas	7,05	6,32
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,83	4,2
F	Konstruksi	6,53	6,03
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,70	4,07
H	Transportasi dan Pergudangan	7,03	5,72
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,43	6,79
J	Informasi dan Komunikasi	7,62	6,6
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,63	5,99
L	Real Estate	6,21	5,12
M,N	Jasa Perusahaan	6,56	6,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,25	8,23
P	Jasa Pendidikan	4,26	4,26
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,73	5,46
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,14	7,37
Total	PDRB	4,11	4,95

Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik, 2025

Pada tahun 2024, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (O) menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi, dengan laju pertumbuhan tertinggi mencapai 8,23 persen. Kondisi ini menandakan meningkatnya peran belanja pemerintah daerah dalam

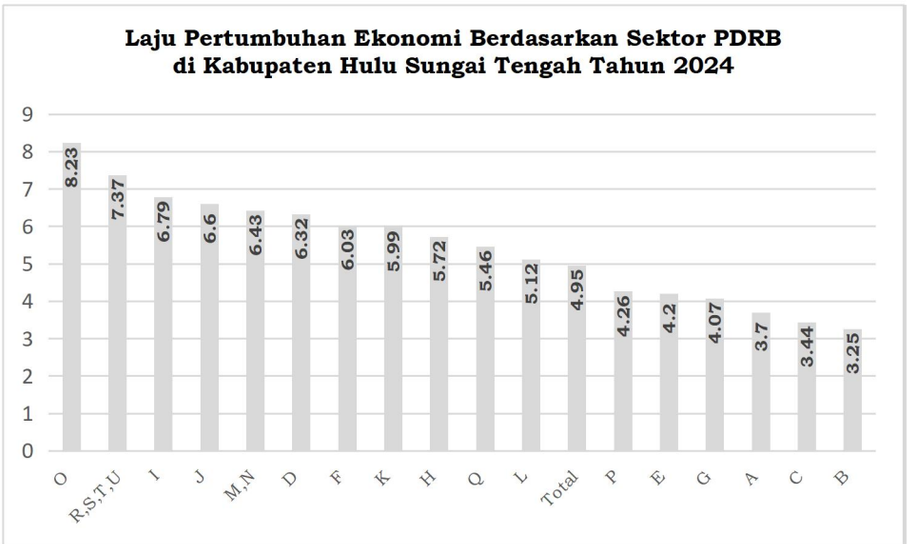
mendorong aktivitas ekonomi, khususnya melalui pengeluaran rutin dan pembangunan layanan publik.

Sektor Jasa Lainnya (R,S,T,U) menempati posisi kedua dengan pertumbuhan 7,37 persen, diikuti oleh Informasi dan Komunikasi (J) sebesar 6,60 persen, serta Jasa Perusahaan (M,N) dan Konstruksi (F) yang masing-masing tumbuh 6,43 persen dan 6,03 persen. Kelompok sektor jasa ini menunjukkan peran dominan dalam memperkuat perekonomian daerah melalui peningkatan aktivitas layanan, komunikasi, dan investasi infrastruktur.

Beberapa sektor lain juga menunjukkan pertumbuhan yang stabil, seperti Transportasi dan Pergudangan (H) sebesar 5,72 persen, Jasa Keuangan dan Asuransi (K) sebesar 5,99 persen, dan Real Estate (L) sebesar 5,12 persen.

Sementara itu, sektor-sektor berbasis sumber daya alam dan produksi primer seperti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A), Pertambangan dan Penggalian (B), serta Industri Pengolahan (C) mencatat pertumbuhan yang lebih rendah, masing-masing 3,70 persen, 3,25 persen, dan 3,44 persen. Meskipun demikian, sektor-sektor ini tetap memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan penyediaan lapangan kerja di daerah. Gambaran perbandingan laju pertumbuhan tertinggi berdasarkan sektor PDRB di Kab. Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3. 36 Perbandingan Laju Pertumbuhan berdasarkan Sektor PDRB di Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2024



Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik, 2025

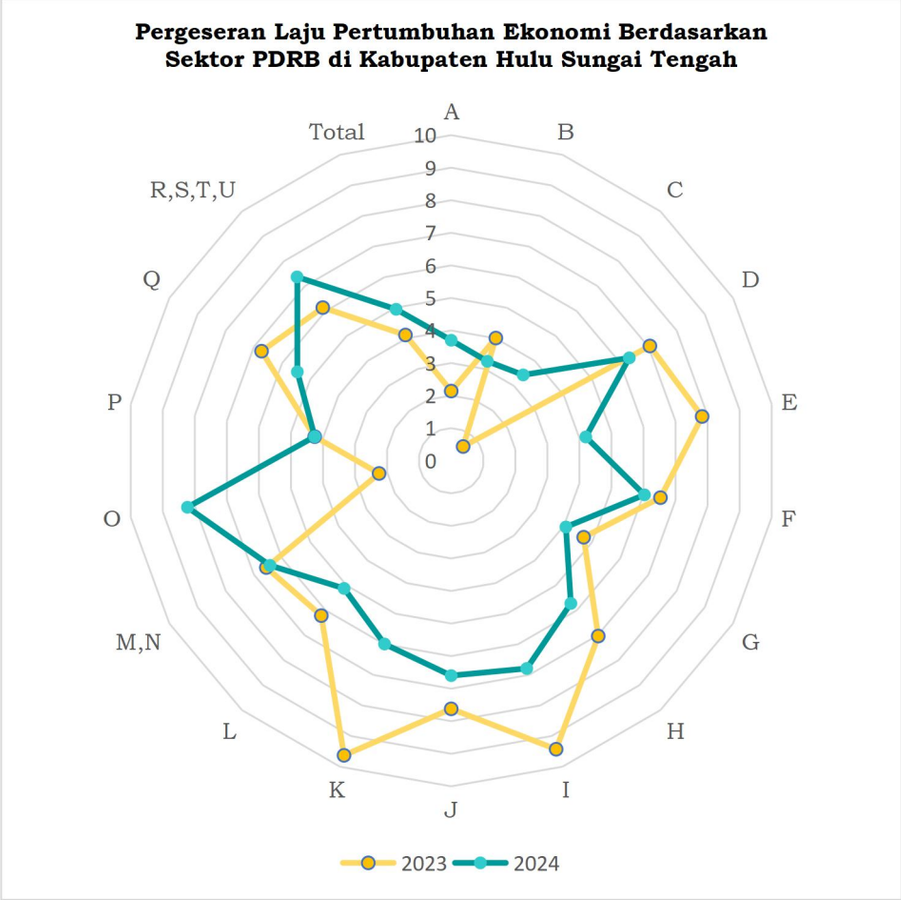
Pada tahun 2024, beberapa sektor mengalami penguatan pertumbuhan, terutama Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A) yang meningkat dari 2,14 persen menjadi 3,70 persen, serta Industri Pengolahan (C) yang naik tajam dari 0,57 persen menjadi 3,44 persen. Peningkatan ini mengindikasikan mulai pulihnya aktivitas ekonomi produktif berbasis sumber daya lokal.

Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (O) juga mencatat lonjakan pertumbuhan signifikan dari 2,25 persen menjadi 8,23 persen, seiring meningkatnya realisasi belanja pemerintah yang mendorong aktivitas ekonomi di sektor publik. Selain itu, Jasa Lainnya (R,S,T,U) juga menunjukkan tren positif dengan kenaikan dari 6,14 persen menjadi 7,37 persen, menggambarkan peningkatan peran sektor jasa dalam perekonomian daerah.

Sebaliknya, beberapa sektor mengalami perlambatan pertumbuhan, seperti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (I) yang turun dari 9,43 persen menjadi 6,79 persen, Jasa Keuangan dan Asuransi (K) dari 9,63 persen menjadi 5,99 persen, serta Pengadaan Air dan Pengelolaan Limbah (E) dari 7,83 persen menjadi 4,20 persen. Penurunan ini mencerminkan adanya proses penyesuaian pascapandemi di sektor-sektor jasa dan keuangan.

Secara keseluruhan, pergeseran tersebut menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah mulai bergerak lebih seimbang antara sektor primer, sekunder, dan tersier, dengan kecenderungan meningkatnya peran sektor pertanian, industri pengolahan, serta administrasi pemerintahan dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Gambaran visual pergeseran antar sektor tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah.

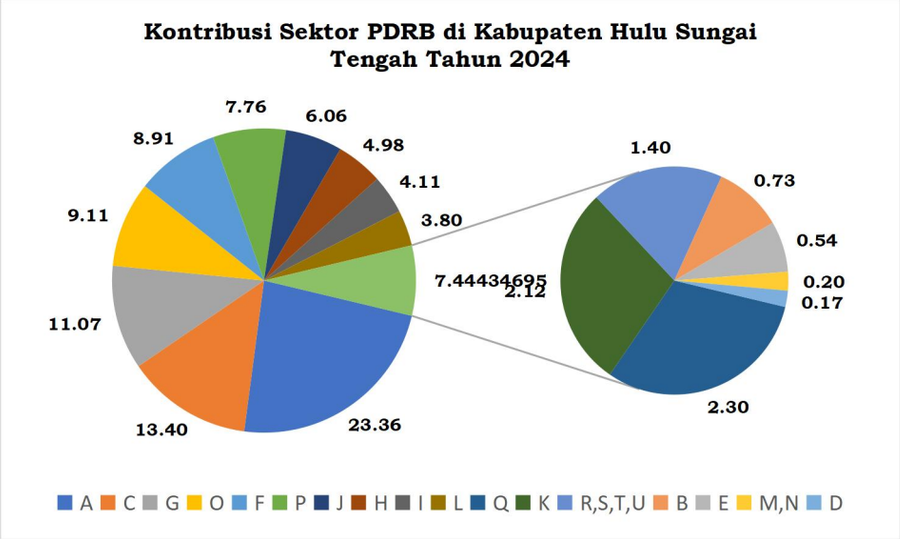
Gambar 3. 37 Pergeseran Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkanSektor PDRB di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023-2024



Sumber : Diolah dari publikasi Badan Pusat Statistik, 2025

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai struktur perekonomian daerah, analisis tidak hanya difokuskan pada pertumbuhan antar sektor, tetapi juga pada kontribusi masing-masing sektor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Analisis kontribusi ini penting untuk melihat seberapa besar peran relatif setiap sektor dalam membentuk total output ekonomi daerah, serta mengidentifikasi sektor-sektor yang menjadi andalan (leading sector) maupun yang masih berperan kecil dalam perekonomian. Rincian kontribusi PDRB menurut lapangan usaha dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3. 38 Kontribusi Sektor PDRB Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2024



Sumber : Diolah dari publikasi Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa Struktur perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2024 menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah masih didominasi oleh sektor primer, dengan peran penting dari Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A) yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB, yaitu sebesar 23,36 persen. Hal ini menegaskan bahwa basis ekonomi daerah masih bertumpu pada sektor agraris yang berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja dan penyediaan bahan baku ekonomi lokal.

Sektor Industri Pengolahan (C) menempati posisi kedua dengan kontribusi 13,40 persen, diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (G) sebesar 11,07 persen. Kedua sektor ini mencerminkan peran penting kegiatan hilirisasi dan distribusi barang dalam mendukung dinamika ekonomi daerah.

Kontribusi signifikan juga berasal dari sektor Konstruksi (F) sebesar 8,91 persen dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (O) sebesar 9,11 persen, yang menunjukkan peran belanja publik dan pembangunan infrastruktur dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Sektor Jasa Pendidikan (P) turut berperan besar dengan kontribusi 7,76 persen, mencerminkan kuatnya fungsi sektor sosial dalam struktur ekonomi daerah. Di sisi lain, sektor-sektor

berbasis jasa modern seperti Informasi dan Komunikasi (J) menyumbang 6,06 persen, sedangkan Transportasi dan Pergudangan (H) berkontribusi 4,98 persen, dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (I) sebesar 4,11 persen.

Sektor-sektor dengan kontribusi relatif kecil meliputi Jasa Keuangan dan Asuransi (K) sebesar 2,12 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Q) sebesar 2,30 persen, Jasa Lainnya (R,S,T,U) sebesar 1,40 persen, serta sektor Pertambangan dan Penggalian (B) dan Jasa Perusahaan (M,N) yang masing-masing hanya menyumbang 0,73 persen dan 0,20 persen terhadap total PDRB.

Tabel 3. 24 Analisis Aspek Kemiskinan Berdasarkan Bidang Perekonomian di Kab. Hulu Sungai Tengah

Indikator	Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Capaian Kab. HST (4.95) masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan capaian provinsi (5.05) dengan gap -0.1	Cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan pertumbuhan 0.034 dari tahun 2020 s.d 2024	Tren ini mengindikasikan program kerja Pemerintah Daerah efektif meingkatatkan laju pertumbuhan ekonomi	trend yang sama dengan provinsi terjadi penigkatan laju pertumbuhan ekonomi. Sejak tahun 2020 s.d 2024 provinsi mengalami rata-rata peningkatan pertumbuhan 0.194 dan Kab HST 0.034
Laju Pertumbuhan berdasarkan Sektor PDRB	Capaian Kab. HST (4,95) masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan capaian provinsi (5,05) dengan gap -0,10	Cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan pertumbuhan 0,034 dari tahun 2020 s.d 2024.	Tren ini mengindikasikan program kerja Pemerintah Daerah efektif meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.	Trend yang sama dengan provinsi terjadi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Sejak tahun 2020 s.d 2024 provinsi mengalami rata-rata peningkatan pertumbuhan 0,194 dan Kab HST 0,034.
Kontribusi Sektor PDRB	Struktur PDRB Kab. HST tahun 2024 menunjukkan kontribusi terbesar sebesar 23,36%, diikuti kontribusi besar lainnya pada kisaran 13,40%, 11,07%, 9,11%, 8,91%, dan 7,76%.	Komposisi kontribusi PDRB tahun 2024 menunjukkan konsentrasi pada sektor dominan (kontribusi terbesar 23,36%) dan sektor lainnya tersebar pada kontribusi menengah hingga kecil.	Struktur kontribusi ini menunjukkan pembentukan PDRB Kab. HST terutama ditopang oleh sektor dominan dan beberapa sektor berkontribusi menengah.	Komposisi kontribusi PDRB tahun 2024 relevan sebagai konteks untuk membaca dinamika pertumbuhan sektoral, karena perubahan laju pertumbuhan total terjadi di tengah struktur PDRB yang didominasi sektor dengan kontribusi terbesar 23,36%.

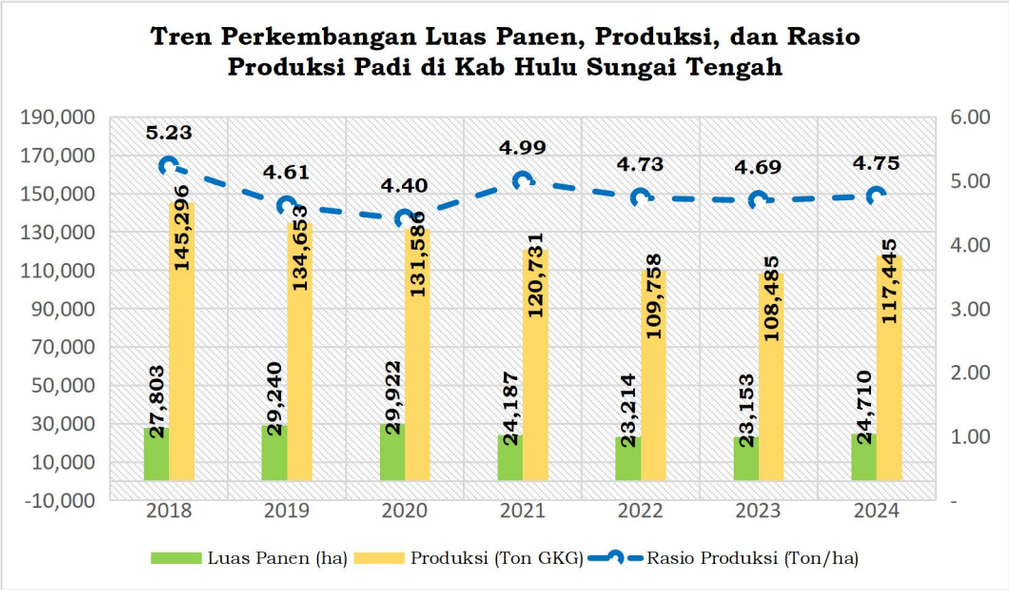
3.3.6 Pertanian

Bidang pertanian, khususnya subsektor tanaman pangan, merupakan salah satu komponen penting dalam struktur perekonomian dan ketahanan pangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kondisi pertanian daerah memberikan gambaran mengenai kapasitas produksi pangan lokal serta keterkaitannya dengan kesejahteraan rumah tangga yang bergantung pada aktivitas pertanian. Analisis tren perkembangan luas panen, produksi, dan rasio produksi padi digunakan untuk memahami dinamika ketersediaan pangan serta perubahan kapasitas produksi yang berlangsung di daerah.

Luas panen merepresentasikan ruang aktual yang digunakan untuk kegiatan budidaya padi, sedangkan volume produksi mencerminkan hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut dalam kurun waktu tertentu. Sementara itu, rasio produksi menjadi indikator yang menunjukkan hubungan antara perubahan luas panen dan jumlah produksi, sehingga memberikan gambaran mengenai efektivitas dan produktivitas sistem budidaya yang diterapkan. Ketiga indikator ini bersama-sama memberikan pemahaman struktural mengenai kondisi pertanian daerah yang relevan dalam melihat determinan kemiskinan, terutama bagi rumah tangga yang bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber pendapatan dan ketahanan pangan.

Data rinci mengenai tren perkembangan luas panen, produksi padi, dan rasio produksi disajikan pada tabel di bawah ini.

Gambar 3. 39 Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Rasio Produksi Padi di Kab Hulu Sungai Tengah Tahun 2018 sd 2024



Sumber : diolah dari dokumen Luas Panen dan Produksi Padi di Provinsi Kalimantan Selatan, hasil olahan 2025

Perkembangan produksi padi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama periode 2018–2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan baik dari sisi luas panen, total produksi, maupun rasio produksi.

Luas panen padi mengalami variasi sepanjang periode pengamatan. Pada 2018, luas panen berada pada 27.803 hektare dan meningkat hingga mencapai puncaknya pada 2019 dan 2020 dengan masing-masing 29.240 hektare dan 29.922 hektare. Setelah itu, terjadi penurunan yang cukup signifikan pada 2021 menjadi 24.187 hektare, dan kembali menurun pada 2022 serta 2023 menjadi 23.214 hektare dan 23.153 hektare. Pada 2024 luas panen meningkat kembali menjadi 24.710 hektare.

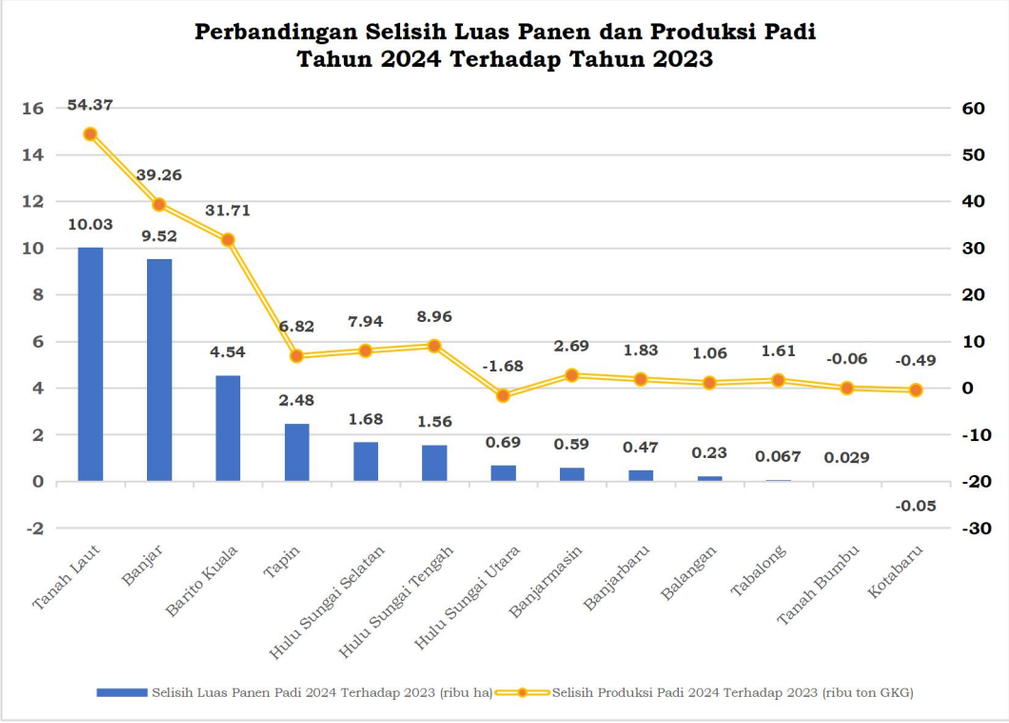
Produksi padi juga menunjukkan tren fluktuatif. Pada 2018 total produksi tercatat 145.296 ton GKG, kemudian menurun menjadi 134.653 ton pada 2019 dan kembali turun menjadi 131.586 ton pada 2020. Penurunan ini berlanjut pada 2021 hingga 120.731 ton, serta 109.758 ton pada 2022 dan 108.485 ton pada 2023. Pada 2024 produksi kembali meningkat menjadi 117.445 ton GKG.

Rasio produksi — yang merepresentasikan produktivitas lahan — menunjukkan pola yang relatif stabil dengan

beberapa variasi. Pada 2018 nilai rasio mencapai 5,23 ton/ha, kemudian menurun pada 2019 dan 2020 menjadi 4,61 ton/ha dan 4,40 ton/ha. Pada 2021 terjadi peningkatan menjadi 4,99 ton/ha, namun kembali mengalami penurunan pada 2022 dan 2023 masing-masing menjadi 4,73 ton/ha dan 4,69 ton/ha. Pada 2024 nilai rasio meningkat tipis menjadi 4,75 ton/ha.

Secara umum, tren perkembangan padi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada periode 2018–2024 menunjukkan: Luas panen dan produksi memiliki pola menurun setelah 2020, meskipun terdapat pemulihan pada 2024. Produktivitas relatif stabil, dengan variasi dalam rentang 4,4–5,2 ton/ha.

Gambar 3. 40 Perbandingan Selisih Luas Panen dan Produksi Padi Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun



Sumber : diolah dari dokumen Luas Panen dan Produksi Padi di Provinsi Kalimantan Selatan, hasil olahan 2025

Berdasarkan gambar di atas terlihat perbandingan capaian antar kabupaten/kota menunjukkan adanya variasi peningkatan dan penurunan luas panen serta produksi padi di Kalimantan Selatan pada tahun 2024 bila dibandingkan dengan tahun 2023. Data selisih ini menggambarkan perubahan bersifat kuantitatif pada masing-masing daerah.

Data selisih luas panen dan produksi padi tahun 2024 terhadap 2023 menunjukkan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Tengah termasuk dalam kelompok daerah yang mengalami peningkatan baik dari sisi luas panen maupun produksi.

Dari sisi luas panen, HST mencatat peningkatan sebesar 1,56 ribu ha. Nilai ini berada di bawah Tanah Laut (10,03 ribu ha), Banjar (9,52 ribu ha), Barito Kuala (4,54 ribu ha), Tapin (2,48 ribu ha), dan Hulu Sungai Selatan (1,68 ribu ha), namun lebih tinggi dibanding Hulu Sungai Utara (0,69 ribu ha), Banjarmasin (0,59 ribu ha), Banjarbaru (0,47 ribu ha), Balangan (0,23 ribu ha), Tabalong (0,067 ribu ha), Tanah Bumbu (0,029 ribu ha), serta Kotabaru yang mengalami penurunan luas panen (-0,05 ribu ha). Hal ini menempatkan HST pada kelompok kabupaten dengan peningkatan luas panen skala menengah di antara daerah lain di Kalimantan Selatan.

Dari sisi produksi padi, HST mencatat peningkatan sebesar 8,96 ribu ton GKG. Nilai ini merupakan peningkatan terbesar keempat setelah Tanah Laut (54,37 ribu ton), Banjar (39,26 ribu ton), dan Barito Kuala (31,71 ribu ton). Peningkatan produksi HST lebih besar dibanding Hulu Sungai Selatan (7,94 ribu ton), Tapin (6,82 ribu ton), Banjarmasin (2,69 ribu ton), Banjarbaru (1,83 ribu ton), Tabalong (1,61 ribu ton), Balangan (1,06 ribu ton), Tanah Bumbu (-0,06 ribu ton), Kotabaru (-0,49 ribu ton), serta Hulu Sungai Utara yang mengalami penurunan produksi (-1,68 ribu ton).

Secara deskriptif, data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada pada posisi menengah–atas di antara kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dalam hal peningkatan luas panen dan terutama peningkatan produksi padi antara tahun 2023 dan 2024.

Tabel 3. 25 Analisis Aspek Kemiskinan Berdasarkan Bidang Pertanian di Kab. Hulu Sungai Tengah

Indikator	Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi
Luas Panen	Capaian Kab. HST tahun 2024 sebesar (24.710 ha) atau meningkat dibandingkan tahun 2023 (23.153 ha) dengan selisih +1.557 ha (+1,56 ribu ha). Pada perbandingan kab/kota, selisih luas panen Kab. HST (+1,56 ribu ha) masih lebih rendah dibandingkan Tanah Laut (10,03), Banjar (9,52), Barito Kuala (4,54), Tapin (2,48), dan Hulu Sungai Selatan (1,68).	Cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan luas panen 1.303 ha dari tahun 2020 s.d 2024 (29.922 ha menjadi 24.710 ha).	Tren ini menunjukkan luas panen pada periode 2020–2024 cenderung menurun, meskipun pada tahun 2024 terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2023.	Trend yang sama pada perbandingan 2024 terhadap 2023 terjadi peningkatan luas panen di Kab. HST (+1,56 ribu ha) dan hal serupa juga terjadi pada sebagian besar kab/kota, sedangkan penurunan luas panen tercatat pada Kotabaru (-0,05 ribu ha).
Produksi Padi	Capaian Kab. HST tahun 2024 sebesar (117.445 ton) atau meningkat dibandingkan tahun 2023 (108.485 ton) dengan selisih +8.960 ton (+8,96 ribu ton). Pada perbandingan kab/kota, selisih produksi Kab. HST (+8,96 ribu ton) masih lebih rendah dibandingkan Tanah Laut (54,37), Banjar (39,26), dan Barito Kuala (31,71).	Cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan produksi 3.535 ton dari tahun 2020 s.d 2024 (131.586 ton menjadi 117.445 ton).	Tren ini menunjukkan produksi pada periode 2020–2024 cenderung menurun, meskipun pada tahun 2024 terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2023	Trend yang sama pada perbandingan 2024 terhadap 2023 terjadi peningkatan produksi di Kab. HST (+8,96 ribu ton) dan hal serupa juga terjadi pada sebagian besar kab/kota, sedangkan penurunan produksi tercatat pada Hulu Sungai Utara (-1,68 ribu ton), Tanah Bumbu (-0,06 ribu ton), dan Kotabaru (-0,49 ribu ton).

Indikator	Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi
Rasio Produksi Padi	Capaian Kab. HST tahun 2024 sebesar (4,75 ton/ha) atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 (4,69 ton/ha) dengan selisih +0,06.	Cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan rasio produksi 0,088 dari tahun 2020 s.d 2024 (4,40 menjadi 4,75).	Tren ini menunjukkan rasio produksi pada periode 2020–2024 cenderung membaik meskipun berfluktuasi.	Trend yang sama pada periode 2020 s.d 2024, rasio produksi meningkat dari 4,40 menjadi 4,75, dan pada tahun 2024 rasio produksi juga meningkat dibandingkan tahun 2023 (4,69 menjadi 4,75).

BAB IV
PROGRAM PRIORITAS

4.1 Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 – 2029 tidak terlepas dari dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 – 2029. Sesuai amanat perundangan bahwa periode RPKD mengacu pada periode RPJMD.

Visi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA HULU SUNGAI TENGAH YANG RELIGIUS, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT"

Visi tersebut mencerminkan tekad untuk membangun Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan menanamkan nilai-nilai religius dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat, meningkatkan kesejahteraan yang merata, serta menjunjung tinggi martabat daerah dalam pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, visi ini juga diharapkan mampu menjadi landasan utama dalam mempersiapkan Hulu Sungai Tengah sebagai pusat jasa dan logistik yang kokoh di masa depan. Untuk mencapai visi tersebut, terdapat 3 (tiga) elemen utama yang menjadi pilar pembangunan:

1. **Religius** menggambarkan Pemerintahan yang jujur, adil, bermanfaat dan disiplin serta Masyarakat yang aman dan tenteram dengan berlandaskan Agama. Religius menggambarkan bahwa dalam aspek hidup bermasyarakat maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan nilai-nilai moral, etika dan agama menjadi pedoman dan landasan dalam menciptakan harmoni sosial, memperkuat solidaritas, kerjasama dan kolaborasi, tidak diskriminatif yang menciptakan konflik bernuansa SARA. Religius juga digambarkan dengan terjadinya peningkatan praktik-

praktik dan tingkat pemahaman keagamaan baik di kehidupan keluarga, bermasyarakat maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada aspek kehidupan bermasyarakat ditandai dengan semakin makmurnya kegiatan keagamaan di masyarakat ataupun berbasis keluarga dan komunitas, dan peningkatan implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat sehingga akan terlihatnya nuansa keagamaan di segala lini aktifitas masyarakat. Pada kehidupan ekonomi ditandai dengan terjadinya peningkatan aktivitas ekonomi berbasis syariah, peningkatan perdagangan produk halal serta penguatan potensi zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) untuk pemberdayaan ekonomi ummat. Pada aspek penyelenggaraan pemerintahan ditandai dengan terjadinya peningkatan karakter pemerintahan yang berakhlak, budaya kerja yang berbasis religius. Nilai-nilai kejujuran, keadilan dan disiplin serta berorientasi kebermanfaatan bagi masyarakat menjiwai setiap kebijakan dan pelaksanaan pembangunan. Indikator elemen visi ini adalah angka konflik yang bernuansa SARA, semakin efektifnya pengendalian korupsi, dan angka kriminalitas.

2. **Sejahtera** menggambarkan kehidupan Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan Tingkat kemiskinan yang rendah. Pembangunan yang dapat mencapai suatu keadaan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup lahir dan bathin, fisik dan non fisik dengan rasa aman dan nyaman. Merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, rasa aman dan nyaman. Pembangunan yang dilakukan berpusat pada manusia, yaitu pembangunan yang mengutamakan kesejahteraan, hak, dan kepentingan manusia sebagai subjek dan tujuan utama pembangunan. Elemen ini mencerminkan harapan

bahwa pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat meningkatkan kesejahteraan baik secara ekonomi maupun kesejahteraan sosial. Sejahtera juga mengacu pada pembangunan yang menghormati martabat, kebebasan, dan keadilan sosial bagi semua orang, serta mengedepankan partisipasi, kolaborasi, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian Sejahtera adalah kondisi dimana kehidupan sosial ekonomi masyarakat dengan semakin meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang ditandai meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan pendapatan masyarakat. Indikator pencapaian pokok visi Sejahtera adalah PDRB Per Kapita, ketimpangan pendapatan yang rendah dan penurunan angka kemiskinan pada tahun 2029. Peningkatan kesejahteraan masyarakat diarahkan bertumpu pada pengembangan kegiatan ekonomi sektor jasa dan logistik, meliputi distribusi logistik, penyediaan pelayanan pendidikan, kesehatan, perdagangan, pariwisata dan jasa lainnya, pusat produksi hasil-hasil pertanian, penyimpanan/transit barang, distribusi dan transportasi, pengelola informasi, dan penyedia barang dari hilirisasi industri sumber daya lokal.

3. **Bermartabat** menggambarkan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang maju, berdaya saing serta unggul dalam aspek kualitas Sumber Daya Manusia, Perkekonomian, Infrastruktur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan dibandingkan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.

4. **Maju** adalah kondisi dimana selalu terjadi peningkatan, perkembangan atau bergerak dinamis ke arah yang lebih baik baik, lebih tinggi, lebih sejahtera, lebih unggul. Elemen ini mencerminkan harapan bahwa kondisi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah terus bergerak, mengalami perubahan ke arah peningkatan yang lebih baik dari kehidupan sosial ekonomi masyarakat,

kualitas hidup masyarakat yang ditandai pencapaian ekonomi daerah yang kuat dan semakin besar yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi yang berakar pada budaya daerah yang selaras masyarakat maju, berdaya, modern, tangguh dan inovatif. Hal ini ditandai dengan perekonomian yang selalu tumbuh positif, PDRB daerah yang semakin besar dan kuat serta berkelanjutan.

5. **Berdaya saing dan unggul** adalah suatu kondisi yang lebih baik, lebih kuat, cakap dari yang lain-lain. Suatu kondisi yang menunjukkan kelebihan atau kemenangan atas yang lain. Elemen ini mencerminkan harapan bahwa pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat menciptakan suatu kondisi daya saing daerah dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dari daerah sekitar yang ditandai dengan meningkatknya daya saing sumberdaya manusia, sarana Infrastruktur wilayah dan pelayanan publik, serta kegiatan ekonomi bernilai tambah tinggi. Unggul juga merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan yang bertumpu pada kekuatan sendiri dengan mengoptimalkan seluruh potensi lokal serta memperluas kerjasama-kerjasama baik regional, nasional maupun internasional. Hal ini ditandai dengan peningkatan Indeks Daya Saing Daerah dan indikator IPM, dengan sarana prasarana wilayah yang mampu mendorong perwujudan perkuatan pondasi sebagai pusat kegiatan jasa dan logistik wilayah sekitarnya khususnya klaster banua anam, pelayanan umum yang tinggi serta terjalinnya kerjasama-kerjasama nasional dan internasional.

Perwujudan visi RPJMD tahun 2025-2029 ini tercermin dari sasaran-sasaran makro pembangunan yaitu :

a. Meningkatnya PDRB per kapita
b. Menurunnya kemiskinan dan terjaganya ketimpangan
c. Meningkatnya daya saing daerah
d. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia

e. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan, maka disusun misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1) Mewujudkan perubahan sosial masyarakat menuju masyarakat adaptif, berdaya saing dan berkualitas hidup tinggi yang religius berbudaya.
2) Mewujudkan perubahan perekonomian daerah secara merata dengan pengembangan menyeluruh dari hulu dan hilirisasi pertanian serta sektor potensial pendukung dengan prinsip kerakyatan yang memperhatikan kesinambungan Pembangunan
3) Meningkatkan infrastruktur pelayanan publik yang merata dengan prinsip berkelanjutan dalam mendukung pengembangan sektor potensial perekonomian daerah dan pelayanan masyarakat.
4) Mewujudkan Pemerintahan yang tanggap dan santun dengan tata kelola profesional.

Keterkaitan antara Misi yang ditetapkan dengan pokok-pokok visi adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Sinkronisasi Kata Kunci Visi dan Penjabaran Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029

Kata Kunci Visi	MISI
RELIGIUS **SEJAHTERA** **BERMARTABAT**	Mewujudkan perubahan sosial masyarakat menuju masyarakat yang adaptif, berdaya saing, dan berkualitas hidup tinggi yang religius serta berbudaya.
	Mewujudkan perubahan perekonomian daerah secara merata dengan pengembangan menyeluruh dari hulu dan hilirisasi pertanian serta sektor potensial pendukung dengan pri nsip kerakyatan yang memperhatikan kesinambungan pembangunan.
	Meningkatkan infrastruktur pelayanan publik yang merata dengan prinsip berkelanjutan dalam mendukung pengembangan sektor potensial perekonomian daerah dan pelayanan masyarakat.
	Mewujudkan pemerintahan yang tanggap dan santun dengan tata kelola profesional.

Elemen religius diimplementasikan melalui misi 1 yaitu mewujudkan perubahan sosial masyarakat menuju masyarakat yang adaptif, berdaya saing, dan berkualitas hidup tinggi yang religius serta berbudaya dan misi 4 yaitu mewujudkan pemerintahan yang tanggap dan santun dengan tata kelola profesional. Elemen religius diimplementasikan dalam upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kehidupan masyarakat maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Elemen sejahtera diimplementasikan melalui misi 2 yaitu mewujudkan perubahan perekonomian daerah secara merata dengan pengembangan menyeluruh dari hulu dan hilirisasi pertanian serta sektor potensial pendukung dengan prinsip kerakyatan yang memperhatikan kesinambungan pembangunan dan misi 3 yaitu Meningkatkan infrastruktur pelayanan publik yang merata dengan prinsip berkelanjutan dalam mendukung pengembangan sektor potensial perekonomian daerah dan pelayanan masyarakat. Elemen sejahtera diwujudkan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan sektor potensial ekonomi dengan prinsip ekonomi yang berkesinambungan yang didukung dengan

peningkatan penyediaan infrastruktur yang semakin merata meliputi infrastruktur dasar, infrastruktur publik dan infrastruktur ekonomi.

Elemen bermartabat diimplementasikan melalui ke-4 (empat) misi yang dijalankan. Peningkatan SDM dan kehidupan masyarakat yang religius dan berbudaya, Pengembangan dan pertumbuhan ekonomi, penyediaan infrastruktur yang semakin meningkat kualitasnya dan semakin merata serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang tanggap, santun dan profesional akan menjadikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah lebih berdaya saing dan unggul dibandingkan daerah-daerah lain.

Penjelasan dari misi-misi tersebut adalah :

a. MISI PERTAMA : **Mewujudkan perubahan sosial masyarakat menuju masyarakat adaptif, berdaya saing dan berkualitas hidup tinggi yang religius berbudaya.**

Misi ini mencakup upaya mewujudkan transformasi sosial masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diwujudkan dengan membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, religius, unggul dan berdaya saing secara regional maupun nasional. Pembangunan sumberdaya manusia juga diintegrasikan dengan trisula pembangunan nasional yaitu peningkatan kualitas SDM berupa dukungan pelaksanaan pemberian makan bergizi gratis (MBG), pembentukan sekolah unggulan, pemeriksaan kesehatan gratis dan lain-lain.

Pada misi ini juga mencakup upaya mengembangkan kesejahteraan masyarakat secara sosial dengan mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat yang harmonis dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas dan masyarakat yang religius dan berbudaya. Pembangunan yang dilakukan dapat menyeimbangkan hubungan sosial dan budaya dan partisipasi dalam pembangunan. Melalui misi ini terjadi Peningkatan Kualitas Keluarga, Pengembangan dan penguatan Kebudayaan lokal, Menjaga kerukunan umat

beragama, peningkatan pelaksanaan demokrasi dan kesetaraan gender. Perubahan sosial masyarakat juga dilakukan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan kualitas hidup yang tinggi yang ditandai dengan menurunnya penduduk miskin dan terjaganya ketimpangan sosial.

b. MISI KEDUA : **Mewujudkan perubahan perekonomian daerah secara merata dengan pengembangan menyeluruh dari hulu dan hilirisasi pertanian serta sektor potensial pendukung dengan prinsip kerakyatan yang memperhatikan kesinambungan Pembangunan**

Misi ini mencakup upaya melakukan perubahan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis kerakyatan dan sumberdaya lokal yang produktif seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan jasa, pariwisata, ekonomi kreatif, Usaha Menengah, Kecil dan Mikro dan bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi dan pengembangan jasa produk unggulan daerah. Pengembangan perekonomian daerah selain memperhatikan baseline ekonomi yang sudah berkembang di masyarakat, tetapi perlu juga memperhatikan pengembangan ekonomi yang potensial untuk dikembangkan di masyarakat. Pengembangan sektor ekonomi primer, skunder dan tersier harus berjalan secara sinergi untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengembangkan ekonomi daerah juga diarahkan untuk meningkatkan penerapan ekonomi hijau dan integrasi ekonomi domestik dengan ekonomi regional, nasional dan global serta tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan. Disamping itu perubahan perekonomian juga diarahkan dengan upaya meningkatkan produktivitas daerah untuk meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan inovasi, penggunaan iptek dan transformasi digital, mengembangkan kewirausahaan dan badan-badan usaha di desa serta upaya mengembangkan BUMD untuk berperan sebagai lokomotif ekonomi dan investasi di daerah.

Perubahan perekonomian daerah juga diupayakan melalui dukungan pelaksanaan program prioritas nasional seperti memanfaatkan efek dari pelaksanaan pemberian makan bergizi gratis (MBG), pembentukan koperasi merah putih (KDP) dan program ekonomi syariah, ekonomi hijau dan lain-lain. dampakPerubahan perekonomian daerah diarahkan untuk berdampak pada meningkatnya kapasitas fiskal daerah sebagai sumber dana pembangunan. Pengembangan produktivitas daerah juga diwujudkan dengan mengembangkan ekonomi daerah yang dapat melayani kawasan regional dengan didukung infrastruktur ekonomi skala regional khususnya klaster pertumbuhan banua anam dan berperan aktif dalam distribusi barang jasa di Prov. Kalsel dan mendukung ibu kota nusantara.

Kesinambungan pembangunan diarahkan dengan upaya menjaga stabilitas daerah dengan meningkatkan kolaborasi dari semua unsur yang ada di daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, politik, dan kantrantibum.

c. MISI KETIGA : **Meningkatkan infrastruktur pelayanan publik yang merata dengan prinsip berkelanjutan dalam mendukung pengembangan sektor potensial perekonomian daerah dan pelayanan masyarakat.**

Misi ini mencakup upaya pembangunan infrastruktur yang memperhatikan kualitas, pemerataan dan keadilan pembangunan serta keberlanjutan. Misi ini mencakup peningkatan penyediaan infrastruktur dasar, ekonomi dan publik yang berkualitas dan ramah lingkungan baik skala domestik maupun regional yang mampu mendukung Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai pusat jasa dan logistik.

Prinsip keberlanjutan pada misi ini mencakup upaya memperkuat ketangguhan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara ekonomi, sosial budaya dan ekologi. Melalui misi ini juga peningkatan

infrastruktur dan ketangguhan lingkungan akan menghasilkan ketahanan bencana sebagai modal untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan iklim dan guncangan lingkungan. Ketangguhan lingkungan juga menggambarkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berpartisipasi optimal dalam pembangunan. Ketangguhan lingkungan dan ketahanan bencana diwujudkan melalui peningkatan pengelolaan dan kualitas lingkungan, pengurangan kerusakan dan pencemaran lingkungan, pemanfaatan energi terbarukan, pengurangan emisi karbon, serta mengurangi risiko dan mitigasi bencana.

d. MISI KEEMPAT : **Mewujudkan Pemerintahan yang tanggap dan santun dengan tata kelola profesional.**

Pemerintahan yang tanggap dan santun dengan tata kelola yang profesional diwujudkan dengan membentuk tata kelola birokrasi yang efisein dan efektif, membangun regulasi dan tata kelola yang ber “akhlak”, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Tata kelola pemerintahan juga dilakukan dalam upaya melanjutkan proses reformasi birokrasi dengan membentuk birokrasi yang profesional dengan nilai-nilai religius, berkinerja tinggi, inovatif, berintegritas patuh dan taat pada peraturan peundangan dan pemerintahan yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

4.2 Tujuan dan Sasaran Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 – 2026 yang terkait dengan kemiskinan adalah merupakan tujuan dan sasaran RKPD.

Sepert yang tertera dalam dokumen RPJMD bahwa untuk mencapai misi “Mewujudkan perubahan sosial masyarakat menuju masyarakat adaptif, berdaya saing dan berkualitas hidup tinggi yang religius berbudaya”, maka tujuan pembangunan ditetapkan

adalah ”Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat yang adaptif, berdaya saing, religius dan berbudaya”

Indikator yang digunakan dalam rangka mengukur ketercapaian tujuan adalah:

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- Tingkat Kemiskinan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:

a. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, kreatif, religius, unggul dan berdaya saing.
b. Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan.
c. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang adaptif, religius dan berbudaya.

Dengan demikian, maka tujuan RPJMD selaras dengan RPKD Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah: Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat yang adaptif, berdaya saing, religius dan berbudaya dengan sasaran yaitu Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan. Indikator kinerja dari tujuan tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Kemiskinan, dan indicator kinerja kemiskinan adalah Indeks Gini, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka.

Tabel 4. 2 Persandingan Misi RPJMD Prov Kalimantan Selatan dan RPJMD Kab Hulu Sungai Tengah

No	Tujuan RPKD	Indikator	Sasaran RPKD	Indikator
1.	**Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat yang adaptif, berdaya saing, religius dan berbudaya**	• Indeks Pembangunan Manusia • Tingkat Kemiskinan	**Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan**	• Indeks Gini • Indeks Kedalaman Kemiskinan • Indeks Keparahan Kemiskinan • Tingkat Pengangguran Terbuka

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, maka ditetapkan target kinerja tahun 2025 - 2029, sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Target Tujuan dan Sasaran Rencana Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan/Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2024)	Target Tahun					Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	
Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat yang adaptif, berdaya saing, religius dan berbudaya	Indeks Pembangunan Manusia	73,33	73,8	74.33	74.82	75.31	75,8	
	Tingkat Kemiskinan	5,81	5.43	5.26	4.88	4.5	4.12	
Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan	Indeks Gini	0,251	0.216	0.213	0.21	0.207	0.204	
	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,745	0,695	0,645	0,595	0,545	0.495	
	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,141	0.137	0.133	0,129	0,125	0,121	
	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,2	3,04	3	2.93	2.87	2.8	

Sumber : Dokumen RPJMD 2025-2029 Kab. Hulu Sungai Tengah, 2026

4.3 Strategi dan Arah Kebijakan Penggulangan Kemiskinan

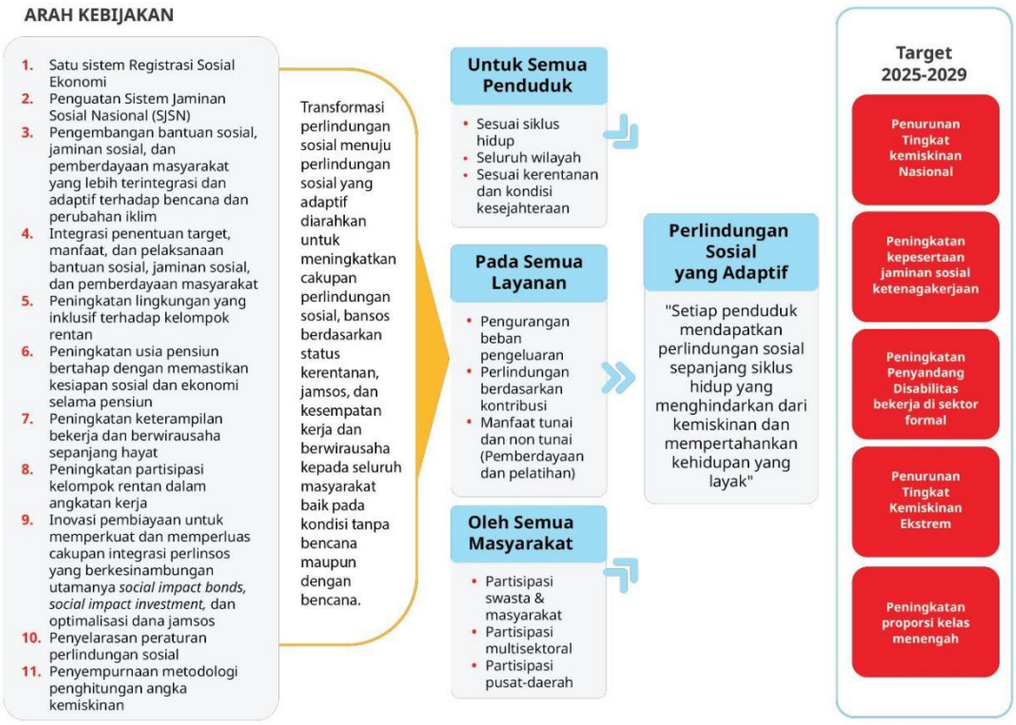
4.3.1 Strategi dan Kebijakan Nasional

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional untuk periode 2025–2029 menempatkan penurunan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan, seiring dengan penguatan kualitas sumber daya manusia dan dorongan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta berkelanjutan. Penekanan pada ketiga agenda tersebut diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah sekaligus memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang secara nasional.

Dalam kerangka kebijakan tersebut, kemiskinan dipahami sebagai persoalan multidimensi yang tidak hanya terkait keterbatasan ekonomi, tetapi juga mencakup kesenjangan sosial,

kerentanan dan marginalisasi kelompok tertentu, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Pemerintah menetapkan target penurunan tingkat kemiskinan nasional pada kisaran 4,5–5,0 persen, serta penurunan kemiskinan ekstrem menjadi kurang dari 0,5 persen pada tahun 2026, dengan penajaman sasaran kepada penduduk paling miskin dan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, lanjut usia, anak-anak, serta masyarakat miskin dan rentan yang berada di wilayah kantong kemiskinan dan wilayah tertinggal.

Gambar 4. 1 Kerangka Pikir Penurunan Kemiskinan RPJPN Periode RPJMN 2025-2029



Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029

Pada periode RPJMN 2025–2029, strategi nasional penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui penguatan perlindungan sosial yang adaptif. Arah kebijakan ini menempatkan perlindungan sosial tidak hanya sebagai jaring pengaman, tetapi sebagai penggerak yang mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, memperkuat kapasitas dan keterampilan tenaga kerja, serta memperluas akses terhadap pekerjaan yang layak. Dalam pendekatan tersebut, kegiatan pendampingan pembangunan dan perawatan kelompok rentan

(caregiving) juga didorong untuk dikembangkan dan distandardisasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesejahteraan dan produktivitas.

Transformasi perlindungan sosial menuju perlindungan sosial yang adaptif dilaksanakan untuk meningkatkan cakupan dan ketepatan sasaran, dengan basis penentuan penerima yang mempertimbangkan status kerentanan, kepesertaan jaminan sosial, serta kesempatan kerja dan berwirausaha. Transformasi ini juga dirancang berlaku untuk seluruh penduduk, mengikuti siklus hidup, menjangkau seluruh wilayah, dan memperhatikan kerentanan serta kondisi kesejahteraan. Pada sisi layanan, penguatan dilakukan melalui pengurangan beban pengeluaran, perluasan perlindungan berbasis kontribusi, serta penyediaan manfaat tunai maupun nontunai yang terintegrasi dengan upaya pemberdayaan dan pelatihan.

Sejalan dengan itu, kebijakan nasional menekankan penguatan fondasi tata kelola perlindungan sosial melalui pembangunan satu sistem registrasi sosial-ekonomi, penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), serta peningkatan integrasi penentuan target, manfaat, dan pelaksanaan bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat, termasuk untuk kelompok miskin dan rentan terhadap bencana serta perubahan iklim. Kebijakan juga diarahkan untuk memperkuat lingkungan yang inklusif bagi kelompok rentan, mendorong peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat, serta meningkatkan partisipasi kelompok rentan dalam angkatan kerja. Dari sisi pembiayaan, pemerintah mendorong inovasi pembiayaan untuk memperkuat dan memperluas cakupan program perlindungan sosial secara berkelanjutan, disertai penyelarasan regulasi dan penyempurnaan metodologi penghitungan kemiskinan sebagai dasar perencanaan yang lebih akurat.

Dengan kerangka kebijakan tersebut, target nasional 2025–2029 diarahkan pada penurunan tingkat kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem), peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, peningkatan partisipasi penyandang disabilitas bekerja di sektor formal, serta peningkatan proporsi kelas menengah.

Kerangka ini menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam menyelaraskan strategi dan arah kebijakan daerah agar sejalan dengan prioritas nasional, khususnya melalui penguatan perlindungan sosial adaptif, integrasi layanan dan sasaran, serta peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat miskin dan rentan.

Gambar 4. 2 Strategi Empat Pilar Utama Penurunan Kemiskinan Nasional



Sumber : Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029

Dalam kerangka kebijakan nasional periode 2025–2029, penurunan kemiskinan ditempuh melalui empat pilar strategi utama yang diarahkan untuk mencapai penurunan kemiskinan absolut (berdasarkan garis kemiskinan) pada kisaran 4,5–5,0 persen pada tahun 2029, serta penurunan kemiskinan ekstrem (standar US$ 2,15 PPP) menjadi kurang dari 0,5 persen pada tahun 2026. Keempat pilar tersebut mencakup: (1) stabilitas ekonomi makro melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pengendalian inflasi; (2) pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin melalui bantuan sosial dan jaminan sosial; (3) peningkatan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja; serta (4) penguatan layanan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah melalui pembangunan kualitas sumber daya manusia dan perluasan akses ekonomi.

Pilar pertama menekankan pentingnya stabilitas ekonomi makro sebagai prasyarat pertumbuhan yang inklusif, termasuk menjaga inflasi agar daya beli masyarakat tetap terlindungi. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif diarahkan

agar manfaat pembangunan tersebar lebih merata ke seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan.

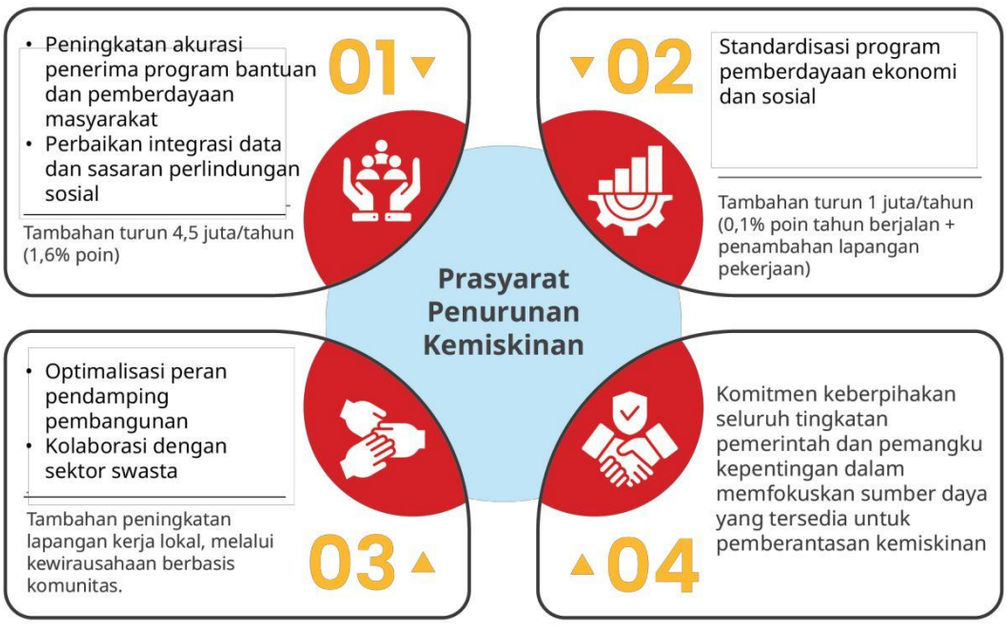
Pilar kedua berfokus pada pengurangan beban pengeluaran melalui penguatan bantuan sosial dan jaminan sosial, serta penguatan instrumen perlindungan untuk kelompok miskin dan rentan. Penguatan pilar ini diarahkan agar rumah tangga miskin memiliki perlindungan yang lebih memadai untuk menjaga kelangsungan konsumsi dasar dan mengurangi kerentanan terhadap guncangan.

Pilar ketiga diarahkan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan kesempatan kerja melalui penguatan kegiatan ekonomi produktif dan perluasan akses kerja. Pilar ini menjadi jalur utama untuk mendorong graduasi dari kemiskinan melalui penguatan kapasitas, akses terhadap sumber daya produktif, serta dukungan kewirausahaan dan kemitraan.

Pilar keempat memperkuat layanan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah sebagai penopang peningkatan kualitas hidup dan akses ekonomi, terutama di wilayah 3T dan kantong kemiskinan. Intervensi diarahkan pada peningkatan akses air minum aman, sanitasi layak, layanan kesehatan, pendidikan berkualitas, konektivitas, dan infrastruktur dasar lainnya.

Kerangka strategi empat pilar tersebut menjadi rujukan untuk penyelarasan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, khususnya dalam memastikan keterpaduan intervensi antara perlindungan sosial, penguatan ekonomi masyarakat, serta perbaikan layanan dasar dan akses wilayah bagi kelompok miskin dan rentan.

Gambar 4. 3 Prasyarat Penurunan Kemiskinan Nasional



Sumber : Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029

Strategi penurunan kemiskinan nasional dilaksanakan dengan pendekatan lintas sektor yang terintegrasi, sehingga memerlukan sejumlah prasyarat agar pelaksanaan program lebih tepat sasaran dan berdampak.

Pertama, diperlukan peningkatan akurasi penerima program bantuan dan pemberdayaan masyarakat melalui perbaikan integrasi data dan sasaran perlindungan sosial. Penguatan basis data sasaran menjadi fondasi untuk memastikan penargetan program lebih tepat dan sejalan dengan kondisi kerentanan rumah tangga.

Kedua, diperlukan penerapan pendekatan yang terstandar, inklusif, dan berkesinambungan melalui standardisasi program pemberdayaan ekonomi dan sosial. Standardisasi ini penting untuk menjaga konsistensi desain program, memperkuat keterkaitan antara bantuan dan pemberdayaan, serta memastikan perluasan program berjalan dengan kualitas pelaksanaan yang terukur.

Ketiga, percepatan penurunan kemiskinan membutuhkan optimalisasi peran pendamping pembangunan dan penguatan kolaborasi strategis lintas sektor dengan partisipasi kuat masyarakat dan sektor swasta. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mempercepat peningkatan keberdayaan masyarakat, mendorong kewirausahaan

berbasis komunitas, memperluas penciptaan lapangan kerja lokal, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pasar dan teknologi.

Keempat, diperlukan komitmen keberpihakan seluruh tingkatan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memfokuskan sumber daya yang tersedia pada agenda pemberantasan kemiskinan. Komitmen ini menjadi penguat tata kelola agar program dan anggaran lebih terarah, saling melengkapi, dan konsisten terhadap target yang telah ditetapkan.

Melalui pemenuhan prasyarat tersebut, sinergi kebijakan penurunan kemiskinan dapat diperkuat melalui pendekatan berbasis data, inovasi teknologi, dan kolaborasi lintas sektor, sehingga program yang dilaksanakan lebih terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

4.3.2 Strategi dan Kebijakan Prov. Kalimantan Selatan

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan periode 2025–2029 disusun untuk memastikan penurunan kemiskinan berjalan secara konsisten, merata, dan berkelanjutan. Berdasarkan rancangan awal RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, persentase penduduk miskin ditargetkan menurun dari 3,85 persen pada tahun 2025 menjadi 2,64 persen pada tahun 2029, dengan proyeksi melandai hingga 2,39 persen pada tahun 2030. Target tersebut disusun dengan memperhatikan keselarasan terhadap sasaran nasional, sehingga arah kebijakan penanggulangan kemiskinan provinsi mendukung agenda prioritas nasional sekaligus mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan daerah.

Untuk mencapai target penurunan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan tiga strategi utama sebagai kerangka kerja penanggulangan kemiskinan daerah. Ketiga strategi ini merupakan integrasi antara perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta pengembangan wilayah, sehingga dapat menjadi rujukan dalam penyelarasan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

(1). Strategi Mengurangi Beban Pengeluaran Rumah Tangga Miskin

Strategi pertama difokuskan untuk menurunkan beban pengeluaran rumah tangga miskin dan rentan miskin melalui penguatan perlindungan sosial serta peningkatan akses layanan dasar. Arah kebijakan mencakup penyediaan bantuan sosial yang tepat sasaran berdasarkan data terpadu (DTSEN), peningkatan akses air minum, sanitasi, dan listrik bagi rumah tangga miskin, penguatan layanan kesehatan primer, serta dukungan sektor pendidikan melalui beasiswa bagi keluarga miskin, BOSDA, dan penyediaan perlengkapan sekolah. Selain itu, penanganan permukiman kumuh dan penyediaan hunian layak menjadi bagian dari upaya menekan risiko kerentanan sosial dan lingkungan pada kelompok miskin.

(2). Strategi Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga Miskin

Strategi kedua diarahkan untuk memperkuat kemampuan ekonomi rumah tangga miskin melalui peningkatan produktivitas, penciptaan kesempatan kerja, dan pengembangan usaha. Arah kebijakan mencakup pengembangan sektor-sektor pengungkit yang berpotensi menyerap tenaga kerja dan memberikan nilai tambah, antara lain pertanian dan perkebunan rakyat, perikanan, UMKM, industri pengolahan berbasis komoditas lokal, serta pariwisata. Penguatan keterampilan kerja dilakukan melalui pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan pusat pelatihan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Sementara itu, peningkatan akses pembiayaan melalui skema seperti KUR, koperasi, dan dana bergulir diarahkan untuk memperkuat kapasitas usaha rumah tangga miskin.

(3). Strategi Meminimalkan Kantong-Kantong Kemiskinan

Strategi ketiga berfokus pada penanganan kemiskinan berbasis wilayah dengan memperhatikan persebaran kemiskinan yang tidak merata. Arah kebijakan meliputi peningkatan akses layanan dasar dan infrastruktur secara berkeadilan pada wilayah prioritas, penyediaan jalan usaha tani dan konektivitas antarwilayah, peningkatan jaringan air minum dan sanitasi, serta penguatan layanan pendidikan dan kesehatan pada lokasi yang sulit dijangkau. Revitalisasi permukiman kumuh dan penguatan sanitasi berbasis masyarakat juga menjadi bagian dari intervensi untuk menurunkan risiko kesehatan dan lingkungan. Penguatan pembangunan desa dilakukan melalui optimalisasi Dana Desa dan pemberdayaan BUMDes untuk memperluas kegiatan ekonomi lokal. Penetapan lokasi prioritas dilakukan dengan pemanfaatan data spasial kemiskinan guna memastikan konvergensi program lintas-perangkat daerah pada rumah tangga dan wilayah yang sama.

Ketiga strategi tersebut diterapkan secara terpadu melalui mekanisme koordinasi lintas perangkat daerah dan lintas pemerintahan dalam kerangka TKPKD. Pendekatan ini menjadi rujukan dalam memastikan intervensi penanggulangan kemiskinan—baik bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pengembangan wilayah—dilaksanakan secara terarah, tepat sasaran, dan saling memperkuat. Dengan penguatan sistem data dan penganggaran berbasis hasil, arah kebijakan penanggulangan kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan periode 2025–2029 diharapkan mampu mendukung pencapaian target yang ditetapkan dan menjadi acuan penyelarasan kebijakan daerah, termasuk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

4.3.3 Strategi dan Kebijakan Kab. Hulu Sungai Tengah

Strategi merupakan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam upaya untuk mencapai sasaran. Adapun strategi dalam upaya pencapaian sasaran menurunnya penduduk miskin adalah sebagai berikut:

1. Berkurangnya beban pengeluaran penduduk miskin.

2. Meningkatnya kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin.
3. Berkembang dan terjaminnya keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil.
4. Berkurangnya kantong kemiskinan.

Tabel 4. 4 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 - 2029

Strategi	Arah Kebijakan
Berkurangnya beban pengeluaran penduduk miskin	Meningkatnya akses rumah layak huni bagi keluarga miskin
	Meningkatnya akses air bersih yang layak bagi penduduk miskin
	Meningkatnya akses sanitasi layak bagi RTM
	Meningkatnya akses listrik bagi RTM
	Meningkatnya akses pelayanan Kesehatan bagi penduduk miskin
	Meningkatnya akses Pendidikan bagi penduduk miskin
	Meningkatnya akses layanan jaminan dan perlindungan sosial
	Meningkatnya akses ketersediaan pangan dan gizi bagi penduduk dan siswa miskin
	Meningkatnya stabilisasi harga pangan / penanganan inflasi
	Meningkatnya perlindungan bagi pekerja rentan
Meningkatnya kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin	Meningkatnya pemberdayaan dan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin
	Meningkatnya kesempatan kerja bagi penduduk miskin
Berkembang dan terjaminnya keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil	Meningkatnya akses permodalan UMK (ultra mikro dan mikro)
	Meningkatnya kapasitas UMK (ultra mikro dan mikro)
Berkurangnya kantong kemiskinan	Meningkatnya tata kelola program PK
	Meningkatnya ketepatan sasaran program PK
	Meningkatnya pengawasan program PK

4.4 Program Penggulangan Kemiskinan Daerah

Dalam rangka memperkuat arah kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025–2029, diperlukan pengelompokan strategi dan program yang jelas agar intervensi penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan lebih terarah, terukur, dan tepat sasaran. Pengelompokan ini juga menjadi dasar untuk memastikan sinergi

lintas perangkat daerah serta keterpaduan antara pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi, dan tata kelola. Adapun strategi dan kelompok program rencana penanggulangan kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025–2029 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 5 Strategi dan Kelompok Program Rencana Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 - 2029

Strategi	Kelompok Program
Berkurangnya beban pengeluaran penduduk miskin	Kelompok Program Bantuan dan Perlindungan Sosial melalui pemenuhan hak dan kebutuhan dasar
Meningkatnya kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin	Kelompok Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat
Berkembang dan terjaminnya keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil	Kelompok Program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha ekonomi ultra mikro, mikro dan kecil
Berkurangnya kantong kemiskinan	Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan melalui Penguatan Tata Kelola dan Peningkatan Akuntabilitas

Sumber : Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 Kab. Hulu Sungai Tengah

Berdasarkan tabel di atas, strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025–2029 dirumuskan ke dalam empat kelompok program utama, yaitu (1) Bantuan dan Perlindungan Sosial melalui pemenuhan hak dan kebutuhan dasar, (2) penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, (3) penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi ultra mikro, mikro, dan kecil, serta (4) Penguatan Tata Kelola dan Peningkatan Akuntabilitas. Pengelompokan ini dimaksudkan untuk memudahkan penajaman peran perangkat daerah, memperkuat integrasi perencanaan–penganggaran, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program melalui koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan.

Program penanggulangan kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi :

1. Kelompok program Bantuan dan Perlindungan Sosial melalui pemenuhan hak dan kebutuhan dasar, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dan kebutuhan dasar,

pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Yang masuk dalam kelompok ini adalah program:

a. Program Pengelolaan Pendidikan
b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
e. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
f. Program Rehabilitasi Sosial
g. Program Pelindungan Dan Jaminan Sosial
h. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
i. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
j. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
k. Program Hubungan Industrial
l. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
m. Program Penanganan Kerawanan Pangan
n. Program Perekonomian Dan Pembangunan

2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, mengembangkan potensi dan kelompok masyarakat miskin dalam pembangunan yang didasarkan pemberdayaan masyarakat. Yang masuk dalam kelompok ini adalah program :

a. Program Pemberdayaan Sosial
b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
c. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
d. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
e. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

f. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
g. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
h. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

3. Kelompok program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha ekonomi ultra mikro, mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala ultra mikro, mikro dan kecil. Yang masuk dalam kelompok ini adalah program :
   a. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
   b. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

4. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan melalui Penguatan Tata Kelola dan Peningkatan Akuntabilitas. Yang masuk dalam kelompok ini adalah program :
   a. Program Pendaftaran Penduduk
   b. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
   c. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
   d. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Secara keseluruhan, pengelompokan program ini menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025–2029 harus dijalankan sebagai upaya bersama yang terintegrasi, lintas sektor, dan akuntabel. Kerangka strategi dan kelompok program tersebut menjadi landasan penajaman pelaksanaan, pengukuran kinerja, serta penguatan sinergi pendanaan agar penurunan kemiskinan dapat dicapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Tabel 4. 6 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat bantuan	Lokasi	Jumlah Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian Bantuan
						Langsung	Tidak langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
1	2	3	5	6	7	8	9	10			11			12	13	14	15	16	17	18
1	Penguranan beban pengeluaran masyarakat	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) HA	Pemberian Bantuan Rumah Swadaya (BRS) berupa Bahan Konstruksi Bangunan dan Upah Pekerja		1. Sosialisasi dan koordinasi, 2 . Pembentukan, Pelatihan dan Belanja Jasa KORFAS dan TFL, 3 Pembentukan dan Honoraium Tim Koordinasi BRS APBD, 4.Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, 5. Belanja sewa gedung dan Perlatan, 6. Belanja Perjalanan Dinas	**30,089,499,800**	**25,712,440,000**	**30,000,000,000**	**30,000,000,000**	**30,000,000,000**	APBD	Berkelanjutan sesuat dengan VISI dan MISI Kab. HST, 100) Unit /Tahun selama 5 Tahun	Seluruh Kecamatan yang tidak termasuk kaw. Permukiman Kumuh di Kabupaten Hulu Sungai Tengah	930 Unit	25 Juta/Unit	Bahan Konstruksi Bangunan dan Upah Pekerja	5 Tahun
			Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) HA	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Pemberian Bantuan Biaya Pembangunan Rumah berupa Bahan Konstruksi dan Upah Pekerja		1. Sosialisasi dan koordinasi, 2 . Pembentukan, Pelatihan dan Belanja Jasa KORFAS dan TFL, 3 Pembentukan dan Honoraium Tim Koordinasi BRS APBD, 4.Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, 5. Belanja sewa gedung dan Perlatan, 6. Belanja Perjalanan Dinas	**2,388,632,000**	**2,048,000,000**	**2,500,000,000**	**2,500,000,000**	**2,500,000,000**	APBD	Berkelanjutan sesuat dengan VISI dan MISI Kab. HST, 100) Unit /Tahun selama 5 Tahun	Beberapa Kecamatan yang termasuk kaw. Permukiman Kumuh di Kabupaten Hulu Sungai Tengah	70 Unit	25 Juta/Unit	Bahan Konstruksi Bangunan dan Upah Pekerja	5 Tahun
			Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) HA	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Pemberian Bantuan Sosial Jamban dan Akses Sanitasi Layak Pedesaan berupa Bahan Konstruksi dan Upah Pekerja		1. Sosialisasi dan koordinasi, 2 . Belanja Jasa KORFAS dan TFL, 3. Belanja Perjalanan Dinas	**1,948,784,200**	**492,000,000**	**120,000,000**	**120,000,000**	**120,000,000**	APBD	Berkelanjutan sesuai dengan pendataan Kebutuhan dimasyarakat	Beberapa Kecamatan yang termasuk kaw. Permukiman Kumuh di Kabupaten Hulu Sungai Tengah	50 Unit	6 Juta/Unit	Bahan Konstruksi Bangunan dan Upah Pekerja	5 Tahun
		Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Sambungan Rumah Sistem Penyediaan Air Minum				5,026,222,500.00	-	-	-	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. HST	5 liter / detik	600 ribu / meter	Sambungan Rumah Sistem Penyediaan Air Minum	1x dalam setahun
						Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan				-	500,000,000.00	-	-	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. HST	5 liter / detik	600 ribu / meter	Sambungan Rumah Sistem Penyediaan Air Minum	1x dalam setahun

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat bantuan	Lokasi	Jumlah Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian Bantuan
						Langsung	Tidak langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	16	17	18
						Perpipaan														
						Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				-	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. HST	250 Unit	4 Juta / Unit	Sambungan Rumah Sistem Penyediaan Air Minum	1x dalam setahun
						Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				-	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. HST	250 Unit	4 Juta / SR	Sambungan Rumah Sistem Penyediaan Air Minum	1x dalam setahun
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Tangki Septik Pabrikasi & Bangunan Atas Kloset dan Instalasinya				3,359,989,800.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	APBD	Tidak Berkelanjutan	Kab. HST	500 orang	15 juta / unit	Tangki Septik Pabrikasi & Bangunan Atas Kloset dan Instalasinya	1x dalam setahun
		Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pembayaran Iuran dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU Pemda dan BP Kelas 3			57,438,259,200	47,828,692,000	50,000,000,000	50,000,000,000	50,000,000,000	APBD	Berkelanjutan sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional	Kabupaten Hulu Sungai tengah	115.000 orang	Iuran Induk Rp. 35.000/orang/bulan dan Bantuan Iuran Rp. 2.800/orang/bulan	Pembayaran Iuran JKN	5 Tahun
		Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Pemberian beasiswa dengan uang non tunai			**1,400,000,000**	500,000,000				APBD	berkelanjutan sesuai kriteria	seluruh desa di Kab. HST	500 orang	1,000,000	uang	1 tahun
				Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Pemberian beasiswa dengan uang non tunai			**600,000,000**	400,000,000				APBD	berkelanjutan sesuai kriteria	seluruh desa di Kab. HST	400 orang	1,000,000	uang	1 tahun
		Dinas Sosial, PPPA dan PPKB	Program Pelindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Bantuan PKH dan BPNT			**64,723,675,000**	**71,196,042,500**	**78,315,646,750**	**86,147,211,425**	**94,761,932,568**	APBN	Berkelanjutan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Jumlah sasaran ditentukan oleh pusat berdasarkan desil yang bersifat dinamis	Besaran manfaat setiap penerima PKH dan BPNT ditentukan oleh pusat dan nominalnya berbeda disesuaikan dengan anggota keluarga penerima bantuan	Uang	1 Tahun
			Program Rehabilitasi Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia 62 Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Pemberian Bantuan Sosial terhadap Penyandang Disabilitas Fisik, Disabilitas Mental Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak terlantar dan Wanita Kepala Keluarga Rawan Sosial Ekonomi		Sosialisasi dan koordinasi	**7,387,714,000**	**9,197,250,000**	**7,906,940,800**	**8,697,634,880**	**10,524,138,205**	APBD	Berkelanjutan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	4155 Orang	1. Bantuan Sosial Disabilitas Fisik, Mental dan Lansia Rp150.000/Bulan 2.Bantuan Sosial Wanita Kepala Keluarga Rawan Sosial Ekonomi Rp1.000.000/Tahun 3. Bantuan Sosial Anak Terlantar Rp22.000/Hari	Uang	1 Tahun
			Program Pemberdayaan	Kegiatan Pengembangan	Penyediaan Sandang	Pemberian Sandang			**51,000,000**	**51,065,000**	**56,171,500**	**61,788,650**	**67,967,515**	APBD	Tidak Berkelanjuta	Kabupaten Hulu	89 Orang	Rp505.000/Orang	Barang	1 Tahun

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat bantuan	Lokasi	Jumlah Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian Bantuan
						Langsung	Tidak langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	16	17	18
			Sosial	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		terhadap Lansia Terlantar, Anak Terlantar dan Disabilitas Terlantar									n	Sungai Tengah				
		SETDA	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat																	
			Program Perekonomian Dan Pembangunan																	
		DISPERKIMTAN	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan																	
		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis		Bimtek Kader Pangan dan Lomba B2SA Tk. Kab		**217,736,750**	**259,751,800**	**255,000,000**	**260,000,000**	**265,000,000**	APBD						
				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Tidak langsung		**247,258,800**	**593,385,264**	**510,000,000**	**510,000,000**	**550,000,000**	APBD						
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten /Kota		Tidak langsung		**394,344,660**	**362,588,774**	**820,000,000**	**820,000,000**	**840,000,000**	APBD						
		Dinas Perdagangan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						**391,002,000**	**391,002,000**	**391,002,000**	APBD						
		Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja															
2	Peningkat	Dinas	Program	Penyediaan	Pengadaan Bibit	Pemberian			**2,241,250,000**		**2,881,607,142**			APBD	Tidak	Kabupaten	Diberikan	Untuk ternak	Ternak	1 Kali

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat bantuan	Lokasi	Jumlah Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian Bantuan
						Langsung	Tidak langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	16	17	18
	an pendapatan masyarakat	Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	bantuan Hewan Ternak Ayam Petelur dan Kambing				2,399,869,200		3,201,785,714	3,521,964,285		Berkelanjutan	Hulu Sungai Tengah	kepada 50 orang penerima ternak ayam petelur dan 20 orang penerima ternak kambing	ayam petelur per 1 orang mendapatkan 100 ekor, pakan pabrik 12 zak dan 1 unit bahan kandang. Untuk ternak kambing per 1 orang mendapatkan 6 ekor kambing betina dan 1 ekor jantan	Ayam Petelur : Ayam Betina, Pakan pabrikan dan bahan kandang, Ternak Kambing : Kambing betina 6 ekor, kambing jantan 1 ekor dan bahan kandang	Sekaligus
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pemberian Bantuan Bibit Cabe Rawit			500,395,000	171,470,000	180,043,500	**189,045,675**	**1,134,274,050**	APBD	Tidak Berkelanjutan	Hulu Sungai Tengah	100KK	1. Bibit Cabe Rawit 1 bks/KK 2.Fungisida 1 botol/KK 3.Herbisida 1 liter/KK 4Insektisida Cair 1 botol / KK 5. Kapur 1 sak / KK 6 Mulsa 1 roll /KK 7.Potray 15 / KK 8. Pupuk NPK 10 Kg /KK	1. Bibit Cabe Rawit 1 bks/KK 2.Fungisida 1 botol/KK 3.Herbisida 1 liter/KK 4Insektisida Cair 1 botol / KK 5. Kapur 1 sak / KK 6 Mulsa 1 roll /KK 7.Potray 15 / KK 8. Pupuk NPK 10 Kg /KK	1 Kali
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat TIngkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakukanya Hulu adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/kota															
		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		Tidak Langsung		**421,665,536**	**252,435,345**	**1,070,000,000**	**1,090,000,000**	**1,110,000,000**	APBD						
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Bantuan Kolam Bundar D3, Pakan PF 800, PF 100, LP1, LP 2, LP 3		Temu Teknis untuk 150 penerima bantuan	**1,565,322,807**	**2,038,901,679**	**2,300,000,000**	**2,300,000,000**	**2,350,000,000**	APBD	Berkelanjutan	HST	Tahun 2026 = 100 Lanjutan, 30 Penerima baru Tahun 2027 = 30 Penerima baru Tahun 2028 = 30	Masing-masing penerima baru = 14.235.000	Kolam Bundar D3, Pakan Ikan PF 800, PF 1000, LP 1, Lp 2, LP 3, dan Benih Ikan Nila	1 Kali

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat bantuan	Lokasi	Jumlah Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian Bantuan
						Langsung	Tidak langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	16	17	18
																	Penerima baru Tahun 2029 = 30 Penerima baru			
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota		Tidak Langsung		**499,620,800**	**2,145,635,330**	**1,930,000,000**	**1,978,500,000**	**2,027,500,000**	APBD	-		-	-	-	-
			Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengeolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Resiko	Bantuan Alat Pengolahan Hasil Perikanan			**456,682,876**	**745,643,831**	**714,000,000**	**728,280,000**	**745,846,000**	APBD	Tidak Berkelanjutan	HST	Bantuan Alat Pengolahan Hasil Perikanan untuk 1 (satu) Kelompok Pengolah dan Pemasar terdiri dari 16 Orang	Rp. 22.000.000,-	Bantuan Alat Ekstraksi Albumin	1 Kali
3	Berkembang dan terjaminnya keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil	Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi dalam Pengembangan Ekonomi									APBD						
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan									APBD						
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri									APBD						
4	Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Penerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Rapat Koordinasi dan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan		**30,824,415**	**46,357,750**	**55,500,000**	**60,500,000**	APBD						
		Dinas Kependudukan dan	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pendataan Penduduk Non Permanen dan			Kegiatan jemput bola dan pendataan	**30,200,000**	**15,700,000**	**30,000,000**	**33,000,000**	**36,300,000**	APBD Kab/Kota						

No	Strategi OPPKPKE	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aktivitas real			Alokasi Anggaran (Rp)					Sumber Pembiayaan	Sifat bantuan	Lokasi	Jumlah Sasaran Penerima Manfaat	Besaran Manfaat	Jenis Bantuan	Durasi Pemberian Bantuan
						Langsung	Tidak langsung	Penunjang	2025	2026	2027	2028	2029							
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11					12	13	14	15	16	17	18
		Pencatatan Sipil			Rentan Administrasi Kependudukan			bagi penduduk rentan adminduk												
				Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk			Rapat koordinasi dan fasilitasi kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk terintegrasi	-	**33,784,600**	**48,042,060**	**52,846,200**	**58,130,893**	APBD Kab/Kota						
					Fasilitasi Pendaftaran Penduduk			Pembelian bahan dan peralatan cetak penerbitan dokumen kependudukan seperti ribbon, cleaning kit dan film utk KTP el dan KIA	**273,350,000**	**292,674,700**	**605,016,085**	**665,517,200**	**732,069,463**	APBD Kab/Kota						
		Inspektorat	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah					**291,952,000**	**325,000,000**	**350,000,000**	**380,000,000**	APBD						
					Reviu Laporan Kinerja					**213,475,000**	**220,000,000**	**247,500,000**	**260,000,000**	APBD						

Sumber : Renstra Perangkat Daerah 2025-2029, Hasil Olahan 2026

4.5 Target Penurunan Angka Kemiskinan

Target penurunan angka kemiskinan merupakan salah satu indikator kinerja utama dalam pelaksanaan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025–2029. Target ini disusun mengacu pada capaian dan proyeksi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025–2029, sebagai bentuk keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan. Penetapan target tahunan ini menjadi acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam merumuskan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan setiap tahunnya, sekaligus menjadi dasar evaluasi capaian kinerja TKPKD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Berdasarkan tabel di atas, tingkat kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ditargetkan menurun secara bertahap dari 5,43% pada tahun 2025 menjadi 4,12% pada tahun 2029, atau mengalami penurunan sebesar 1,31 poin persentase selama periode lima tahun. Penurunan tersebut ditargetkan berlangsung secara konsisten setiap tahunnya, dengan penurunan rata-rata sekitar 0,33 poin persentase per tahun. Pencapaian target ini memerlukan sinergi program antara kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu dengan kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, sebagaimana diuraikan dalam struktur TKPKD Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Tabel 4. 7 Target Penurunan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029

No	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
1	Tingkat kemiskinan (%)	5,43	5,26	4,88	4,50	4,12

Sumber : RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029, Hasil Olahan 2026

4.6 Analisis Kondisi Fiskal Untuk Penanggulangan Kemiskinan

4.6.1 Kondisi Umum Fiskal

Kondisi umum fiskal Kabupaten Hulu Sungai Tengah menggambarkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dalam

mengoptimalkan pendapatan daerah serta mengarahkan belanja dan pembiayaan daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan prioritas pembangunan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Dalam kerangka tersebut, APBD sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah memuat struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar penyusunan kebijakan fiskal. Subbab ini menyajikan gambaran perkembangan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Tabel 4. 8 Realisasi Pendapatan dan Belanja Kab. Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 sd 2024

No	APBD	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan Daerah	1.175.940.490.493,69	1.112.074.210.230,13	1.345.630.259.510,64	1.611.181.292.311,05	1.797.379.975.577,00
2	Belanja Daerah	1.153.936.967.252,97	1.162.809.816.957,32	1.222.034.891.472,57	1.442.520.425.181,20	1.857.618.421.917,05
3	Pembiayaan Daerah	139.388.754.641	161.336.600.836	109.225.220.394	197.823.140.932	366.478.269.202

Sumber : BPKAD Kab. Hulu Sungai Tengah 2025

Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2020 sebesar 1.175.940.490.493,69, kemudian menurun pada tahun 2021 menjadi 1.112.074.210.230,13 (turun 63.866.280.263,56). Selanjutnya, pendapatan meningkat secara berturut-turut pada tahun 2022–2024, yakni menjadi 1.345.630.259.510,64 (2022), 1.611.181.292.311,05 (2023), dan 1.797.379.975.577,00 (2024). Secara keseluruhan, pendapatan tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun 2020, dengan kenaikan absolut sekitar 621.439.485.083,31.

Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah pada tahun 2020 sebesar 1.153.936.967.252,97 dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 1.162.809.816.957,32 (naik 8.872.849.704,35). Belanja daerah

selanjutnya terus meningkat pada tahun 2022 menjadi 1.222.034.891.472,57, meningkat pada tahun 2023 menjadi 1.442.520.425.181,20, dan mencapai 1.857.618.421.917,05 pada tahun 2024. Dibandingkan tahun 2020, belanja tahun 2024 meningkat sekitar 703.681.454.664,08.

Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Daerah pada tahun 2020 sebesar 139.388.754.641 dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 161.336.600.836 (naik 21.947.846.195). Pada tahun 2022, pembiayaan menurun menjadi 109.225.220.394 (turun 52.111.380.442). Selanjutnya, pembiayaan meningkat pada tahun 2023 menjadi 197.823.140.932 (naik 88.597.920.538) dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 366.478.269.202 (naik 168.655.128.270). Secara keseluruhan, pembiayaan tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun 2020, dengan kenaikan sekitar 227.089.514.561.

4.6.2 Analisis Kemandirian Fiskal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan otonomi daerah menempatkan pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab yang lebih besar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, penyediaan pelayanan publik, serta pelaksanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Konsekuensi dari peningkatan kewenangan tersebut menuntut kemampuan fiskal daerah yang memadai agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan efektif, tertib, dan berkelanjutan.

Kemandirian fiskal merupakan ukuran kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan dari sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri, terutama melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga ketergantungan terhadap sumber pendanaan dari luar daerah dapat ditekan. Penguatan kemandirian fiskal pada prinsipnya dilakukan melalui optimalisasi sumber-sumber PAD, khususnya pajak daerah dan retribusi daerah sebagai komponen

utama, serta komponen PAD lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada bagian ini, analisis kemandirian fiskal ditinjau melalui perkembangan komponen PAD Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2020–2024, baik dari sisi nilai rupiah maupun persentase pertumbuhan tahunan. Uraian ini memberikan gambaran dinamika masing-masing komponen PAD sebagai dasar untuk menilai arah penguatan kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembiayaan pelayanan publik dan program pembangunan prioritas.

Tabel 4. 9 Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Nilai Rupiah dan Persentase Pertumbuhan tahunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020-2024

No	APBD	2020		2021		2022		2023		2024	
1	Pajak Daerah	11.114.134.812,80	-18,08	11.571.389.664,95	4,11	15.254.672.390,30	31,83	17.025.906.956,73	11,61	16.681.812.765,00	-2,02
2	Retribusi Daerah	9.868.450.550,00	-17,64	10.508.734.080,00	6,49	13.960.318.668,00	32,84	13.229.698.533,00	-5,23	12.025.534.082,00	-9,10
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.841.522.022,00	52,55	6.145.710.709,00	26,94	6.775.056.242,00	10,24	7.052.993.989,00	4,10	9.137.692.478,00	29,56
4	Lain-lain PAD yang sah	124.055.217.081,89	38,86	96.107.487.756,81	-22,53	156.379.919.522,34	62,71	223.637.639.224,32	43,01	211.663.980.517,67	-5,35

Sumber : BPKAD Kab. Hulu Sungai Tengah, 2025

Pajak Daerah

Realisasi Pajak Daerah pada tahun 2020 sebesar 11.114.134.812,80 dengan pertumbuhan -18,08%. Pada 2021, pajak daerah meningkat menjadi 11.571.389.664,95 (pertumbuhan 4,11%), kemudian kembali meningkat pada 2022 menjadi 15.254.672.390,30 (pertumbuhan 31,83%). Tren kenaikan berlanjut pada 2023 dengan realisasi 17.025.906.956,73 (pertumbuhan 11,61%), sedangkan pada 2024 realisasi menjadi 16.681.812.765,00 dengan pertumbuhan -2,02%. Dengan demikian, pajak daerah menunjukkan peningkatan nilai rupiah hingga 2023, kemudian mengalami penurunan pada 2024

Pajak Daerah

Realisasi Pajak Daerah pada tahun 2020 sebesar 11.114.134.812,80 dengan pertumbuhan -18,08%. Pada 2021, pajak daerah meningkat menjadi 11.571.389.664,95 (pertumbuhan 4,11%), kemudian kembali meningkat pada 2022 menjadi 15.254.672.390,30 (pertumbuhan 31,83%). Tren kenaikan berlanjut pada 2023 dengan realisasi 17.025.906.956,73 (pertumbuhan 11,61%), sedangkan pada 2024 realisasi menjadi 16.681.812.765,00 dengan pertumbuhan -2,02%. Dengan demikian, pajak daerah menunjukkan peningkatan nilai rupiah hingga 2023, kemudian mengalami penurunan pada 2024

Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah pada tahun 2020 sebesar 9.868.450.550,00 dengan pertumbuhan -17,64%. Pada 2021, retribusi meningkat menjadi 10.508.734.080,00 (pertumbuhan 6,49%) dan meningkat kembali pada 2022 menjadi 13.960.318.668,00 (pertumbuhan 32,84%). Namun pada 2023 retribusi menurun menjadi 13.229.698.533,00 (pertumbuhan -5,23%) dan kembali menurun pada 2024 menjadi 12.025.534.082,00 (pertumbuhan -9,1%). Pola ini menunjukkan

peningkatan sampai 2022, kemudian penurunan berlanjut pada 2023–2024.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2020 sebesar 4.841.522.022,00 dengan pertumbuhan 52,55%. Pada 2021, realisasi meningkat menjadi 6.145.710.709,00 (pertumbuhan 26,94%) dan meningkat pada 2022 menjadi 6.775.056.242,00 (pertumbuhan 10,24%). Pada 2023, realisasi kembali meningkat menjadi 7.052.993.989,00 (pertumbuhan 4,1%), kemudian pada 2024 meningkat menjadi 9.137.692.478,00 dengan pertumbuhan 29,56%. Secara umum, komponen ini menunjukkan tren kenaikan nilai rupiah sepanjang 2020–2024, dengan pertumbuhan tahunan yang bervariasi.

Lain-lain PAD yang Sah

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah pada tahun 2020 sebesar 124.055.217.081,89 dengan pertumbuhan 38,86%. Pada 2021, realisasi menurun menjadi 96.107.487.756,81 (pertumbuhan -22,53%), kemudian meningkat pada 2022 menjadi 156.379.919.522,34 (pertumbuhan 62,71%). Peningkatan berlanjut pada 2023 dengan realisasi 223.637.639.224,32 (pertumbuhan 43,01%), sedangkan pada 2024 realisasi menurun menjadi 211.663.980.517,67 dengan pertumbuhan -5,35%. Dengan demikian, komponen ini berfluktuasi, dengan penurunan pada 2021 dan 2024, serta peningkatan signifikan pada 2022–2023.

4.7 Analisis Faktor Pendorong Dan Penghambat Intervensi

Analisis faktor pendorong dan penghambat intervensi disusun untuk mengidentifikasi kondisi objektif yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah. Pendekatan analisis dilakukan dengan menelaah perkembangan kinerja pada urusan pendidikan, kesehatan, perekonomian, tenaga kerja, pertanian, dan infrastruktur. Setiap bidang dianalisis dari sisi faktor internal yang mendukung percepatan capaian serta kendala struktural dan operasional yang berpotensi menghambat keberhasilan intervensi.

Tabel 4. 10 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No	Bidang Urusan	Pendorong	Penghambat
1	Pendidikan	- Kinerja pendidikan cenderung membaik, terlihat dari peningkatan capaian belajar dan partisipasi sekolah. - Risiko putus sekolah cenderung menurun dan layanan pendidikan dasar relatif terkendali. - Program prioritas pendidikan (bantuan pendidikan dan penguatan pengelolaan layanan) menjadi penopang perbaikan.	- Transisi dari pendidikan dasar ke menengah masih menjadi tantangan; partisipasi sesuai jenjang belum merata. - Konsistensi partisipasi sekolah menengah masih fluktuatif. - Kerentanan putus sekolah masih muncul pada sebagian kelompok/wilayah sehingga perlu penguatan pencegahan.
2	Kesehatan	- Cakupan perlindungan jaminan kesehatan cenderung meningkat dan ditopang dukungan iuran. - Status gizi balita menunjukkan perbaikan sehingga intervensi gizi relatif berjalan. - Program layanan kesehatan dan pengendalian penyakit menjadi faktor pendukung penguatan sistem layanan.	- Pemanfaatan persalinan di fasilitas kesehatan melemah, mengindikasikan hambatan akses, rujukan, atau preferensi layanan. - Percepatan penurunan stunting masih perlu diperkuat agar lebih merata. - Capaian layanan dan gizi belum sepenuhnya stabil antar waktu sehingga konsistensi intervensi perlu ditingkatkan.
3	Perekonomian	- Posisi wilayah strategis mendukung perdagangan, distribusi, dan pertumbuhan aktivitas ekonomi. - Basis sektor unggulan tetap menjadi penopang	- Daya dorong pertumbuhan ekonomi masih relatif tertinggal dibanding pembanding utama sehingga perlu akselerasi. - Ketergantungan pada sektor primer masih tinggi sehingga

No	Bidang Urusan	Pendorong	Penghambat
		dan sebagian sektor menunjukkan penguatan. - Penguatan UMKM, koperasi, dan industri kecil berperan menjaga daya tahan ekonomi daerah.	rentan terhadap guncangan. - Kinerja antar sektor belum merata sehingga proses transformasi ekonomi berjalan bertahap.
4	Tenaga Kerja	- Tingkat pengangguran menunjukkan tren membaik. - Partisipasi angkatan kerja relatif tinggi, menandakan ketersediaan tenaga kerja untuk mendukung aktivitas ekonomi. - Program pelatihan dan penempatan kerja membantu meningkatkan peluang kerja.	- Penciptaan lapangan kerja yang berkualitas masih perlu diperkuat agar serapan sejalan dengan kebutuhan pasar. - Dinamika pasar kerja belum sepenuhnya stabil dan sensitif terhadap kondisi ekonomi. - Peningkatan keterampilan serta produktivitas tenaga kerja perlu dipercepat.
5	Pertanian	- Peran sebagai sentra produksi pangan dan peternakan memperkuat ketahanan ekonomi lokal. - Produksi menunjukkan indikasi pemulihan sehingga peluang peningkatan output masih terbuka. - Dukungan program produksi, diversifikasi, dan sarana prasarana memperkuat daya saing sektor.	- Keberlanjutan produksi perlu dijaga karena kinerja luas tanam dan output sempat melemah. - Sektor rentan terhadap bencana, cuaca ekstrem, dan alih fungsi lahan. - Efisiensi budidaya dan produktivitas masih menjadi tantangan utama.
6	Infrastruktur	- Akses layanan dasar perumahan dan sanitasi menunjukkan perbaikan. - Ketersediaan utilitas dasar dan kualitas sebagian jaringan jalan cenderung meningkat. - Program perumahan, air minum–sanitasi, serta peningkatan jalan menjadi pendorong pemerataan layanan.	- Masih ada rumah tangga yang belum menikmati hunian layak dan sanitasi memadai. - Kerusakan jalan pada beberapa segmen mengganggu konektivitas dan meningkatkan biaya logistik. - Kesenjangan layanan dasar antar wilayah masih perlu dipersempit.

Berdasarkan hasil analisis, pendidikan menunjukkan perbaikan capaian belajar dan partisipasi sekolah, disertai penurunan risiko putus sekolah. Tantangan masih kuat pada transisi ke jenjang menengah karena partisipasi belum merata dan kerentanan putus sekolah masih muncul pada kelompok/wilayah tertentu.

Kesehatan didorong peningkatan cakupan jaminan kesehatan dan membaiknya gizi balita. Kendala utama terlihat pada belum optimalnya persalinan di fasilitas kesehatan, kebutuhan percepatan penurunan stunting yang lebih merata, serta capaian layanan yang belum stabil.

Perekonomian ditopang posisi wilayah yang strategis, sektor unggulan, dan penguatan UMKM. Pertumbuhan masih perlu dipacu karena relatif tertinggal, ketergantungan pada sektor primer tinggi, dan penguatan antar sektor belum merata.

Tenaga kerja memperlihatkan tren pengangguran membaik dengan partisipasi angkatan kerja yang relatif tinggi, didukung pelatihan dan penempatan. Pekerjaan berkualitas, stabilitas pasar kerja, serta akselerasi keterampilan dan produktivitas tetap menjadi kebutuhan.

Pertanian berperan sebagai penopang ketahanan ekonomi melalui basis pangan dan peternakan, ditambah dukungan program produksi dan sarpras. Keberlanjutan luas tanam dan output, risiko bencana/cuaca ekstrem dan alih fungsi lahan, serta produktivitas masih menjadi hambatan.

Infrastruktur menunjukkan perbaikan layanan perumahan–sanitasi dan kualitas sebagian jalan yang mendorong pemerataan. Kesenjangan layanan dasar, rumah tangga yang belum menikmati hunian layak dan sanitasi memadai, serta kerusakan jalan pada beberapa segmen masih perlu ditangani.

BAB V
LOKASI PRIORITAS

5.1 Prioritas Wilayah Bedasarkan Jumlah Penduduk

Prioritas wilayah berdasarkan jumlah penduduk rentan yang diwakili oleh jumlah kepala keluarga Desil 1–5 menurut kecamatan. Informasi ini digunakan untuk mengidentifikasi konsentrasi basis sasaran penanggulangan kemiskinan sehingga penajaman lokus program dan kegiatan dapat dilakukan secara lebih terarah. Adapun data jumlah kepala keluarga Desil 1–5 per kecamatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 1 Jumlah Kepala Keluarga Desil 1- 5 menurut Kecamatan

Kecamatan	Kepala keluarga Desil 1 - 5
Haruyan	5.409
Batu Benawa	4.702
Hantakan	3.479
Batang Alai Selatan	5.202
Batang Alai Timur	2.059
Barabai	7.109
Labuan Amas Selatan	6.247
Labuan Amas Utara	5.578
Pandawan	7.599
Batang Alai Utara	4.771
Limpasu	2.846

Sumber : Portal Sepakat, 2026

Berdasarkan data tersebut, sebaran kepala keluarga Desil 1–5 menunjukkan variasi antar kecamatan. Kecamatan dengan basis sasaran terbesar terkonsentrasi di Pandawan dan Barabai, diikuti oleh Labuan Amas Selatan, Labuan Amas Utara, Haruyan, dan Batang Alai Selatan. Sementara itu, kecamatan dengan basis sasaran relatif lebih rendah terdapat di Batang Alai Timur dan Limpasu, sedangkan Batu Benawa, Batang Alai Utara, Hantakan berada pada kelompok menengah. Gambaran ini memberikan dasar penentuan fokus wilayah dalam penajaman sasaran program, terutama pada kecamatan dengan konsentrasi kepala keluarga Desil 1–5 yang lebih besar.

5.2 Prioritas Wilayah Bedasarkan Kondisi Penduduk

5.2.1 Rumah Tidak Layak Huni

Kepala keluarga Desil 1–5 dengan status Rumah Tidak Layak Huni merupakan pengelompokan wilayah yang dilakukan berdasarkan parameter jumlah kepala keluarga Desil 1–5 sebagai indikator basis sasaran rumah tangga rentan dan jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) sebagai indikator kondisi kerentanan hunian. Hasil pengelompokan dibagi ke dalam empat tingkat prioritas untuk menunjukkan perbedaan tingkat kebutuhan penanganan antar kecamatan secara lebih terarah. Adapun data terkait jumlah kepala keluarga Desil 1–5 dan kondisi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menurut kecamatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 2 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni menurut Kepala Keluarga Desil 1 s/d Desil 5

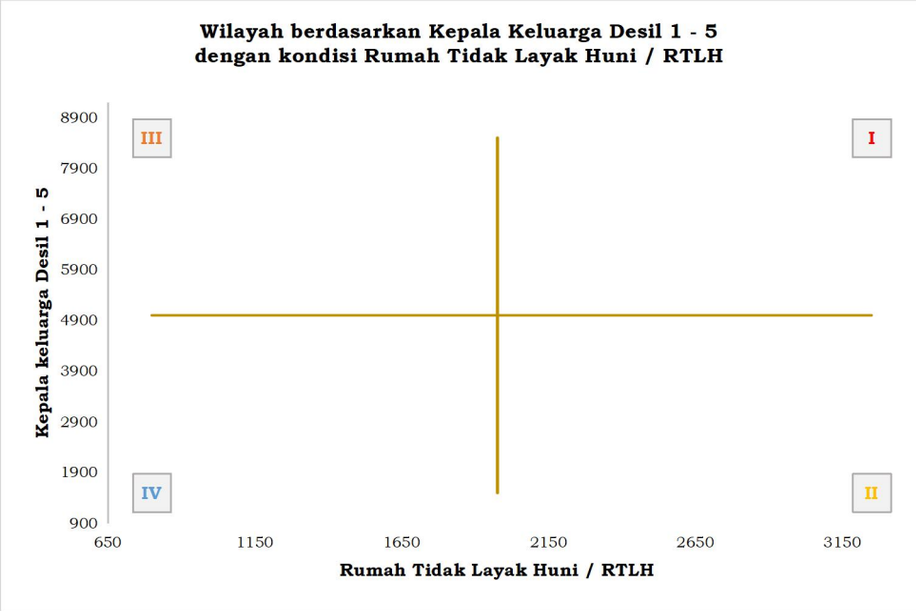
Kecamatan	Kepala keluarga Desil 1 - 5	Rumah Tidak Layak Huni
Haruyan	5.409	2070
Batu Benawa	4.702	1937
Hantakan	3.479	1813
Batang Alai Selatan	5.202	1248
Batang Alai Timur	2.059	1367
Barabai	7.109	2102
Labuan Amas Selatan	6.247	2353
Labuan Amas Utara	5.578	3161
Pandawan	7.599	2480
Batang Alai Utara	4.771	1903
Limpasu	2.846	1308

Sumber : Portal Sepakat, 2026

Berdasarkan hasil pengelompokan, Prioritas 1 meliputi Haruyan, Barabai, Labuan Amas Selatan, Labuan Amas Utara, dan Pandawan. Kelompok ini merepresentasikan kecamatan dengan tingkat kebutuhan penanganan tertinggi karena berada pada kombinasi basis sasaran kepala keluarga Desil 1–5 yang besar dan jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) yang relatif tinggi. Prioritas 3 ditempati Batang Alai Selatan. Kelompok ini menunjukkan kebutuhan penanganan pada tingkat menengah. Adapun Prioritas 4 meliputi Batu Benawa, Hantakan, Batang Alai Timur, Batang Alai Utara, dan Limpasu. Gambaran pengelompokan wilayah berdasarkan kepala keluarga Desil 1–5

dengan kondisi Rumah Tidak Layak Huni/RTLH disajikan pada Gambar 5. 1.

Gambar 5. 1 Pengelompokan Wilayah berdasarkan Kepala Keluarga Desil 1 - 5 dengan kondisi Rumah Tidak Layak Huni / RTLH



Sumber : Portal Sepakat, Hasil Olahan 2026

5.2.2 Tidak Bekerja

Individu Desil 1–5 dengan status tidak bekerja merupakan pengelompokan wilayah yang dilakukan berdasarkan parameter jumlah individu Desil 1–5 sebagai indikator basis sasaran penduduk rentan dan jumlah individu dengan status tidak bekerja sebagai indikator kondisi kerentanan ketenagakerjaan. Hasil pengelompokan dibagi ke dalam empat tingkat prioritas untuk menunjukkan perbedaan tingkat kebutuhan penanganan antar kecamatan secara lebih terarah. Adapun data terkait jumlah individu Desil 1–5 dan status tidak bekerja menurut kecamatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 3 Jumlah Individu Tidak Bekerja Desil 1 s/d Desil 5

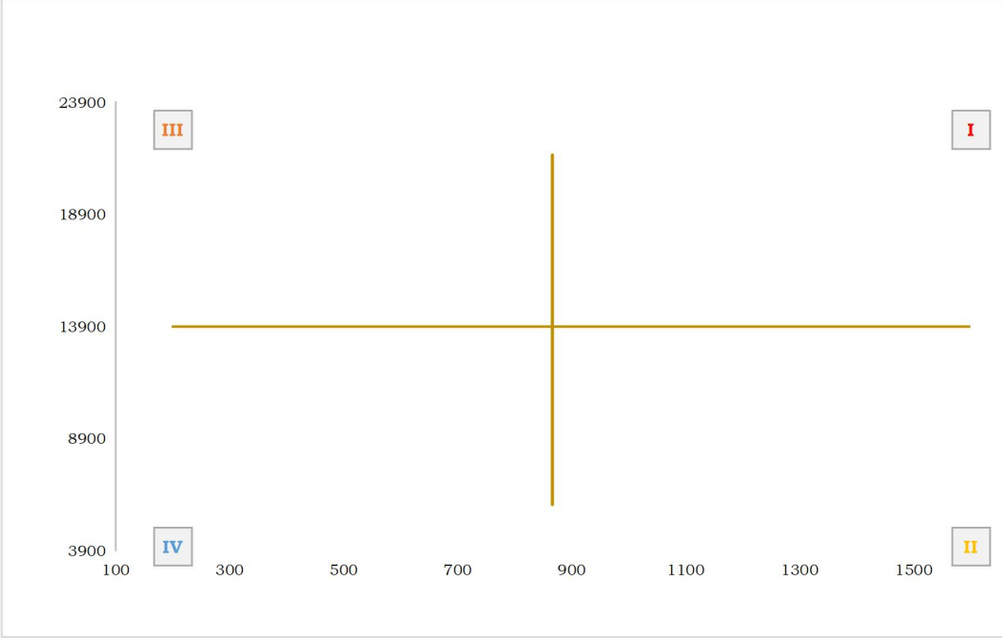
Kecamatan	Individu Desil 1 - 5	Tidak Bekerja
Haruyan	14.861	914
Batu Benawa	12.966	833
Hantakan	10.126	413
Batang Alai Selatan	14.142	1.111
Batang Alai Timur	5.967	241
Barabai	19.947	1.532
Labuan Amas Selatan	16.866	1.032

Kecamatan	Individu Desil 1 - 5	Tidak Bekerja
Labuan Amas Utara	15.099	929
Pandawan	21.565	1.287
Batang Alai Utara	13.44	836
Limpasu	8.013	398

Sumber : Portal Sepakat, 2026

Berdasarkan hasil pengelompokan, Prioritas 1 meliputi Haruyan, Batang Alai Selatan, Barabai, Labuan Amas Selatan, Labuan Amas Utara, dan Pandawan. Kelompok ini merepresentasikan wilayah dengan kombinasi basis sasaran individu Desil 1–5 yang besar dan jumlah individu tidak bekerja yang relatif tinggi, sehingga menjadi fokus utama penajaman lokus penanganan pada aspek ketenagakerjaan melalui intervensi yang terarah pada sasaran. Adapun Prioritas 4 meliputi Batu Benawa, Hantakan, Batang Alai Timur, Batang Alai Utara, dan Limpasu. Gambaran pengelompokan wilayah berdasarkan individu Desil 1–5 dengan status tidak bekerja disajikan pada Gambar 5. 2 berikut.

Gambar 5. 2 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Individu Desil 1 - 5 dengan Status Tidak Bekerja



Sumber : Portal Sepakat, Hasil Olahan 2026

5.2.3 Tidak Bersekolah

Individu Desil 1–5 dengan status tidak bersekolah merupakan pengelompokan wilayah yang dilakukan berdasarkan

parameter jumlah individu Desil 1–5 sebagai indikator basis sasaran penduduk rentan dan jumlah individu dengan status tidak bersekolah sebagai indikator kondisi kerentanan akses pendidikan. Hasil pengelompokan dibagi ke dalam empat tingkat prioritas untuk menunjukkan perbedaan tingkat kebutuhan penanganan antar kecamatan secara lebih terarah. Adapun data terkait jumlah individu Desil 1–5 dan status tidak bersekolah menurut kecamatan disajikan pada tabel berikut.

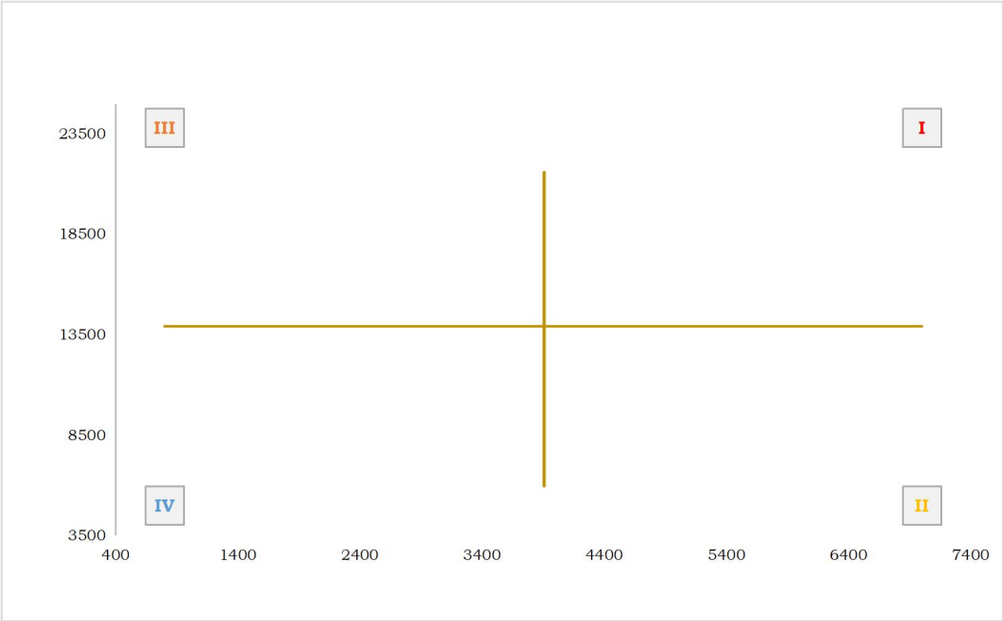
Tabel 5. 4 Jumlah Individu Tidak Bersekolah Desil 1 s/d Desil 5

Kecamatan	Individu Desil 1 - 5	Tidak Bersekolah
Haruyan	14.861	4.353
Batu Benawa	12.966	3.823
Hantakan	10.126	2.509
Batang Alai Selatan	14.142	4.253
Batang Alai Timur	5.967	1.054
Barabai	19.947	5.510
Labuan Amas Selatan	16.866	4.930
Labuan Amas Utara	15.099	4.185
Pandawan	21.565	6.281
Batang Alai Utara	13.44	3.762
Limpasu	8.013	2.318

Sumber : Portal Sepakat, 2026

Berdasarkan hasil pengelompokan, Prioritas 1 meliputi Haruyan, Batang Alai Selatan, Barabai, Labuan Amas Selatan, Labuan Amas Utara, dan Pandawan. Kelompok ini merepresentasikan kecamatan dengan tingkat kebutuhan penanganan tertinggi karena berada pada kombinasi basis sasaran individu Desil 1–5 yang besar dan jumlah individu tidak bersekolah yang relatif tinggi. Adapun Prioritas 4 meliputi Batu Benawa, Hantakan, Batang Alai Timur, Batang Alai Utara, dan Limpasu. Gambaran pengelompokan wilayah berdasarkan individu Desil 1–5 dengan status tidak bersekolah disajikan pada Gambar 5. 3 berikut.

Gambar 5. 3 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Individu Desil 1 - 5 dengan Status Tidak Bersekolah



Sumber : Portal Sepakat, Hasil Olahan 2026

5.2.4 Tidak Memiliki Lahan

Kepala keluarga Desil 1–5 dengan status tidak memiliki lahan (selain yang ditempati) merupakan pengelompokan wilayah yang dilakukan berdasarkan parameter jumlah kepala keluarga Desil 1–5 sebagai indikator basis sasaran rumah tangga rentan dan jumlah kepala keluarga yang tidak memiliki lahan (selain yang ditempati) sebagai indikator keterbatasan aset produktif. Hasil pengelompokan dibagi ke dalam empat tingkat prioritas untuk menunjukkan perbedaan tingkat kebutuhan penanganan antar kecamatan secara lebih terarah. Adapun data terkait jumlah kepala keluarga Desil 1–5 dan status tidak memiliki lahan (selain yang ditempati) menurut kecamatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 5 Jumlah Keluarga yang tidak memiliki lahan selain yang ditempati Desil 1 s/d Desil 5

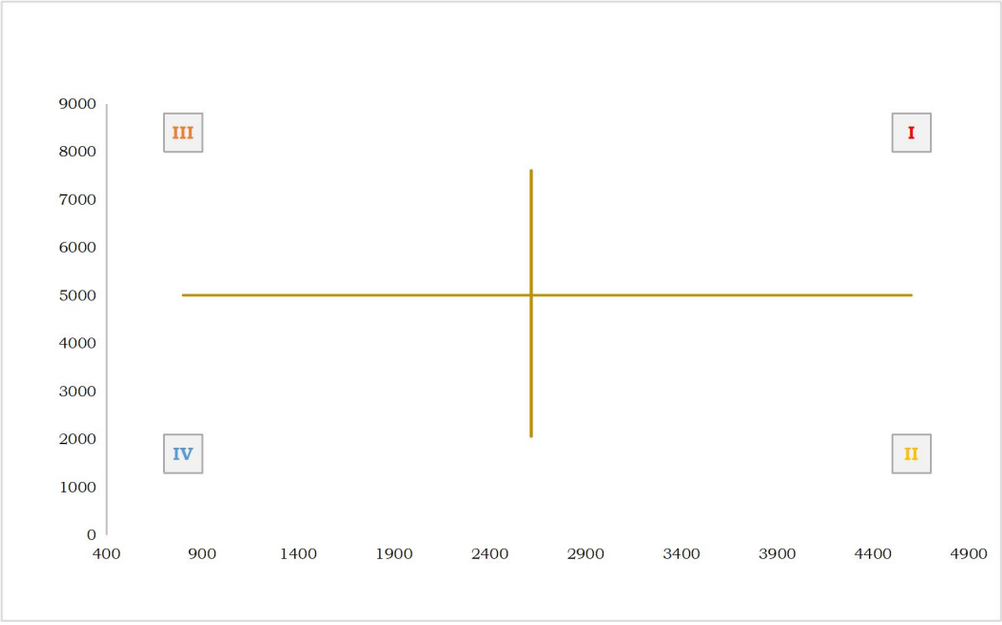
Kecamatan	Kepala keluarga Desil 1 - 5	Tidak Memiliki Lahan
Haruyan	5.409	2.734
Batu Benawa	4.702	2.428
Hantakan	3.479	2.036
Batang Alai Selatan	5.202	2.311
Batang Alai Timur	2.059	1.045
Barabai	7.109	4.167
Labuan Amas	6.247	3.546

Kecamatan	Kepala keluarga Desil 1 - 5	Tidak Memiliki Lahan
Selatan		
Labuan Amas Utara	5.578	3.014
Pandawan	7.599	3.725
Batang Alai Utara	4.771	2.469
Limpasu	2.846	1.307

Sumber : Portal Sepakat, 2026

Berdasarkan hasil pengelompokan, Prioritas 1 meliputi Haruyan, Barabai, Labuan Amas Selatan, Labuan Amas Utara, dan Pandawan. Kelompok ini merepresentasikan kecamatan dengan tingkat kebutuhan penanganan tertinggi karena berada pada kombinasi basis sasaran kepala keluarga Desil 1–5 yang besar dan jumlah kepala keluarga yang tidak memiliki lahan (selain yang ditempati) yang relatif tinggi. Prioritas 3 ditempati Batang Alai Selatan. Kelompok ini menunjukkan kebutuhan penanganan pada tingkat menengah. Adapun Prioritas 4 meliputi Batu Benawa, Hantakan, Batang Alai Timur, Batang Alai Utara, dan Limpasu. Gambaran pengelompokan wilayah berdasarkan kepala keluarga Desil 1–5 dengan status tidak memiliki lahan (selain yang ditempati) disajikan pada Gambar 5. 4 berikut.

Gambar 5. 4 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Kepala keluarga Desil 1 – 5 dengan Status Tidak Memiliki Lahan (selain yang ditempati)



Sumber : Portal Sepakat, Hasil Olahan 2026

5.2.5 Tidak Memiliki Usaha

Kepala keluarga Desil 1–5 dengan status tidak memiliki usaha sendiri/bersama merupakan pengelompokan wilayah yang dilakukan berdasarkan parameter jumlah kepala keluarga Desil 1–5 sebagai indikator basis sasaran rumah tangga rentan dan jumlah kepala keluarga dengan status tidak memiliki usaha sendiri/bersama sebagai indikator keterbatasan akses terhadap sumber penghidupan. Hasil pengelompokan dibagi ke dalam empat tingkat prioritas untuk menunjukkan perbedaan tingkat kebutuhan penanganan antar kecamatan secara lebih terarah. Adapun data terkait jumlah kepala keluarga Desil 1–5 dan status tidak memiliki usaha sendiri/bersama menurut kecamatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 6 Jumlah Keluarga Desil 1 – 5 yang Tidak Memiliki Usaha Sendiri/Bersama

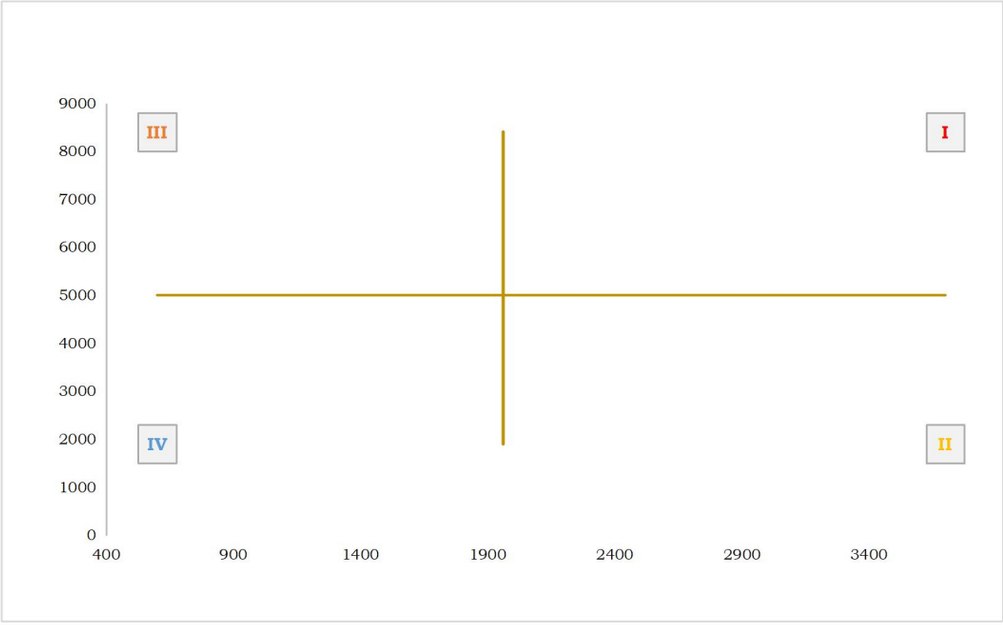
Kecamatan	Kepala keluarga Desil 1 - 5	Tidak Memiliki Usaha Sendiri/ Bersama
Haruyan	5.409	1.983
Batu Benawa	4.702	1.923
Hantakan	3.479	981
Batang Alai Selatan	5.202	2.634
Batang Alai Timur	2.059	774
Barabai	7.109	3.498
Labuan Amas Selatan	6.247	2.123
Labuan Amas Utara	5.578	1.807
Pandawan	7.599	2.945
Batang Alai Utara	4.771	1.905
Limpasu	2.846	997

Sumber : Portal Sepakat, 2026

Berdasarkan hasil pengelompokan, Prioritas 1 meliputi Haruyan, Batang Alai Selatan, Barabai, Labuan Amas Selatan, dan Pandawan. Kelompok ini merepresentasikan kecamatan dengan tingkat kebutuhan penanganan tertinggi karena berada pada kombinasi basis sasaran kepala keluarga Desil 1–5 yang besar dan jumlah kepala keluarga yang tidak memiliki usaha sendiri/bersama yang relatif tinggi. Prioritas 3 ditempati Labuan Amas Utara. Kelompok ini menunjukkan kebutuhan penanganan pada tingkat menengah. Adapun Prioritas 4 meliputi Batu

Benawa, Hantakan, Batang Alai Timur, Batang Alai Utara, dan Limpasu. Gambaran pengelompokan wilayah berdasarkan kepala keluarga Desil 1–5 dengan status tidak memiliki usaha sendiri/bersama disajikan pada Gambar 5. 5 berikut.

Gambar 5. 5 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Kepala keluarga Desil 1 – 5 dengan Status Tidak Memiliki Usaha Sendiri/ Bersama



Sumber : Portal Sepakat, Hasil Olahan 2026

5.2.6 Belum Menerima Bantuan

Kepala keluarga Desil 1–5 dengan status belum menerima bantuan merupakan pengelompokan wilayah yang dilakukan berdasarkan parameter jumlah kepala keluarga Desil 1–5 sebagai indikator basis sasaran rumah tangga rentan dan jumlah kepala keluarga dengan status belum menerima bantuan sebagai indikator keterbatasan cakupan perlindungan sosial. Hasil pengelompokan dibagi ke dalam empat tingkat prioritas untuk menunjukkan perbedaan tingkat kebutuhan penanganan antar kecamatan secara lebih terarah. Adapun data terkait jumlah kepala keluarga Desil 1–5 dan status belum menerima bantuan menurut kecamatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 7 Jumlah Keluarga Desil 1 - 5 yang Belum Menerima Bantuan

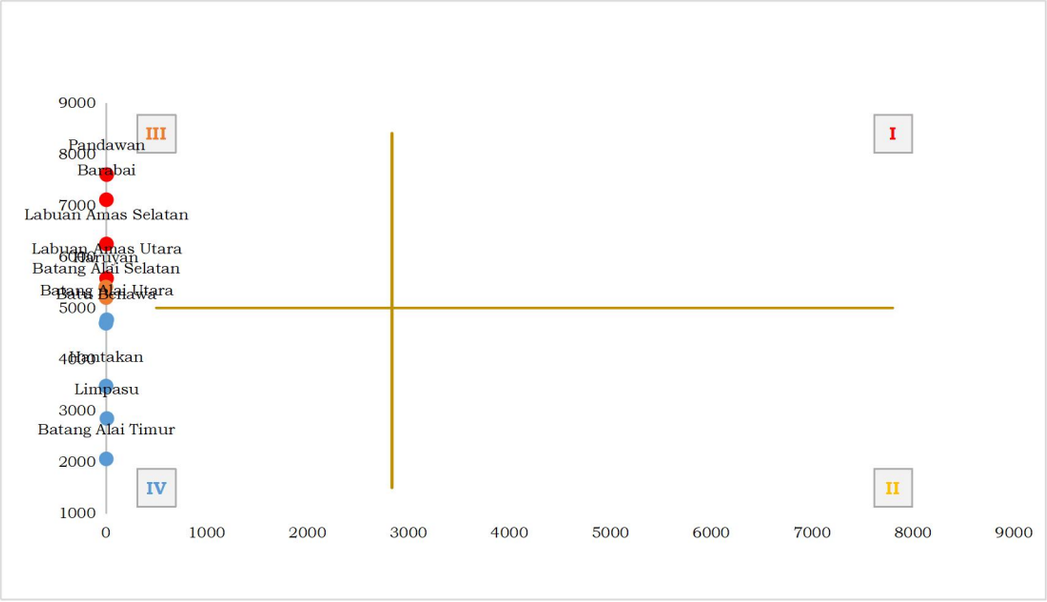
Kecamatan	Kepala keluarga Desil 1 - 5	Belum Menerima Bantuan
Haruyan	5.409	2.529
Batu Benawa	4.702	2.507
Hantakan	3.479	1.334
Batang Alai Selatan	5.202	2.788

Kecamatan	Kepala keluarga Desil 1 - 5	Belum Menerima Bantuan
Batang Alai Timur	2.059	576
Barabai	7.109	7.057
Labuan Amas Selatan	6.247	3.480
Labuan Amas Utara	5.578	3.578
Pandawan	7.599	3.767
Batang Alai Utara	4.771	2.277
Limpasu	2.846	1.307

Sumber : Portal Sepakat, 2026[1]

Berdasarkan hasil pengelompokan, Prioritas 1 meliputi Barabai, Labuan Amas Selatan, Labuan Amas Utara, dan Pandawan. Kelompok ini merepresentasikan kecamatan dengan tingkat kebutuhan penanganan tertinggi karena berada pada kombinasi basis sasaran kepala keluarga Desil 1–5 yang besar dan jumlah kepala keluarga belum menerima bantuan yang relatif tinggi. Prioritas 3 meliputi Haruyan dan Batang Alai Selatan. Kelompok ini menunjukkan kebutuhan penanganan pada tingkat menengah. Adapun Prioritas 4 meliputi Batu Benawa, Hantakan, Batang Alai Timur, Batang Alai Utara, dan Limpasu. Gambaran pengelompokan wilayah berdasarkan kepala keluarga Desil 1–5 dengan status belum menerima bantuan disajikan pada Gambar 5. 6 berikut.

Gambar 5. 6 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Kepala keluarga Desil 1 – 5 dengan Status Belum Menerima Bantuan



Sumber : Portal Sepakat, Hasil Olahan 2026

[1] Sumber data yang digunakan adalah Regsosek Tahun 2022

5.2.7 Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan

Individu Desil 1–5 dengan status tidak memiliki jaminan kesehatan merupakan pengelompokan wilayah yang dilakukan berdasarkan parameter jumlah individu Desil 1–5 sebagai indikator basis sasaran penduduk rentan dan jumlah individu yang tidak memiliki jaminan kesehatan sebagai indikator keterbatasan cakupan perlindungan kesehatan. Hasil pengelompokan dibagi ke dalam empat tingkat prioritas untuk menunjukkan perbedaan tingkat kebutuhan penanganan antar wilayah secara lebih terarah. Adapun data terkait jumlah individu Desil 1–5 dan status tidak memiliki jaminan kesehatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 8 Jumlah Individu Desil 1 – 5 yang Tidak Menerima Jaminan Kesehatan

Kecamatan	Individu Desil 1 - 5	Tidak Memiliki JAMKES
Haruyan	14.861	1.649
Batu Benawa	12.966	1.150
Hantakan	10.126	1.091
Batang Alai Selatan	14.142	2.063
Batang Alai Timur	5.967	701
Barabai	19.947	7.996
Labuan Amas Selatan	16.866	3.480
Labuan Amas Utara	15.099	2.858
Pandawan	21.565	2.781
Batang Alai Utara	13.44	2.286
Limpasu	8.013	1.163

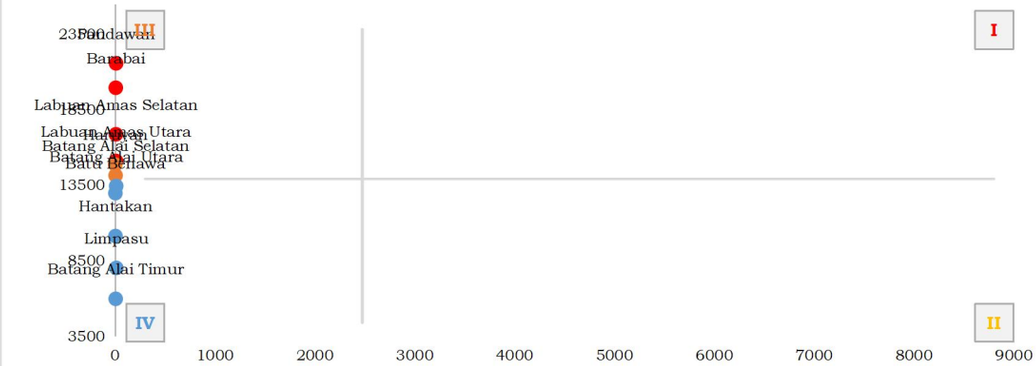
Sumber : Portal Sepakat, 2026[2]

Berdasarkan hasil pengelompokan, Prioritas 1 meliputi Barabai, Labuan Amas Selatan, Labuan Amas Utara, dan Pandawan. Kelompok ini merepresentasikan wilayah dengan tingkat kebutuhan penanganan tertinggi karena berada pada kombinasi basis sasaran individu Desil 1–5 yang besar dan jumlah individu yang tidak memiliki jaminan kesehatan yang relatif tinggi. Prioritas 3 meliputi Haruyan dan Batang Alai Selatan. Kelompok ini menunjukkan kebutuhan penanganan pada tingkat menengah. Adapun Prioritas 4 meliputi Batu Benawa, Hantakan, Batang Alai Timur, Batang Alai Utara, dan

[2] Sumber data yang digunakan adalah Regsosek Tahun 2022

Limpasu. Gambaran pengelompokan wilayah berdasarkan individu Desil 1–5 dengan status tidak memiliki jaminan kesehatan disajikan pada Gambar 5. 7 berikut.

Gambar 5. 7 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Individu Desil 1 – 5 dengan Status Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan



Sumber : Portal Sepakat data, Hasil Olahan 2026

BAB VI
PENUTUP

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman teknokratis untuk mengarahkan perumusan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan keselarasan dengan RPJMD 2025–2029 serta sinergi dengan kebijakan provinsi, nasional, dan komitmen pembangunan berkelanjutan. Melalui dokumen ini, penanggulangan kemiskinan ditempatkan sebagai agenda lintas sektor yang menuntut intervensi berbasis data dan fokus pada hasil, dengan penajaman strategi utama berupa pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin, peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, penguatan dan keberlanjutan usaha ekonomi ultra mikro–mikro–kecil, serta percepatan penanganan kantong-kantong kemiskinan melalui tata kelola program yang lebih baik.

Sehubungan dengan itu, pelaksanaan RPKD perlu didukung oleh penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan agar perencanaan–penganggaran–pelaksanaan program berjalan konsisten dan saling melengkapi; peningkatan ketepatan sasaran melalui pemutakhiran dan pemanfaatan data yang andal sebagai dasar penentuan penerima manfaat, lokus, dan jenis intervensi; serta penguatan sistem pengawasan, pemantauan, dan evaluasi secara berkala untuk memastikan capaian kinerja terukur, akuntabel, dan dapat diperbaiki secara berkelanjutan sesuai dinamika sosial ekonomi daerah.

Akhirnya, diharapkan RPKD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025–2029 dapat menjadi acuan operasional yang efektif dalam memperkuat komitmen bersama, meningkatkan ketepatan sasaran intervensi, dan mendorong sinergi program lintas sektor, sehingga penurunan kemiskinan dapat dipercepat secara inklusif,

Berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi pembangunan daerah menuju Hulu Sungai Tengah yang religius, sejahtera, dan bermartabat.



Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah